



Katalog: 3102033

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA 2022



BADAN PUSAT STATISTIK

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA 2022



INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA 2022

Indonesian Sustainable Development Goals Indicators 2022

ISSN: 2745-6803

No. Publikasi/Publication Number: 07300.2227

Katalog/Catalog: 3102033

Ukuran Buku/Book Size: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xxii+ 245 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Penyunting/Editor:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Sumber Ilustrasi/Graphics by:

www.freepik.com

www.shutterstock.com

Penerbit/Published by:

© BPS RI/BPS-Statistics Indonesia

Pencetak/Printed by:

CV Daffa Putra

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

TIM PENYUSUN

Pengarah

Moh Edy Mahmud S.Si, M.P

Penanggung Jawab

Dr. Muchammad Romzi

Editor

Adam Sofian S.Si, M.Si

Henri Asri Reagan SST., M.Si.

Adwi Hastuti SST

Penulis

Adwi Hastuti SST

Chairul Anam SAP

Erna Yulianingsih SST, M.Appl.Ecmets

Henri Asri Reagan SST., M.Si.

Muhammad Ihsan SST

Nia Setiyawati SST, M.Sc

Nurarifin SST, M.Ec.Dev, M.Ec.

Tika Meilaningsih S.Tr.Stat.

Valent Gigih Saputri SST

Kompilator Data

Tika Meilaningsih S.Tr.Stat.

Penata Letak

Tika Meilaningsih S.Tr.Stat.

KONTRIBUTOR DATA

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Ketenagakerjaan
6. Kementerian Keuangan
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Kementerian Luar Negeri
10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
13. Kementerian Perdagangan
14. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
15. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16. Kementerian Pertanian
17. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
18. Badan Kepegawaian Negara
19. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
20. Badan Narkotika Nasional
21. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
22. Badan Pemeriksa Keuangan
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
25. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
26. Badan Pusat Statistik
27. Bank Indonesia
28. Dewan Pers Nasional
29. Kepolisian Negara Republik Indonesia
30. Komisi Informasi Publik
31. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
32. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
33. Komisi Pemilihan Umum
34. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia



KATA PENGANTAR

S*ustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati dan diimplementasikan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Sejauh mana hasil yang telah dicapai dari beragam kegiatan implementasi kesepakatan bersama tersebut, mutlak memerlukan dukungan data sebagai suatu indikator pencapaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BPS telah berkomitmen dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs di Indonesia melalui berbagai upaya berkelanjutan untuk menyediakan data dan Indikator TPB/SDGs, dengan terus melakukan kajian-kajian penghitungan Indikator TPB/SDGs, berkoordinasi antar lembaga/organisasi penyedia data, maupun melakukan inisiatif kegiatan statistik baru guna penyediaan Indikator TPB/SDGs.

Publikasi ini menyajikan perkembangan potret capaian TPB/SDGs di Indonesia, serta diharapkan mampu memberikan dasar pijakan yang kuat dalam melakukan monitoring, evaluasi, maupun penyusunan kebijakan program, untuk meraih cita-cita dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada publikasi yang akan datang.

Jakarta, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik

Margo Yuwono



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Pendahuluan	1
Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	7
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	17
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	27
Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	45
Tujuan 5 Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	59
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	69
Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	77
Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	83
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	95
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	105
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	115
Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	123
Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	131
Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	137
Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	143

Tujuan 16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	151
Tujuan 17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	173
Daftar Pustaka		187
Lampiran		189

<https://www.bps.go.id>



DAFTAR TABEL

Halaman

TUJUAN 5

Tabel 5.1.	Ketersediaan Sistem untuk Melacak dan Membuat Alokasi Umum untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	68
------------	---	----

TUJUAN 12

Tabel 12.1.	Jumlah Produk Ramah Lingkungan yang Teregister dan Masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 2020-2021	128
-------------	--	-----

TUJUAN 15

Tabel 15.1.	Situs Penting Keanekaragaman Hayati Pegunungan dalam Kawasan Konservasi, 2020.....	147
Tabel 15.2.	Indeks Tutupan Hijau Pegunungan, 2017 dan 2019	148
Tabel 15.3.	Indeks Daftar Merah (<i>Red-List Index</i>), 2019.....	148

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 1	Jumlah Indikator TPB/SDGs Berdasarkan Metadata Nasional Edisi II Menurut Sumber Data.....	3
----------	---	---

TUJUAN 1

Gambar 1.1.	Proporsi Penduduk yang Hidup Dalam Kemiskinan Ekstrem (Persen), 2015 -2021	10
Gambar 1.2.	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, 2015-2022.....	10
Gambar 1.3.	Proporsi Penduduk yang Menerima Program Perlindungan Sosial (Persen), 2015-2020	11
Gambar 1.4.	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, 2019 - 2021.....	11
Gambar 1.5.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Pelayanan Dasar, 2018-2021.....	12
Gambar 1.6.	Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Kepemilikan, 2015 - 2021 ...	12
Gambar 1.7.	Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang, 2017-2021.....	13
Gambar 1.8.	Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Terhadap PDB (Persen), 2020.....	13
Gambar 1.9.	Persentase Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang Memiliki Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), 2018-2021.....	14
Gambar 1.10.	Proporsi Sumber Daya yang Dialokasikan oleh Pemerintah Secara Langsung untuk Program Pemberantasan Kemiskinan, 2021.....	14
Gambar 1.11.	Proporsi Total Pengeluaran Pemerintah untuk Layanan Penting (Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial), 2015-2020....	15

TUJUAN 2

Gambar 2.1.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>), 2018-2021	20
Gambar 2.2.	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan, 2018-2021.....	20
Gambar 2.3.	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita, 2018-2019 dan 2021	21
Gambar 2.4.	Prevalensi <i>Wasting</i> (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun, 2018-2019 dan 2021	21
Gambar 2.5.	Kualitas Konsumsi Pangan yang Diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH), 2016-2019 dan 2021.....	22

Gambar 2.6.	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Usia 15-49 Tahun, 2013 dan 2018.....	22
Gambar 2.7.	Volume Produksi per Tenaga Kerja Menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/Peternakan/Perikanan/ Kehutanan, 2020	23
Gambar 2.8.	Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja Menurut Kelas Usaha Tani Tanaman/ Peternakan/ Perikanan/Kehutanan (Rupiah per Tenaga Kerja), 2019-2021	23
Gambar 2.9.	Rata-Rata Pendapatan Produsen Pertanian Skala Kecil, Menurut Subsektor, 2020	24
Gambar 2.10.	Proporsi Areal Pertanian Produktif dan Berkelanjutan, 2020	24
Gambar 2.11.	Jumlah Akses Sumber Daya Genetik Tanaman, 2020	24
Gambar 2.12.	Proporsi Ras Ternak Lokal yang Berisiko Punah, 2019	25
Gambar 2.13.	Indeks Orientasi Pertanian (IOP) untuk Pengeluaran Pemerintah, 2020.....	25
Gambar 2.14.	Total Bantuan Pembangunan (ODA) dan Bantuan Lain untuk Sektor Pertanian, 2020	25
Gambar 2.15.	Indikator Anomali Harga Pangan, 2021	26
TUJUAN 3		
Gambar 3.1.	Angka Kematian Ibu Menurut Pulau (per 100.000 Kelahiran Hidup), 2015.....	30
Gambar 3.2.	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih, 2017-2021.....	30
Gambar 3.3.	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan, 2017-2021	31
Gambar 3.4.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup, 2012 dan 2017	31
Gambar 3.5.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, 2012 dan 2017	32
Gambar 3.6.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup, 2012 dan 2017	32
Gambar 3.7.	Jumlah Infeksi Baru HIV per 1.000 Penduduk Tidak Terinfeksi, 2021	33
Gambar 3.8.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk, 2017-2020	33
Gambar 3.9.	Kejadian Malaria per 1.000 Orang, 2017-2021.....	33
Gambar 3.10.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria, 2017-2021.....	34
Gambar 3.11.	Insiden Hepatitis B per 100.000 Penduduk Tahun 2021	34
Gambar 3.12.	Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis dan Proporsi Kasus Kusta yang Ditemukan dan Diobati Tahun 2021	34
Gambar 3.13.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta, 2017-2021.....	35
Gambar 3.14.	Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis yang Mencapai Eliminasi, 2017-2021	35
Gambar 3.15.	Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun, 2013, 2016 dan 2018.....	36
Gambar 3.16.	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi, 2016 dan 2018	36
Gambar 3.17.	Prevalensi Obesitas pada Penduduk Umur ≥18 Tahun, 2013 dan 2018.....	37

Gambar 3.18.	Jumlah Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis, 2021.....	37
Gambar 3.19.	Jumlah yang Mengakses Layanan Pasca Rehabilitasi, 2021.....	38
Gambar 3.20.	Konsumsi Alkohol (Liter per Kapita) oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun dalam Satu Tahun Terakhir, 2017-2021.....	38
Gambar 3.21.	Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi Menurut Metode Kontrasepsi Modern, 2012 Dan 2017	39
Gambar 3.22.	Angka Kelahiran Remaja (Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan di Kelompok Umur yang Sama, 2012 Dan 2017	39
Gambar 3.23.	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	40
Gambar 3.24.	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan, 2017-2021.....	40
Gambar 3.25.	Proporsi Populasi dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga atau Pendapatan, 2019-2021	41
Gambar 3.26.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 2017-2021	41
Gambar 3.27.	Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun, 2017-2021	42
Gambar 3.28.	Proporsi Target Populasi yang Telah Memperoleh Vaksin Program Nasional, 2013 dan 2018	42
Gambar 3.29.	Total <i>Official Development Assistant</i> (ODA) untuk Penelitian Medis dan Sektor Kesehatan Dasar (Miliar Rupiah), 2021	43
Gambar 3.30.	Proporsi Fasilitas Kesehatan dengan Paket Obat Esensial yang Tersedia dan Terjangkau Secara Berkelanjutan, 2017-2021	43
Gambar 3.31.	Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan (per 1.000 Penduduk), 2021.....	44

TUJUAN 4

Gambar 4.1.	Proporsi Anak-Anak dan Remaja di: (A) Kelas 5 (B) Kelas 8, dan (C) Kelas 11 yang Mencapai Setidaknya Tingkat Kemahiran Minimum dalam: (i) Membaca, (ii) Matematika, 2021.....	48
Gambar 4.2.	Persentase Siswa yang Menyelesaikan Pendidikan Jenjang SD/Sederajat, 2020-2021.....	48
Gambar 4.3.	Persentase Siswa yang Menyelesaikan Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat, 2020-2021	49
Gambar 4.4.	Persentase Siswa yang Menyelesaikan Pendidikan Jenjang SMA/Sederajat, 2020-2021	49
Gambar 4.5.	Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang SD/Sederajat, 2020-2021	49
Gambar 4.6.	Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang SMP/Sederajat, 2020-2021 ...	50
Gambar 4.7.	Angka Anak Tidak Sekolah Jenjang SMA/Sederajat, 2020-2021...	50
Gambar 4.8.	Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) (Persen), 2020-2021 ..	50
Gambar 4.9.	Tingkat Partisipasi Remaja dan Dewasa dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal dalam 12 Bulan Terakhir (Persen), 2018.....	51
Gambar 4.10.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT), 2020 dan 2021	51
Gambar 4.11.	Proporsi Remaja (Usia 15-24 Tahun) dan Dewasa (Usia 15-59 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2019-2021	52

Gambar 4.12.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki pada Tingkat SD/Sederajat, 2020-2021	52
Gambar 4.13.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki pada Tingkat SMP/Sederajat, 2020-2021	53
Gambar 4.14.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki pada Tingkat SMA/SMK/Sederajat, 2020-2021	53
Gambar 4.15.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki pada Tingkat Perguruan Tinggi, 2020-2021	53
Gambar 4.16.	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun, 2020-2021.....	54
Gambar 4.17.	Proporsi Sekolah SD dengan Akses Terhadap Listrik, Internet untuk Tujuan Pengajaran, Komputer untuk Tujuan Pengajaran, Air Minum Layak, Fasilitas Sanitasi Dasar per Jenis Kelamin, dan Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, dan Higienis Bagi Semua (WASH)), 2021	54
Gambar 4.18.	Proporsi Sekolah SMP dengan Akses Terhadap Listrik, Internet untuk Tujuan Pengajaran, Komputer untuk Tujuan Pengajaran, Air Minum Layak, Fasilitas Sanitasi Dasar per Jenis Kelamin, dan Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, dan Higienis Bagi Semua (WASH)), 2021	55
Gambar 4.19.	Proporsi Sekolah SMA dan SMK dengan Akses Terhadap Listrik, Internet untuk Tujuan Pengajaran, Komputer untuk Tujuan Pengajaran, Air Minum Layak, Fasilitas Sanitasi Dasar per Jenis Kelamin, dan Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, dan Higienis Bagi Semua (WASH)), 2021	55
Gambar 4.20.	Proporsi Sekolah SLB dengan Akses Terhadap Listrik, Internet untuk Tujuan Pengajaran, Komputer untuk Tujuan Pengajaran, Air Minum Layak, Fasilitas Sanitasi Dasar per Jenis Kelamin, dan Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, dan Higienis Bagi Semua (WASH)), 2021	56
Gambar 4.21.	Persentase Siswa yang Mengalami Perundungan dalam 12 Bulan Terakhir, 2021	56
Gambar 4.22.	Jumlah Bantuan Resmi Pemerintah Indonesia kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang, 2021	57
Gambar 4.23.	Persentase Guru dengan Kualifikasi Minimal S1 atau D4 dan Guru yang Bersertifikat Pendidik, 2021	57

TUJUAN 5

Gambar 5.1.	Persentase Ketersediaan Kerangka Hukum yang Mendorong, Menetapkan dan Memantau Kesetaraan Gender dan Penghapusan Diskriminasi Berdasarkan Jenis Kelamin, 2020.....	62
Gambar 5.2.	Prevalensi Kekerasan (Fisik, Seksual, Emosional) Terhadap Perempuan (Umur 15-64 Tahun) yang Pernah/Sedang Menikah oleh Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir, 2021.....	62
Gambar 5.3.	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir, 2021	63

Gambar 5.4.	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 15 Tahun, 2020-2021.....	63
Gambar 5.5.	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 18 Tahun, 2020-2021.....	64
Gambar 5.6.	Proporsi Anak Perempuan dari Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Telah Menjalani Sunat Perempuan Menurut Kriteria WHO, 2021	64
Gambar 5.7.	Proporsi Kursi yang Dipegang oleh Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 2009, 2014 dan 2019	65
Gambar 5.8.	Proporsi Kursi yang Dipegang oleh Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Provinsi, 2019	65
Gambar 5.9.	Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial, 2020-2021	65
Gambar 5.10.	Proporsi Semua Perempuan Usia Reproduksi 15-49 Tahun yang Membuat Keputusan Sendiri Terkait Hubungan Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, dan Layanan Kesehatan, 2012 dan 2017	66
Gambar 5.11.	Proporsi Perempuan yang Sudah Menikah dari Usia Reproduksi 15-49 Tahun yang Membuat Keputusan Sendiri Terkait Hubungan Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, dan Layanan Kesehatan, 2012 dan 2017	66
Gambar 5.12.	Proporsi Penduduk Pertanian yang Memiliki Hak Atas Tanah Pertanian, 2020	67
Gambar 5.13.	Proporsi Perempuan Penduduk Pertanian Sebagai Pemilik atau yang Memiliki Hak Atas Tanah Pertanian, 2020.....	67
Gambar 5.14.	Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam, 2020-2021.....	68

TUJUAN 6

Gambar 6.1.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman Berdasarkan Wilayah, 2019-2021	72
Gambar 6.2.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air Berdasarkan Wilayah, 2019-2021.....	72
Gambar 6.3.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen), 2019-2021	73
Gambar 6.4.	Persentase Rumah Tangga yang Masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka, 2019-2021.....	73
Gambar 6.5.	Persentase Limbah Cair Industri yang Diolah Secara Aman, 2019-2020.....	74
Gambar 6.6.	Capaian Indeks Kualitas Air, 2018-2021	74
Gambar 6.7.	Proporsi Wilayah Cekungan Lintas Batas dengan Pengaturan Kerja Sama Sumber Daya Air yang Operasional, 2019.....	75
Gambar 6.8.	Indeks Kualitas Lahan, 2015-2020	75

TUJUAN 7

Gambar 7.1.	Rasio Elektrifikasi, 2016-2021.....	80
Gambar 7.2.	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh), 2016-2021	80
Gambar 7.3.	Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga, 2016-2020.....	81

Gambar 7.4.	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga, 2016-2021	81
Gambar 7.5.	Bauran Energi Terbarukan (Persen), 2017-2021	82
Gambar 7.6.	Intensitas Energi Primer (Setara Barel Minyak (SBM)/Miliar Rupiah), 2015-2021	82
Gambar 7.7.	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan (dalam Watt per Kapita), 2021.....	82

TUJUAN 8

Gambar 8.1.	Laju Pertumbuhan PDB per Kapita (Persen), 2017-2021	86
Gambar 8.2.	PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah), 2017-2021.....	86
Gambar 8.3.	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDB Riil per Orang Bekerja per Tahun (Persen), 2017-2021	87
Gambar 8.4.	Proporsi Lapangan Kerja Informal Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal (Persen), 2019-2021	87
Gambar 8.5.	Persentase Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke Layanan Keuangan, 2016-2020.....	88
Gambar 8.6.	Rencana dan Implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, 2021.....	88
Gambar 8.7.	Upah Rata-Rata per Jam Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin (Rupiah), 2017-2021	88
Gambar 8.8.	Upah Rata-Rata per Jam Pekerja Berdasarkan Tempat Tinggal (Rupiah), 2017-2021	89
Gambar 8.9.	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (Persen), 2019-2021	89
Gambar 8.10.	Tingkat Setengah Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal (Persen), 2019-2021	90
Gambar 8.11.	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET) Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019-2021.....	90
Gambar 8.12.	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja, Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019-2021	91
Gambar 8.13.	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja, Berdasarkan Kelompok Umur, 2020-2021.....	91
Gambar 8.14.	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3, 2021	91
Gambar 8.15.	Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB (Persen), 2016-2020	92
Gambar 8.16.	Laju Pertumbuhan Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB (Persen), 2017-2020.....	92
Gambar 8.17.	Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia, 2017-2021 .	92
Gambar 8.18.	Jumlah Perjalanan yang Dilakukan Penduduk Indonesia (Perjalanan), 2017-2021	93
Gambar 8.19.	Total Perolehan Devisa di Sektor Pariwisata (Miliar USD), 2017-2021.....	93
Gambar 8.20.	Jumlah Kantor Bank per 100.000 Penduduk Dewasa, 2017-2021	93
Gambar 8.21.	Jumlah ATM per 100.000 Penduduk Dewasa, 2017-2021	94
Gambar 8.22.	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit, 2017-2021	94

TUJUAN 9

Gambar 9.1.	Kondisi Mantap Jalan Nasional (Persen), 2017-2021.....	98
Gambar 9.2.	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi Kereta Api, 2020-2021	98
Gambar 9.3.	Jumlah Penumpang (Orang) dan Barang (Ton) Moda Transportasi Kapal Pelayaran Dalam Negeri, 2020	99
Gambar 9.4.	Jumlah Penumpang (Orang) dan Barang (Kilogram) Moda Transportasi Pesawat Terbang, 2020	99
Gambar 9.5.	Jumlah Bandara yang Aktif Beroperasi, 2020	100
Gambar 9.6.	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB (Persen), 2017-2021	100
Gambar 9.7.	Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur per Kapita (Ribu Rupiah), 2017-2021.....	100
Gambar 9.8.	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur (Persen), 2017-2021	101
Gambar 9.9.	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur (Persen), 2018-2021.....	101
Gambar 9.10.	Proporsi Nilai Tambah Industri Mikro dan Kecil Terhadap Total Nilai Tambah Sektor Industri (Persen), 2016-2020	101
Gambar 9.11.	Proporsi Industri Mikro dan Kecil dengan Pinjaman atau Kredit (Persen), 2016-2020	102
Gambar 9.12.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri, 2020	102
Gambar 9.13.	Intensitas Emisi Sektor Industri, 2020	102
Gambar 9.14.	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB (Persen), 2020.....	103
Gambar 9.15.	Proporsi EPIBT Terhadap Total Ekspor (Persen), 2017-2021	103
Gambar 9.16.	Proporsi Penduduk Terlayani <i>Mobile Broadband</i> (Persen), 2020 .	103

TUJUAN 10

Gambar 10.1.	Rasio Gini, 2015-2022.....	108
Gambar 10.2.	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, 2015-2022.....	108
Gambar 10.3.	Jumlah Desa Tertinggal, 2019-2021	109
Gambar 10.4.	Jumlah Desa Mandiri, 2019-2021	109
Gambar 10.5.	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal , 2015-2021.....	110
Gambar 10.6.	Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal, 2015-2021....	110
Gambar 10.7.	Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan, Menurut Jenis Kelamin dan Penyandang Disabilitas, 2018-2021.....	111
Gambar 10.8.	Indeks Aspek Kebebasan (Metode Baru), 2021	111
Gambar 10.9.	Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), 2015-2020	112
Gambar 10.10.	Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan Terutama Kekerasan Terhadap Perempuan, 2015-2020.....	112
Gambar 10.11.	Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif dalam 12 Bulan Lalu Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum HAM Internasional, 2015-2020.....	112

Gambar 10.12.	Persentase Rencana Anggaran untuk Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat, 2015-2021	113
Gambar 10.13.	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, 2019 - 2021.....	113
Gambar 10.14.	Indikator Kesehatan Bank (Persentase), 2015-2021	114
Gambar 10.15.	Jumlah Dokumen Kerjasama Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Negara RI dengan Negara Tujuan Penempatan, 2021.....	114
Gambar 10.16.	Jumlah Tenaga Kerja Luar Negeri Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021	114

TUJUAN 11

Gambar 11.1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak, 2019-2021	118
Gambar 11.2.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Nyaman (Jarak 0,5 Km) ke Transportasi Umum, 2017 dan 2020.....	118
Gambar 11.3.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dengan Rute Tertentu, 2017 dan 2020.....	119
Gambar 11.4.	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang, 2017-2021.....	119
Gambar 11.5.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif Terhadap PDB, 2015-2020	120
Gambar 11.6.	Persentase Sampah Nasional yang Terkelola, 2015-2021.....	120
Gambar 11.7.	Rata-Rata Tahunan Materi Partikulat Halus PM 10, 2020.....	121
Gambar 11.8.	Indeks Kualitas Udara, 2015-2021	121
Gambar 11.9.	Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2016-2020	121
Gambar 11.10.	Persentase Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang Memiliki Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), 2018-2021.....	122

TUJUAN 12

Gambar 12.1.	Indeks Kerugian Pangan, 2019-2020.....	126
Gambar 12.2.	Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline 50 Ton Penggunaan Merkuri, 2020-2021	126
Gambar 12.3.	Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon dari Baseline, 2020-2021	126
Gambar 12.4.	Limbah B3 yang Dihasilkan per Kapita (Ton/Orang), 2015-2020 ..	127
Gambar 12.5.	Proporsi Limbah B3 yang Diolah, 2015-2020.....	127
Gambar 12.6.	Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang (Juta Ton), 2019-2020.....	127
Gambar 12.7.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, 2019	128
Gambar 12.8.	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001, 2015-2020.....	128
Gambar 12.9.	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa, 2019-2021	129
Gambar 12.10.	Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/Komunitas Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup, 2015-2021	129

Gambar 12.11.	Jumlah Fasilitas Publik yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Teregister, 2021.....	130
Gambar 12.12.	Jumlah Subsidi Bahan Bakar Fosil Sebagai Persentase dari PDB, 2015-2020.....	130

TUJUAN 13

Gambar 13.1.	Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang, 2017-2021.....	134
Gambar 13.2.	Persentase Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang Memiliki Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), 2018-2021.....	134
Gambar 13.3.	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) per Tahun (Juta TCO ₂ E), 2015-2020.....	135
Gambar 13.4.	Persentase Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), 2018-2020.....	135
Gambar 13.5.	Potensi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (T CO ₂ -Equivalent/Rupiah), 2015-2019	135
Gambar 13.6.	Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/ Komunitas Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup, 2015-2021	136
Gambar 13.7.	Jumlah Dana Publik (<i>Budget Tagging</i>) untuk Tandai Perubahan Iklim: Alokasi dan Realisasi Anggaran Pembangunan Rendah Karbon (Rp Triliun), 2018-2020	136

TUJUAN 14

Gambar 14.1.	Persentase Penurunan Sampah Terbuang ke Laut, 2018-2020....	140
Gambar 14.2.	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Laut yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman, 2017-2021	140
Gambar 14.3.	Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut, 2017-2021	140
Gambar 14.4.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha, 2019-2021.....	141
Gambar 14.5.	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan Perikanan, 2017-2021.....	141
Gambar 14.6.	Jumlah Nelayan yang Terlindungi (Orang), 2018-2020	141

TUJUAN 15

Gambar 15.1.	Proporsi Kawasan Hutan Terhadap Total Luas Lahan (Persen), 2016-2020.....	146
Gambar 15.2.	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) (Ha), 2019-2020 .	146
Gambar 15.3.	Jumlah KPH yang Masuk Kategori Maju, 2020-2021	146
Gambar 15.4.	Proporsi Lahan yang Terdegradasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan, 2019	147
Gambar 15.5.	Jumlah Kasus Perburuan atau Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), 2016-2021	149
Gambar 15.6.	Jumlah Kasus Perburuan atau Perdagangan Ilegal TSL, 2016-2021	150

TUJUAN 16

Gambar 16.1.	Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir, 2016-2021.....	154
Gambar 16.2.	Jumlah Kematian Disebabkan Konflik per 100.000 Penduduk, 2014-2021.....	154

Gambar 16.3.	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan, 2015-2020	155
Gambar 16.5.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (Persen), 2014, 2017 dan 2020	156
Gambar 16.6.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun yang Mengalami Hukuman Fisik dan/atau Agresi Psikologis dari Pengasuh dalam Setahun Terakhir (Persen), 2014 dan 2020.....	156
Gambar 16.7.	Prevalensi Anak Usia 13-17 Tahun yang Pernah Mengalami Kekerasan Sepanjang Hidupnya (Persen), 2018.....	157
Gambar 16.8.	Proporsi Perempuan dan Laki-Laki Muda Umur 18-24 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun, 2018 ..	157
Gambar 16.9.	Persentase Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2016-2020	158
Gambar 16.10.	Persentase Orang Miskin yang Menerima Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, 2017-2021	158
Gambar 16.11.	Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum berupa Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pembebasan Biaya Perkara, 2015-2020.....	159
Gambar 16.12.	Proporsi Tahanan yang Melebihi Masa Penahanan Terhadap Seluruh Jumlah Tahanan, 2015- 2020.....	159
Gambar 16.13.	Indeks Akses Terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>), 2019 ..	160
Gambar 16.14.	Persentase Masyarakat yang Mengeluarkan Uang/Barang/ Fasilitas Melebihi Ketentuan Ketika Berurusan Dengan Layanan Publik, 2020-2021.....	160
Gambar 16.15.	Indeks Perilaku Anti Korupsi, 2017-2021	160
Gambar 16.16.	Indeks Perilaku Anti Korupsi Menurut Beberapa Karakteristik, 2021.....	161
Gambar 16.17.	Persentase Pelaku Usaha yang Mengeluarkan Uang/Barang/ Fasilitas Melebihi Ketentuan Ketika Berurusan dengan Layanan Publik, 2020-2021.....	161
Gambar 16.18.	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui, 2015-2021	162
Gambar 16.19.	Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2016-2020	162
Gambar 16.20.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B, 2017-2021	163
Gambar 16.21.	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B, 2017-2021	163
Gambar 16.22.	Jumlah Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik, 2016-2019	164
Gambar 16.23.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 2014, 2019 dan 2021.....	164
Gambar 16.24.	Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II), 2015-2020	165
Gambar 16.25.	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi, 2021	165
Gambar 16.26.	Indeks Aspek Kebebasan, 2021	166
Gambar 16.27.	Indeks Kesetaraan, 2021.....	166

Gambar 16.28.	Jumlah Keanggotaan dan Kontribusi dalam Forum dan Organisasi Internasional, 2016-2020	167
Gambar 16.29.	Proporsi Anak di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil, 2017-2021	167
Gambar 16.30.	Persentase Kepemilikan Akta Lahir untuk Penduduk 0-17 Tahun pada 40% Berpendapatan Bawah, 2017-2021.....	168
Gambar 16.31.	Persentase Anak Berusia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, 2017-2021.....	168
Gambar 16.32.	Indeks Kebebasan dari Kekerasan bagi Jurnalis dan Awak Media, 2016-2020.....	169
Gambar 16.33.	Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), 2015-2020	169
Gambar 16.34.	Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan Terutama Kekerasan Terhadap Perempuan, 2016-2021	170
Gambar 16.35.	Jumlah Negara yang Mengadopsi dan Melaksanakan Konstitusi, Statutori dan/atau Jaminan Kebijakan untuk Akses Publik pada Informasi	170
Gambar 16.36.	Jumlah Badan Publik yang Berkualifikasi Informatif, 2016-2021	171
Gambar 16.37.	Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi, 2015-2021	171
Gambar 16.38.	Tersedianya Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional yang Independen yang Sejalan dengan <i>Paris Principles</i>	172
Gambar 16.39.	Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif dalam 12 Bulan Lalu Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum HAM Internasional, 2015-2021	172

TUJUAN 17

Gambar 17.1.	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDB Menurut Sumbernya (Persen), 2017-2021	176
Gambar 17.2.	Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB (Persen), 2016-2021	176
Gambar 17.3.	Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak Domestik, 2016-2021.....	177
Gambar 17.4.	Proporsi Volume Remitansi TKI (Dalam US Dolar) Terhadap PDB, 2016-2021.....	177
Gambar 17.5.	Proporsi Pembayaran Utang dan Bunga (<i>Debt Service</i>) Terhadap Ekspor Barang dan Jasa, 2016-2021	178
Gambar 17.6.	Persentase Pelanggan Terlayani Jaringan Internet Akses Tetap Pita Lebar (<i>Fixed Broadband</i>) Terhadap Total Rumah Tangga, 2016-2020.....	178
Gambar 17.7.	Persentase Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik (Kumulatif), 2019-2020	179
Gambar 17.8.	Persentase Pengguna Internet, 2015-2021	179
Gambar 17.9.	Jumlah Indikasi Pendanaan untuk Pembangunan Kapasitas dalam Kerangka KSST Indonesia (Miliar Rupiah), 2015-2021	180
Gambar 17.10.	Jumlah Program/Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, 2015-2021	180
Gambar 17.11.	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang Disepakati, 2015-2021	181

Gambar 17.12. Pertumbuhan Ekspor Produk Nonmigas, 2016-2021.....	181
Gambar 17.13. Tersedianya <i>Dashboard</i> Makroekonomi	182
Gambar 17.14. Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang Diterbitkan Setiap Tahun, 2015-2021	182
Gambar 17.15. Persentase Pengguna Data yang Menggunakan Data BPS Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Nasional, 2020-2021.....	183
Gambar 17.16. Persentase Publikasi Statistik yang Menerapkan Standar Akurasi Sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Nasional, 2020-2021.....	183
Gambar 17.17. Keberadaan Undang-Undang Statistik Nasional	184
Gambar 17.18. Ketersediaan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (RENSTRA)	184
Gambar 17.19. Persentase K/L/D/I yang Melaksanakan Rekomendasi Kegiatan Statistik, 2020-2021	185
Gambar 17.20. Persentase K/L/D/I yang Menyampaikan Metadata Sektoral dan Khusus Sesuai Standar, 2020-2021	185
Gambar 17.21. Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada Tahun 2020	186

PENDAHULUAN



Komitmen Badan Pusat Statistik

Sustainable Development Goals (SDGs) atau di Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan yang disepakati oleh negara-negara di dunia demi kebaikan umat manusia dan kelestarian planet bumi yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan global yang berakhir pada tahun 2030. TPB/SDGs mencakup 17 *Goals*/Tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam upaya Indonesia untuk mencapai setiap tujuan pada TPB/SDGs yang dapat dikatakan sangat ambisius tersebut, ada kebutuhan indikator TPB/SDGs yang dibutuhkan untuk memonitor dan evaluasi setiap kegiatan serta pengambilan kebijakan terkait pencapaian setiap tujuan dari TPB/SDGs. Kebutuhan tersebut dirasakan sangat strategis dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain ketersediaan data yang berupa indikator TPB/SDGs merupakan salah satu syarat demi suksesnya program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya data-data indikator TPB/SDGs maka perkembangan target-target TPB/SDGs dapat dimonitor serta kegiatan yang mendukung program pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dievaluasi.

Hampir satu dekade Indonesia telah mengadopsi tujuan dan sasaran TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan Indonesia. Ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan TPB/SDGs khususnya terkait penyediaan data. Tantangan tersebut diantaranya:

- a. belum optimalnya kolaborasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan;
- b. belum tersedianya SDM dan anggaran yang memadai;
- c. disagregasi statistik untuk menggambarkan tren khusus pada subpopulasi; dan
- d. terdapat sejumlah indikator TPB/SDGs belum tersedia datanya.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut diperlukan upaya dan dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dari setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, rumusan TPB/SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik dengan mengusung prinsip universal, integrasi, inklusif dan *no one left behind*.



Pelaksanaan TPB/SDGs telah memasuki 10 (sepuluh) tahun atau disebut dekade aksi (*Decade of Action*), sehingga diperlukan upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan akselerasi dan komitmen yang kuat dengan mengubah Perpres No. 59 Tahun 2017 yang sebelumnya dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia menjadi Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Beberapa perubahan dalam Perpres No. 111 Tahun 2022 di antaranya adalah memutakhirkan sasaran nasional TPB/SDGs, menekankan peran para pihak, mendorong platform pembiayaan inovatif untuk TPB/SDGs, menguatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam implementasi TPB/SDGs di tingkat daerah, dan amanat memutakhirkan peta jalan TPB/SDGs serta Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai *National Statistics Office* (NSO) berperan sangat vital dalam hal pengumpulan data, koordinasi, pelaporan, dan validasi statistik untuk TPB/SDGs. Sebagai bagian dari upaya BPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait TPB/SDGs tersebut, pada tahun 2022 BPS mengeluarkan Keputusan Kepala BPS No. 137 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPS No. 19 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Data dan Indikator TPB/SDGs BPS 2022.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Data dan Indikator TPB/SDGs BPS 2022 adalah sebagai berikut:

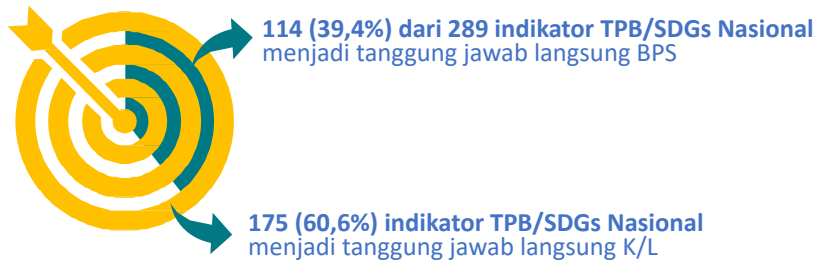
- a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyediaan data dan indikator oleh Badan Pusat Statistik;
- b. mengoordinasikan kegiatan penyediaan data dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tugas-tugasnya dilaksanakan oleh kelompok kerja Penyediaan Data dan Indikator Pilar Pembangunan Sosial; kelompok kerja Penyediaan Data dan Indikator Pilar Pembangunan Ekonomi; kelompok kerja Penyediaan Data dan Indikator Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; kelompok kerja Metodologi, Diseminasi dan Sistem Informasi;
- c. mengoordinasikan kegiatan diseminasi, sosialisasi dan komunikasi hasil penyediaan data dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Penyediaan Data dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Badan Pusat Statistik; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Inovasi BPS

Berdasarkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia edisi II, terdapat 17 tujuan, 169 target, dan 289 indikator. Dari hasil identifikasi Indikator TPB/SDGs menurut sumber data (Gambar 1), maka terlihat bahwa dari total 289 indikator TPB/SDGs 114 indikator atau sebesar 39,4 persen menjadi tanggung jawab BPS. Sedangkan sisanya 175 atau sebesar 60,6 persen indikator TPB/SDGs Nasional menjadi tanggung jawab langsung Kementerian/Lembaga.



GAMBAR 1 JUMLAH INDIKATOR TPB/SDGS BERDASARKAN METADATA NASIONAL EDISI II MENURUT SUMBER DATA



Sumber: Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II

BPS sangat berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Bentuk komitmen tersebut tercermin dalam bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan data TPB/SDGs. Namun mengingat begitu banyaknya cakupan data dan informasi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan TPB/SDGs, oleh karena itu perlu adanya inovasi-inovasi yang dilakukan BPS agar dapat menyediakan data indikator TPB/SDGs yang dapat digunakan untuk mengukur capaian target sesuai dengan konsep definisi indikator secara global. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan BPS antara lain:

1. *Statistics Reengineering*

Statistics Reengineering merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BPS dalam upaya memenuhi kebutuhan indikator TPB/SDGs sekaligus menunjukkan transformasi BPS menjadi BPS yang “*agile*”. Kegiatan *Statistics Reengineering* antara lain: penggunaan *Integrated Collection System* (ICS) dalam mengubah pengumpulan data tradisional dan pemenuhan indikator TPB/SDGs yang selama ini BPS belum dapat menghasilkannya seperti Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) untuk menghasilkan data TPB/SDGs terkait pangan, metode penghitungan indikator baru dari data survei yang ada seperti *Indicator of Food Price Anomalies* (IFPA).

a. ***Integrated Collection System* (ICS).** ICS merupakan solusi dari kebutuhan aplikasi pendataan dinamis dan memungkinkan BPS melakukan pengumpulan data secara terintegrasi dengan menggunakan beberapa moda seperti *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI)- menggunakan gawai; *Computer-Assisted Web Interviewing* (CAWI)- menggunakan situs web; *Desktop Data Entry for Paper and Pencil Interviewing* (PAPI)- menggunakan kuesioner kertas; dan *External Data Acquisition*- melalui pertukaran data. ICS mereformasi cara BPS mengumpulkan data: ICS menyederhanakan desain kuesioner (menggunakan satu desain untuk moda CAPI, CAWI dan PAPI); mengurangi tahapan pemrosesan dengan ICS-CAPI dan ICS-CAWI (terdapat efisiensi waktu sehingga analisis data dapat dilakukan hampir *real-time*, dan waktu tunggu untuk menghasilkan statistik semakin cepat); dan juga mengintegrasikan data yang dikumpulkan dengan berbagai moda.

b. **Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI).** Berangkat dari keinginan untuk menghasilkan suatu sistem data yang terintegrasi dari seluruh survei pertanian, serta untuk memenuhi kebutuhan data TPB/SDGs sektor pertanian seperti indikator 2.3.1* produktivitas per tenaga kerja atau pendapatan per hari kerja



(US\$ PPP); indikator 2.3.2* rata-rata pendapatan dalam setahun (US\$ PPP); indikator 2.4.1* pertanian yang produktif dan berkelanjutan; dan indikator 5.a.1* peran perempuan dalam hak yang aman/terjamin atas lahan pertanian. BPS dalam hal ini Kedeputan Bidang Statistik Produksi, telah merancang suatu kegiatan yang dinamakan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI)/*Agricultural Integrated Survey* (AGRIS).

- c. **Indicator of Food Price Anomalies (IFPA) untuk indikator TPB/SDGs 2.c.1* anomali harga pangan.** Walaupun secara rutin BPS melakukan survei harga yang hasilnya dirilis secara rutin misalnya melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi. Namun selama ini BPS belum bisa menghasilkan indikator TPB/SDGs 2.c.1* anomali harga pangan. Oleh karena itu, BPS berinisiatif menghubungi FAO sebagai organisasi pengampu indikator-indikator TPB/SDGs yang berkaitan dengan pangan untuk mendapatkan *Technical Assistance* bagaimana cara untuk menghasilkan indikator TPB/SDGs 2.c.1*.

2. **Small Area Estimation**

Ketersediaan data indikator-indikator TPB/SDGs untuk dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting. Dengan adanya data-data indikator TPB/SDGs maka perkembangan target-target TPB/SDGs dapat dimonitor serta kegiatan yang mendukung program pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dievaluasi. BPS selalu berusaha memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan data tersebut seperti yang ditetapkan oleh Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia. Dengan prinsip inklusivitas dan *no one left behind*, agenda TPB/SDGs menghendaki keterlibatan semua pihak sehingga ketersediaan data untuk kelompok rentan dan sampai dengan level disagregasi terkecil sangat diperlukan. Di sinilah perlu adanya Metode *Small Area Estimation* (SAE) yang merupakan salah satu pemodelan statistik untuk mengestimasi parameter saat kondisi sampel tidak memadai atau kurang. Teknik ini digunakan ketika adanya kebutuhan akan penyediaan indikator TPB/SDGs sampai dengan wilayah administrasi terkecil atau pada level kabupaten/kota sesuai yang dikehendaki oleh metadata TPB/SDGs. Seperti yang diketahui bahwa banyak indikator TPB/SDGs yang dihasilkan dari Susenas, namun Susenas tidak didesain untuk estimasi level wilayah kecil, sehingga ketika harus didisagregasikan sampai dengan level kabupaten/kota diperlukan estimasi dengan pemodelan untuk mendapatkan hasil estimasi yang presisi.

3. **Pemanfaatan Big Data untuk TPB/SDGs**

Sebagai bentuk komitmen BPS dalam mendukung Indonesia dalam mencapai tujuan yang dicanangkan dalam TPB/SDGs pada tahun 2030 adalah dengan menyediakan data pendukung pelaksanaan implementasi TPB/SDGs. Ketersediaan indikator-indikator TPB/SDGs beserta *insight* yang menyertainya dirasakan sangat penting untuk dapat memonitor dan mengevaluasi capaian dari masing-masing tujuan. Salah satu upaya yang BPS lakukan adalah dengan menggunakan *Big Data* sebagai salah satu *alternative data source* selain sumber data konvensional seperti sensus, survei dan kompilasi produk administrasi. Ada beberapa upaya yang telah BPS lakukan dalam pemanfaatan *Big Data* untuk mendukung kegiatan TPB/SDGs, diantaranya adalah MPD, KSA dan Degurba.

- a. **Mobile Phone Data (MPD).** Ada beberapa hal yang melatarbelakangi penggunaan MPD antara lain ketika adanya kebutuhan untuk mengukur indikator 9.c.1* proporsi populasi yang dicakup oleh jaringan seluler dan indikator 17.8.1* proporsi individu yang menggunakan internet. Selama ini, untuk mengukur



cakupan penggunaan internet, Pemerintah Indonesia menggunakan beberapa sumber data, yaitu: data APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia), data laporan operator seluler yang disampaikan kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), dan data Susenas hasil dari BPS. Dari ketiga sumber itu, data Susenas merupakan data yang diambil dari pengalaman pemakai jasa layanan, sedangkan APJII dan operator seluler berdasarkan penyedia layanan. Dan ketiga sumber data ini memiliki hasil yang berbeda. Untuk itu, MPD digunakan sebagai pembanding bagi ketiga sumber data tersebut, yang diharapkan dapat digunakan untuk mengukur kedua indikator tersebut.

- b. **Kerangka Sampel Area (KSA).** Hal yang melatarbelakangi penggunaan KSA adalah adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan data pangan dengan semangat Satu Data Indonesia untuk mewujudkan satu data produksi padi. Hal lainnya yang melatarbelakangi penggunaan KSA adalah untuk mendukung kegiatan pemerintah yaitu swasembada pangan.
- c. ***Degree of Urbanisation (Degurba)*.** Ada beberapa hal yang melatarbelakangi penggunaan Degurba misalnya adanya kebutuhan beberapa indikator TPB/SDGs perlu memisahkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, sehingga diperlukan suatu metodologi yang terstandarisasi secara internasional agar keterbandingan antar negara dapat dipenuhi. Di samping itu, dapat digunakan untuk diseminasi data yang sensitif (seperti gambaran kondisi wilayah perdesaan). Metode derajat urbanisasi (*Degree of Urbanisation*) mampu mengidentifikasi klasifikasi wilayah menjadi tiga tingkatan; *Cities, Towns* dan *Semi-dense area*, dan *Rural area*.

Tujuan penulisan publikasi

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah sebagai berikut:

- a. menyajikan indikator-indikator TPB/SDGs yang tersedia di Indonesia terutama data yang bersumber dari BPS dan dari Kementerian/Lembaga lain yang telah dikompilasi oleh Sekretariat Nasional TPB/SDGs, Kementerian PPN/Bappenas;
- b. mengetahui perkembangan indikator TPB/SDGs dengan melakukan analisis terhadap indikator yang datanya belum ada dan datanya mengalami perubahan/perkembangan jika dibandingkan dengan publikasi sebelumnya; dan
- c. mendorong semua *stakeholder* untuk ikut menyediakan data dan informasi bagi ketersediaan indikator TPB/SDGs di Indonesia.

Sistematika penulisan

Penulisan publikasi TPB/SDGs ini secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama Pendahuluan, Bagian kedua menyajikan analisis tentang indikator-indikator di masing-masing tujuan dan target yang ada datanya. Bagian ketiga lampiran tabel data-data indikator TPB/SDGs yang tersedia hingga level provinsi.



1

TANPA KEMISKINAN

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun

Tujuan pertama dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah mengakhiri kemiskinan. Terdapat 11 indikator yang dapat ditampilkan untuk menghitung capaian tujuan pertama dalam level nasional.

Dampak pandemi Covid-19 masih terasa di tahun 2021. Secara umum, tingkat kemiskinan yang sempat naik karena pandemi Covid-19 perlahan mulai menurun. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan yang dicapai belum seperti kondisi pada saat sebelum pandemi Covid-19.

Kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan mencakup banyak dimensi. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan dan kesejahteraan. Pada tahun 2021, capaian pengurangan kemiskinan ditandai dengan adanya peningkatan proporsi penduduk penerima program perlindungan sosial, peningkatan proporsi penduduk yang mengakses perlindungan dasar dan peningkatan proporsi total pengeluaran pemerintah untuk layanan penting. Hal ini menggambarkan bahwa agenda untuk mengakhiri kemiskinan adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.



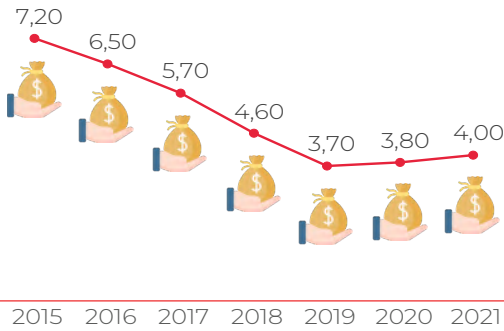


INDIKATOR 1.1.1*

TINGKAT KEMISKINAN EKSTREM

GAMBAR 1.1.

PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DALAM KEMISKINAN EKSTREM (PERSEN), 2015-2021



Dalam kurun waktu 2015-2019, proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem mengalami penurunan yang cukup berarti. Namun pada tahun 2020 angkanya kembali meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua aspek kehidupan.

Catatan: Perkiraan konversi 1,9 US\$ PPP dengan baseline 2017

Tahun 2017, 1,9 US\$ PPP Rp 10.195,6

Tahun 2021, 1,9 US\$ PPP Rp 11.941,1 (Estimasi berdasarkan konsep USD PPP Tahun 2017 yang digerakkan dengan perubahan IHK periode Maret 2017-Maret 2021)

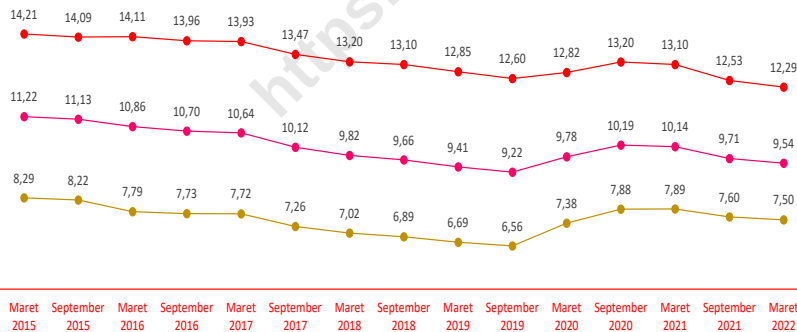
Sumber: Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 1.2.1*

PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

GAMBAR 1.2.

PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, 2015-2022



Perdesaan

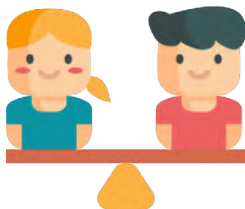


Perkotaan



Indonesia

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



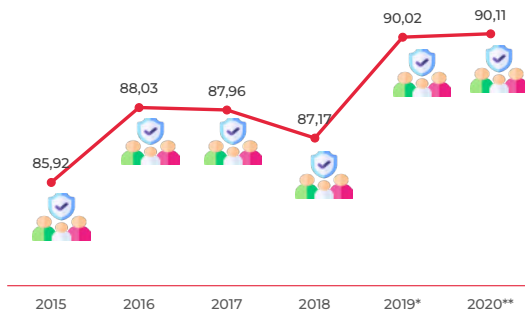
Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada Maret 2022, terdapat 12 dari 100 penduduk yang tinggal di daerah perdesaan dan 8 dari 100 penduduk yang tinggal di daerah perkotaan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, terdapat 10 dari 100 penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

**INDIKATOR 1.3.1***

PROPORSI PENDUDUK YANG MENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL, MENURUT JENIS KELAMIN, UNTUK KATEGORI KELOMPOK SEMUA ANAK, PENGANGGURAN, LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS, IBU HAMIL/MELAHIRKAN, KORBAN KECELAKAAN KERJA, KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN

GAMBAR 1.3.

PROPORSI PENDUDUK YANG MENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PERSEN), 2015-2020



Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial cenderung terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2020, telah ada 90 dari tiap 100 penduduk yang menerima program perlindungan sosial.

Catatan: * Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2019 mencapai 96,5 juta orang dari target 107,2 juta.

** PBI JKN tahun 2020 mencapai 96,6 juta orang dari target 107,2 juta.

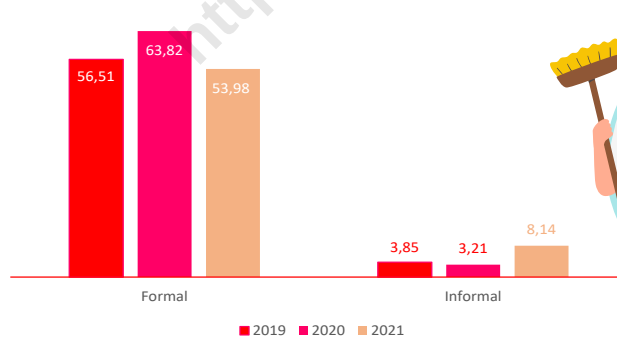
Sumber: Basis Data Terpadu (BDT) Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019, Bappenas dan BPJS Kesehatan

INDIKATOR 1.3.1.(B)

PROPORSI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

GAMBAR 1.4.

PROPORSI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, 2019 - 2021



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan sektor formal dan informal. Pada tahun 2021, terdapat 54 dari tiap 100 orang pekerja sektor formal yang menjadi peserta program jaminan sosial. Sedangkan pada sektor informal, hanya terdapat 8 dari tiap 100 pekerja yang menjadi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

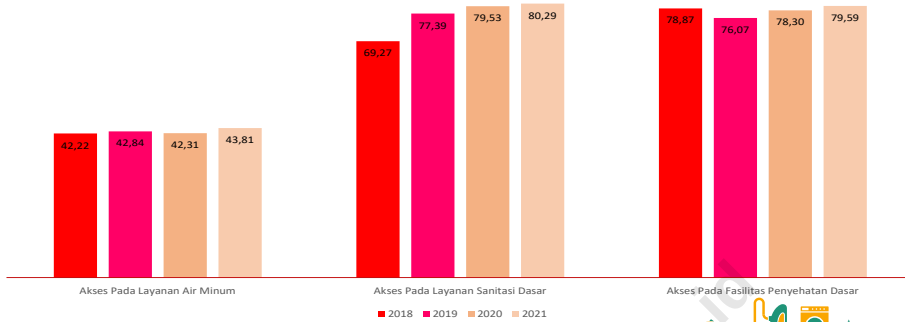


INDIKATOR 1.4.1*

PROPORSI PENDUDUK/RUMAH TANGGA DENGAN AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR

GAMBAR 1.5.

PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR, 2018-2021



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2021, proporsi rumah tangga yang mempunyai akses terhadap layanan air minum, layanan sanitasi dasar dan fasilitas kebersihan dasar mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

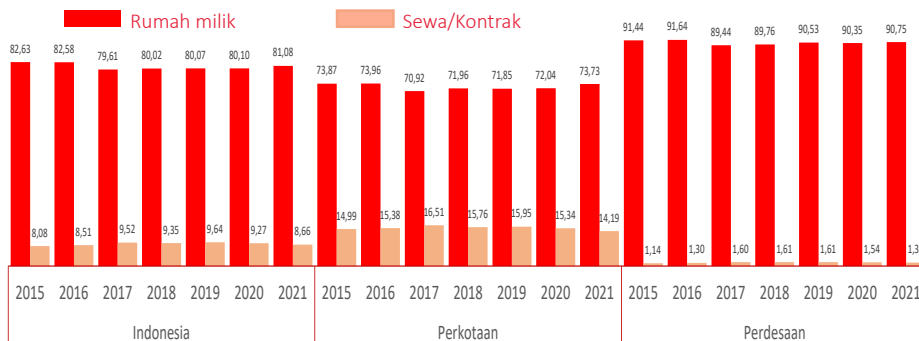


INDIKATOR 1.4.2*

PROPORSI DARI PENDUDUK DEWASA YANG MENDAPATKAN HAK ATAS TANAH YANG DIDASARI OLEH DOKUMEN HUKUM DAN YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN TIPE KEPEMILIKAN

GAMBAR 1.6.

PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN HAK ATAS TANAH YANG DIDASARI OLEH DOKUMEN HUKUM DAN YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN TIPE KEPEMILIKAN, 2015 - 2021



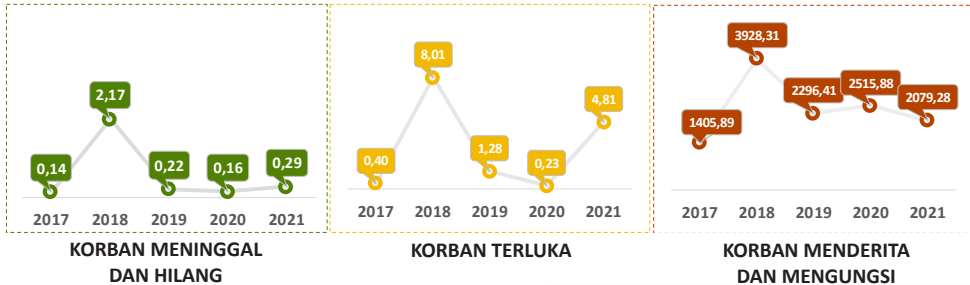
Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

Penduduk yang tinggal di daerah perdesaan lebih banyak yang menghuni rumah milik sendiri dibandingkan penduduk yang tinggal di perkotaan. Pada tahun 2021, 91 dari tiap 100 rumah tangga di perdesaan dan 74 dari tiap 100 rumah tangga di perkotaan menghuni rumah milik sendiri. Sebaliknya, penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak yang menghuni rumah sewa/kontrak dibandingkan penduduk yang tinggal di perdesaan.

**INDIKATOR 1.5.1*****JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG**

GAMBAR 1.7.

JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG, 2017-2021



Meningkatnya frekuensi bencana alam seperti kekeringan dan banjir didorong oleh perubahan iklim. Pada tahun 2021, korban meninggal dan hilang serta korban terluka mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,29 dan 4,81 per 100.000 orang. Edukasi kesiapsiagaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko bencana.

Catatan: Data Korban dan Kerusakan Menurut Wilayah diakses dari <https://dibi.bnppb.go.id/kwilayah/index> pada 2 Desember 2022

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 1.5.2***JUMLAH KERUGIAN EKONOMI LANGSUNG AKIBAT BENCANA TERHADAP PDB**

GAMBAR 1.8.

JUMLAH KERUGIAN EKONOMI LANGSUNG AKIBAT BENCANA TERHADAP PDB (PERSEN), 2020



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB merupakan jumlah kerugian langsung bidang pertanian, jumlah kerugian ekonomis langsung pada semua kerusakan dan kehancuran asset produktif, jumlah kerugian ekonomis di sektor perumahan, jumlah kerugian ekonomis langsung karena rusak dan hancurnya infrastruktur vital dan jumlah kerugian ekonomis langsung akibat rusak dan hancurnya warisan budaya dibagi dengan PDB. Indikator ini digunakan untuk memonitor kerugian langsung akibat bencana sebagai salah satu landasan penilaian kebutuhan pasca bencana, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada sebuah provinsi.

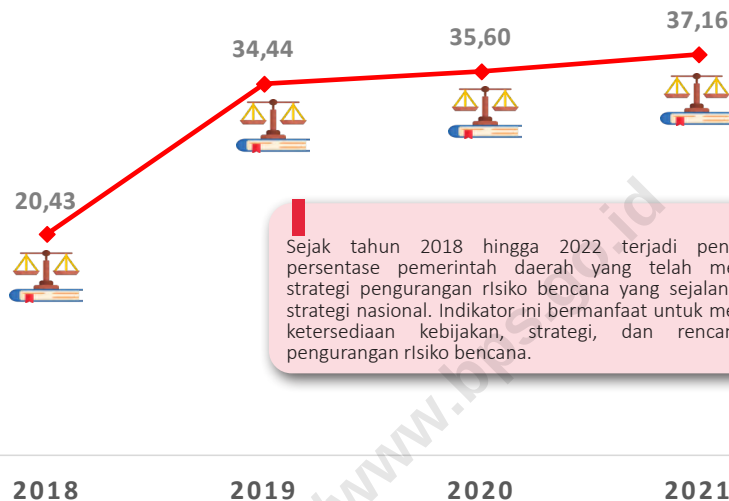


INDIKATOR 1.5.4*

PERSENTASE PEMERINTAH DAERAH YANG MENGADOPSI DAN MENERAPKAN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAERAH YANG SELARAS DENGAN STRATEGI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA NASIONAL

GAMBAR 1.9.

PERSENTASE PEMERINTAH DAERAH (KABUPATEN/KOTA) YANG MEMILIKI RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD-PRB), 2018-2021



Sejak tahun 2018 hingga 2022, terjadi peningkatan persentase pemerintah daerah yang telah melakukan strategi pengurangan risiko bencana yang sejalan dengan strategi nasional. Indikator ini bermanfaat untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi pengurangan risiko bencana.

Sumber: Direktorat Tata Ruang dan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas, 2022

INDIKATOR 1.A.1*

PROPORSI SUMBER DAYA YANG DIALOKASIKAN OLEH PEMERINTAH SECARA LANGSUNG UNTUK PROGRAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN

GAMBAR 1.10.

PROPORSI SUMBER DAYA YANG DIALOKASIKAN OLEH PEMERINTAH SECARA LANGSUNG UNTUK PROGRAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN, 2021

Pada tahun 2021, sebanyak 16,84 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun berjalan digunakan untuk program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)



INDIKATOR 1.A.2*

PENGELUARAN UNTUK LAYANAN POKOK (PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL) SEBAGAI PERSENTASE DARI TOTAL BELANJA PEMERINTAH

GAMBAR 1.11.

PROPORSI TOTAL PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK LAYANAN PENTING (PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PERLINDUNGAN SOSIAL), 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah mengalokasikan APBN sebesar 20 persen untuk bidang pendidikan. Angka ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2016. Sedangkan alokasi 5,2 persen dialokasikan untuk bidang kesehatan dan 18,1 persen untuk program perlindungan sosial. Kedua angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020.



2 TANPA KELAPARAN

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

Kelaparan didefinisikan sebagai hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik (Lenhart 1989; Ngongi 1999). Kondisi ini terjadi karena adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar minimal pangan yang dapat disebabkan karena kurangnya daya beli maupun minimnya ketersediaan pangan yang ada.

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan menjadi tujuan kedua dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 8 target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan ini. Pada level nasional, terdapat 15 indikator yang telah disajikan untuk menghitung capaian pada tujuan kedua.

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak negatif pada hampir seluruh aspek. Meskipun begitu, upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan juga turut memberikan hasil yang baik pada capaian di tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya prevalensi kerawanan pangan sedang dan berat (4,79 persen), *stunting* (24,40 persen), *wasting* (7,10 persen), serta meningkatnya nilai tambah pertanian menjadi 60,7 juta per tenaga kerja.



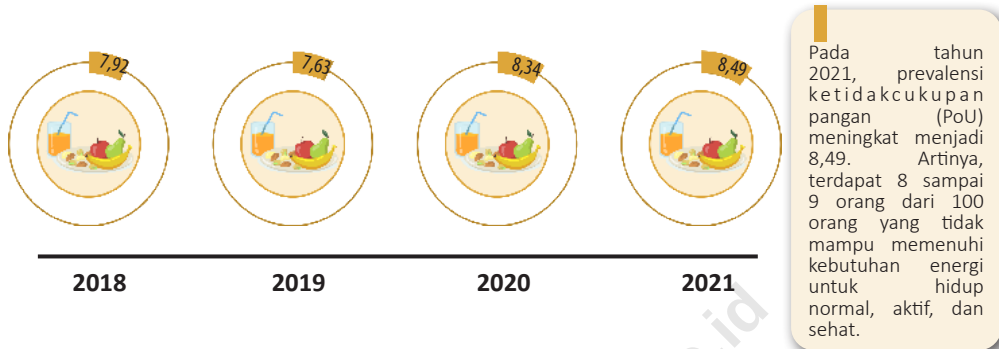


INDIKATOR 2.1.1*

PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (*PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT*)

GAMBAR 2.1.

PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (*PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT*), 2018-2021



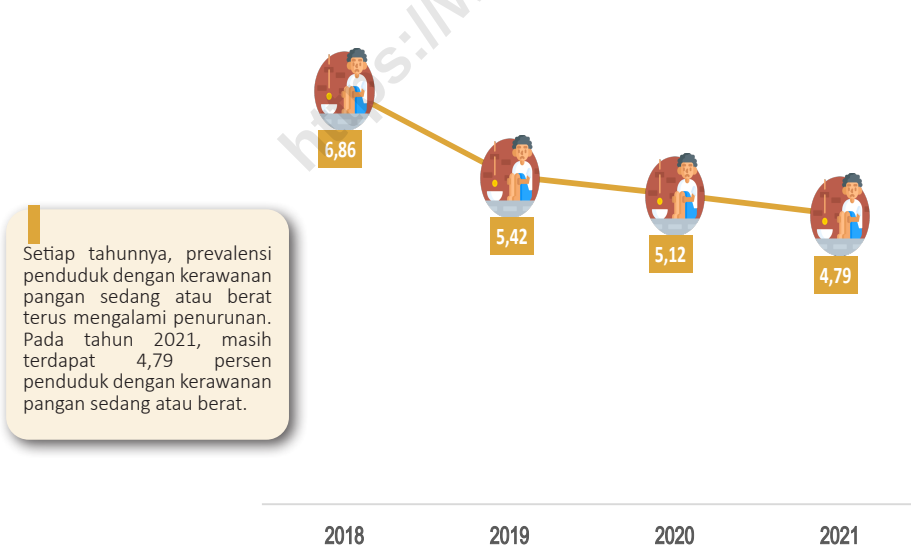
Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 2.1.2*

PREVALENSI PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT, BERDASARKAN PADA SKALA PENGALAMAN KERAWANAN PANGAN

GAMBAR 2.2.

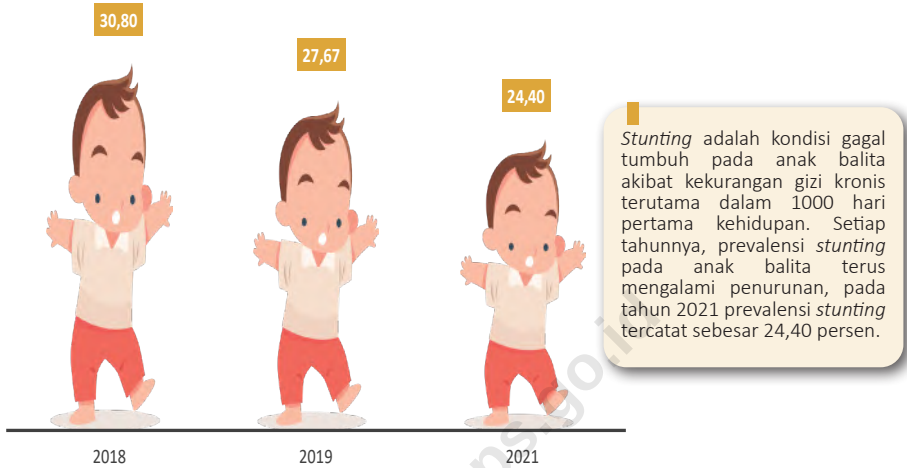
PREVALENSI PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT, BERDASARKAN PADA SKALA PENGALAMAN KERAWANAN PANGAN, 2018-2021



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

**INDIKATOR 2.2.1*****PREVALENSI *STUNTING* (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN/BALITA**

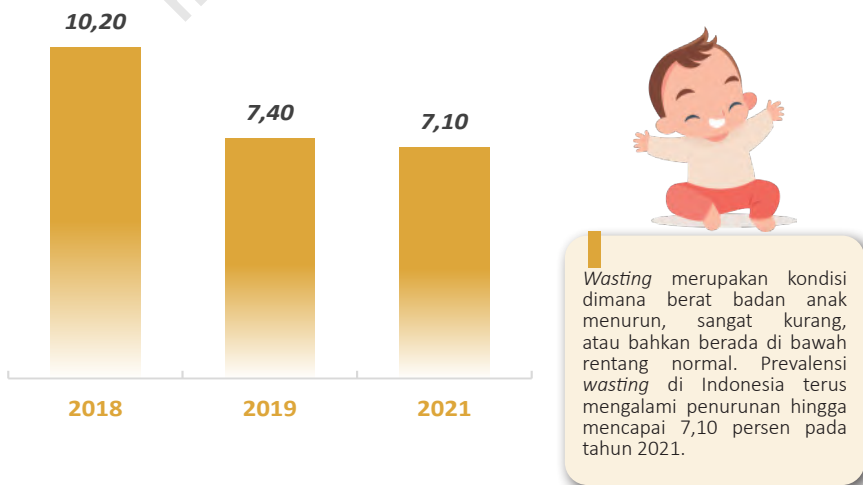
GAMBAR 2.3.

PREVALENSI *STUNTING* (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK DI BAWAH LIMA TAHUN/BALITA, 2018-2019 DAN 2021

Sumber: Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018, Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, Survei Status Gizi Indonesia 2021, Kementerian Kesehatan

INDIKATOR 2.2.2***PREVALENSI *WASTING* (BERAT BADAN/TINGGI BADAN) ANAK PADA USIA KURANG DARI 5 TAHUN, BERDASARKAN TIPE**

GAMBAR 2.4.

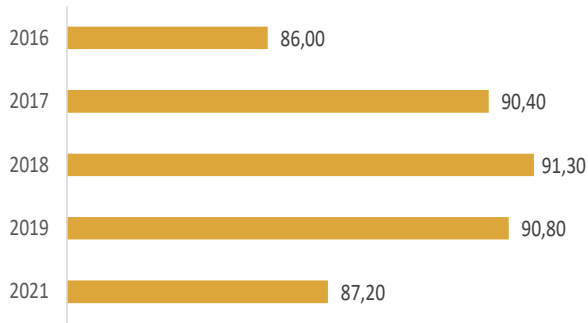
PREVALENSI *WASTING* (BERAT BADAN/TINGGI BADAN) ANAK PADA USIA KURANG DARI 5 TAHUN, 2018-2019 DAN 2021

Sumber: Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018 dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, Survei Status Gizi Indonesia 2021, Kementerian Kesehatan



INDIKATOR 2.2.2.(A) KUALITAS KONSUMSI PANGAN YANG DIINDIKASIKAN OLEH SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)

GAMBAR 2.5. KUALITAS KONSUMSI PANGAN YANG DIINDIKASIKAN OLEH SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH), 2016-2019 DAN 2021



Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor PPH mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 tercatat sebesar 87,20.

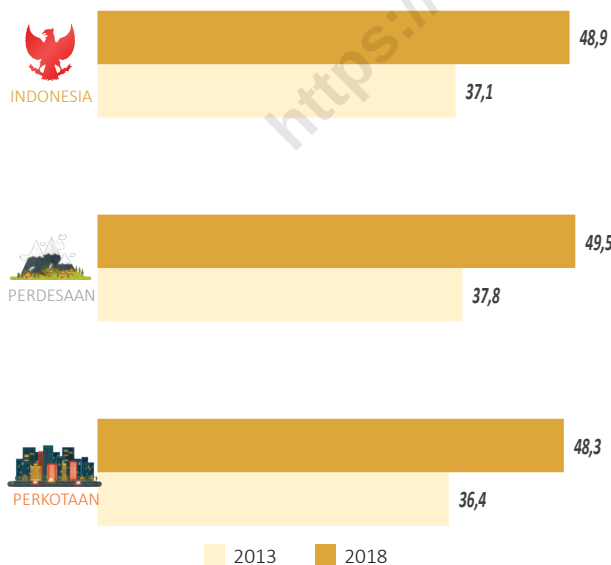


Catatan: Angka 2016-2019 menggunakan Angka Kecukupan Energi 2.000 Kkal/Kapita/Hari
Angka 2021 menggunakan Angka Kecukupan Energi 2.100 Kkal/Kapita/Hari

Sumber: Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

INDIKATOR 2.2.3* PREVALENSI ANEMIA PADA IBU HAMIL USIA 15-49 TAHUN

GAMBAR 2.6. PREVALENSI ANEMIA PADA IBU HAMIL USIA 15-49 TAHUN, 2013 DAN 2018



Anemia pada ibu hamil merupakan salah satu resiko yang harus diwaspadai karena dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin. Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun tertinggi terjadi di wilayah perdesaan.



Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2013, Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan

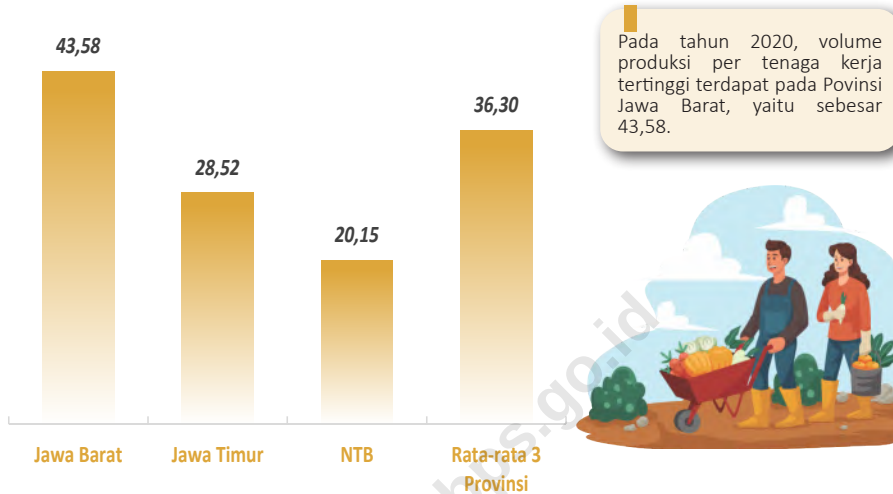


INDIKATOR 2.3.1*

VOLUME PRODUKSI PER TENAGA KERJA MENURUT KELAS USAHA TANI TANAMAN/PETERNAKAN/PERIKANAN/ KEHUTANAN

GAMBAR 2.7.

VOLUME PRODUKSI PER TENAGA KERJA MENURUT KELAS USAHA TANI TANAMAN/PETERNAKAN/PERIKANAN/ KEHUTANAN, 2020



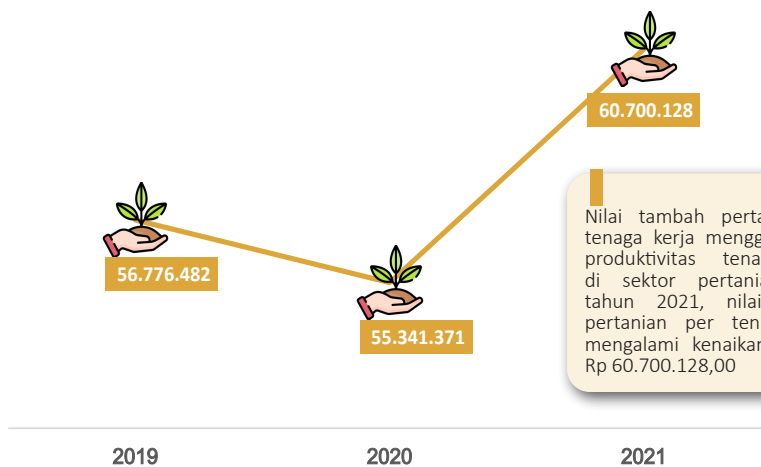
Sumber: Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2020, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 2.3.1.(A)

NILAI TAMBAH PERTANIAN PER TENAGA KERJA MENURUT KELAS USAHA TANI TANAMAN/ PETERNAKAN/ PERIKANAN/KEHUTANAN

GAMBAR 2.8.

NILAI TAMBAH PERTANIAN PER TENAGA KERJA MENURUT KELAS USAHA TANI TANAMAN/ PETERNAKAN/ PERIKANAN/KEHUTANAN (RUPIAH PER TENAGA KERJA), 2019-2021



Sumber: Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian, Badan Pusat Statistik

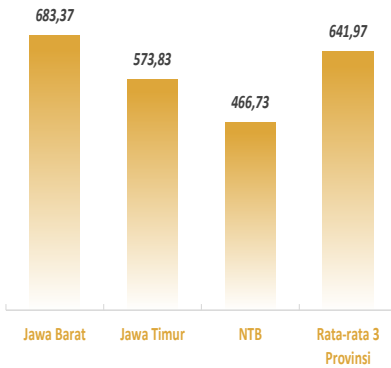


INDIKATOR 2.3.2*

RATA-RATA PENDAPATAN PRODUSEN PERTANIAN SKALA KECIL, MENURUT SUBSEKTOR

GAMBAR 2.9.

RATA-RATA PENDAPATAN PRODUSEN PERTANIAN SKALA KECIL, MENURUT SUBSEKTOR, 2020



Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil tertinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NTB, yaitu sebesar 683,37.

Sumber: Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2020, Badan Pusat Statistik

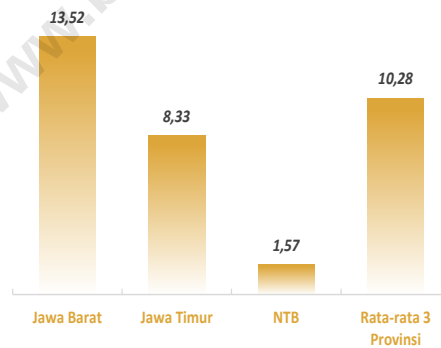
INDIKATOR 2.4.1

PROPORSI AREAL PERTANIAN PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN

GAMBAR 2.10.

PROPORSI AREAL PERTANIAN PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN, 2020

Pada tahun 2020, proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan di Provinsi NTB hanya sebesar 1,57 persen. Jumlah ini berbeda jauh dengan 2 provinsi lainnya, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur.



Sumber: Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2020, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 2.5.1*

JUMLAH SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN DAN HEWAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN YANG DISIMPAN DI FASILITAS KONSERVASI, BAIK JANGKA MENENGAH ATAUPUN JANGKA PANJANG

GAMBAR 2.11.

JUMLAH AKSESI SUMBER DAYA GENETIK (SDG) TANAMAN, 2020

4.655



Pada tahun 2020, jumlah sumber daya genetik tanaman tercatat sejumlah 4.655.

Sumber: Kementerian Pertanian

**INDIKATOR 2.5.2*****PROPORSI RAS TERNAK LOKAL YANG BERISIKO PUNAH**

GAMBAR 2.12.

PROPORSI RAS TERNAK LOKAL YANG BERISIKO PUNAH, 2019

**0,46%**

Pada tahun 2019, proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah tercatat sebesar 0,46 persen.

Sumber: Kementerian Pertanian

INDIKATOR 2.A.1***INDEKS ORIENTASI PERTANIAN (IOP) UNTUK PENGELUARAN PEMERINTAH**

GAMBAR 2.13.

INDEKS ORIENTASI PERTANIAN (IOP) UNTUK PENGELUARAN PEMERINTAH, 2020

**0,095**

Indeks Orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,095.

Sumber: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Nilai Tambah Pertanian Badan Pusat Statistik (diolah Kementerian PPN/Bappenas)

INDIKATOR 2.A.2***TOTAL BANTUAN PEMBANGUNAN (ODA) DAN BANTUAN LAIN UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

GAMBAR 2.14.

TOTAL BANTUAN PEMBANGUNAN (ODA) DAN BANTUAN LAIN UNTUK SEKTOR PERTANIAN, 2020

**969,84 Juta USD**

Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian pada tahun 2020 mencapai 969,84 juta USD.

Sumber: Direktorat Kerja Sama Pendanaan Bilateral dan Direktorat Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas

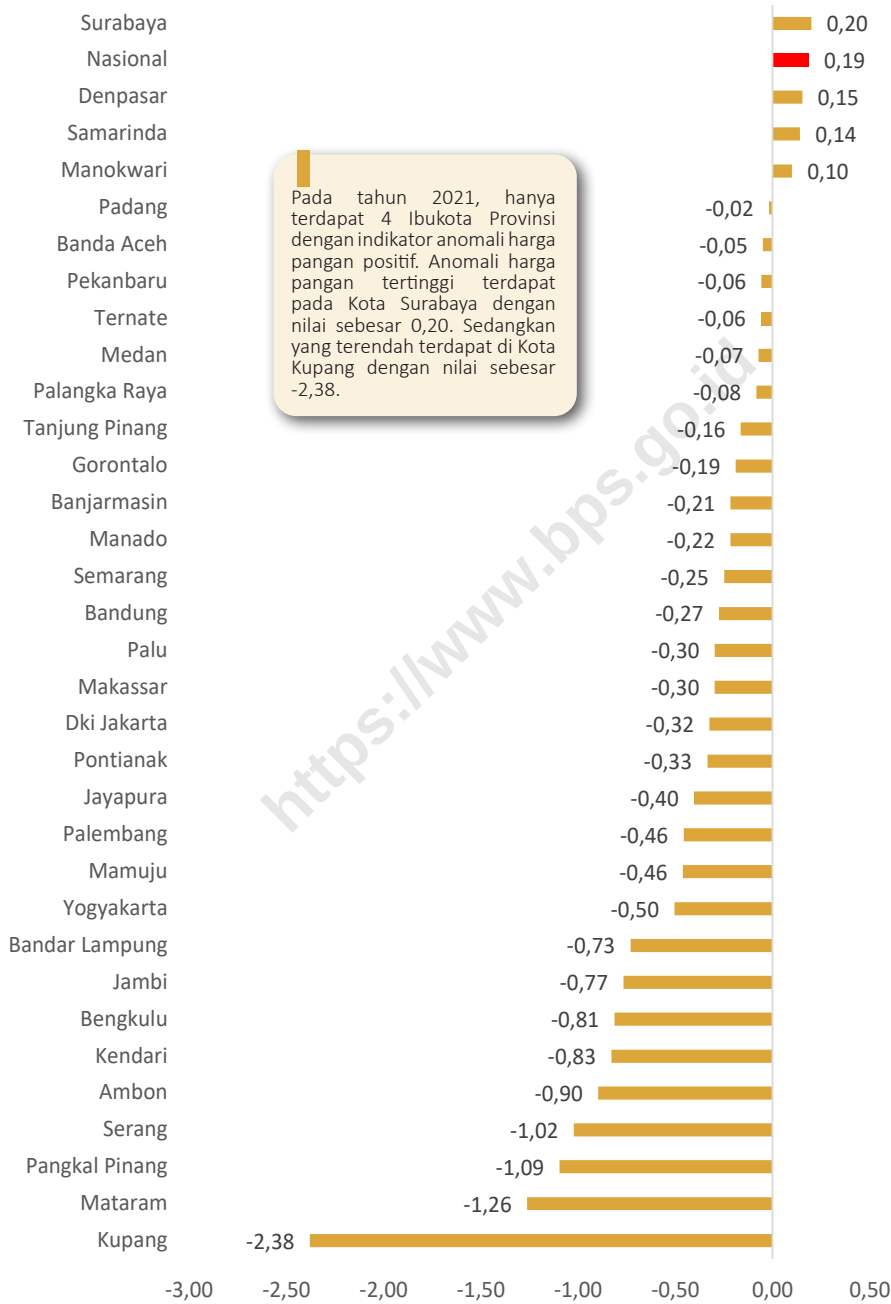


INDIKATOR 2.C.1

INDIKATOR ANOMALI HARGA PANGAN

GAMBAR 2.15.

INDIKATOR ANOMALI HARGA PANGAN, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik



3

KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia merupakan tujuan ketiga dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada level nasional, terdapat 29 indikator yang terdiri dari 18 indikator nasional yang sesuai dengan indikator global dan sisanya merupakan proksi dan indikator pengayaan.

Dalam mewujudkan pembangunan di sektor kesehatan, diperlukan peran aktif dari seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Secara umum capaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan ketiga ini menunjukkan hasil yang lebih baik. Salah satu contohnya yaitu meningkatnya proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang proses kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan, yakni sebanyak 95,93 persen pada tahun 2021.



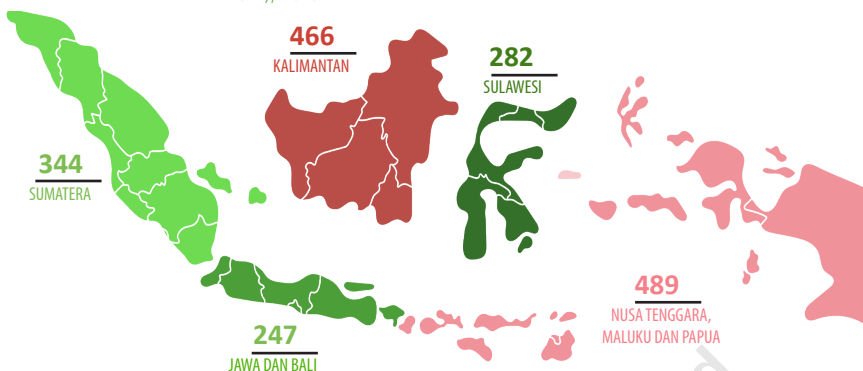


INDIKATOR 3.1.1*

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

GAMBAR 3.1.

ANGKA KEMATIAN IBU MENURUT PULAU (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP), 2015



Angka Kematian Ibu Nasional: 305

Angka Kematian Ibu di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mencapai 489 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu terendah terdapat di Jawa dan Bali sebesar 247 per 100.000 kelahiran hidup.

Sumber: Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015, Badan Pusat Statistik

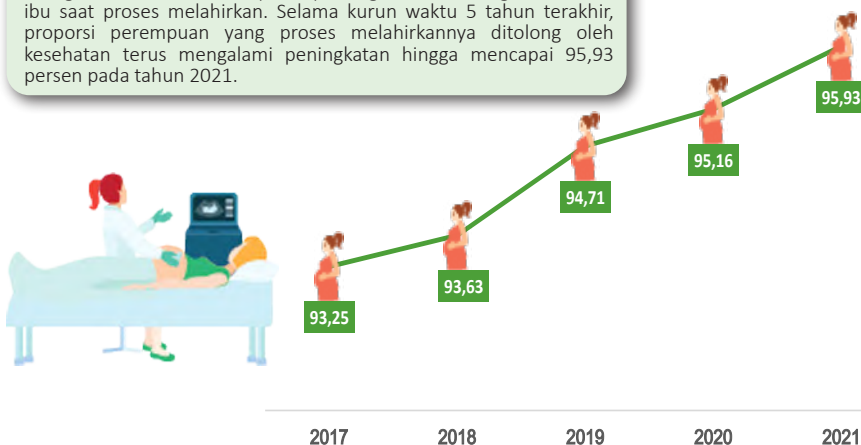
INDIKATOR 3.1.2*

PROPORSI PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA: (A) DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH; (B) DI FASILITAS KESEHATAN

GAMBAR 3.2.

PROPORSI PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH, 2017-2021

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mencegah kematian ibu saat proses melahirkan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, proporsi perempuan yang proses melahirkannya ditolong oleh kesehatan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 95,93 persen pada tahun 2021.

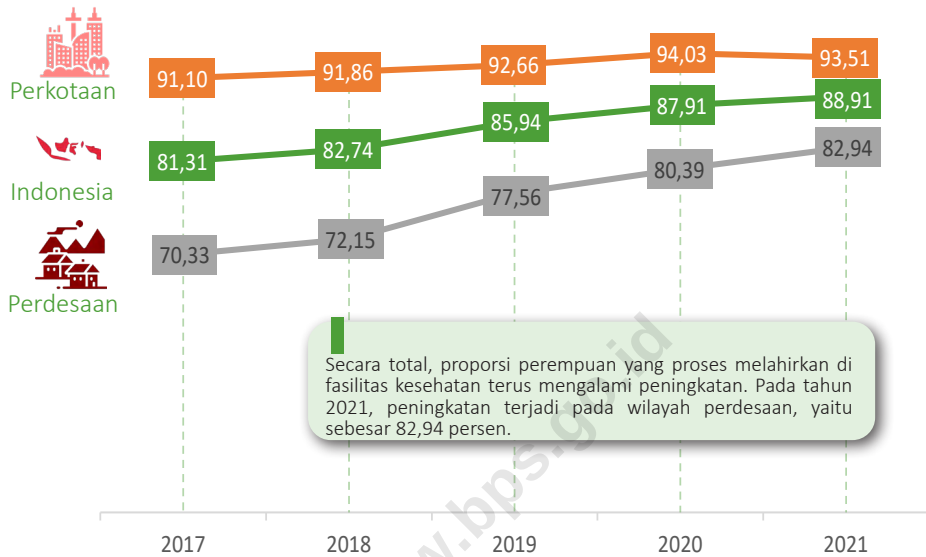


Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



GAMBAR 3.3.

PROPORSI PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN, 2017-2021



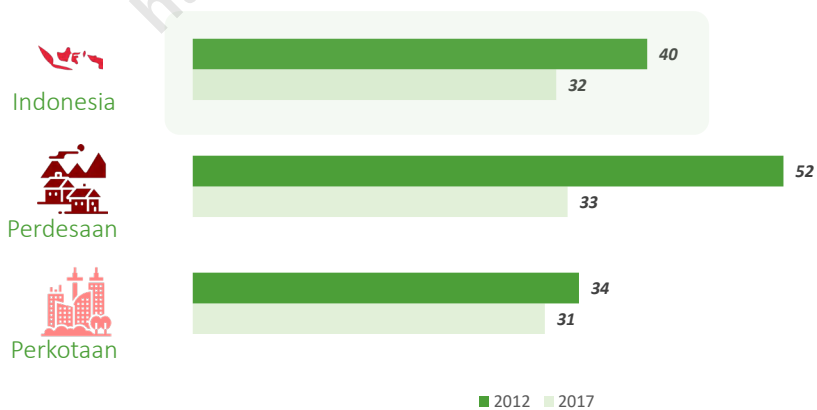
Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 3.2.1

(A) ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP;
(B) ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

GAMBAR 3.4.

ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP, 2012 DAN 2017



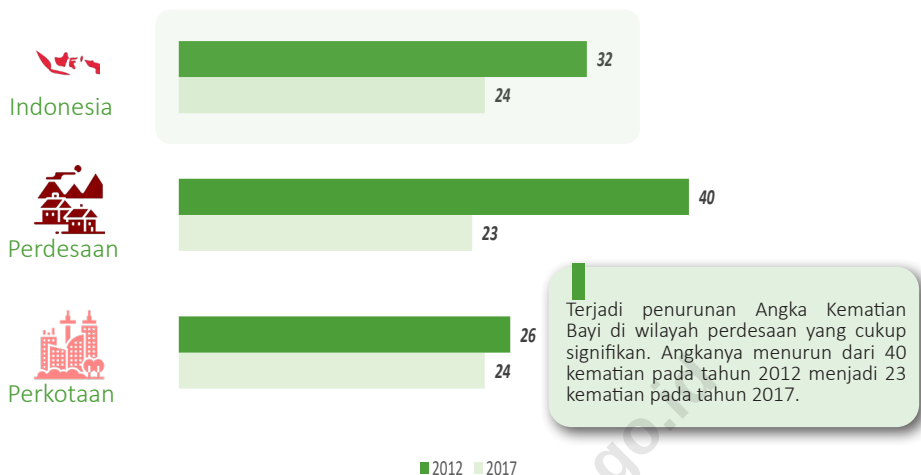
Angka Kematian Balita turun dari 40 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017.

Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan Pusat Statistik



GAMBAR 3.5.

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP, 2012 DAN 2017



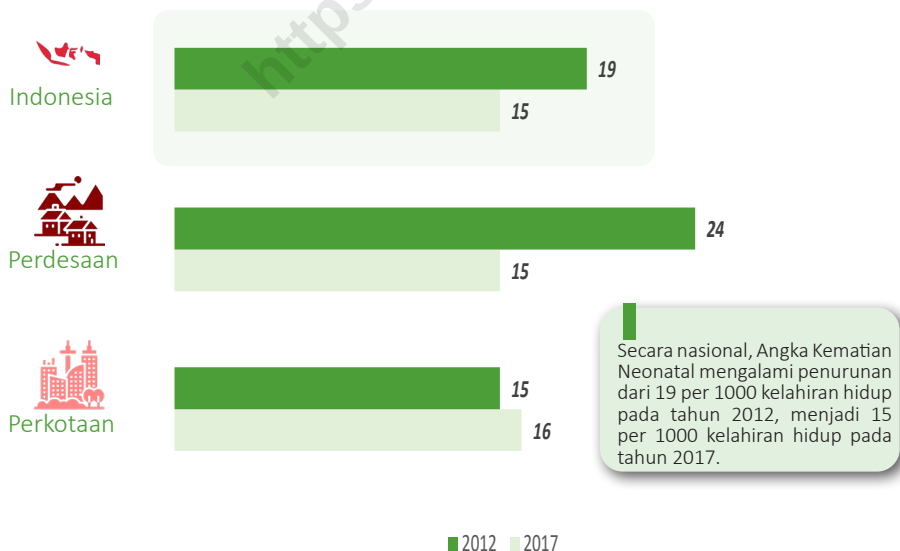
Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 3.2.2*

ANGKA KEMATIAN NEONATAL (AKN) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

GAMBAR 3.6.

ANGKA KEMATIAN NEONATAL (AKN) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP, 2012 DAN 2017



Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan Pusat Statistik

**INDIKATOR 3.3.1*****JUMLAH INFEKSI BARU HIV PER 1.000 PENDUDUK TIDAK TERINFEKSI**

GAMBAR 3.7.

JUMLAH INFEKSI BARU HIV PER 1.000 PENDUDUK TIDAK TERINFEKSI, 2021



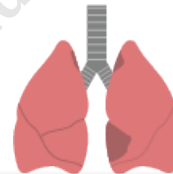
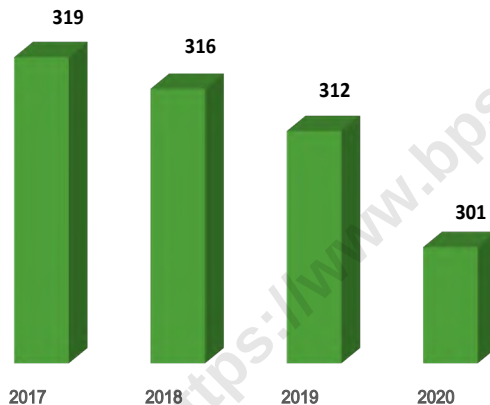
Pada tahun 2021, jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk sebesar 0,10. Indikator ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur penyebaran HIV di masyarakat.

Sumber: Kementerian Kesehatan

INDIKATOR 3.3.2***INSIDEN TUBERKULOSIS (ITB) PER 100.000 PENDUDUK**

GAMBAR 3.8.

INSIDEN TUBERKULOSIS (ITB) PER 100.000 PENDUDUK, 2017-2020



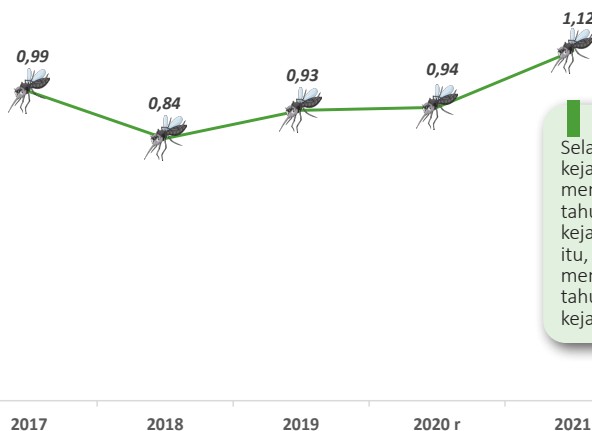
Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan merupakan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah insiden tuberkulosis. Pada tahun 2020 tercatat terjadi 301 insiden tuberkulosis per 100.000 penduduk.

Sumber: WHO Global TB Report

INDIKATOR 3.3.3***KEJADIAN MALARIA PER 1.000 ORANG**

GAMBAR 3.9.

KEJADIAN MALARIA PER 1.000 ORANG, 2017-2021



Selama tahun 2017-2021, kejadian malaria sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,84 kejadian per 1.000 orang. Setelah itu, kejadian malaria terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,12 kejadian malaria per 1.000 orang.

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan



INDIKATOR 3.3.3.(A) JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENCAIPI ELIMINASI MALARIA

GAMBAR 3.10.

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENCAIPI ELIMINASI MALARIA, 2017-2021



Setiap tahunnya, jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 347 kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi malaria.



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan

INDIKATOR 3.3.4* INSIDEN HEPATITIS B PER 100.000 PENDUDUK

GAMBAR 3.11.

INSIDEN HEPATITIS B PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2021

1,69



Hepatitis B adalah penyakit menular yang menimbulkan peradangan pada organ hati dan disebabkan oleh virus. Pada tahun 2021, terdapat 1,69 insiden hepatitis B per 100.000 penduduk di Indonesia.

Sumber: POKSI Hepatitis dan PISP Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

INDIKATOR 3.3.5* JUMLAH ORANG YANG MEMERLUKAN INTERVENSI TERHADAP PENYAKIT TROPIS YANG TERABAIKAN (A) FILARIASIS DAN (B) KUSTA

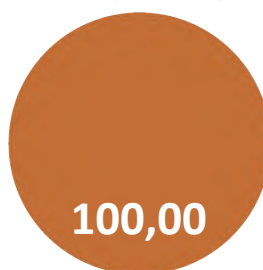
GAMBAR 3.12.

ANGKA PENCAPAIAN PENGOBATAN PENYAKIT FILARIASIS DAN PROPORSI KASUS KUSTA YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI TAHUN 2021

Pada tahun 2021, angka pencapaian pengobatan filariasis mencapai 71,55 persen. Sedangkan proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati mencapai 100 persen.



Filariasis



Kusta

Sumber: Kementerian Kesehatan



INDIKATOR 3.3.5.(A) JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN ELIMINASI KUSTA

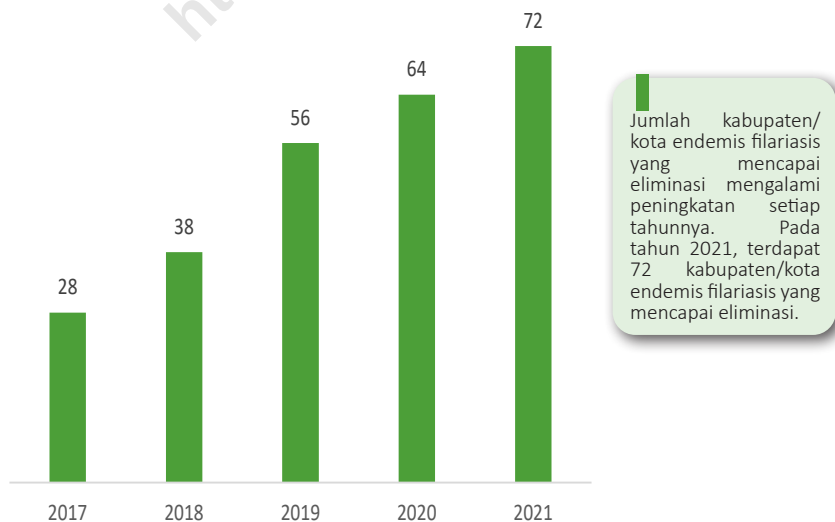
GAMBAR 3.13. JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN ELIMINASI KUSTA, 2017-2021



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan

INDIKATOR 3.3.5.(B) JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIASIS YANG MENCAPAI ELIMINASI

GAMBAR 3.14. JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIASIS YANG MENCAPAI ELIMINASI, 2017-2021



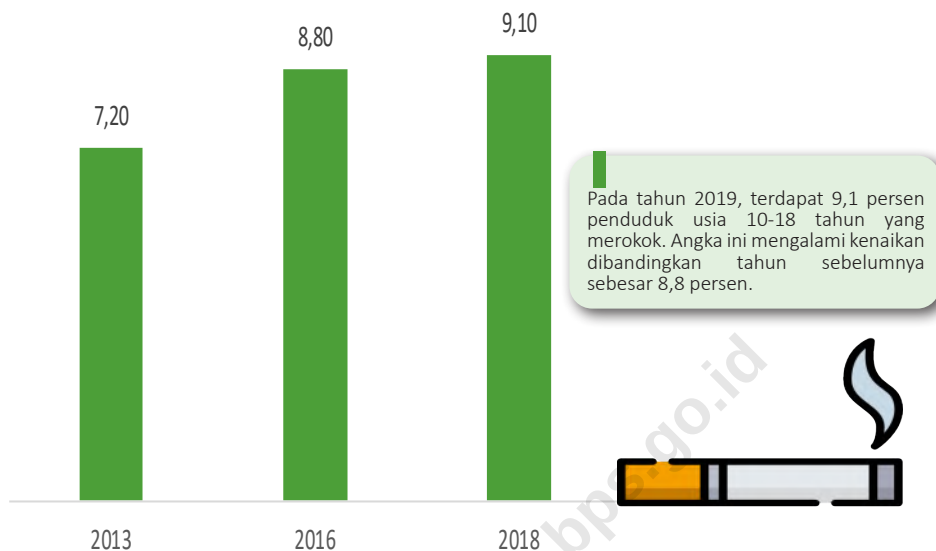
Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan



INDIKATOR 3.4.1.(A) PERSENTASE MEROKOK PENDUDUK USIA 10-18 TAHUN

GAMBAR 3.15.

PERSENTASE MEROKOK PENDUDUK USIA 10-18 TAHUN, 2013, 2016 DAN 2018

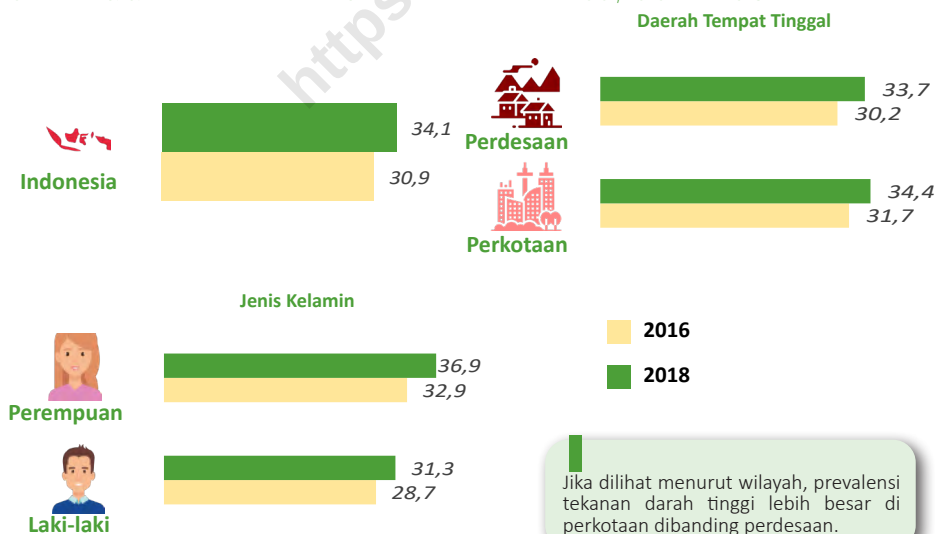


Sumber: Riskesdas 2013, Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) 2016, Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan

INDIKATOR 3.4.1.(B) PREVALENSI TEKANAN DARAH TINGGI

GAMBAR 3.16.

PREVALENSI TEKANAN DARAH TINGGI, 2016 DAN 2018



Sumber: Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) 2016, Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan

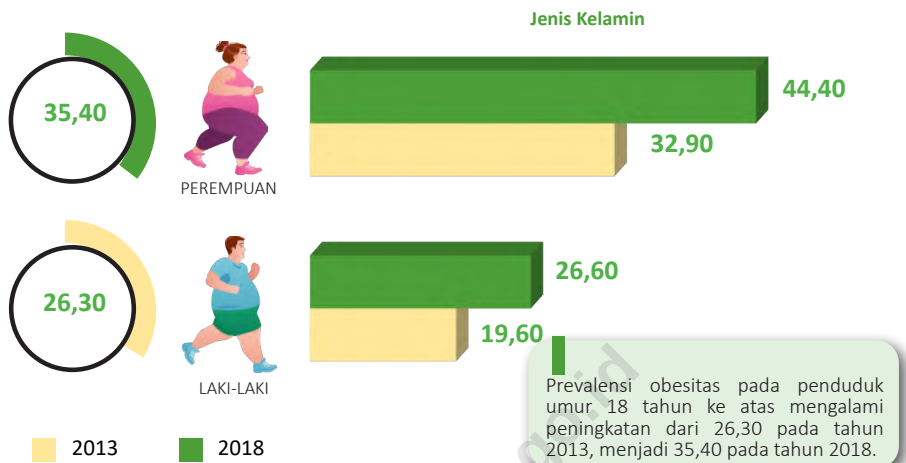


INDIKATOR 3.4.1.(C)

PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK UMUR ≥ 18 TAHUN

GAMBAR 3.17.

PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK UMUR ≥ 18 TAHUN, 2013 DAN 2018



Catatan: Obesitas dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 25

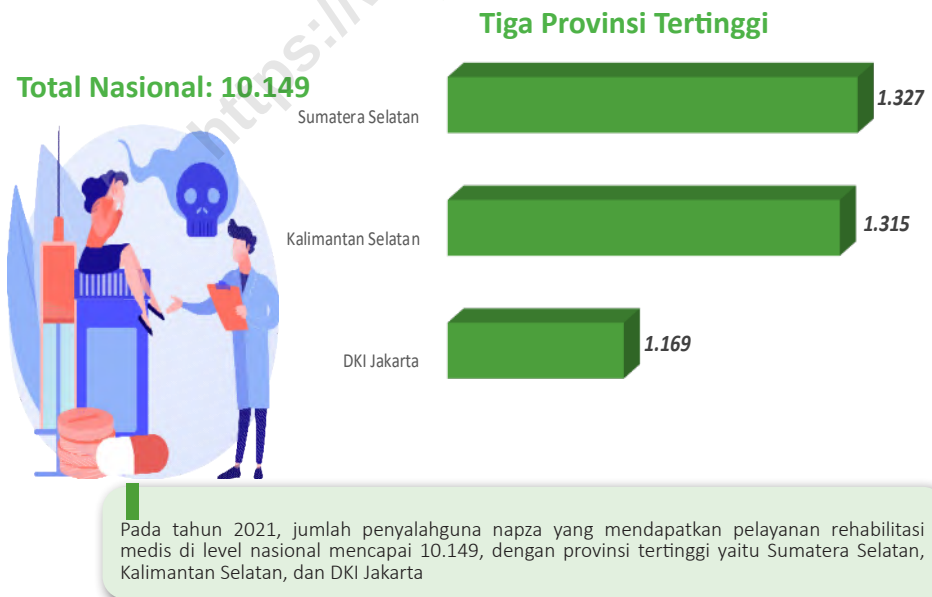
Sumber: Riskesdas 2013, Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan

INDIKATOR 3.5.1.(A)

JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

GAMBAR 3.18.

JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS, 2021



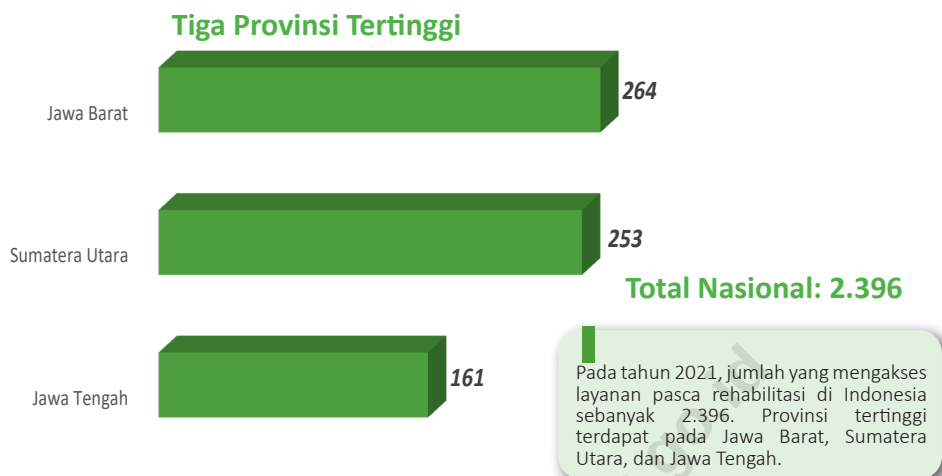
Sumber: Laporan Tahunan Masalah Penyalahgunaan Napza, Kementerian Kesehatan



INDIKATOR 3.5.1.(B) JUMLAH YANG MENGAKSES LAYANAN PASCA REHABILITASI

GAMBAR 3.19.

JUMLAH YANG MENGAKSES LAYANAN PASCA REHABILITASI, 2021



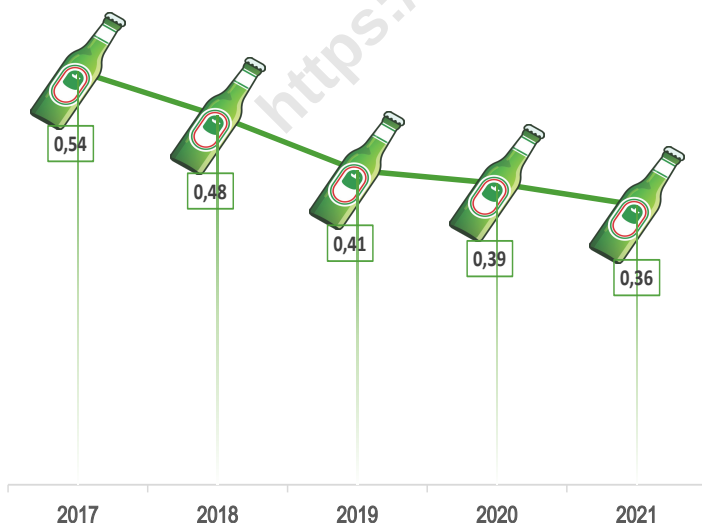
Catatan: Jenis layanan kegiatan pasca rehabilitasi melalui agen pemulihan

Sumber: Badan Narkotika Nasional

INDIKATOR 3.5.2* KONSUMSI ALKOHOL (LITER PER KAPITA) OLEH PENDUDUK UMUR $\geq$ 15 TAHUN DALAM SATU TAHUN TERAKHIR

GAMBAR 3.20.

KONSUMSI ALKOHOL (LITER PER KAPITA) OLEH PENDUDUK UMUR $\geq$ 15 TAHUN DALAM SATU TAHUN TERAKHIR, 2017-2021



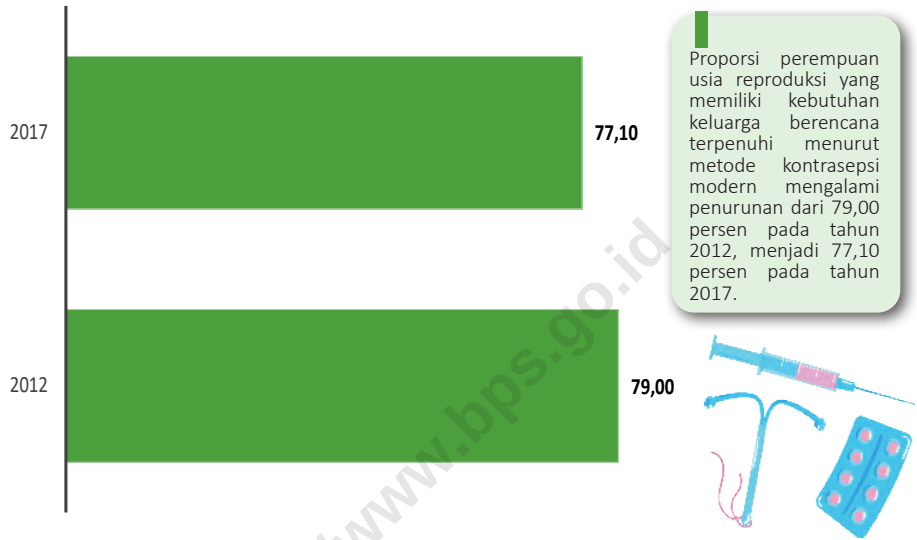
Selama 5 tahun terakhir, konsumsi alkohol terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 tercatat konsumsi alkohol sebesar 0,36 liter per kapita per tahun.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

**INDIKATOR 3.7.1*****PROPORSI PEREMPUAN USIA REPRODUKSI (15-49 TAHUN) YANG MEMILIKI KEBUTUHAN KELUARGA BERENCANA TERPENUHI MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN**

GAMBAR 3.21.

PROPORSI PEREMPUAN USIA REPRODUKSI (15-49 TAHUN) YANG MEMILIKI KEBUTUHAN KELUARGA BERENCANA TERPENUHI MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN, 2012 DAN 2017

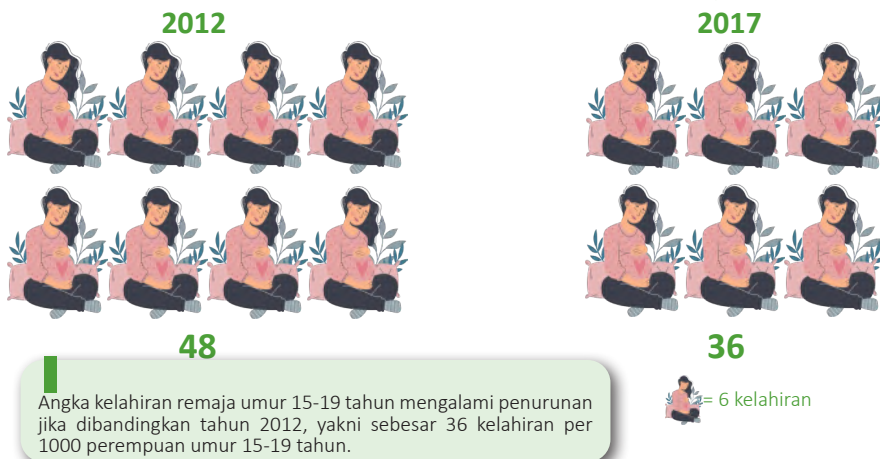


Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 3.7.2***ANGKA KELAHIRAN REMAJA (UMUR 15-19 TAHUN) PER 1000 PEREMPUAN DI KELOMPOK UMUR YANG SAMA**

GAMBAR 3.22.

ANGKA KELAHIRAN REMAJA (UMUR 15-19 TAHUN) PER 1000 PEREMPUAN DI KELOMPOK UMUR YANG SAMA, 2012 DAN 2017



Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 3.7.2.(A) TOTAL FERTILITY RATE (TFR)

GAMBAR 3.23.

TOTAL FERTILITY RATE (TFR)



2012 ➡ 2,60

2017 ➡ 2,40

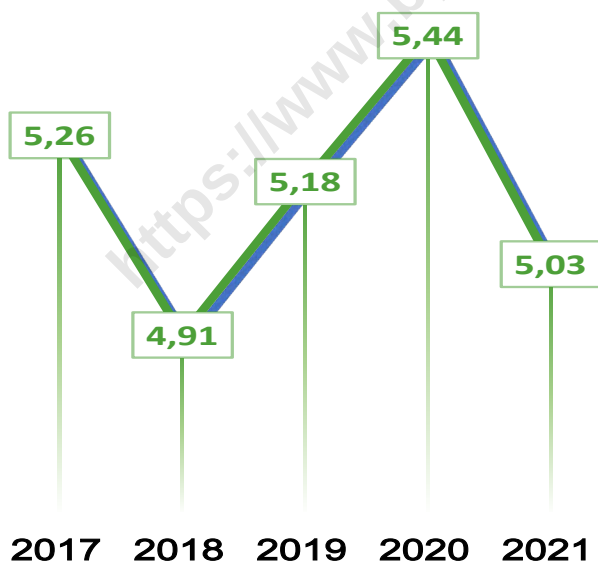
Jika dibandingkan dengan tahun 2012, TFR pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,2 poin menjadi 2,40. Artinya, pada tahun 2017 perempuan usia 15-49 tahun rata-rata mempunyai 2-3 anak pada masa subur.

Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 3.8.1.(A) UNMET NEED PELAYANAN KESEHATAN

GAMBAR 3.24.

UNMET NEED PELAYANAN KESEHATAN, 2017-2021



Unmet Need adalah indikator yang menunjukkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Pada tahun 2021, angka *unmet need* mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 5,03 persen.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

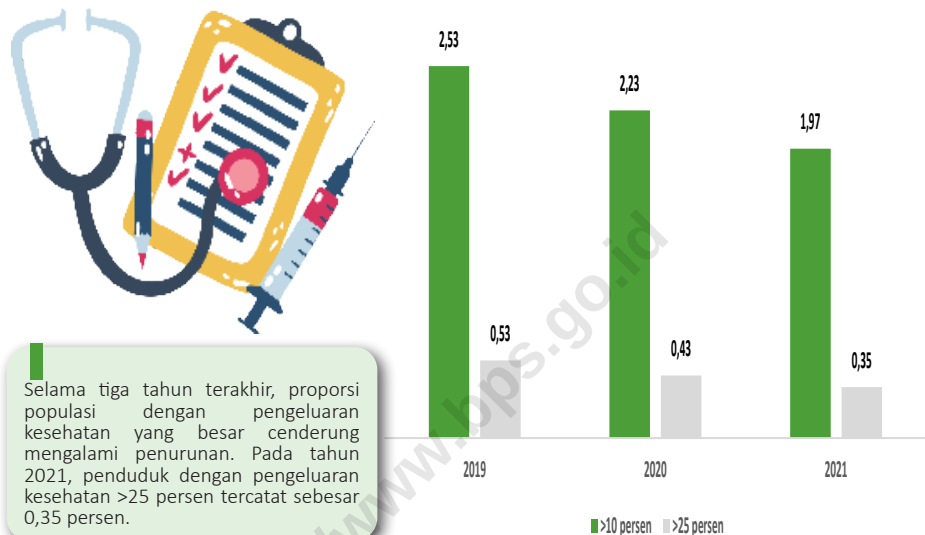


INDIKATOR 3.8.2*

PROPORSI POPULASI DENGAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA YANG BESAR UNTUK KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI TOTAL PENGELUARAN RUMAH TANGGA ATAU PENDAPATAN

GAMBAR 3.25.

PROPORSI POPULASI DENGAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA YANG BESAR UNTUK KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI TOTAL PENGELUARAN RUMAH TANGGA ATAU PENDAPATAN, 2019-2021



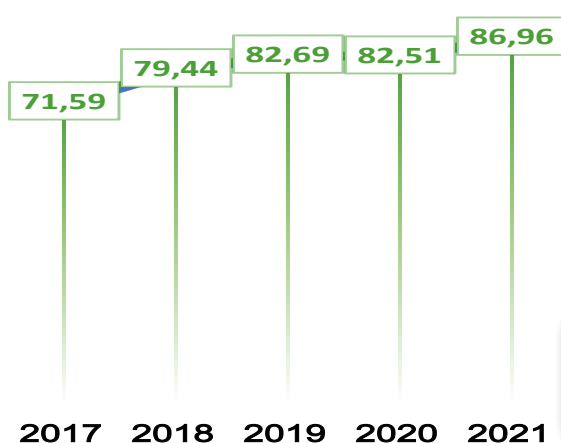
Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 3.8.2.(A)

CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

GAMBAR 3.26.

CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN), 2017-2021



Pada tahun 2021, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 86,96 persen, melebihi target RPJMN yang ditetapkan yakni 85 persen.

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan

**INDIKATOR 3.A.1*****PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR ≥15 TAHUN**

GAMBAR 3.27.

PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK UMUR ≥15 TAHUN, 2017-2021

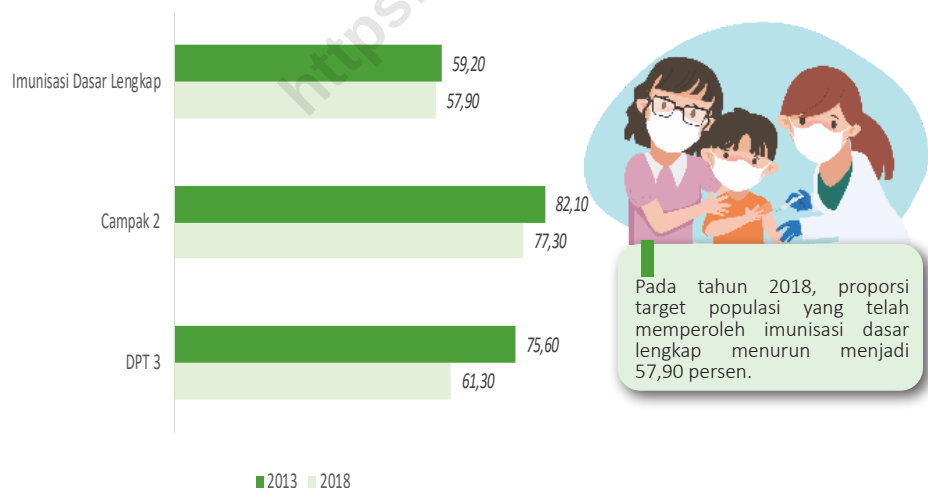


Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 3.B.1***PROPORSI TARGET POPULASI YANG TELAH MEMPEROLEH VAKSIN PROGRAM NASIONAL**

GAMBAR 3.28.

PROPORSI TARGET POPULASI YANG TELAH MEMPEROLEH VAKSIN PROGRAM NASIONAL, 2013 DAN 2018



Sumber: Riskesdas, Kementerian Kesehatan

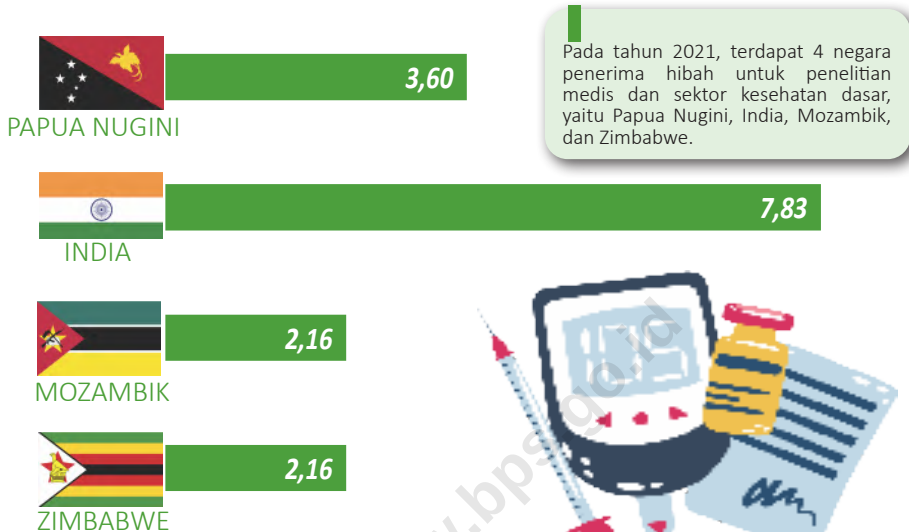


INDIKATOR 3.B.2*

TOTAL OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANT (ODA) UNTUK PENELITIAN MEDIS DAN SEKTOR KESEHATAN DASAR

GAMBAR 3.29.

TOTAL OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANT (ODA) UNTUK PENELITIAN MEDIS DAN SEKTOR KESEHATAN DASAR (MILIAR RUPIAH), 2021



Sumber: LDKPI Kementerian Keuangan

INDIKATOR 3.B.3*

PROPORSI FASILITAS KESEHATAN DENGAN PAKET OBAT ESENSIAL YANG TERSEDIA DAN TERJANGKAU SECARA BERKELANJUTAN

GAMBAR 3.30.

PROPORSI FASILITAS KESEHATAN DENGAN PAKET OBAT ESENSIAL YANG TERSEDIA DAN TERJANGKAU SECARA BERKELANJUTAN, 2017-2021



Sumber: Laporan Rutin Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

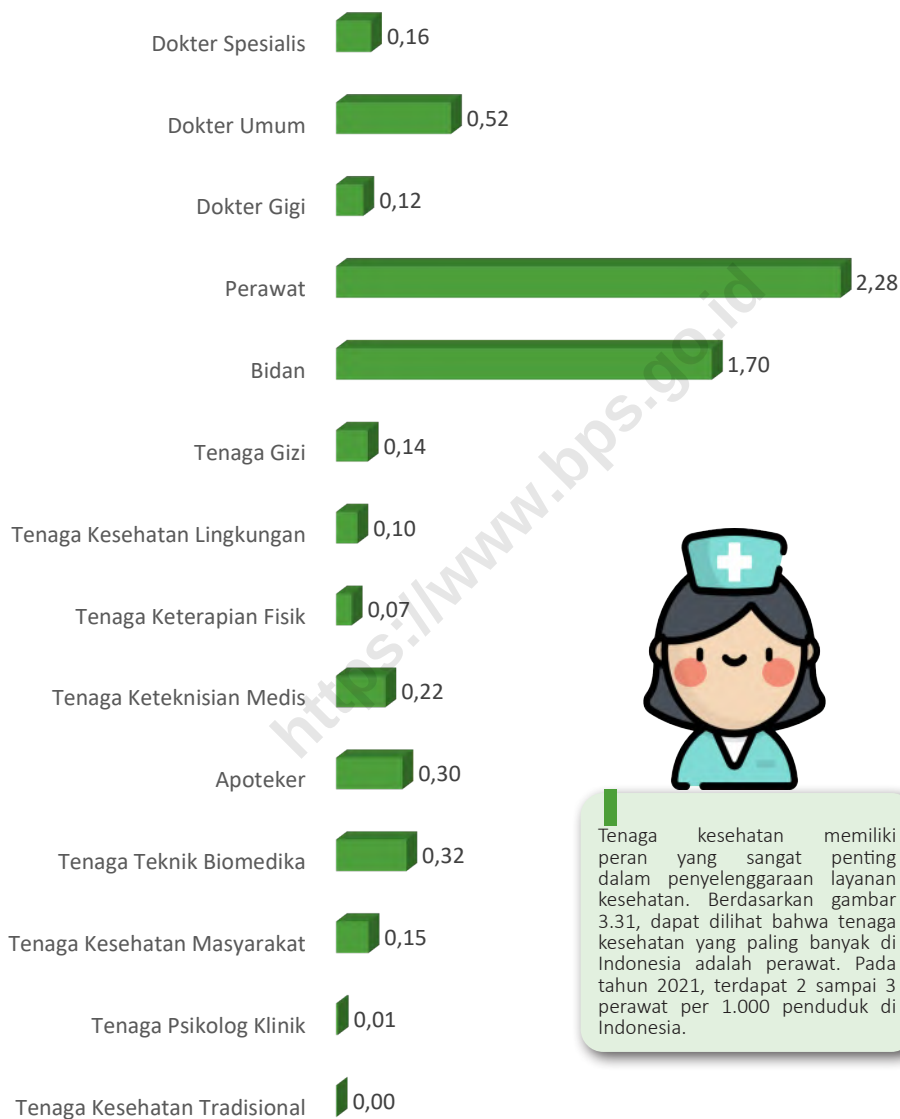


INDIKATOR 3.C.1*

KEPADATAN DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN

GAMBAR 3.31.

KEPADATAN DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN (PER 1.000 PENDUDUK), 2021



Sumber: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (KKI dan KTKI) diolah Pusrengun SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan



4

PENDIDIKAN BERKUALITAS

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua



Pendidikan menjadi suatu hal yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi tumpuan pembangunan kualitas manusia Indonesia diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaya saing tinggi. Pada bab ini, terdapat tiga belas target di tingkat global yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam mewujudkan pendidikan.

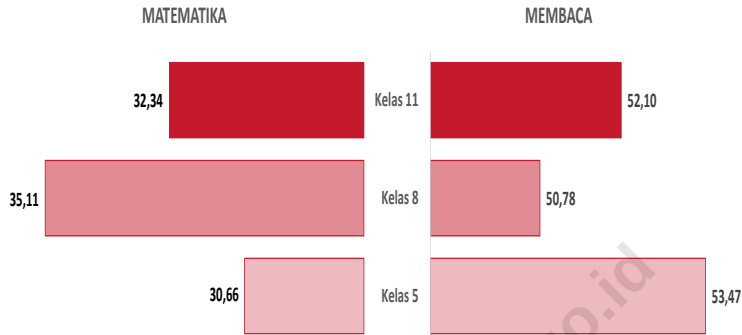
Secara umum, terdapat beberapa indikator yang semakin membaik dan mendukung tercapainya tujuan keempat SDGs. Misalnya, meningkatnya persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan juga SMA/ sederajat; menurunnya angka anak tidak sekolah jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat; Naiknya angka partisipasi kasar perguruan tinggi; meningkatnya proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi; meningkatnya rasio APK perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMA/ SMK/ sederajat; dan membaiknya persentase angka melek aksara; menurunnya persentase siswa yang mengalami perundungan.



INDIKATOR 4.1.1.(A) PROPORSI ANAK-ANAK DAN REMAJA DI: (A) KELAS 5 (B) KELAS 8, DAN (C) USIA 15 TAHUN YANG MENCAPAI SETIDAKNYA TINGKAT KEMAHIRAN MINIMUM DALAM: (I) MEMBACA, (II) MATEMATIKA

GAMBAR 4.1.

PROPORSI ANAK-ANAK DAN REMAJA DI: (A) KELAS 5 (B) KELAS 8, DAN (C) KELAS 11 YANG MENCAPAI SETIDAKNYA TINGKAT KEMAHIRAN MINIMUM DALAM: (I) MEMBACA, (II) MATEMATIKA, 2021



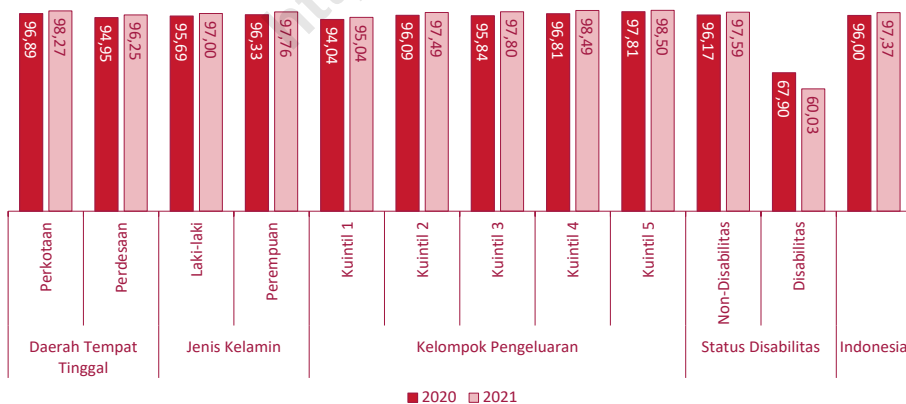
Proporsi anak-anak dan remaja masih cukup rendah dalam mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam membaca dan matematika.

Sumber: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

INDIKATOR 4.1.2* TINGKAT PENYELESAIAN PENDIDIKAN JENJANG SD/SEDERAJAT, SMP/SEDERAJAT, DAN SMA/SEDERAJAT

GAMBAR 4.2.

PERSENTASE SISWA YANG MENYELESAIKAN PENDIDIKAN JENJANG SD/ SEDERAJAT, 2020-2021



Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/ sederajat meningkat di Indonesia, baik laki-laki dan perempuan; baik di perkotaan dan di perdesaan. Persentase kenaikan terjadi di seluruh kelompok pengeluaran. Namun, pada kelompok disabilitas, persentasenya justru menurun dari tahun sebelumnya.

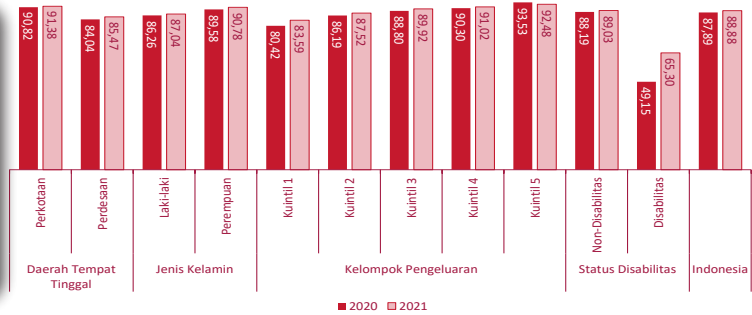
Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



GAMBAR 4.3.

PERSENTASE SISWA YANG MENYELESAIKAN PENDIDIKAN JENJANG SMP/SEDERAJAT, 2020-2021

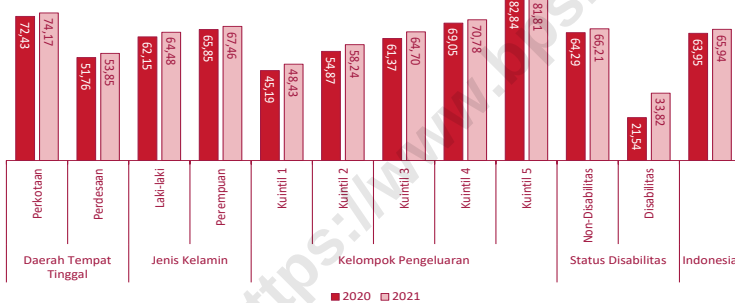
Secara umum, persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/ sederajat di Indonesia mengalami peningkatan. Menurut kelompok pengeluaran, persentase di kuintil 5 mengalami penurunan, dari 93,53 persen pada tahun 2020 menjadi 92,48 pada tahun 2021



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

GAMBAR 4.4.

PERSENTASE SISWA YANG MENYELESAIKAN PENDIDIKAN JENJANG SMA/SEDERAJAT, 2020-2021



Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat meningkat di Indonesia. Namun, jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, kelompok di kuintil 5 mengalami penurunan daripada persentase pada tahun sebelumnya.

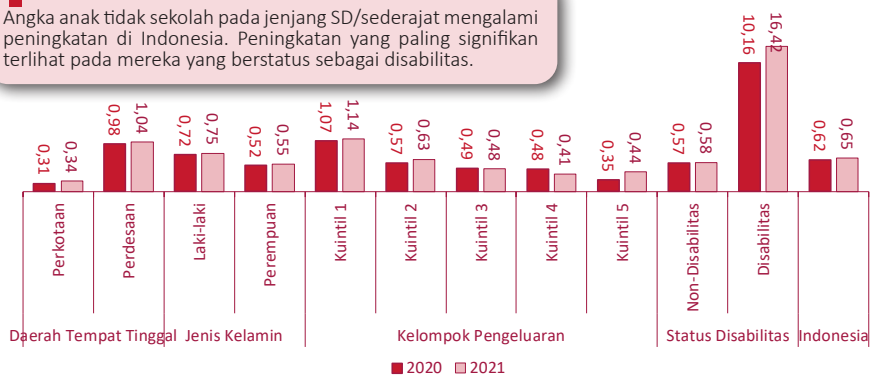
Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 4.1.2.(A) ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH JENJANG: (A) PAUD/SEDERAJAT; (B) SD/SEDERAJAT; (C) SMP/SEDERAJAT; DAN (D) SMA/SEDERAJAT

GAMBAR 4.5.

ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH JENJANG SD/SEDERAJAT, 2020-2021

Angka anak tidak sekolah pada jenjang SD/ederajat mengalami peningkatan di Indonesia. Peningkatan yang paling signifikan terlihat pada mereka yang berstatus sebagai disabilitas.

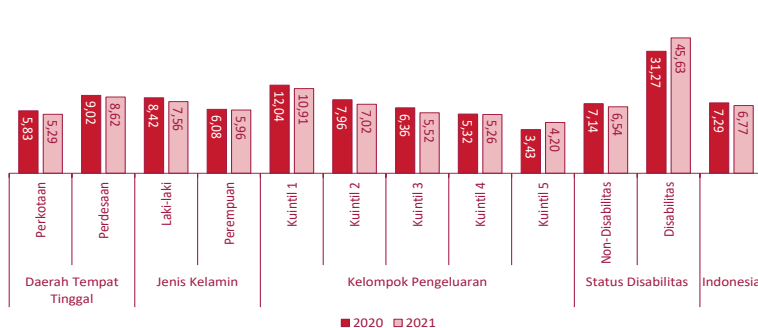


Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



GAMBAR 4.6.

ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH JENJANG SMP/SEDERAJAT, 2020-2021



Secara umum, angka anak tidak sekolah jenjang SMP/ sederajat mengalami penurunan dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun, pada kelompok kuintil 5 dan kelompok disabilitas, angkanya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

GAMBAR 4.7.

ANGKA ANAK TIDAK SEKOLAH JENJANG SMA/SEDERAJAT, 2020-2021

Pada jenjang SMA/ sederajat, angka anak tidak sekolah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali pada kelompok kuintil 5.



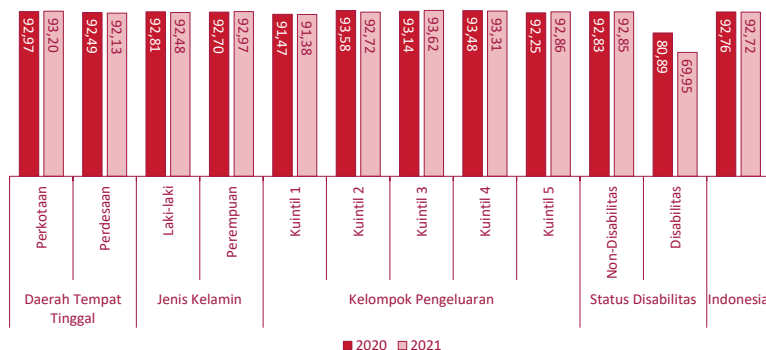
Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 4.2.2*

TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMBELAJARAN YANG TERORGANISIR (SATU TAHUN SEBELUM USIA SEKOLAH DASAR), MENURUT JENIS KELAMIN

GAMBAR 4.8.

TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMBELAJARAN YANG TERORGANISIR (SATU TAHUN SEBELUM USIA SEKOLAH DASAR) (PERSEN), 2020-2021



Persentase partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia SD) tahun 2021 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

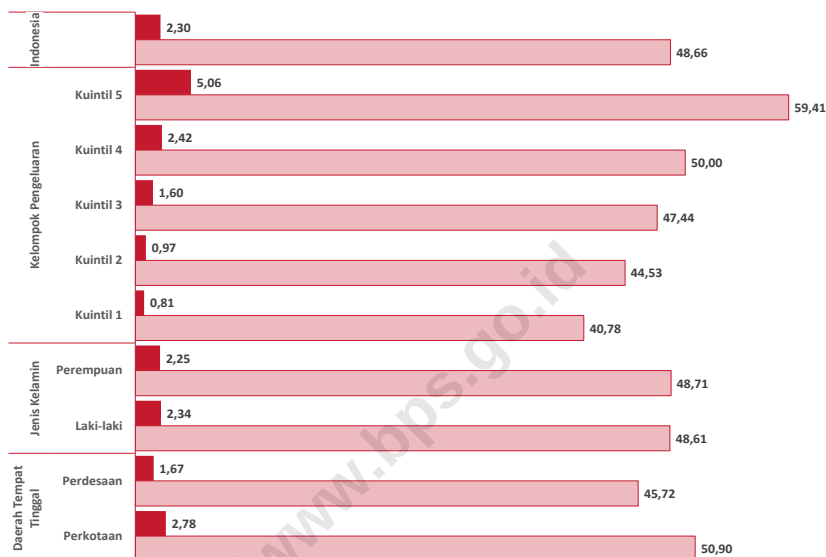


INDIKATOR 4.3.1*

TINGKAT PARTISIPASI REMAJA DAN DEWASA DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL DALAM 12 BULAN TERAKHIR, MENURUT JENIS KELAMIN

GAMBAR 4.9.

TINGKAT PARTISIPASI REMAJA DAN DEWASA DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL DALAM 12 BULAN TERAKHIR (PERSEN), 2018



Tingkat partisipasi remaja dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk dewasa. Kuintil 5 memiliki tingkat partisipasi yang paling tinggi, artinya semakin tinggi tingkat ekonomi rumah tangga, semakin besar kemungkinan mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Sumber: Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 4.3.1.(A)

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI (PT)

GAMBAR 4.10.

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI (PT), 2020 DAN 2021

Di Indonesia, angka partisipasi kasar perguruan tinggi 2021 meningkat jika dibandingkan dengan 2020. Kelompok Kuintil 5 dengan kondisi ekonomi paling baik, memiliki APK yang paling tinggi di antara kelompok pengeluaran lainnya.

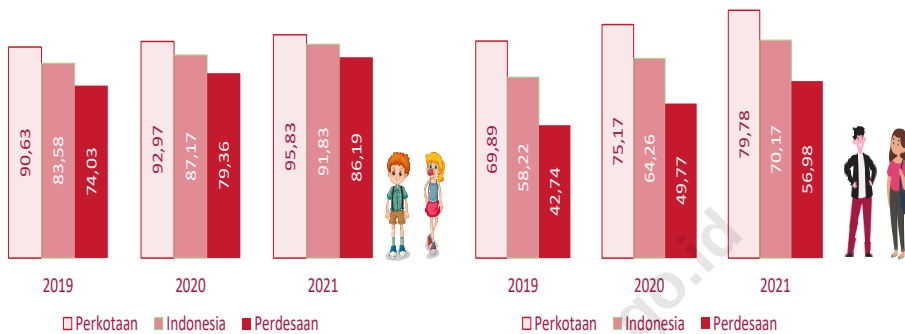


Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 4.4.1.(A) PROPORSI REMAJA (USIA 15-24 TAHUN) DAN DEWASA (USIA 15-59 TAHUN) DENGAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

GAMBAR 4.11. PROPORSI REMAJA (USIA 15-24 TAHUN) DAN DEWASA (USIA 15-59 TAHUN) DENGAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK), 2019-2021

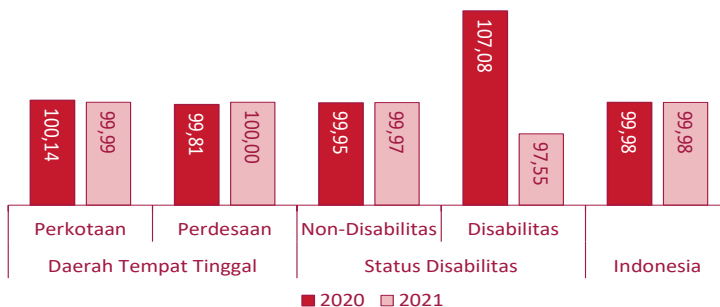


Sejak 2019, proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) jauh lebih tinggi daripada penduduk dewasa (15-59 tahun). Ditinjau dari daerah tempat tinggal, proporsi di perkotaan jauh lebih tinggi daripada di perdesaan. Sehingga, remaja yang tinggal di perkotaan sangat berkemungkinan memiliki keterampilan TIK.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 4.5.1.* RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PADA TINGKAT SD/ SEDERAJAT, DAN (II) RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PADA TINGKAT SMP/SEDERAJAT, SMA/SMK/SEDERAJAT, DAN PERGURUAN TINGGI UNTUK (A) PEREMPUAN/LAKI-LAKI, (B) PERDESAAN/ PERKOTAAN, (C) KUINTIL TERBAWAH/TERATAS, (D) DISABILITAS/ TANPA DISABILITAS

GAMBAR 4.12. RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI PADA TINGKAT SD/SEDERAJAT, 2020-2021

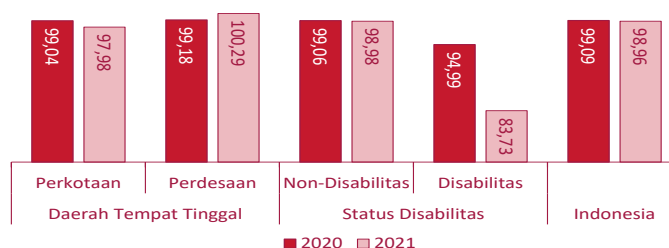


Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada tingkat SD/ sederajat relatif stagnan. Hanya saja, terjadi penurunan rasio yang cukup signifikan pada kelompok penyandang disabilitas.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



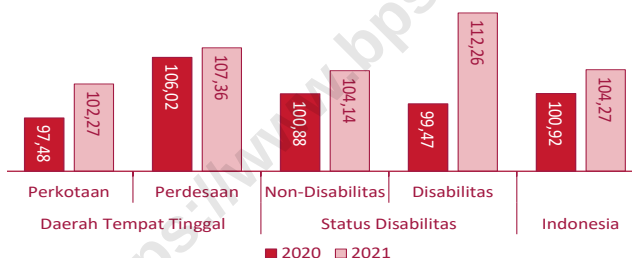
GAMBAR 4.13. RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PEREMPUAN/LAKI-LAKI PADA TINGKAT SMP/SEDERAJAT, 2020-2021



Rasio APK perempuan terhadap laki-laki pada tingkat SMP/ sederajat mengalami penurunan, terutama jika dilihat menurut status disabilitas. Di kalangan penyandang disabilitas, rasio APK laki-laki relatif lebih tinggi daripada APK perempuan.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

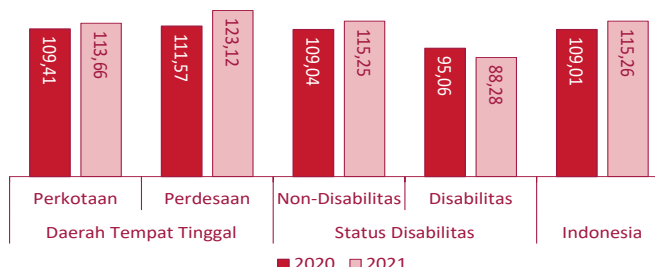
GAMBAR 4.14. RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PEREMPUAN/LAKI-LAKI PADA TINGKAT SMA/SMK/SEDERAJAT, 2020-2021



Ditinjau dari segala sisi, rasio APK perempuan terhadap laki-laki pada tingkat SMA/SMK/ sederajat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

GAMBAR 4.15. RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PEREMPUAN/LAKI-LAKI PADA TINGKAT PERGURUAN TINGGI, 2020-2021



Meskipun rasio APK perempuan terhadap laki-laki pada tingkat perguruan tinggi sudah cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, masih terdapat pekerjaan rumah untuk meningkatkan APK perempuan/laki-laki pada tingkat perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas.

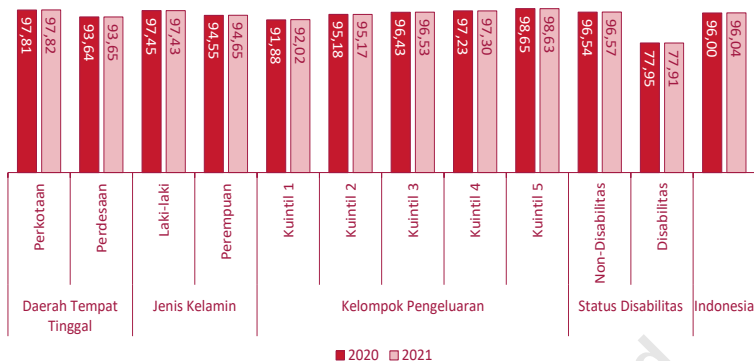
Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 4.6.1.(A) PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR ≥15 TAHUN

GAMBAR 4.16.

PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR ≥15 TAHUN, 2020-2021



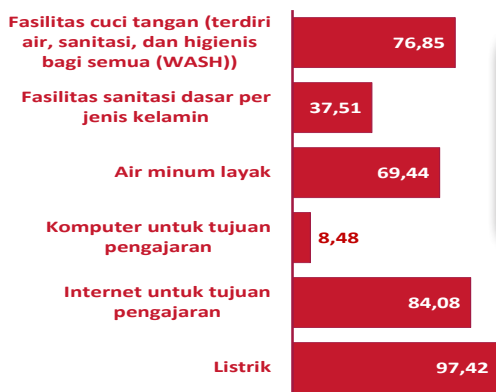
Persentase angka melek aksara mengalami perbaikan dari periode sebelumnya. Perhatian serius ditujukan kepada kelompok disabilitas dimana secara relatif, persentase angka melek aksaranya cukup tertinggal.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 4.A.1* PROPORSI SEKOLAH DENGAN AKSES TERHADAP: (A) LISTRIK (B) INTERNET UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, (C) KOMPUTER UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, (D) AIR MINUM LAYAK, (E) FASILITAS SANITASI DASAR PER JENIS KELAMIN, (F) FASILITAS CUCI TANGAN (TERDIRI AIR, SANITASI, DAN HIGIENIS BAGI SEMUA (WASH))

GAMBAR 4.17.

PROPORSI SEKOLAH SD DENGAN AKSES TERHADAP LISTRIK, INTERNET UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, KOMPUTER UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, AIR MINUM LAYAK, FASILITAS SANITASI DASAR PER JENIS KELAMIN, DAN FASILITAS CUCI TANGAN (TERDIRI AIR, SANITASI, DAN HIGIENIS BAGI SEMUA (WASH)), 2021

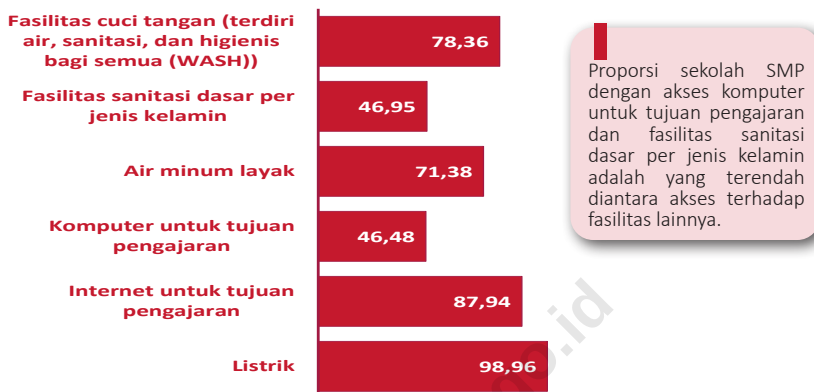


Proporsi sekolah SD dengan akses terhadap listrik sudah cukup tinggi, namun untuk proporsi sekolah SD dengan akses terhadap komputer untuk tujuan pengajaran masih sangat rendah.

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

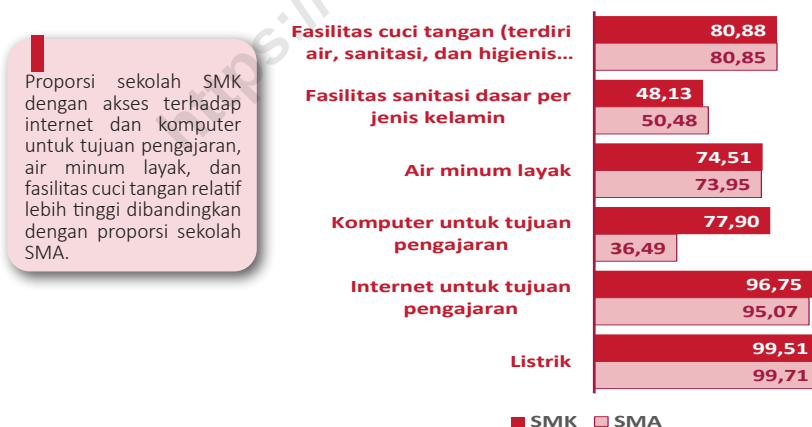


GAMBAR 4.18. PROPORSI SEKOLAH SMP DENGAN AKSES TERHADAP LISTRIK, INTERNET UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, KOMPUTER UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, AIR MINUM LAYAK, FASILITAS SANITASI DASAR PER JENIS KELAMIN, DAN FASILITAS CUCI TANGAN (TERDIRI AIR, SANITASI, DAN HIGIENIS BAGI SEMUA (WASH)), 2021



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

GAMBAR 4.19. PROPORSI SEKOLAH SMA DAN SMK DENGAN AKSES TERHADAP LISTRIK, INTERNET UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, KOMPUTER UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, AIR MINUM LAYAK, FASILITAS SANITASI DASAR PER JENIS KELAMIN, DAN FASILITAS CUCI TANGAN (TERDIRI AIR, SANITASI, DAN HIGIENIS BAGI SEMUA (WASH)), 2021



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



GAMBAR 4.20.

PROPORSI SEKOLAH SLB DENGAN AKSES TERHADAP LISTRIK, INTERNET UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, KOMPUTER UNTUK TUJUAN PENGAJARAN, AIR MINUM LAYAK, FASILITAS SANITASI DASAR PER JENIS KELAMIN, DAN FASILITAS CUCI TANGAN (TERDIRI AIR, SANITASI, DAN HIGIENIS BAGI SEMUA (WASH)), 2021

Aksesibilitas sekolah SLB terhadap komputer untuk tujuan pengajaran dan fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin sangat penting untuk diperhatikan karena proporsinya di Indonesia pada 2021 masih sangat rendah.

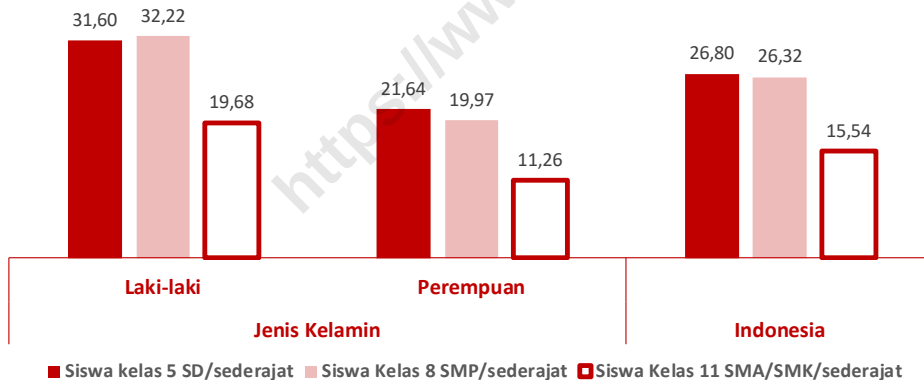


Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

INDIKATOR 4.A.1.(A) PERSENTASE SISWA YANG MENGALAMI PERUNDUNGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

GAMBAR 4.21.

PERSENTASE SISWA YANG MENGALAMI PERUNDUNGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR, 2021



Persentase siswa laki-laki kelas 8 SMP/ sederajat dan kelas 11 SMA/ SMK/ sederajat yang mengalami perundungan lebih tinggi daripada siswa perempuan. Di sisi lain, persentase siswa kelas 11 SMA/ SMK/ sederajat yang mengalami perundungan lebih rendah daripada siswa kelas 8 SMP/ sederajat.

Sumber: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Lingkungan Belajar 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

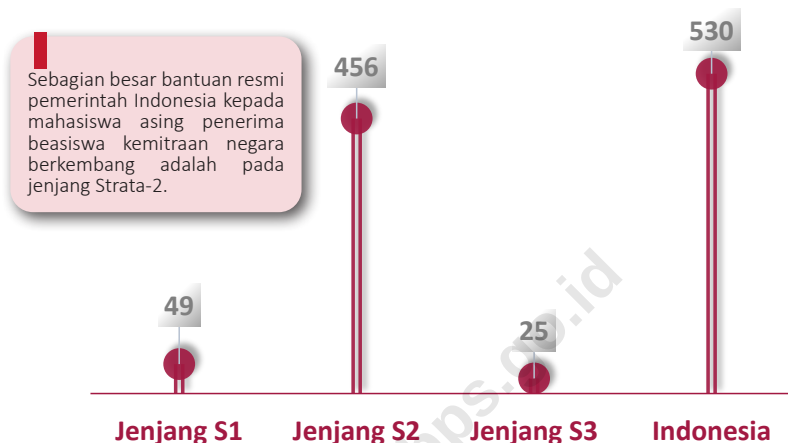


INDIKATOR 4.B.1*

JUMLAH BANTUAN RESMI PEMERINTAH INDONESIA KEPADA MAHASISWA ASING PENERIMA BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG

GAMBAR 4.22.

JUMLAH BANTUAN RESMI PEMERINTAH INDONESIA KEPADA MAHASISWA ASING PENERIMA BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG, 2021



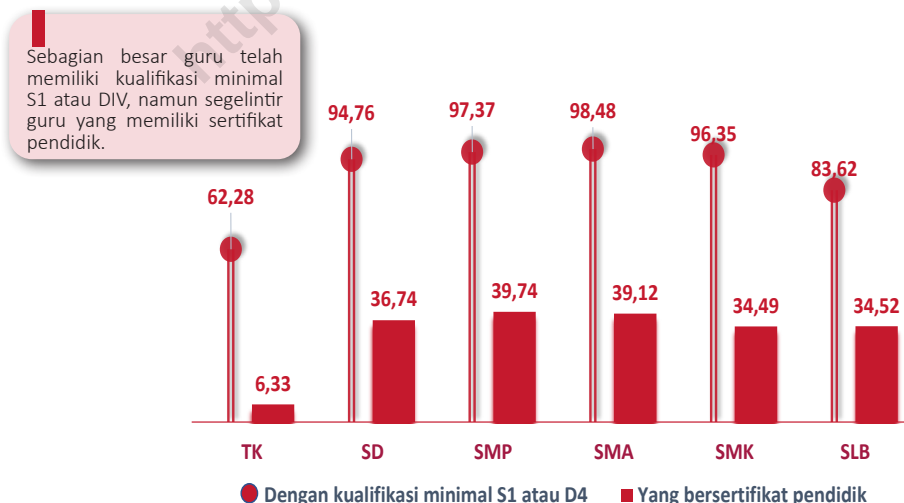
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

INDIKATOR 4.C.1*

PERSENTASE GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

GAMBAR 4.23.

PERSENTASE GURU DENGAN KUALIFIKASI MINIMAL S1 ATAU D4 DAN GURU YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK, 2021



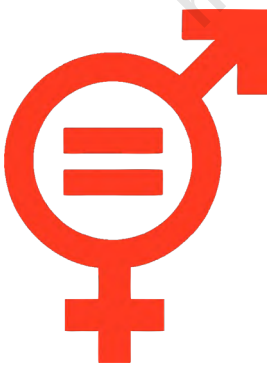
Sumber: Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



5

KESETARAAN GENDER

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan



Kesetaraan gender mendorong kemampuan negara untuk berkembang. Dalam upaya memberdayakan masyarakat, mempromosikan kesetaraan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

Secara umum, perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tujuan kelima di Indonesia sudah cukup baik. Misalnya, Indonesia sudah 100 persen mempunyai dasar hukum mengenai kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi di setiap bidang, dan sekitar 91,67 persen kerangka hukum pada hal kekerasan terhadap perempuan; serta penurunan proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau hidup bersama pertamanya sebelum umur 18 tahun.

Meskipun begitu, tidak sedikit pekerjaan rumah terkait kesetaraan gender yang harus segera diatasi. Di antaranya, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun kelompok disabilitas pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tajam; Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial relatif menurun; serta masih relatif rendahnya perempuan yang menguasai/memiliki telepon genggam dibandingkan laki-laki.



INDIKATOR 5.1.1*

KETERSEDIAAN KERANGKA HUKUM YANG MENDORONG, MENETAPKAN DAN MEMANTAU KESETARAAN GENDER DAN PENGHAPUSAN DISKRIMINASI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

GAMBAR 51.

PERSENTASE KETERSEDIAAN KERANGKA HUKUM YANG MENDORONG, MENETAPKAN DAN MEMANTAU KESETARAAN GENDER DAN PENGHAPUSAN DISKRIMINASI BERDASARKAN JENIS KELAMIN, 2020

BIDANG HUKUM



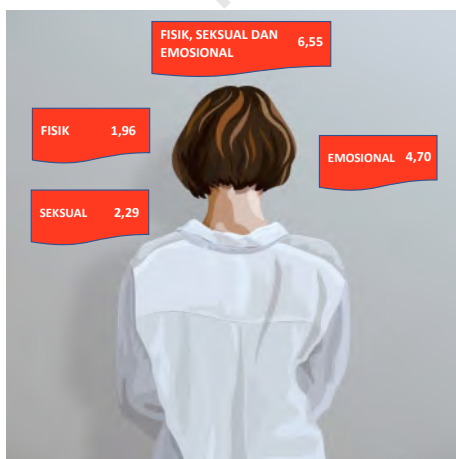
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR 5.2.1*

PROPORSI PEREMPUAN DEWASA DAN ANAK PEREMPUAN (UMUR 15-64 TAHUN) MENGALAMI KEKERASAN (FISIK, SEKSUAL, ATAU EMOSIONAL) OLEH PASANGAN ATAU MANTAN PASANGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

GAMBAR 52.

PREVALENSI KEKERASAN (FISIK, SEKSUAL, EMOSIONAL) TERHADAP PEREMPUAN (UMUR 15-64 TAHUN) YANG PERNAH/SEDANG MENIKAH OLEH PASANGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR, 2021



Selama 2021, terdapat sekitar 6,55 persen perempuan berusia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik (1,96 persen), seksual (2,29 persen), dan emosional (4,70 persen).

Sumber: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 5.2.2*

PROPORSI PEREMPUAN DEWASA DAN ANAK PEREMPUAN (UMUR 15-64 TAHUN) MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL OLEH ORANG LAIN SELAIN PASANGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

GAMBAR 5.3.

PROPORSI PEREMPUAN DEWASA DAN ANAK PEREMPUAN (UMUR 15-64 TAHUN) MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL OLEH ORANG LAIN SELAIN PASANGAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR, 2021

Selama tahun 2021, masih saja terjadi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan yang dilakukan oleh orang lain selain pasangan. Sebagian besar dialami oleh perempuan dewasa/anak yang belum kawin/belum pernah punya pasangan.

16,57 Belum kawin/belum pernah punya pasangan

3,04 Pernah/sedang punya pasangan

5,23 Total



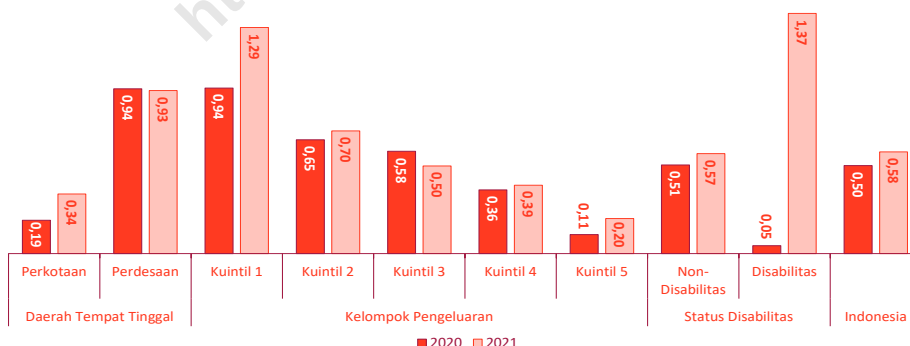
Sumber: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 5.3.1*

PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20-24 TAHUN YANG USIA KAWIN PERTAMA ATAU USIA HIDUP BERSAMA PERTAMA SEBELUM UMUR 15 TAHUN DAN SEBELUM UMUR 18 TAHUN

GAMBAR 5.4.

PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20-24 TAHUN YANG USIA KAWIN PERTAMA ATAU USIA HIDUP BERSAMA PERTAMA SEBELUM UMUR 15 TAHUN, 2020-2021



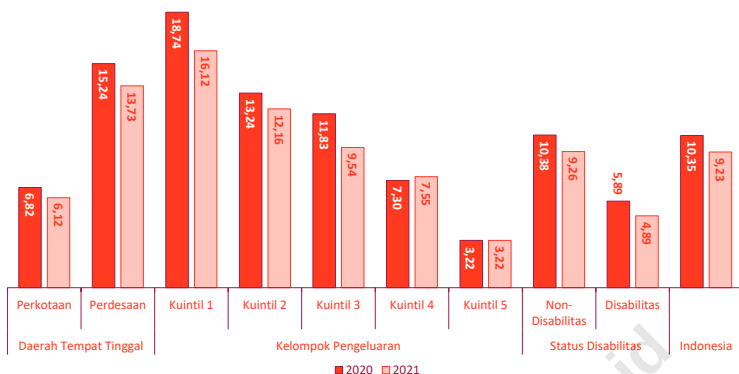
Masih terdapat perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertamanya sebelum umur 15 tahun. Menurut status disabilitas, proporsi kelompok disabilitas pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



GAMBAR 5.5.

PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20-24 TAHUN YANG USIA KAWIN PERTAMA ATAU USIA HIDUP BERSAMA PERTAMA SEBELUM UMUR 18 TAHUN, 2020-2021



Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau hidup bersama pertamanya sebelum umur 18 tahun mengalami penurunan.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 5.3.2*

PERSENTASE ANAK PEREMPUAN DAN WANITA BERUSIA 15-49 TAHUN YANG TELAH MENJALANI FGM ATAU SUNAT PEREMPUAN MENURUT KELOMPOK UMUR

GAMBAR 5.6.

PROPORSI ANAK PEREMPUAN DARI PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN YANG TELAH MENJALANI SUNAT PEREMPUAN MENURUT KRITERIA WHO, 2021



Persentase anak perempuan dan wanita berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM atau sunat perempuan di perdesaan relatif lebih tinggi daripada di perkotaan.

Sumber: Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik

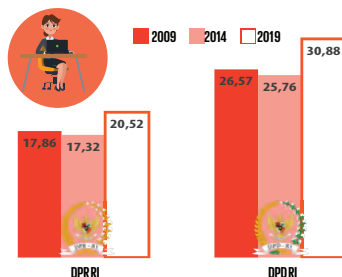


INDIKATOR 5.5.1*

PROPORSI KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI (A) PARLEMEN TINGKAT PUSAT DAN (B) PEMERINTAH DAERAH

GAMBAR 5.7.

PROPORSI KURSI YANG DIPEGANG OLEH PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD), 2009, 2014 DAN 2019



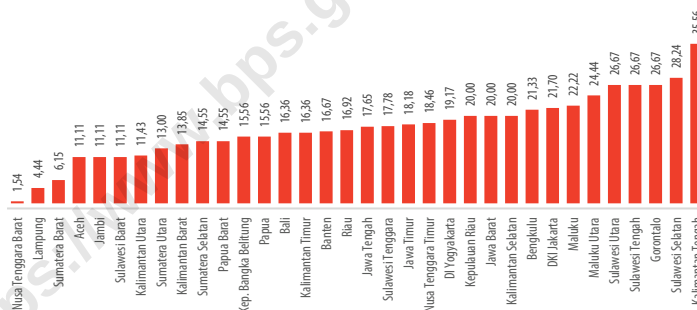
Perwakilan perempuan di kursi parlemen mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kesetaraan gender dan semakin diakuinya peran perempuan dalam dunia politik.

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

GAMBAR 5.8.

PROPORSI KURSI YANG DIPEGANG OLEH PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) MENURUT PROVINSI, 2019

Perwakilan perempuan di lembaga legislatif di tingkat daerah menunjukkan sebaran yang cukup bervariasi dengan capaian terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



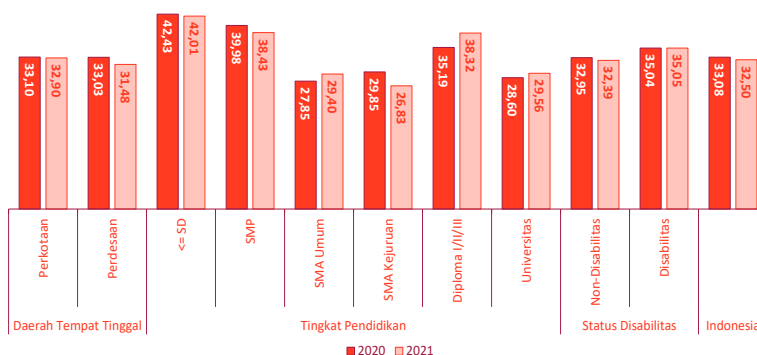
Sumber: Komisi Pemilihan Umum

INDIKATOR 5.5.2*

PROPORSI PEREMPUAN YANG BERADA DI POSISI MANAGERIAL

GAMBAR 5.9.

PROPORSI PEREMPUAN YANG BERADA DI POSISI MANAGERIAL, 2020-2021



Secara umum, proporsi perempuan yang berada di posisi managerial relatif menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

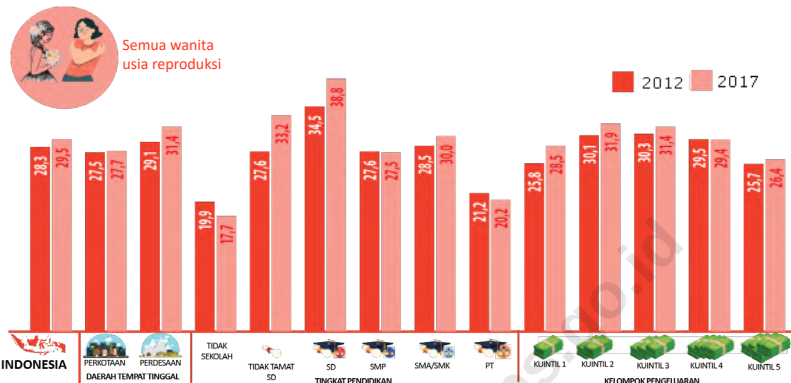


INDIKATOR 5.6.1*

PROPORSI PEREMPUAN USIA REPRODUKSI 15-49 TAHUN YANG MEMBUAT KEPUTUSAN SENDIRI TERKAIT HUBUNGAN SEKSUAL, PENGGUNAAN KONTRASEPSI, DAN LAYANAN KESEHATAN

GAMBAR 5.10.

PROPORSI SEMUA PEREMPUAN USIA REPRODUKSI 15-49 TAHUN YANG MEMBUAT KEPUTUSAN SENDIRI TERKAIT HUBUNGAN SEKSUAL, PENGGUNAAN KONTRASEPSI, DAN LAYANAN KESEHATAN, 2012 DAN 2017

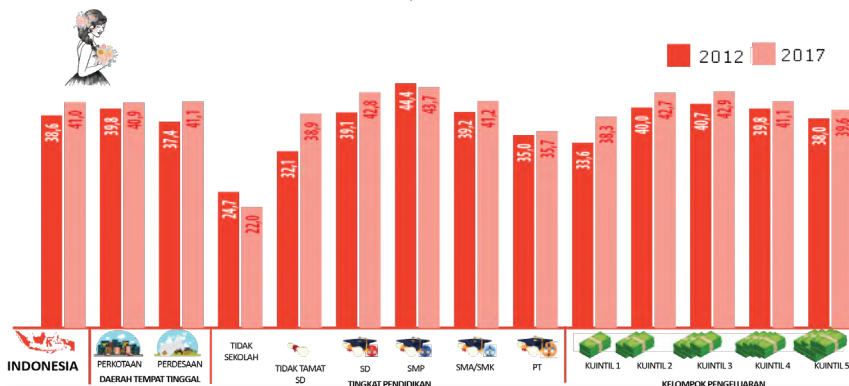


Semakin banyak perempuan yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 28,3 persen dan naik menjadi 29,5 persen di tahun 2017.

Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan Pusat Statistik

GAMBAR 5.11.

PROPORSI PEREMPUAN YANG SUDAH MENIKAH DARI USIA REPRODUKSI 15-49 TAHUN YANG MEMBUAT KEPUTUSAN SENDIRI TERKAIT HUBUNGAN SEKSUAL, PENGGUNAAN KONTRASEPSI, DAN LAYANAN KESEHATAN, 2012 DAN 2017



Perempuan berumur 15-49 tahun yang sudah menikah semakin banyak yang mengambil keputusan sendiri terkait kesehatan reproduksinya. Perempuan dengan pendidikan SD dan SMP cenderung lebih banyak.

Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan Pusat Statistik

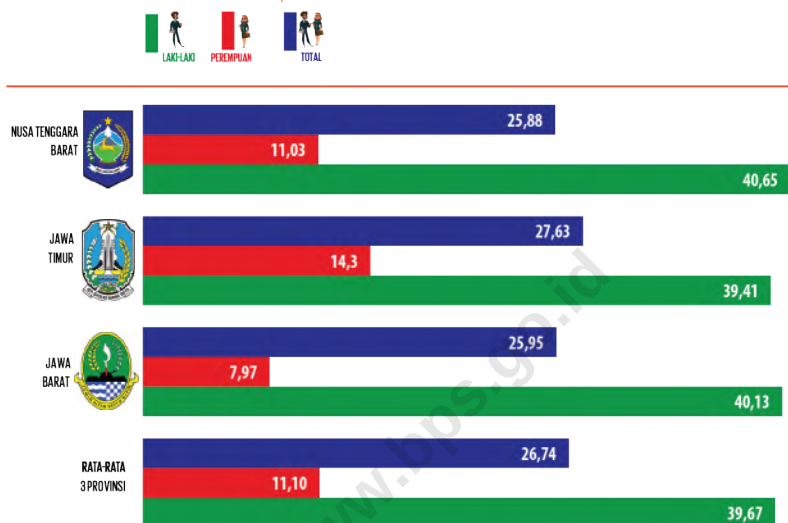


INDIKATOR 5.A.1*

(1) PROPORSI PENDUDUK PERTANIAN YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH PERTANIAN; (2) PROPORSI PEREMPUAN PENDUDUK PERTANIAN SEBAGAI PEMILIK ATAU YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH PERTANIAN, MENURUT JENIS KEPEMILIKAN.

GAMBAR 5.12.

PROPORSI PENDUDUK PERTANIAN YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH PERTANIAN, 2020



Penduduk pertanian laki-laki 3-4 kali lebih banyak yang memiliki hak atas tanah pertanian dibandingkan perempuan. Bahkan perbandingannya mencapai lebih dari 5 kali di Provinsi Jawa Barat.

Sumber: Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2020, Badan Pusat Statistik

GAMBAR 5.13.

PROPORSI PEREMPUAN PENDUDUK PERTANIAN SEBAGAI PEMILIK ATAU YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH PERTANIAN, 2020



Sekitar 2 dari 10 penduduk perempuan menjadi pemilik atau memiliki hak atas tanah pertanian. Tingkat kepemilikan atau memiliki hak atas tanah pertanian pada penduduk perempuan terbesar berada di Provinsi Jawa Timur sekitar 24,28 persen.

Sumber: Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 2020, Badan Pusat Statistik

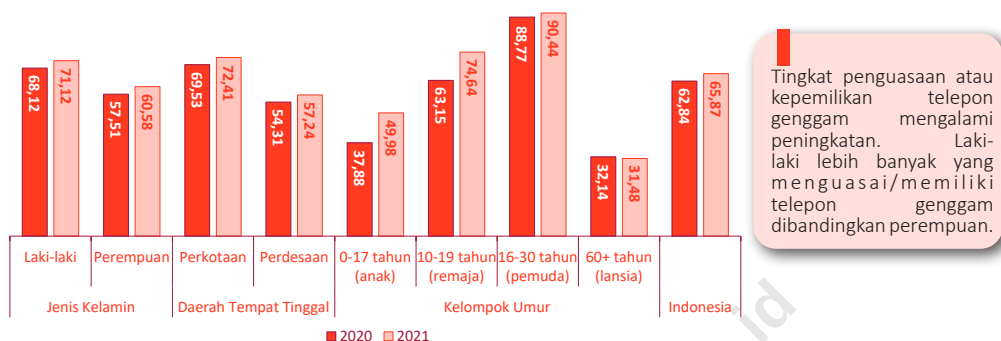


INDIKATOR 5.B.1*

PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GENGAM

GAMBAR 5.14.

PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GENGAM, 2020-2021



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 5.C.1*

KETERSEDIAAN SISTEM UNTUK MELACAK DAN MEMBUAT ALOKASI UMUM UNTUK KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

TABEL 5.1.

KETERSEDIAAN SISTEM UNTUK MELACAK DAN MEMBUAT ALOKASI UMUM UNTUK KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Disagregasi	Jawaban - Ya	Memenuhi Persyaratan
Kriteria		
Kriteria 1: Manakah dari aspek-aspek berikut dari pengeluaran publik yang tercermin dalam program pemerintah Anda dan alokasi sumber dayanya? (pada tahun fiskal terakhir)	2 dari 3 pertanyaan	Ya
Kriteria 2: Sejauh mana sistem Manajemen Keuangan Publik Anda mempromosikan tujuan yang berhubungan dengan gender atau responsif gender? (pada tahun fiskal terakhir)	4 dari 7 pertanyaan	Ya
Kriteria 3: Apakah alokasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dipublikasikan? (pada tahun fiskal terakhir yang selesai)	0 dari 3 pertanyaan	Tidak
Klasifikasi Ringkasan	Kasus E (Persyaratan Pendekatan)	

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Indonesia telah memenuhi persyaratan dalam hal sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu dalam program pemerintah dan alokasi sumber daya serta sistem keuangan yang responsif gender.



6

AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Target yang ingin dicapai pada tahun 2030 ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak, mencakup akses merata pada air minum aman dan terjangkau, sanitasi dan kebersihan yang memadai, serta akses terhadap udara yang berkualitas.



Ketersediaan air yang aman, mudah dijangkau dan berkelanjutan serta sanitasi yang bersih untuk semua merupakan tujuan yang harus dicapai pada tahun 2030. Dengan ketersediaan air dan sanitasi yang baik akan mendukung produktivitas dari masyarakat yang pada akhirnya secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi secara positif. Pada tahun 2021, umumnya Indonesia mengalami peningkatan pada tujuan ini. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak mencapai 43,81 persen dan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak mencapai 80,29 persen. Fokus utama ada pada ketersediaan air bersih dan sanitasi layak yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar ini dapat berakibat fatal bagi kehidupan.

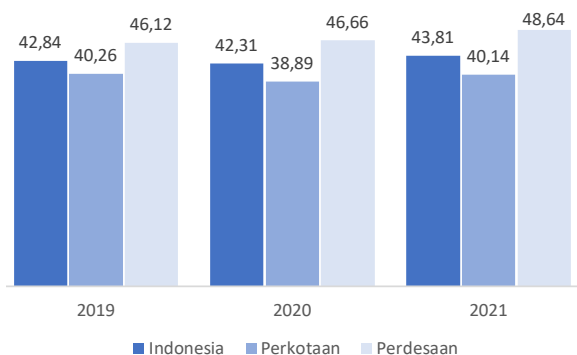


INDIKATOR 6.1.1*

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK

GAMBAR 6.1.

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LAYANAN AIR MINUM YANG DIKELOLA SECARA AMAN BERDASARKAN WILAYAH, 2019-2021



Persentase rumah tangga di perdesaan lebih banyak yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak daripada rumah tangga di daerah perkotaan pada tahun 2021.



Catatan: Komponen penyusun indikator air minum yang dikelola secara aman (air layak, terletak di dalam kawasan rumah, tersedia setiap dibutuhkan (tidak kekurangan air dalam 24 jam), dan memenuhi syarat kualitas air minum (tidak keruh, berwarna, berbusa, dll)).

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

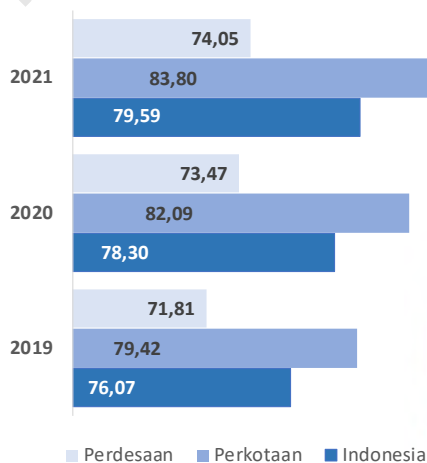
INDIKATOR 6.2.1*

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN LAYANAN SANITASI YANG DIKELOLA SECARA AMAN, TERMASUK FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN AIR DAN SABUN

GAMBAR 6.2.

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI FASILITAS CUCI TANGAN DENGAN SABUN DAN AIR BERDASARKAN WILAYAH, 2019-2021

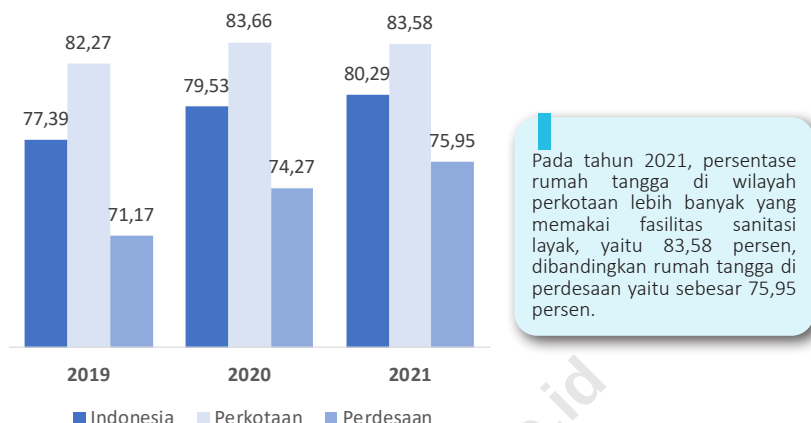
Pada tahun 2021, persentase rumah tangga di daerah Perdesaan yang memiliki fasilitas cuci tangan sebesar 74,05 persen lebih kecil jika dibandingkan dengan rumah tangga yang berada di daerah perkotaan sebesar 83,80 persen.



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



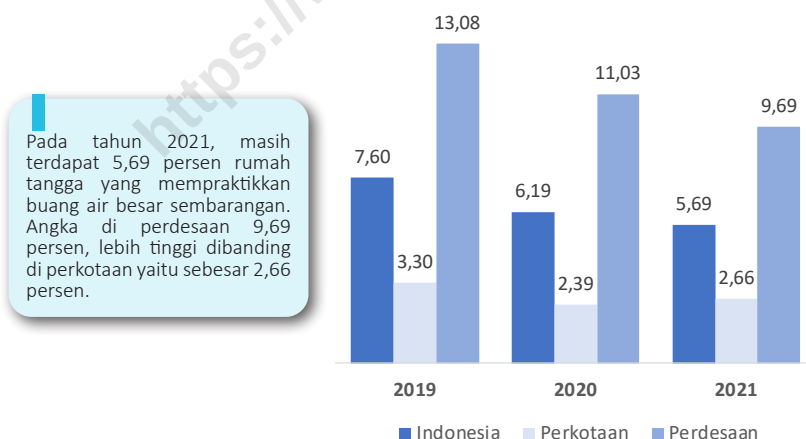
GAMBAR 63. PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK (PERSEN), 2019-2021



Catatan: Rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

GAMBAR 64. PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MASIH MEMPRAKTIKKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI TEMPAT TERBUKA, 2019-2021



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



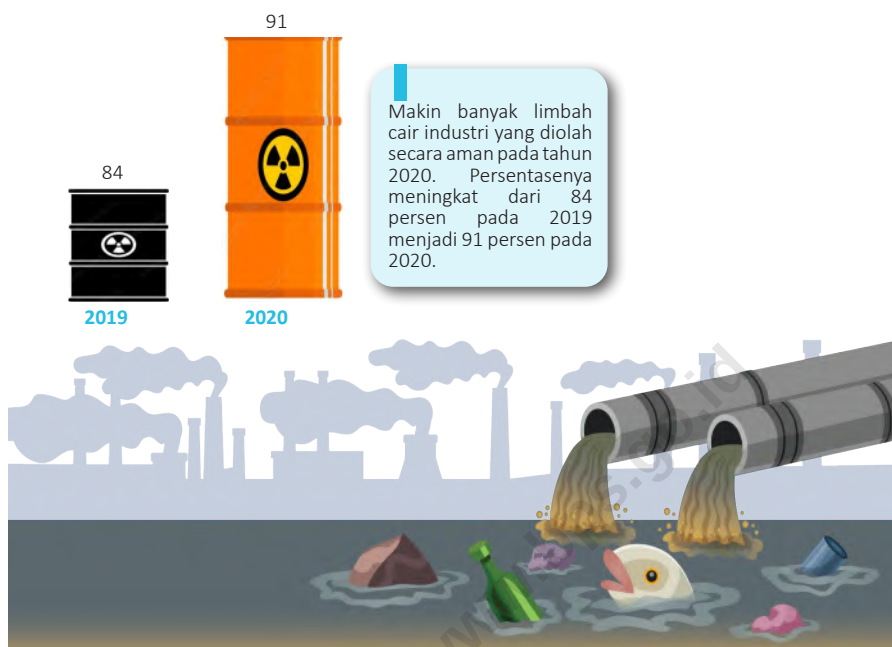


INDIKATOR 6.3.1.(A)

PERSENTASE LIMBAH CAIR INDUSTRI YANG DIOLAH SECARA AMAN

GAMBAR 6.5.

PERSENTASE LIMBAH CAIR INDUSTRI YANG DIOLAH SECARA AMAN, 2019-2020



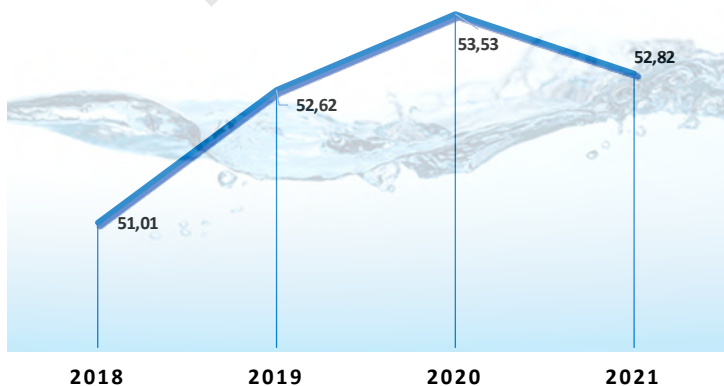
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR 6.3.2.(A)

KUALITAS AIR SUNGAI SEBAGAI SUMBER AIR BAKU

GAMBAR 6.6.

CAPAIAN INDEKS KUALITAS AIR, 2018-2021



Indeks Kualitas Air pada tahun 2018-2020 menunjukkan nilai yang terus membaik, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 52,82 dari tahun sebelumnya sebesar 53,53.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

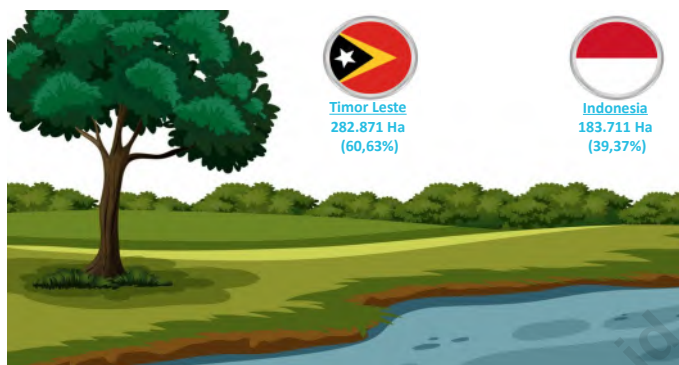


INDIKATOR 6.5.2*

PROPORSI WILAYAH CEKUNGAN LINTAS BATAS DENGAN PENGATURAN KERJA SAMA SUMBER DAYA AIR YANG OPERASIONAL

GAMBAR 6.7.

PROPORSI WILAYAH CEKUNGAN LINTAS BATAS DENGAN PENGATURAN KERJA SAMA SUMBER DAYA AIR YANG OPERASIONAL, 2019



Total wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional antara Indonesia dan Timor Leste seluas 466.582 Ha. Proporsi yang berada di Indonesia sebesar 39,37 persen lebih sedikit daripada yang berada di Timor Leste sebesar 60,63 persen.

Total Daerah Aliran Sungai (DAS): 10

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

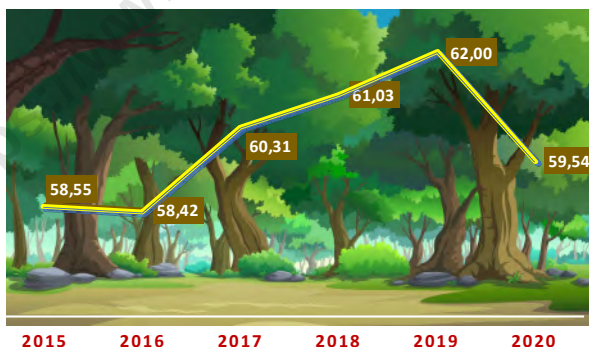
INDIKATOR 6.6.1*

PERUBAHAN TINGKAT KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA AIR PADA EKOSISTEM PERAIRAN DARI WAKTU KE WAKTU

GAMBAR 6.8.

INDEKS KUALITAS LAHAN, 2015-2020

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) cenderung meningkat, pada tahun 2016 tercatat sebesar 58,42 menjadi 62,00 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 indeks tersebut turun 2,46 poin menjadi 59,54. IKL terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG).



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

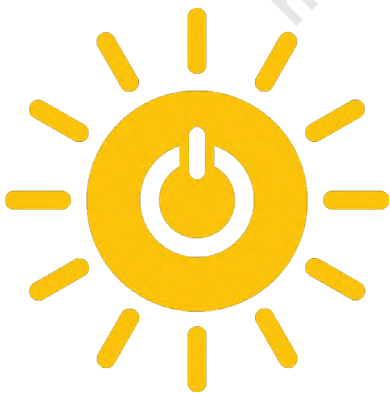


<https://www.bps.go.id>



7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua



Untuk mencapai Tujuan ke-7, yaitu energi bersih dan terjangkau, ketersediaan energi bersih dan terjangkau terus diupayakan oleh semua pihak. Terdapat lima target pada TPB/SDGs 7, antara lain: menjamin akses terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan, efisiensi energi, serta meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan.

Kebutuhan akan energi bersih dan berkelanjutan terus meningkat. Capaian TPB/SDGs pada tujuan ini di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio elektrifikasi terus meningkat, menjadi 99,45 persen di tahun 2021. Meskipun pertumbuhannya melambat karena hampir mencapai 100 persen, diupayakan target tercapai pada tahun 2030. Rumah tangga juga telah beralih ke energi bersih dan modern, ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah jaringan gas rumah tangga dan rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2021, masing-masing sebesar 673.220 sambungan dan 83,36 persen. Meskipun demikian, efisiensi penggunaan energi dan peralihan ke energi terbarukan juga harus terus diupayakan guna keberlanjutan ketersediaan energi bersih.

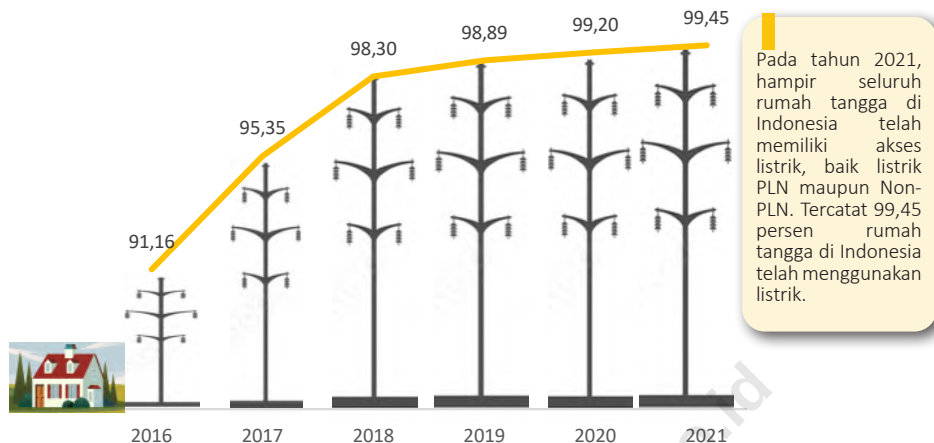


INDIKATOR 7.1.1*

RASIO ELEKTRIFIKASI

GAMBAR 7.1.

RASIO ELEKTRIFIKASI, 2016-2021



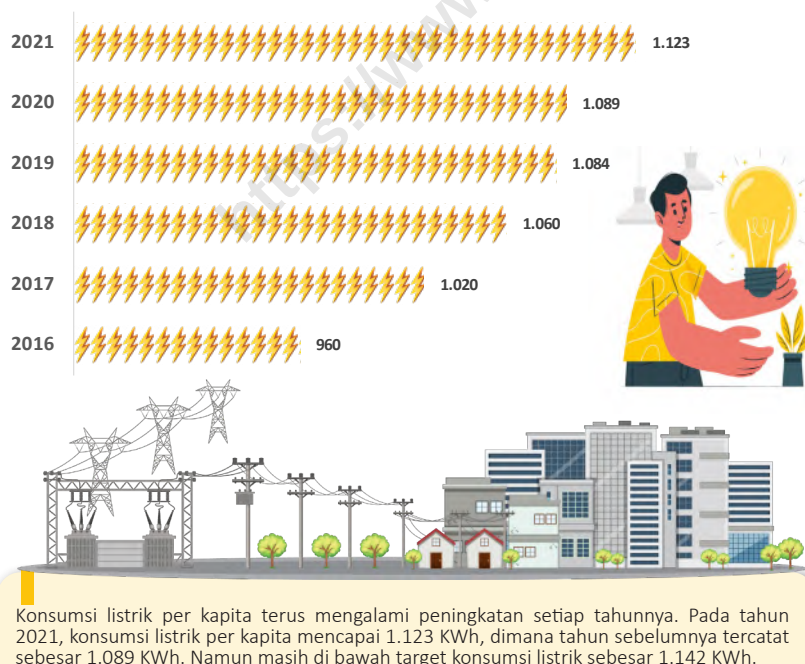
Sumber : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

INDIKATOR 7.1.1.(A)

KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA

GAMBAR 7.2.

KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA (KWH), 2016-2021



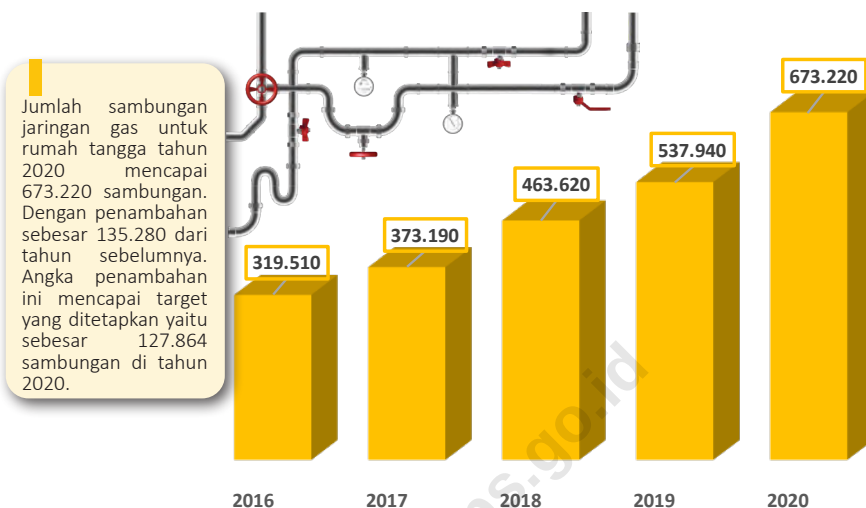
Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



INDIKATOR 7.1.2.(A) JUMLAH SAMBUNGAN JARINGAN GAS UNTUK RUMAH TANGGA

GAMBAR 7.3.

JUMLAH SAMBUNGAN JARINGAN GAS UNTUK RUMAH TANGGA, 2016-2020



Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

INDIKATOR 7.1.2.(B) RASIO PENGGUNAAN GAS RUMAH TANGGA

GAMBAR 7.4.

RASIO PENGGUNAAN GAS RUMAH TANGGA, 2016-2021



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



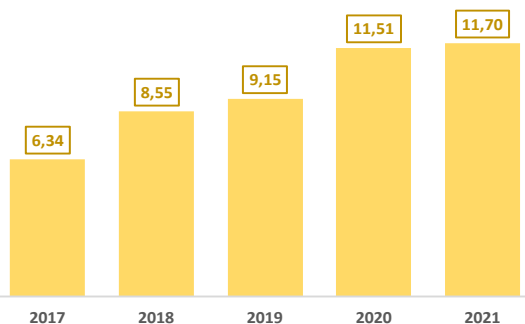


INDIKATOR 7.2.1*

BAURAN ENERGI TERBARUKAN

GAMBAR 7.5.

BAURAN ENERGI TERBARUKAN (PERSEN), 2017-2021



Bauran energi terbarukan di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2021, ada 11,70 persen total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final.

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

INDIKATOR 7.3.1*

INTENSITAS ENERGI PRIMER

GAMBAR 7.6.

INTENSITAS ENERGI PRIMER (SETARA BAREL MINYAK (SBM)/MILIAR RUPIAH), 2015-2021



Intensitas energi primer terus menunjukkan penurunan hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan energi untuk menghasilkan satu unit output semakin efisien dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, intensitas energi primer sebesar 133,90 SBM/miliar rupiah.

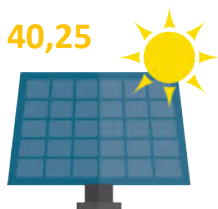
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

INDIKATOR 7.B.1*

KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT LISTRIK DARI ENERGI TERBARUKAN

GAMBAR 7.7.

KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT LISTRIK DARI ENERGI TERBARUKAN (DALAM WATT PER KAPITA), 2021



Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan pada tahun 2021 sebesar 40,25 watt per kapita.

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



8

PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua



Salah satu tujuan yang diharapkan dari pencapaian SDGs yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak untuk semua. Ketersediaan pekerjaan yang layak dan mampu dijangkau seluruh penduduk tanpa terkecuali menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Dengan bekerja, penduduk memperoleh pendapatan dan mencapai tingkat kesejahteraan.

Pada 2021, Indonesia berhasil mencatatkan perbaikan pada beberapa indikator perekonomian, seperti pendapatan per kapita, produktivitas tenaga kerja, dan akses UMKM ke lembaga keuangan. Pemerintah berupaya mendorong pemulihan di seluruh sektor terdampak pandemi. Hal ini tergambarkan dari agregat ekonomi yang berhasil tumbuh positif setelah mencatatkan nilai negatif pada 2020 silam. Performa positif dari indikator ketenagakerjaan tercermin dari peningkatan upah dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), setengah penganggur, dan anak yang bekerja. Namun di sisi lain, pemulihan pada 2021 belum cukup kuat memperbaiki keterpurukan sektor pariwisata sejak 2020 akibat pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari total perolehan devisa negara yang rendah di 2021.

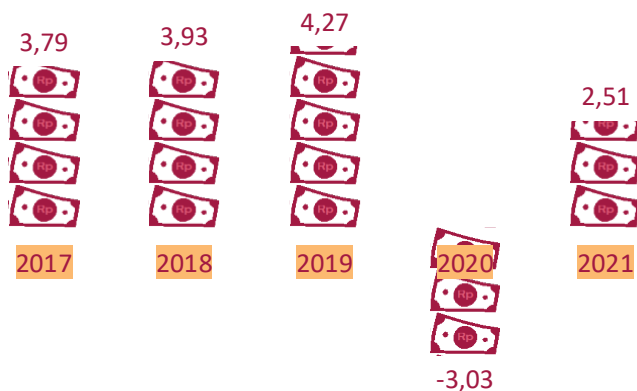


INDIKATOR 8.1.1*

LAJU PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA

GAMBAR 8.1.

LAJU PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA (PERSEN), 2017-2021



Sumber: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan, Badan Pusat Statistik

Setelah sempat terpuruk akibat pandemi covid pada 2020, laju pertumbuhan PDB per kapita berhasil meningkat menjadi 2,51 persen pada 2021. Kenaikan ini dapat mencerminkan standar hidup rata-rata penduduk semakin bertambah.

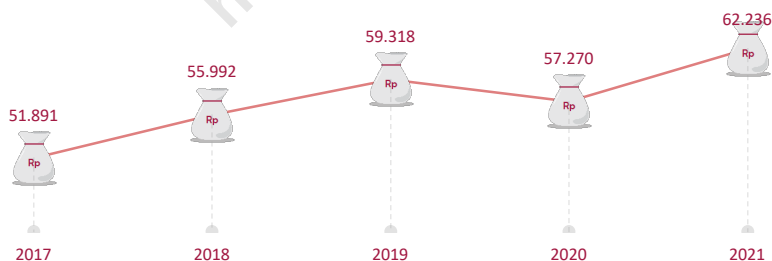


INDIKATOR 8.1.1.(A)

PDB PER KAPITA

GAMBAR 8.2.

PDB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (RIBU RUPIAH), 2017-2021



Sumber: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan, Badan Pusat Statistik



Meski sempat mengalami penurunan pada 2020 akibat pandemi, PDB per kapita yang diukur dari PDB atas dasar harga berlaku berhasil meningkat pada 2021. Peningkatan ini mencerminkan kenaikan nilai tambah yang dihasilkan satu orang penduduk selama satu tahun.

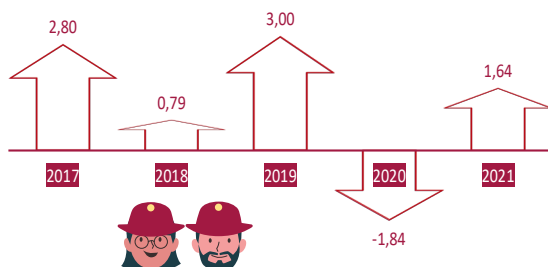


INDIKATOR 8.2.1*

LAJU PERTUMBUHAN PDB PER TENAGA KERJA/TINGKAT PERTUMBUHAN PDB RIIL PER ORANG BEKERJA PER TAHUN

GAMBAR 8.3.

LAJU PERTUMBUHAN PDB PER TENAGA KERJA/TINGKAT PERTUMBUHAN PDB RIIL PER ORANG BEKERJA PER TAHUN (PERSEN), 2017-2021



Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja mengalami fluktuasi sepanjang 2017-2021. Indikator ini menggambarkan produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Semakin tinggi laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja berarti tenaga kerja yang ada semakin produktif dalam menghasilkan barang/jasa yang bernilai tambah.

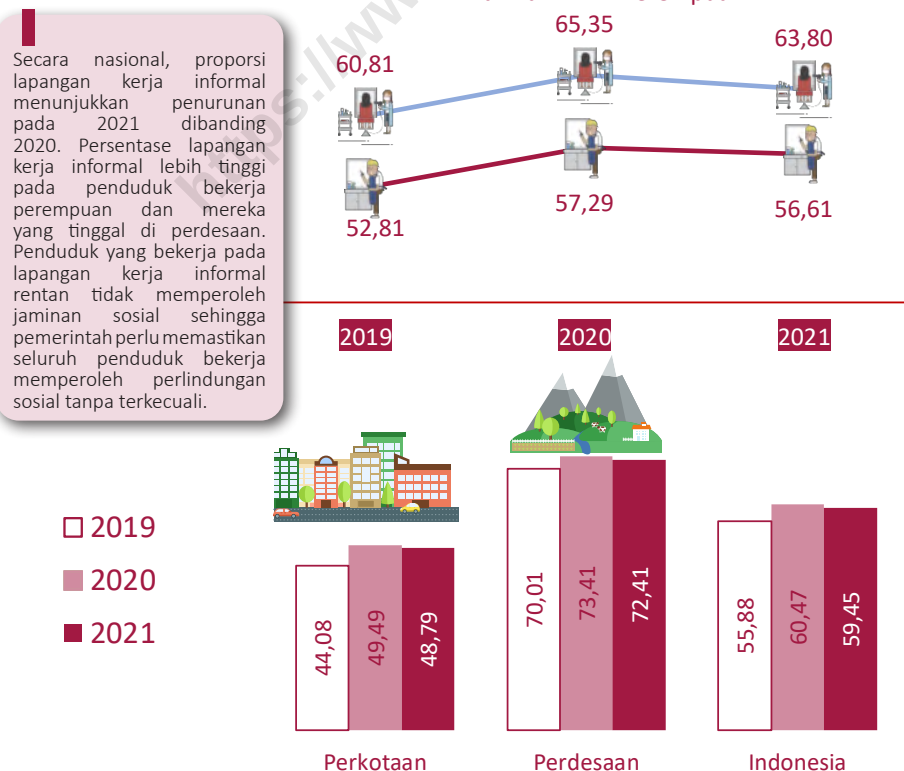
Sumber: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan dan Sakernas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 8.3.1*

PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL BERDASARKAN SEKTOR DAN JENIS KELAMIN

GAMBAR 8.4.

PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN TEMPAT TINGGAL (PERSEN), 2019-2021

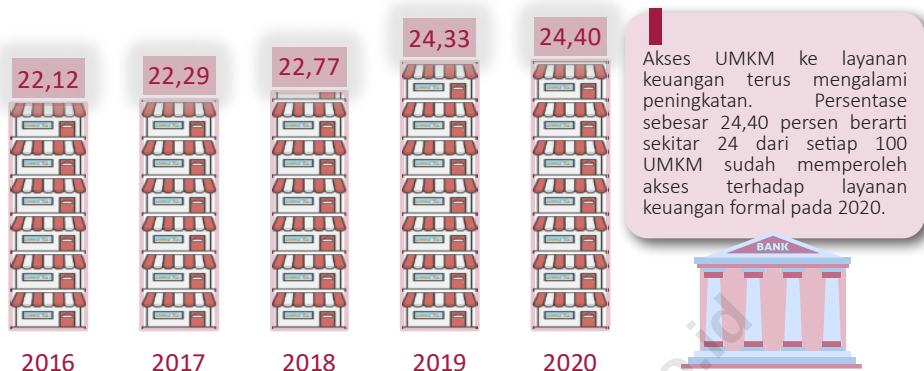


Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 8.3.1.(A) **PERSENTASE AKSES UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) KE LAYANAN KEUANGAN**

GAMBAR 8.5. PERSENTASE AKSES UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) KE LAYANAN KEUANGAN, 2016-2020

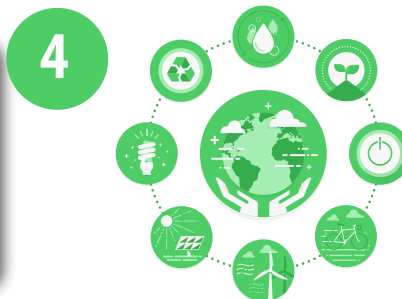


Sumber: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Bank Indonesia

INDIKATOR 8.4.1.(A) **RENCANA DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PELAKSANAAN SASARAN POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKELANJUTAN**

GAMBAR 8.6. RENCANA DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PELAKSANAAN SASARAN POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKELANJUTAN, 2021

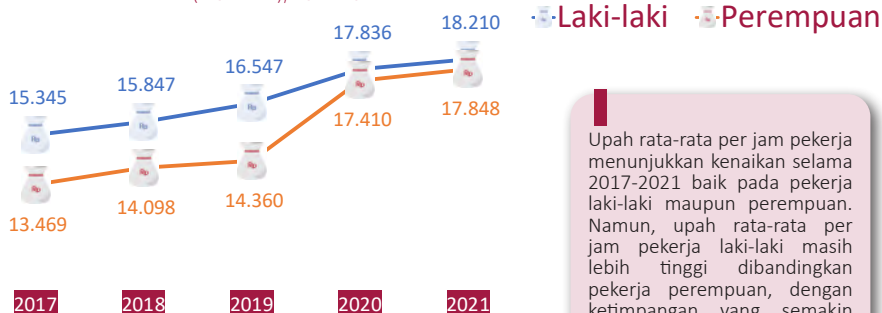
Pada tahun 2021 tercatat ada 4 dokumen hukum (rancangan/peraturan/keputusan) terkait dengan pengembangan instrumen/kolaborasi program yang disusun, telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya usaha-usaha pengkoordinasian dalam mengembangkan, mengadopsi, atau mengimplementasi instrumen-instrumen kebijakan yang bertujuan kepada pelaksanaan produksi dan konsumsi berkelanjutan



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR 8.5.1* **UPAH RATA-RATA PER JAM PEKERJA**

GAMBAR 8.7. UPAH RATA-RATA PER JAM PEKERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN (RUPIAH), 2017-2021



Catatan: Menggunakan Penimbang SUPAS 2015

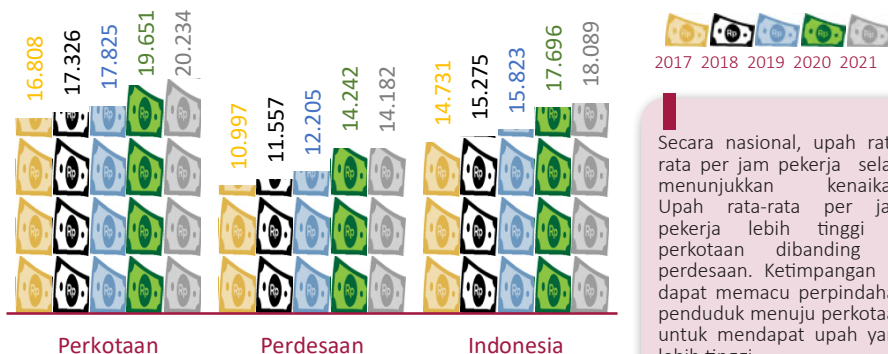
Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

Upah rata-rata per jam pekerja menunjukkan kenaikan selama 2017-2021 baik pada pekerja laki-laki maupun perempuan. Namun, upah rata-rata per jam pekerja laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan, dengan ketimpangan yang semakin menipis.



GAMBAR 8.8.

UPAH RATA-RATA PER JAM PEKERJA BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL (RUPIAH), 2017-2021



Secara nasional, upah rata-rata per jam pekerja selalu menunjukkan kenaikan. Upah rata-rata per jam pekerja lebih tinggi di perkotaan dibanding di perdesaan. Ketimpangan ini dapat memacu perpindahan penduduk menuju perkotaan untuk mendapat upah yang lebih tinggi.

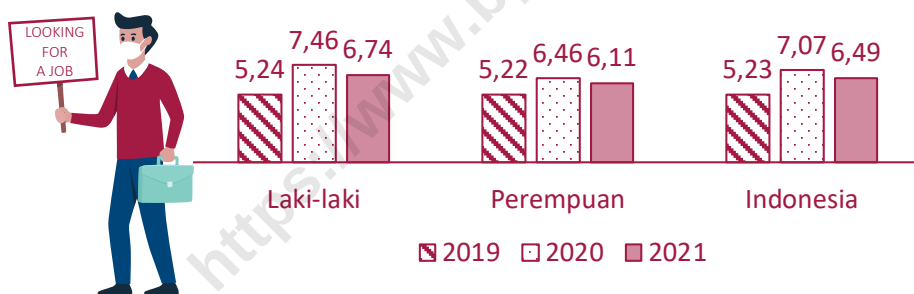
Catatan: Menggunakan Penimbang SUPAS 2015
Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 8.5.2*

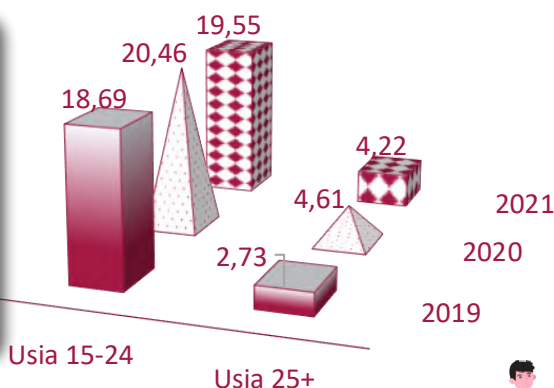
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

GAMBAR 8.9.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR (PERSEN), 2019-2021



Secara nasional, TPT menunjukkan penurunan pada 2021 dibanding 2020. Pemulihan ekonomi pada 2021 berhasil menyerap lebih banyak tenaga kerja dan semakin berkurang tenaga kerja yang tidak termanfaatkan (penganggur). Tingkat pengangguran lebih tinggi pada laki-laki dan mereka yang berusia muda atau masih masuk usia sekolah menengah dan lanjutan (15-24 tahun).



Catatan: Menggunakan Penimbang SUPAS 2015
Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

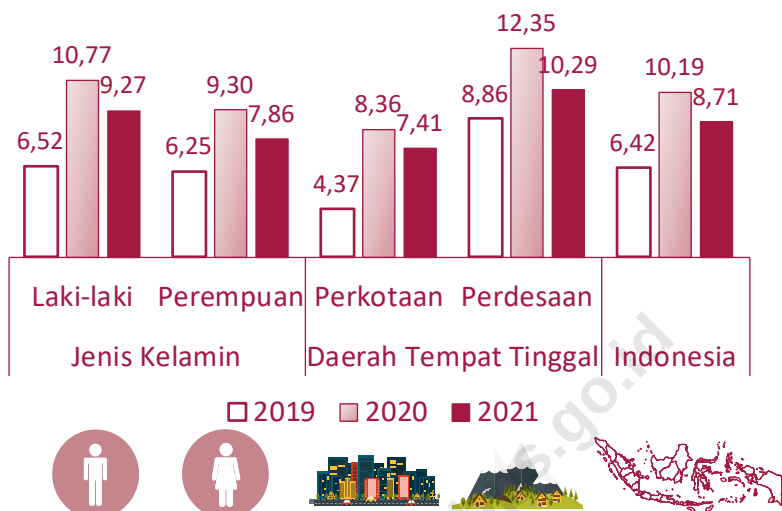




INDIKATOR 8.5.2.(A) TINGKAT SETENGAH PENGANGGURAN

GAMBAR 8.10.

TINGKAT SETENGAH PENGANGGURAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN TEMPAT TINGGAL (PERSEN), 2019-2021



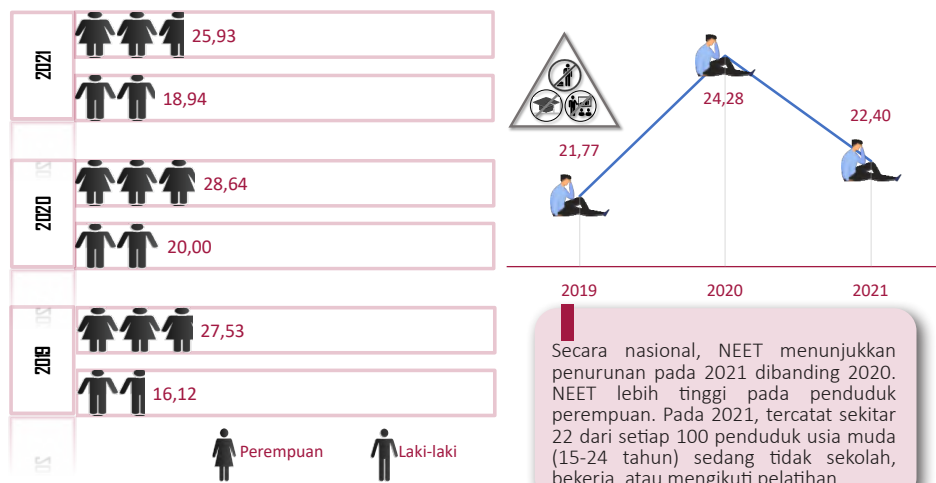
Secara nasional, Tingkat Setengah Pengangguran (TSP) menunjukkan penurunan pada 2021 dibanding 2020. TSP lebih tinggi di perdesaan dan pada penduduk laki-laki. Semakin rendah TSP dapat memberikan gambaran kualitas, produktivitas, dan tingkat utilisasi lapangan kerja yang semakin baik.

Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 8.6.1* PERSENTASE USIA MUDA (15-24 TAHUN) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA ATAU MENGIKUTI PELATIHAN (NEET)

GAMBAR 8.11.

PERSENTASE USIA MUDA (15-24 TAHUN) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA ATAU MENGIKUTI PELATIHAN (NEET) BERDASARKAN JENIS KELAMIN, 2019-2021



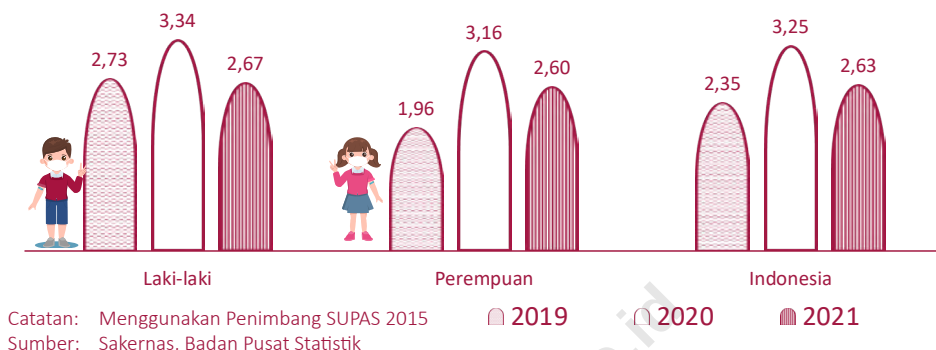
Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 8.7.1.(A) PERSENTASE DAN JUMLAH ANAK USIA 10-17 TAHUN, YANG BEKERJA, DIBEDAKAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

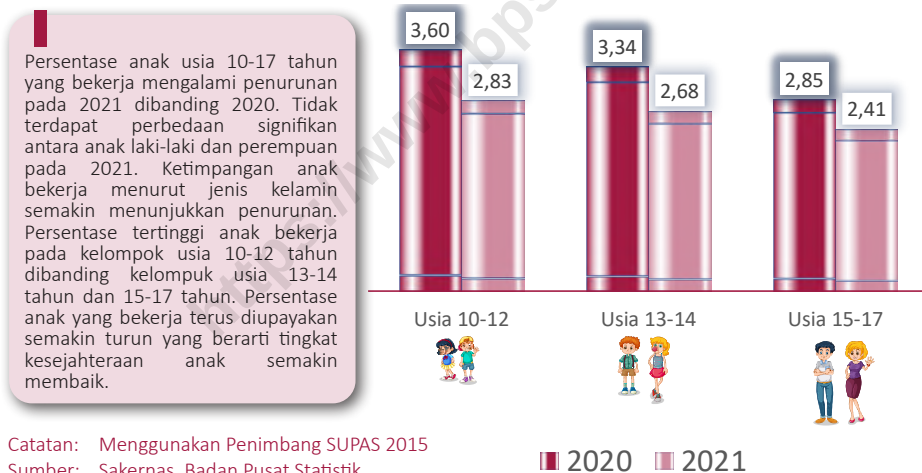
GAMBAR 8.12.

PERSENTASE ANAK USIA 10-17 TAHUN YANG BEKERJA, BERDASARKAN JENIS KELAMIN, 2019-2021



GAMBAR 8.13.

PERSENTASE ANAK USIA 10-17 TAHUN YANG BEKERJA, BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, 2020-2021



INDIKATOR 8.8.1.(A) JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN NORMA K3

GAMBAR 8.14.

JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN NORMA K3, 2021



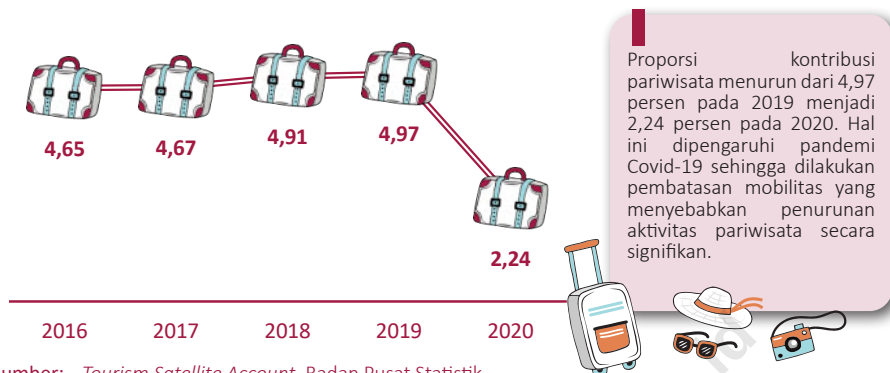


INDIKATOR 8.9.1*

PROPORSI DAN LAJU PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDB

GAMBAR 8.15.

PROPORSI KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDB (PERSEN), 2016-2020



Sumber: Tourism Satellite Account, Badan Pusat Statistik

GAMBAR 8.16.

LAJU PERTUMBUHAN KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDB (PERSEN), 2017-2020



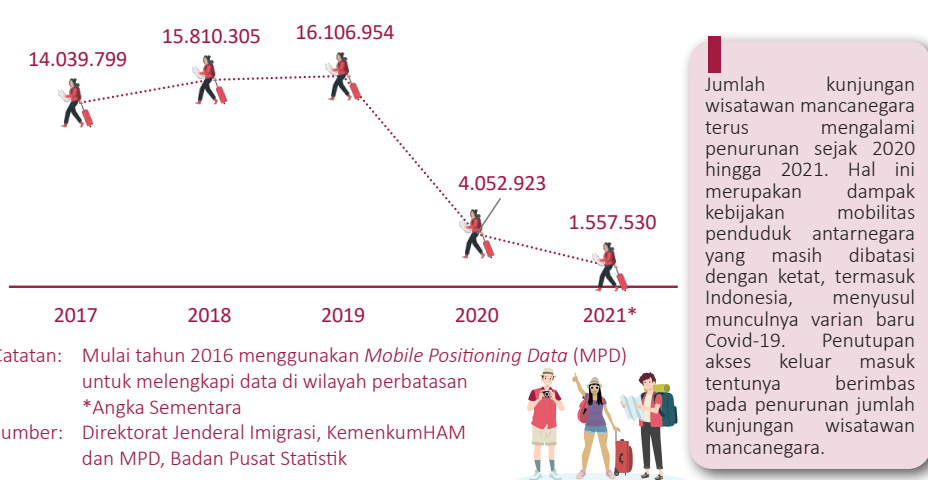
Sumber: Tourism Satellite Account, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 8.9.1.(A)

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA

GAMBAR 8.17.

KEDATANGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE INDONESIA, 2017-2021





INDIKATOR 8.9.1.(B) JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA

GAMBAR 8.18. JUMLAH PERJALANAN YANG DILAKUKAN PENDUDUK INDONESIA (PERJALANAN), 2017-2021



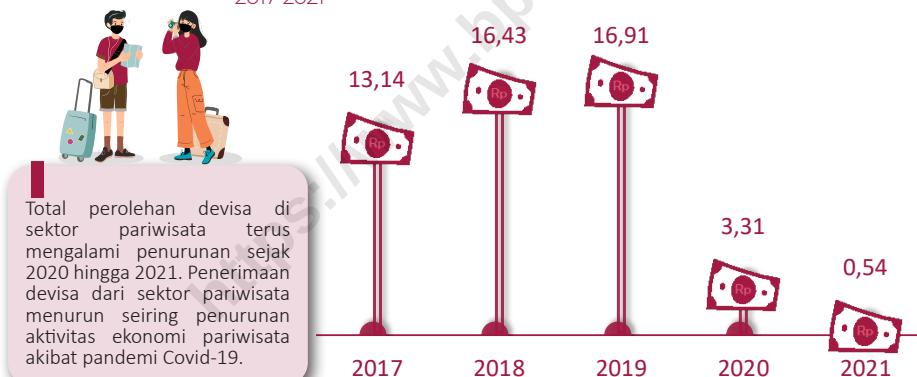
Jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia pada 2021 menunjukkan peningkatan dibanding 2020. Hal ini sebagai dampak pelonggaran mobilitas wisatawan domestik pada 2021 dengan tetap memperhatikan situasi terkini terkait Covid-19.

Catatan: Sejak tahun 2019 menggunakan Metode *Mobile Positioning Data* (MPD), BPS

Sumber: Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 8.9.1.(C) JUMLAH DEvisa SEKTOR PARIWISATA

GAMBAR 8.19. TOTAL PEROLEHAN DEvisa DI SEKTOR PARIWISATA (MILIAR USD), 2017-2021

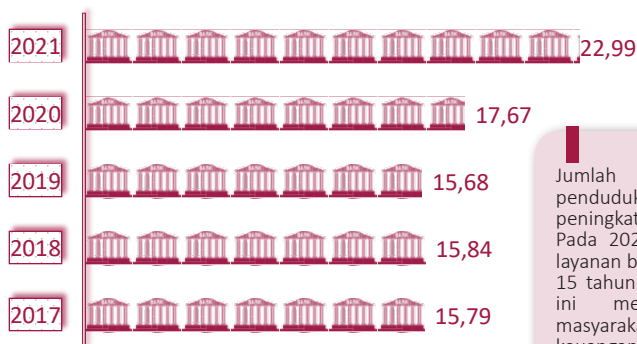


Total perolehan devisa di sektor pariwisata terus mengalami penurunan sejak 2020 hingga 2021. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata menurun seiring penurunan aktivitas ekonomi pariwisata akibat pandemi Covid-19.

Sumber: Bank Indonesia

INDIKATOR 8.10.* JUMLAH KANTOR BANK DAN ATM PER 100.000 PENDUDUK DEWASA

GAMBAR 8.20. JUMLAH KANTOR BANK PER 100.000 PENDUDUK DEWASA, 2017-2021



Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa menunjukkan peningkatan positif selama 2017-2021. Pada 2021, terdapat sekitar 23 kantor layanan bank per 100.000 penduduk usia 15 tahun ke atas. Peningkatan indikator ini mencerminkan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas lembaga keuangan perbankan yang semakin baik.

Sumber: Bank Indonesia



GAMBAR 8.21.

JUMLAH ATM PER 100.000 PENDUDUK DEWASA, 2017-2021



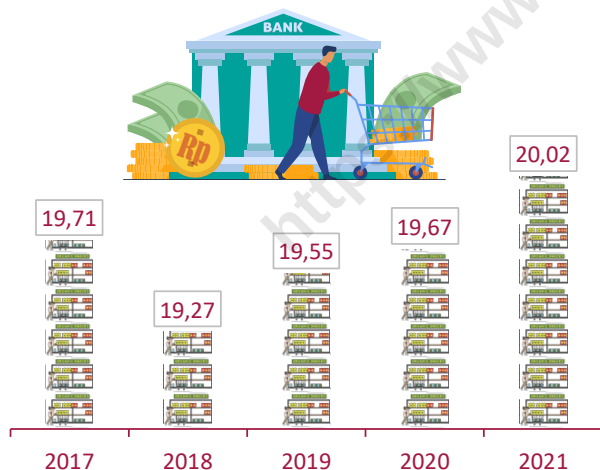
Sumber: Bank Indonesia

Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa menunjukkan tren negatif selama 2017-2021. Penurunan jumlah mesin ATM dipengaruhi gaya hidup masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Perkembangan transaksi digital perbankan yang semakin populer menggeser pola perilaku masyarakat dari transaksi konvensional melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menjadi transaksi digital menggunakan dompet digital atau e-channel perbankan.

INDIKATOR 8.10.1.(A) PROPORSI KREDIT UMKM TERHADAP TOTAL KREDIT

GAMBAR 8.22.

PROPORSI KREDIT UMKM TERHADAP TOTAL KREDIT, 2017-2021



Sumber: Bank Indonesia

Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit menunjukkan peningkatan dalam empat tahun terakhir. Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan keterjangkauan UMKM terhadap akses pembiayaan yang semakin baik. Kredit UMKM merupakan salah satu bentuk dukungan modal yang diberikan pemerintah dan swasta untuk meningkatkan peluang pertumbuhan skala UMKM.



9

INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi



Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan membutuhkan motor penggerak berupa investasi dalam infrastruktur dan inovasi.

Industri dan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) yang semakin berkembang menuntut penduduk untuk beradaptasi terhadap perubahan. Hal ini penting sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar nasional dan global.

Kehadiran teknologi menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan efisiensi energi. Industri berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi sumber daya, serta penciptaan sumber energi baru diupayakan agar selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Investasi dalam inovasi juga diperlukan dalam upaya menciptakan hal-hal dan sumber daya baru dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan yang semakin kompleks.

Digitalisasi yang semakin meluas secara global perlu diiringi dengan perluasan akses TIK secara merata agar tidak terjadi ketimpangan digital dan berhasil meraih bonus digital. Kesetaraan akses terhadap teknologi dan informasi mendorong penduduk untuk meningkatkan inovasi dan kewirausahaan.

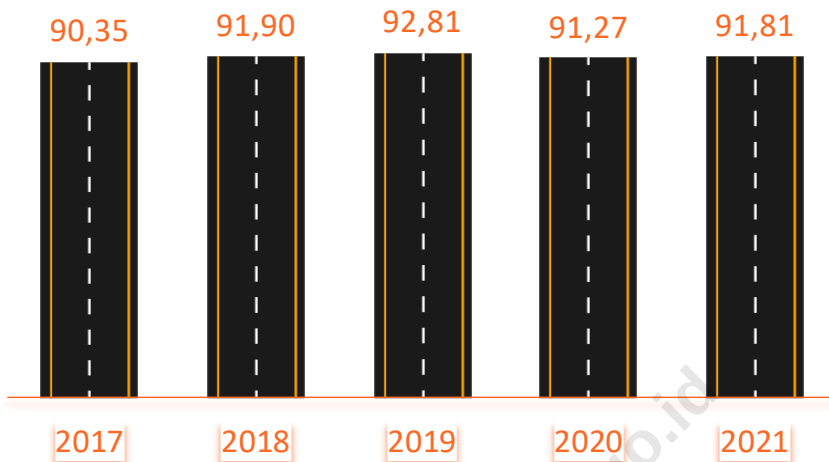


INDIKATOR 9.1.1.(A)

KONDISI MANTAP JALAN NASIONAL

GAMBAR 9.1.

KONDISI MANTAP JALAN NASIONAL (PERSEN), 2017-2021



Sumber: Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (8 Agustus 2022)

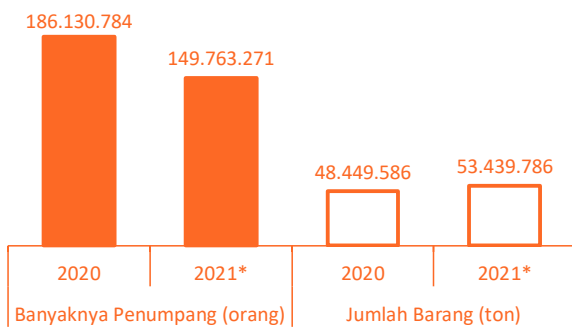
Proporsi kondisi mantap jalan nasional atau panjang jalan nasional dengan kategori baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional mengalami peningkatan pada 2021. Kondisi mantap jalan nasional pada tahun tersebut sebesar 91,81 persen, sedangkan di tahun sebelumnya sebesar 91,27 persen. Ketersediaan kondisi mantap jalan nasional diperlukan sebagai upaya perlindungan dan keselamatan bagi pengguna jalan dalam menunjang konektivitas antar wilayah.

INDIKATOR 9.1.2*

JUMLAH PENUMPANG DAN BARANG BERDASARKAN MODA TRANSPORTASI

GAMBAR 9.2.

JUMLAH PENUMPANG DAN BARANG BERDASARKAN MODA TRANSPORTASI KERETA API, 2020-2021

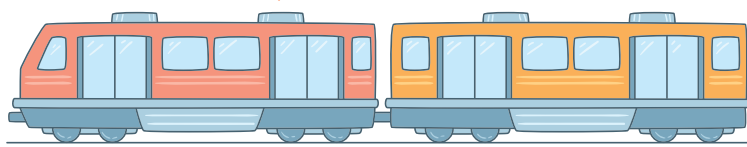


Banyak penumpang dengan moda transportasi kereta api menunjukkan penurunan pada 2021, sementara jumlah barang yang diangkut menunjukkan peningkatan.

Catatan: Moda kereta api hanya mencakup Jawa dan Sumatera

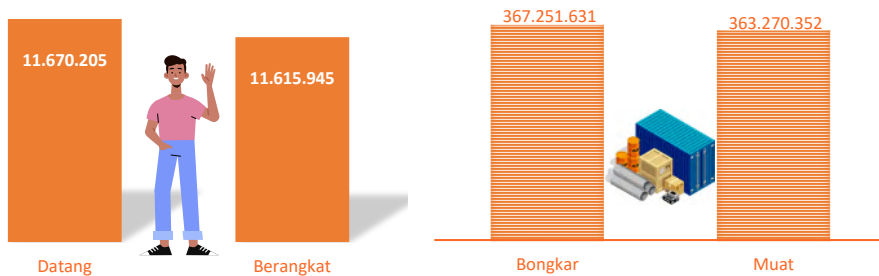
*Angka Sementara

Sumber: Statistik Transportasi Darat 2020, BPS (data dari PT (Persero) Kereta Api Indonesia dan Kereta Commuter Indonesia)

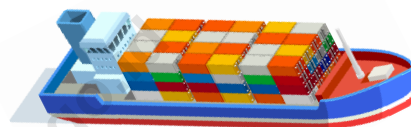




GAMBAR 9.3. JUMLAH PENUMPANG (ORANG) DAN BARANG (TON) MODA TRANSPORTASI KAPAL PELAYARAN DALAM NEGERI, 2020

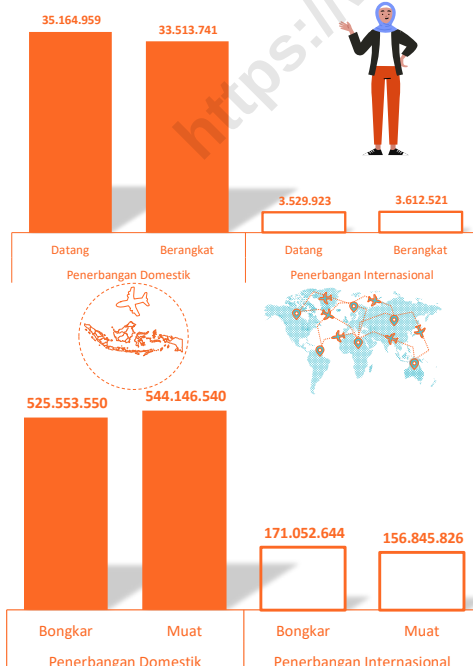


Sumber: Statistik Transportasi Laut 2020, Badan Pusat Statistik (data dari Pelabuhan Laut-SIMOPPEL)



Jumlah penumpang yang datang dan berangkat menggunakan moda transportasi kapal pelayaran dalam negeri pada 2020 masing-masing sebesar 11,67 dan 11,62 juta orang. Sementara itu, jumlah barang yang dibongkar mencapai 367,25 juta ton dan barang yang dimuat 363,27 juta ton.

GAMBAR 9.4. JUMLAH PENUMPANG (ORANG) DAN BARANG (KILOGRAM) MODA TRANSPORTASI PESAWAT TERBANG, 2020



Jumlah penumpang dari penerbangan domestik masih mendominasi keberangkatan dan kedatangan penumpang dengan moda transportasi pesawat terbang dibanding penerbangan internasional. Begitu pula pada jumlah barang yang diangkut lebih banyak berasal dari penerbangan domestik. Penutupan akses keluar masuk antarnegara pada 2020 akibat pandemi Covid-19 menghambat mobilitas melalui penerbangan internasional.



Sumber: Statistik Transportasi Udara 2020, Badan Pusat Statistik (data dari Laporan tahunan dari PT. Angkasa Pura I dan II; Laporan Bandar Udara- Dokumen III/1)



INDIKATOR 9.1.2.(A) JUMLAH BANDARA

GAMBAR 9.5. JUMLAH BANDARA YANG AKTIF BEROPERASI, 2020



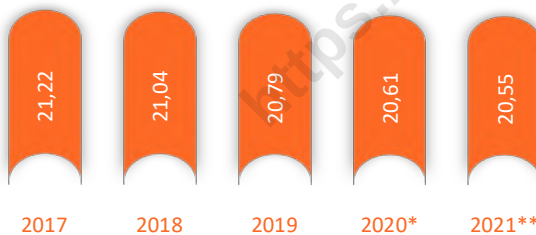
Sumber: Statistik Transportasi Udara 2020, Badan Pusat Statistik (data dari Laporan tahunan PT Angkasa Pura 1 dan PT Angkasa Pura 2 dan Laporan Bandar Udara- Dokumen III)



Pada 2020, tercatat sebanyak 215 bandara yang aktif beroperasi dengan jumlah tertinggi di Provinsi Papua sebanyak 41 bandara. Hal ini dipengaruhi topografi Papua yang lebih memungkinkan dijangkau melalui udara.

INDIKATOR 9.2.1* PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDB DAN PER KAPITA

GAMBAR 9.6. PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDB (PERSEN), 2017-2021



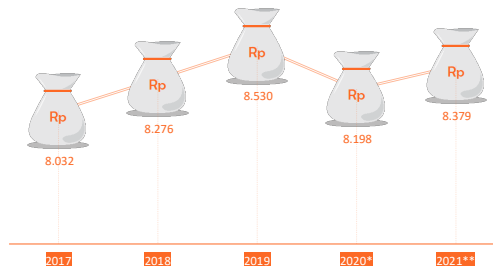
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB menunjukkan tren yang menurun dalam lima tahun terakhir.

Catatan: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik

GAMBAR 9.7. NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR PER KAPITA (RIBU RUPIAH), 2017-2021



Nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita yang sempat menurun pada 2020 berhasil meningkat pada 2021.

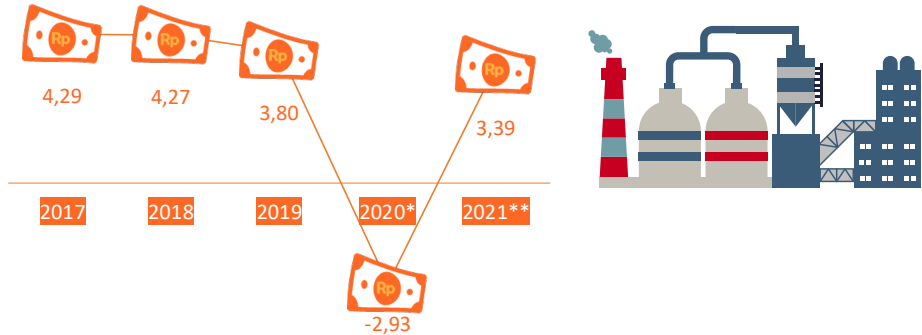


Sumber: Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 9.2.1.(A) LAJU PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI MANUFAKTUR

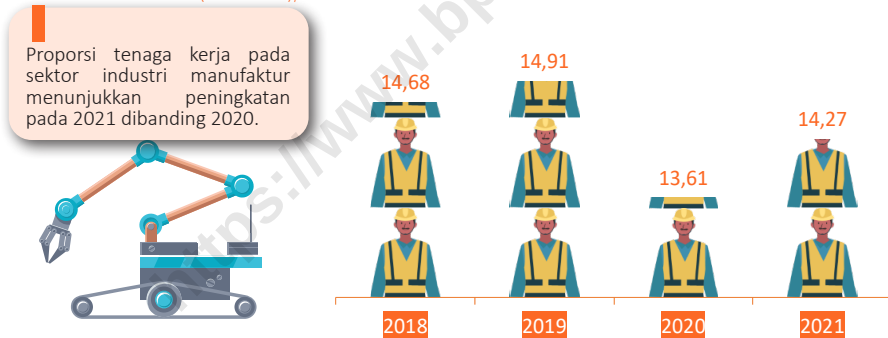
GAMBAR 9.8. LAJU PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI MANUFAKTUR (PERSEN), 2017-2021



Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 9.2.2* PROPORSI TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR

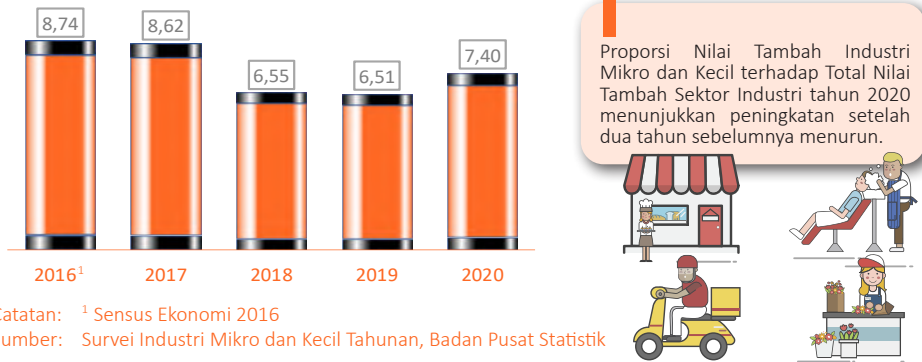
GAMBAR 9.9. PROPORSI TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR (PERSEN), 2018-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 9.3.1* PROPORSI NILAI TAMBAH INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TERHADAP TOTAL NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI

GAMBAR 9.10. PROPORSI NILAI TAMBAH INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TERHADAP TOTAL NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI (PERSEN), 2016-2020



Catatan: ¹ Sensus Ekonomi 2016
 Sumber: Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan, Badan Pusat Statistik

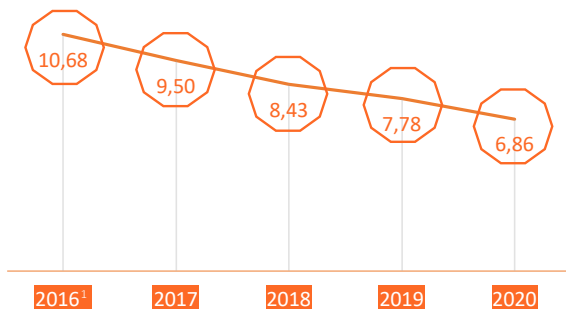


INDIKATOR 9.3.2*

PROPORSI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL DENGAN PINJAMAN ATAU KREDIT

GAMBAR 9.11.

PROPORSI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL DENGAN PINJAMAN ATAU KREDIT (PERSEN), 2016-2020



Catatan: ¹ Sensus Ekonomi 2016

Sumber: Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan, Badan Pusat Statistik

Proporsi Industri Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit menunjukkan tren yang menurun selama 2016-2020.

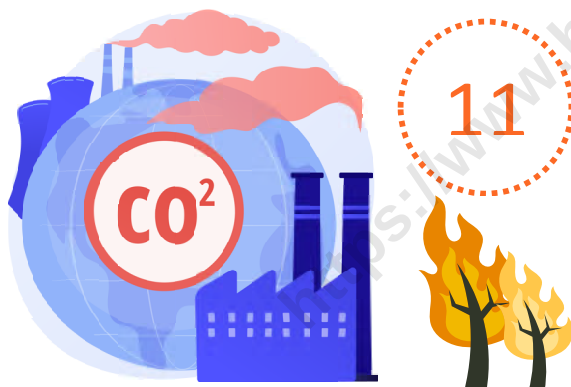


INDIKATOR 9.4.1.(A)

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR INDUSTRI

GAMBAR 9.12.

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR INDUSTRI, 2020



Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri tahun 2020 sebesar **11** persen. Pemerintah berupaya mendorong pelaku sektor industri agar beralih menggunakan peralatan dan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah emisi dengan pemberian insentif.



Sumber: Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/Bappenas

INDIKATOR 9.4.1.(B)

INTENSITAS EMISI SEKTOR INDUSTRI

GAMBAR 9.13.

INTENSITAS EMISI SEKTOR INDUSTRI, 2020

Intensitas emisi sektor industri tahun 2020 tercatat sebesar **25,6** ton CO₂/miliar rupiah. Indikator ini berperan untuk mengetahui hasil kinerja dari program pengurangan emisi CO₂ khususnya di sektor industri.



Sumber: Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/Bappenas



INDIKATOR 9.5.1*

PROPORSI ANGGARAN RISET PEMERINTAH TERHADAP PDB

GAMBAR 9.14.

PROPORSI ANGGARAN RISET PEMERINTAH TERHADAP PDB (PERSEN), 2020

Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB tahun 2020 sebesar **0,25** persen. Indikator ini bermanfaat guna mengetahui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kapabilitas ilmu pengetahuan nasional dan penciptaan inovasi yang berdampak pada percepatan ekonomi dan peningkatan daya saing global.



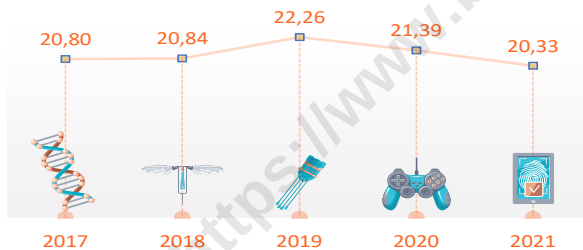
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Keuangan, LIPI, dan BPS

INDIKATOR 9.B.1.(A)

PROPORSI EKSPOR PRODUK INDUSTRI BERTEKNOLOGI TINGGI (PEPIBT)

GAMBAR 9.15.

PROPORSI EPIBT TERHADAP TOTAL EKSPOR (PERSEN), 2017-2021



Proporsi EPIBT terhadap total ekspor masih belum menunjukkan perbaikan sejak menurun pada 2020. Proporsi EPIBT mencerminkan proses transisi struktural di sektor industri dari industri berbasis sumberdaya dan berteknologi rendah ke aktivitas industri berteknologi tinggi.

Catatan: Data tahun 2017-2020 adalah data revisi tahunan

Sumber: Badan Pusat Statistik

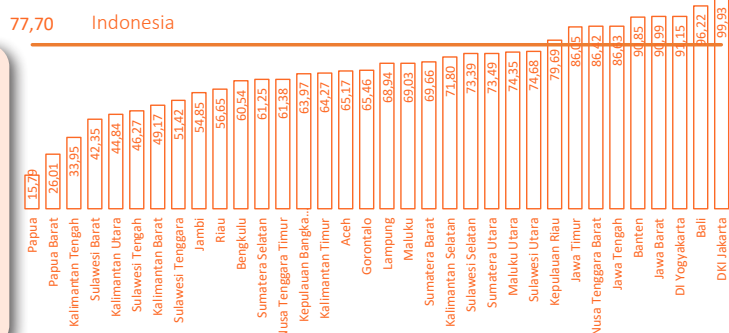
INDIKATOR 9.C.1*

PROPORSI PENDUDUK TERLAYANI MOBILE BROADBAND

GAMBAR 9.16.

PROPORSI PENDUDUK TERLAYANI MOBILE BROADBAND (PERSEN), 2020

Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* antar provinsi di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup besar. Artinya, masih terdapat ketimpangan penduduk dalam mendapatkan akses layanan *mobile broadband* yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan menggunakan TIK.



Sumber: Badan Pusat Statistik

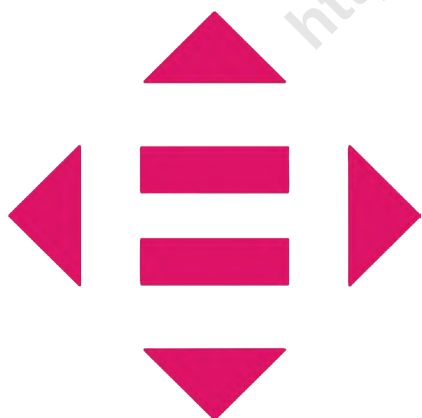




10

BERKURANGNYA KESENJANGAN

Mengurangi kesenjangan intra
dan antar negara



Mengurangi kesenjangan menjadi salah satu tujuan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 16 indikator yang dapat ditampilkan untuk menghitung capaian tujuan ke sepuluh dalam level nasional.

Kesenjangan berkaitan erat dengan kemiskinan. Pengurangan kemiskinan yang diikuti dengan pengurangan kesenjangan akan menghasilkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2021, capaian tujuan dalam hal mengurangi kesenjangan belum maksimal. Efek dari pandemi Covid-19 masih terasa. Kondisi ini terlihat dari nilai rasio gini daerah perkotaan dan perdesaan yang masih tinggi. Namun, kondisi pertumbuhan ekonomi tertinggal mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan jumlah desa tertinggal yang mengalami penurunan, sedangkan jumlah desa mandiri mengalami peningkatan.

Ketimpangan yang masih lebar perlu diatasi dengan penerapan kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, diperlukan kebijakan yang bersifat menyeluruh dari segi perbaikan aturan, pengawasan pasar dan institusi finansial, serta mendorong bantuan pembangunan dan investasi asing pada wilayah yang membutuhkan.

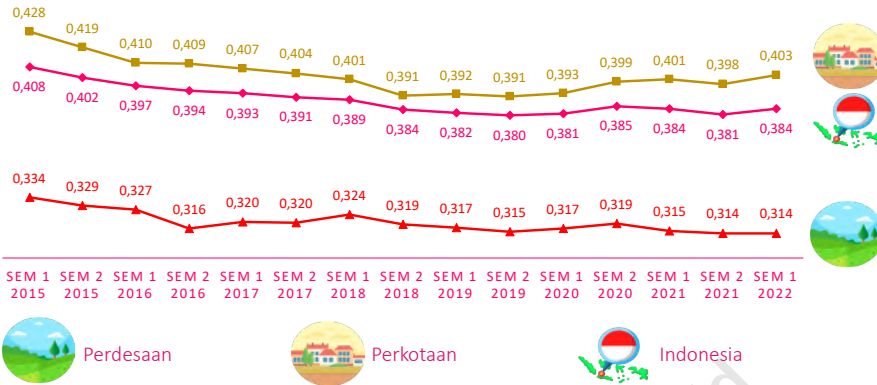


INDIKATOR 10.1.1*

RASIO GINI

GAMBAR 10.1.

RASIO GINI, 2015-2022



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

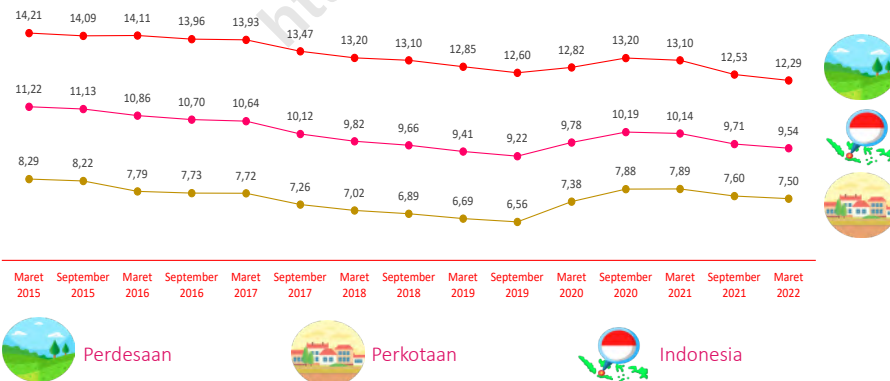


Ketimpangan di Indonesia cenderung tidak berubah dari tahun 2015 hingga tahun 2022, ditandai dengan nilai rasio gini yang cenderung konstan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, daerah perkotaan cenderung mempunyai ketimpangan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini terlihat dari nilai rasio gini yang lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan.

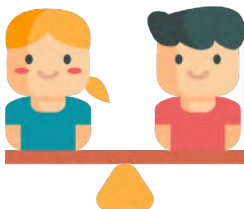
INDIKATOR 10.1.1.(A) PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

GAMBAR 10.2.

PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, 2015-2022



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

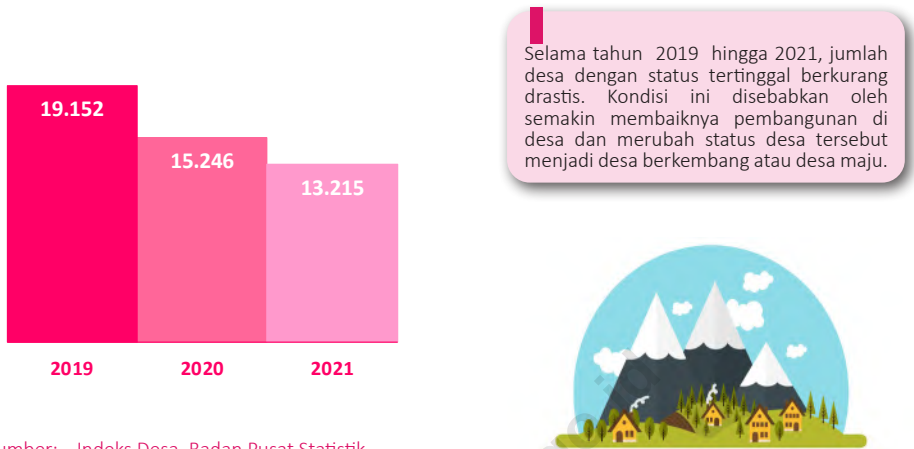


Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada Maret 2022, terdapat 13 dari 100 penduduk yang tinggal di daerah perdesaan dan 8 dari 100 penduduk yang tinggal di daerah perkotaan yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Sementara itu, terdapat 10 dari 100 penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.



INDIKATOR 10.1.1.(B) JUMLAH DESA TERTINGGAL

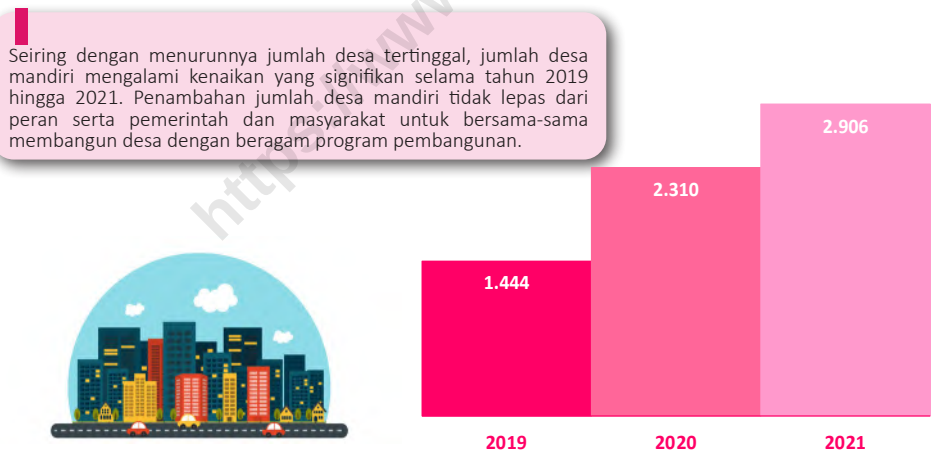
GAMBAR 10.3. JUMLAH DESA TERTINGGAL, 2019-2021



Sumber: Indeks Desa, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 10.1.1.(C) JUMLAH DESA MANDIRI

GAMBAR 10.4. JUMLAH DESA MANDIRI, 2019-2021



Catatan: Mulai tahun 2019, menggunakan sumber Indeks Desa. Sebelumnya menggunakan Indeks Pembangunan Desa (tahun 2018). Terdapat perbedaan kategori di antara keduanya sehingga tidak bisa dibandingkan.

Indeks Pembangunan Desa terdiri dari 3 Kategori (Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Mandiri), sedangkan Indeks Desa terdiri dari 5 kategori (sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri)

Indeks Desa 2019 dihitung berdasarkan data hasil pendataan Podes 2018 dan Updating Podes 2019 serta menggunakan daftar desa Kepmnedagri No. 414 Tahun 2019

Indeks Desa 2020 dihitung berdasarkan data hasil Updating Podes 2020 dan menggunakan daftar desa Kepmendagri No. 146 Tahun 2020

Indeks Desa 2021 dihitung berdasarkan data hasil Pendataan Podes 2021 dan menggunakan daftar desa Kepmendagri No. 146 Tahun 2020

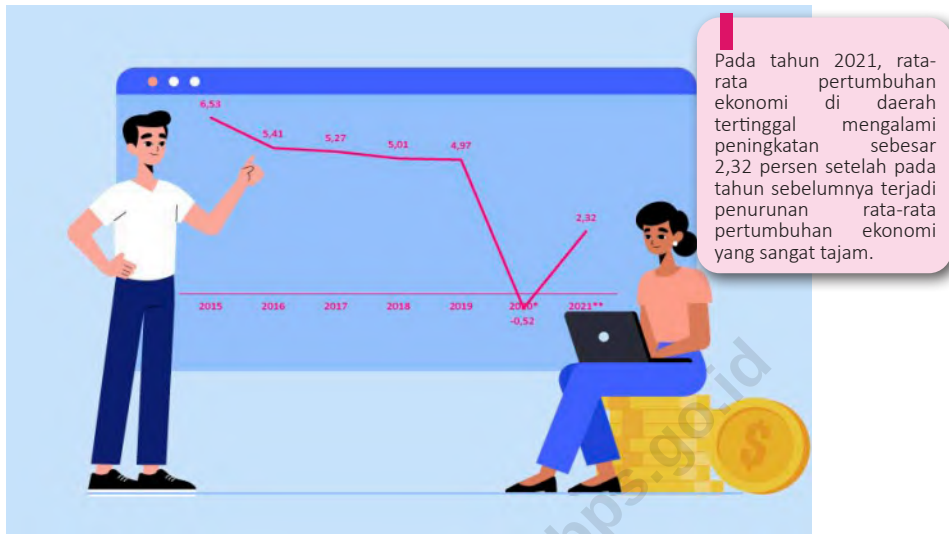
Sumber: Indeks Desa, Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 10.1.1.(E) RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH TERTINGGAL

GAMBAR 10.5.

RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH TERTINGGAL , 2015-2021



Catatan: Data tahun 2015-2019, berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Terdapat 122 Daerah Tertinggal)

Data tahun 2020, berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Terdapat 62 Daerah Tertinggal)

* Angka sementara

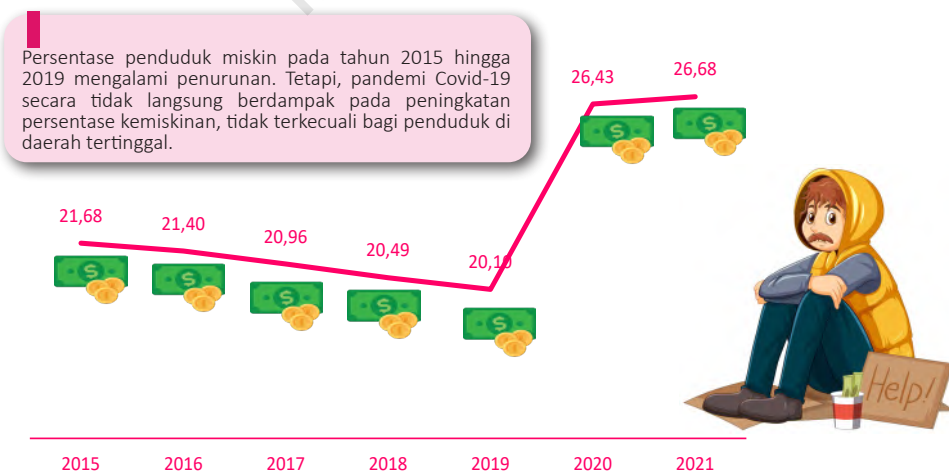
** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 10.1.1.(F) PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH TERTINGGAL

GAMBAR 10.6.

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH TERTINGGAL, 2015-2021



Catatan: Data tahun 2015-2019, berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Terdapat 122 Daerah Tertinggal)

Data tahun 2020-2021, berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Terdapat 62 Daerah Tertinggal)

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

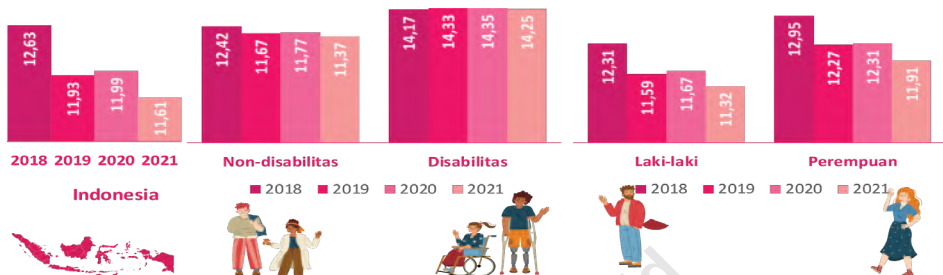


INDIKATOR 10.2.1*

PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH 50 PERSEN DARI MEDIAN PENDAPATAN, MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENYANDANG DISABILITAS

GAMBAR 10.7.

PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH 50 PERSEN DARI MEDIAN PENDAPATAN, MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENYANDANG DISABILITAS, 2018-2021



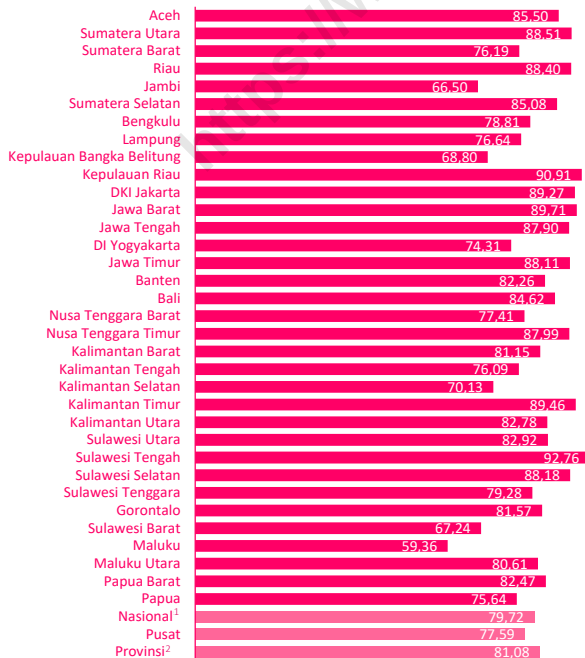
Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

Proporsi penduduk disabilitas yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan lebih tinggi dari proporsi nasional dan proporsi penduduk non disabilitas. Berdasarkan jenis kelamin, proporsi penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

INDIKATOR 10.3.1.(A) INDEKS KEBEBASAN

GAMBAR 10.8.

INDEKS ASPEK KEBEBASAN (METODE BARU), 2021



Pada tahun 2021, terdapat 23 provinsi yang mempunyai capaian indeks aspek kebebasan yang lebih tinggi dari capaian indeks aspek kebebasan di tingkat nasional.



Catatan: Angka 2021 menggunakan angka IDI metode baru

¹ Nilai Indeks Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat

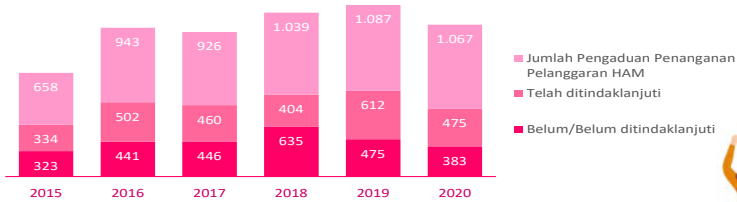
² Nilai Indeks Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas



INDIKATOR 10.3.1.(B) JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

GAMBAR 10.9. JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM), 2015-2020



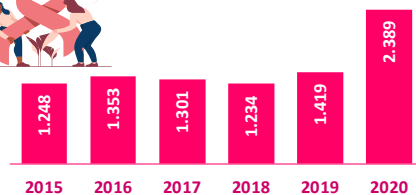
Sumber: KemenkumHAM

Jumlah pengaduan pelanggaran HAM cenderung meningkat sejak tahun 2015 hingga 2020. Namun, jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti cenderung fluktuatif, bahkan menurun pada tahun 2020. Sedangkan jumlah pengaduan yang belum ditindaklanjuti hampir setara dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti setiap tahunnya.

INDIKATOR 10.3.1.(C) JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEREMPUAN TERUTAMA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

GAMBAR 10.10. JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEREMPUAN TERUTAMA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, 2015-2020

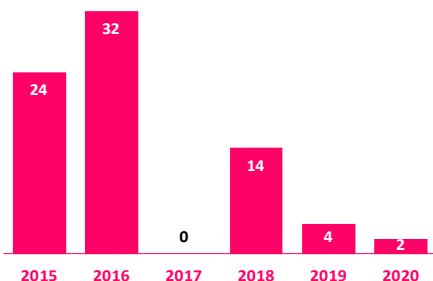
Selama tahun 2015 hingga 2019, jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan mengalami tren peningkatan. Tetapi, jumlah penanganan mengalami peningkatan yang sangat besar di tahun 2020. Kondisi ini disebabkan dari dampak tidak langsung pandemi Covid-19 yang memicu meningkatnya kekerasan terhadap perempuan.



Sumber: Komnas Perempuan

INDIKATOR 10.3.1.(D) JUMLAH KEBIJAKAN YANG DISKRIMINATIF DALAM 12 BULAN LALU BERDASARKAN PELARANGAN DISKRIMINASI MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL

GAMBAR 10.11. JUMLAH KEBIJAKAN YANG DISKRIMINATIF DALAM 12 BULAN LALU BERDASARKAN PELARANGAN DISKRIMINASI MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL, 2015-2020



Jumlah kebijakan yang diskriminatif cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Bahkan pada tahun 2017 dan 2020, tidak ada kebijakan yang diskriminatif di Indonesia.

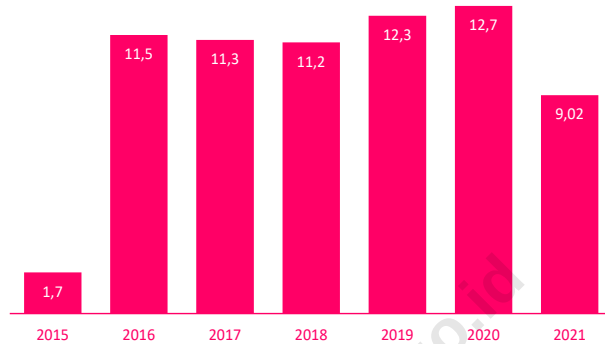
Sumber: Komnas Perempuan



INDIKATOR 10.4.1.(A) PERSENTASE RENCANA ANGGARAN UNTUK BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL PEMERINTAH PUSAT

GAMBAR 10.12.

PERSENTASE RENCANA ANGGARAN UNTUK BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL PEMERINTAH PUSAT, 2015-2021



Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial di tahun 2021 mengalami penurunan. Selain disebabkan oleh berkurangnya total belanja pemerintah pusat, anggaran lebih banyak difokuskan ke pelayanan umum dan kesehatan dibandingkan dengan perlindungan sosial.

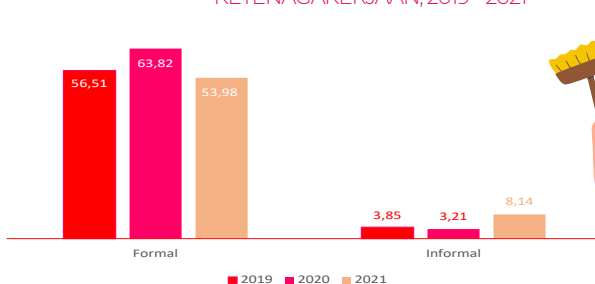


Sumber: Kementerian Keuangan

INDIKATOR 10.4.1.(B) PROPORSI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

GAMBAR 10.13.

PROPORSI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, 2019 - 2021



Terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan sektor formal dan informal. Pada tahun 2021, terdapat 54 dari tiap 100 orang pekerja sektor formal yang menjadi peserta program jaminan sosial. Sedangkan pada sektor informal, hanya terdapat 9 dari tiap 100 pekerja yang menjadi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

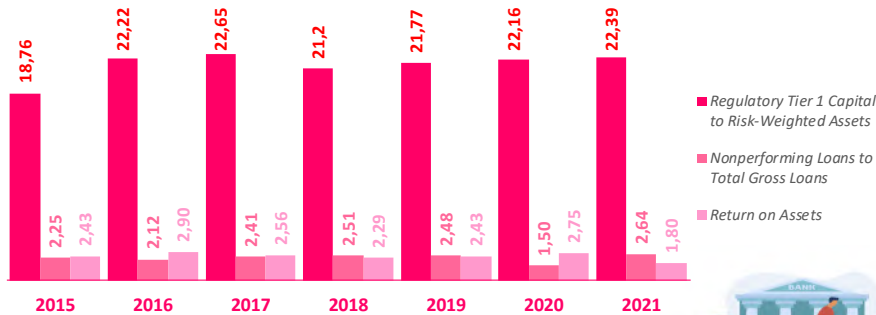
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan



INDIKATOR 10.5.1.(A) INDIKATOR KESEHATAN PERBANKAN

GAMBAR 10.14.

INDIKATOR KESEHATAN BANK (PERSENTASE), 2015-2021



Sumber: Bank Indonesia



Pada tahun 2021, tingkat ketahanan perbankan (*regulatory tier 1 capital to risk-weighted assets*) dan kualitas aset dalam portofolio kredit (*nonperforming loans to total gross loans*) mengalami peningkatan. Sementara itu, tingkat efisiensi bank dalam mengelola asetnya mengalami penurunan.

INDIKATOR 10.7.2.(A) JUMLAH DOKUMEN KERJASAMA KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ANTARA NEGARA RI DENGAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN

GAMBAR 10.15.

JUMLAH DOKUMEN KERJASAMA KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ANTARA NEGARA RI DENGAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN, 2021

Pada tahun 2021, terdapat 4 dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara Indonesia dengan negara tujuan penempatan.



Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

INDIKATOR 10.7.2.(B) JUMLAH FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN TKLN BERDASARKAN OKUPASI

GAMBAR 10.16.

JUMLAH TENAGA KERJA LUAR NEGERI BERDASARKAN JENIS KELAMIN, 2021



Berdasarkan jenis kelamin, jumlah TKLN perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah TKLN laki-laki. Terdapat 63.853 perempuan dan 8.711 laki-laki sebagai TKLN di tahun 2021.

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



11

KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

Tujuan 11 dalam agenda TPB/SDGs adalah kota dan permukiman yang berkelanjutan. Tujuan ini merupakan bagian dari pilar ekonomi, yang terdiri dari sepuluh target, di antaranya adalah menjamin akses yang aman dan terjangkau terhadap perumahan dan sistem transportasi umum, memperkuat urbanisasi serta perencanaan penanganan permukiman yang terintegrasi, mengurangi dampak lingkungan perkotaan yang merugikan, serta menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau.

Capaian indikator-indikator di tujuan 11 secara umum sedikit lebih baik pada tahun 2021. Terdapat 60,90 persen rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap hunian yang layak. Persentase sampah yang terkelola juga mengalami peningkatan, menjadi 64,56 persen pada tahun 2021. Keamanan juga terus meningkat, ditunjukkan pada penurunan persentase penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam setahun terakhir. Selain itu, persentase pemerintah daerah yang mengadopsi strategi penanggulangan bencana daerah juga mengalami peningkatan capaian menjadi 37,16 persen di tahun 2021. Indeks Kualitas Udara juga terus meningkat selama tiga tahun terakhir.

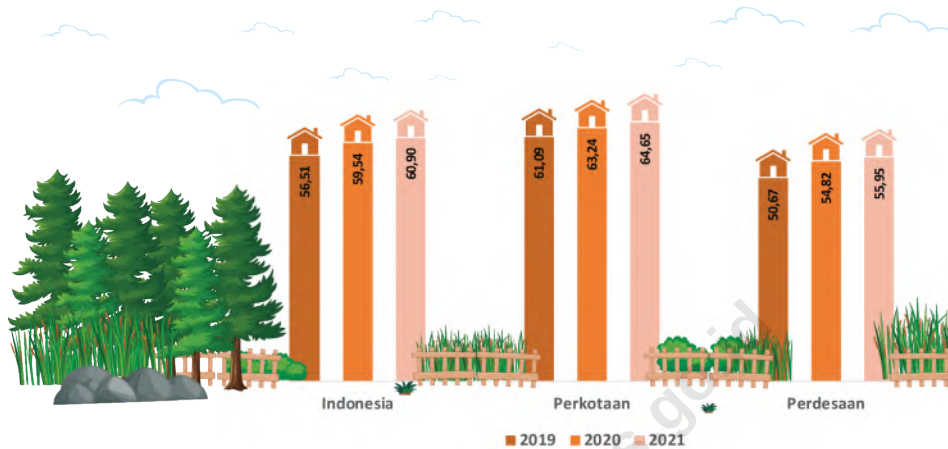




INDIKATOR 11.1.1.(A) **PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU**

GAMBAR 11.1.

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK, 2019-2021



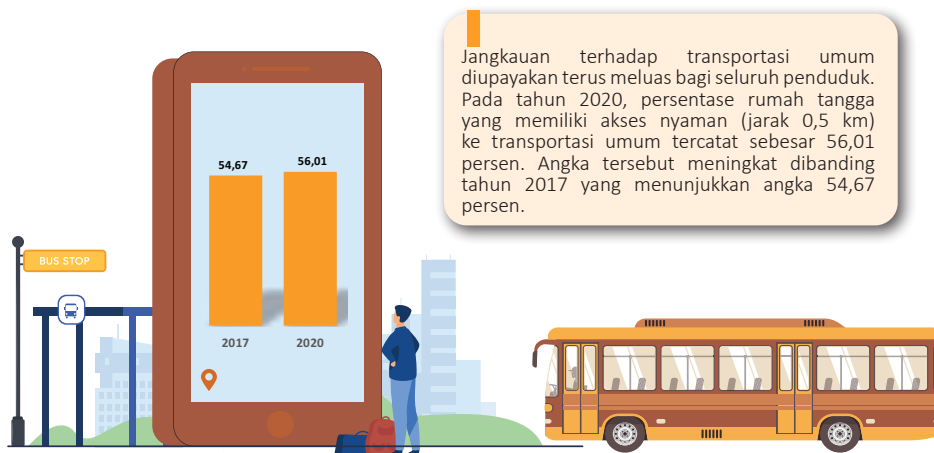
Akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua merupakan salah satu target di Tujuan 11. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Indonesia tercatat sebesar 60,90 persen. Angka capaian terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, kesenjangan akses masih terjadi antara perkotaan dan perdesaan.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 11.2.1.(A) **PROPORSI POPULASI YANG MENDAPATKAN AKSES YANG NYAMAN PADA TRANSPORTASI PUBLIK**

GAMBAR 11.2.

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES NYAMAN (JARAK 0,5 KM) KE TRANSPORTASI UMUM, 2017 DAN 2020



Jangkauan terhadap transportasi umum diupayakan terus meluas bagi seluruh penduduk. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman (jarak 0,5 km) ke transportasi umum tercatat sebesar 56,01 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2017 yang menunjukkan angka 54,67 persen.

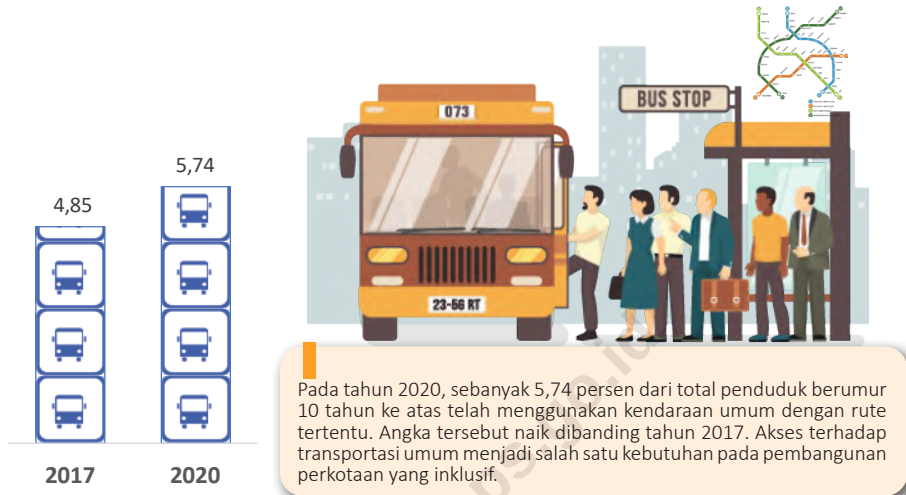
Sumber: Susenas Modul Hansos, Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 11.2.1.(B) PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI TRANSPORTASI UMUM

GAMBAR 11.3.

PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DENGAN RUTE TERTENTU, 2017 DAN 2020

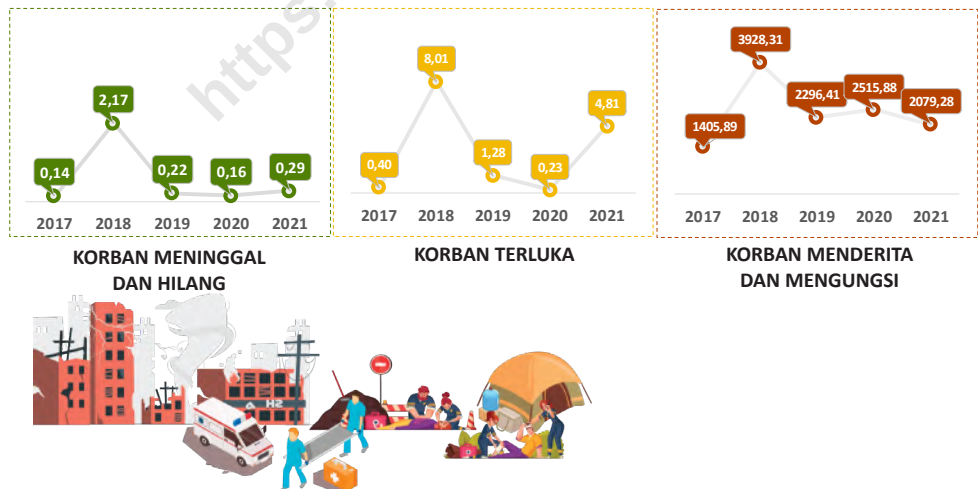


Sumber: Susenas Modul Hansos, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 11.5.1* JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG, DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG

GAMBAR 11.4.

JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG, DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG, 2017-2021



Salah satu target di tujuan 11 adalah mengurangi jumlah kematian dan dampak yang disebabkan oleh bencana. Namun, pada tahun 2021, jumlah korban meninggal dan hilang serta korban terluka mengalami peningkatan. Masing-masing menunjukkan angka 0,29 dan 4,81 per 100.000 orang.

Catatan: Data Korban dan Kerusakan Menurut Wilayah diakses dari <https://dibi.bnpb.go.id/kwilayah/index> pada 2 Desember 2022

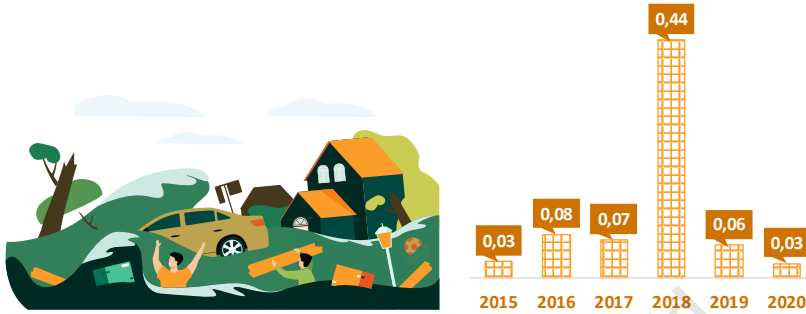
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 11.5.2.(A) PROPORSI KERUGIAN EKONOMI LANGSUNG AKIBAT BENCANA RELATIF TERHADAP PDB

GAMBAR 11.5.

PROPORSI KERUGIAN EKONOMI LANGSUNG AKIBAT BENCANA RELATIF TERHADAP PDB, 2015-2020



Mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana relatif terhadap PDB menjadi salah satu target yang terdapat pada Tujuan 11. Pada tahun 2020, tercatat proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB sebesar 0,03 persen, turun dibandingkan tahun 2019. Di tahun 2018, proporsi kerugian mencapai 0,44 persen akibat banyaknya bencana alam yang terjadi pada periode tersebut.

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 11.6.1.(B) PERSENTASE SAMPAH NASIONAL YANG TERKELOLA

GAMBAR 11.6.

PERSENTASE SAMPAH NASIONAL YANG TERKELOLA, 2015-2021

Penanganan sampah di perkotaan sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan di daerah perkotaan. Sekitar 64,56 persen dari total sampah yang dihasilkan telah terkelola di tahun 2021. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, dan diusahakan terus meningkat untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan.



Catatan: Akses SISPSN pada tanggal 04 November 2022

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



INDIKATOR 11.6.2.(A) RATA-RATA TAHUNAN MATERI PARTIKULAT HALUS PM 10

GAMBAR 11.7.

RATA-RATA TAHUNAN MATERI PARTIKULAT HALUS PM 10, 2020

Tingkat rata-rata tahunan partikel halus (PM10) pada tahun 2020 sebesar $< 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$

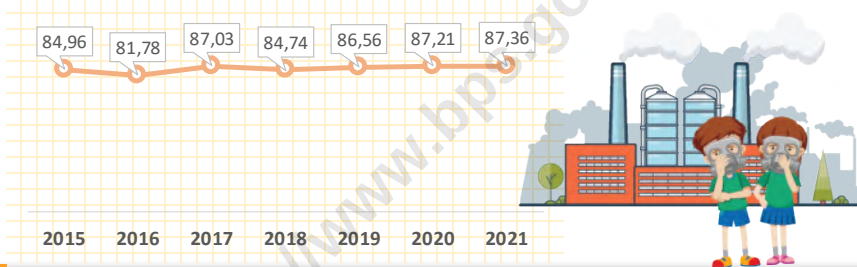


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR 11.6.2.(B) INDEKS KUALITAS UDARA

GAMBAR 11.8.

INDEKS KUALITAS UDARA, 2015-2021



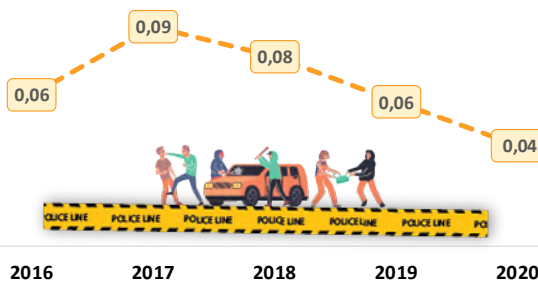
Kualitas udara, khususnya di daerah perkotaan, perlu perhatian khusus karena banyaknya kendaraan bermotor dan industri. Polusi udara dapat memberikan dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Salah satu indikator yang mengukur kualitas udara adalah Indeks Kualitas Udara. Semakin tinggi indeks menunjukkan kualitas udara yang semakin baik. Pada 2021, Indeks mencapai 87,36 yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR 11.7.2.(A) PROPORSI PENDUDUK YANG MENGALAMI KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

GAMBAR 11.9.

PROPORSI PENDUDUK YANG MENGALAMI KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR, 2016-2020



Penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan selama tahun 2020 sebesar 0,04 persen. Angka tersebut terus turun dari empat tahun terakhir. Salah satu syarat untuk menjadikan kota yang aman dan inklusif adalah keamanan untuk semua, baik perempuan, anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas.

Catatan: *Time reference* indikator adalah 1 Januari - 31 Desember t-1 (Data Januari-Desember 2020 diperoleh dari Susenas 2021)

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 11.B.2*

PERSENTASE PEMERINTAH DAERAH YANG MENGADOPSI DAN MENERAPKAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG SELARAS DENGAN RENCANA/STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

GAMBAR 11.10.

PERSENTASE PEMERINTAH DAERAH (KABUPATEN/KOTA) YANG MEMILIKI RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD-PRB), 2018-2021



Sumber: Direktorat Tata Ruang dan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, 2022



12

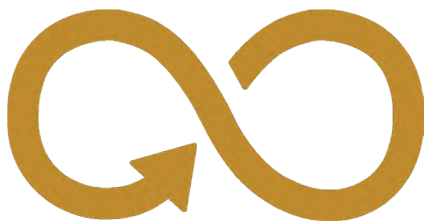
KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Menjadikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

Tujuan 12 dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Hingga saat ini, terdapat 12 indikator di level nasional yang telah tersedia.

Untuk mencapai target di tujuan ini, diperlukan kontribusi dari seluruh pihak dan lapisan masyarakat. Di tahun 2020, terdapat 864 satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup guna meningkatkan penanaman kesadaran budaya lingkungan. Persentase penurunan penggunaan merkuri turun hingga 31,48 persen pada 2021. Sementara itu, jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) serta timbulan sampah yang didaur ulang mengalami peningkatan. Namun, penurunan tingkat konsumsi perusak ozon mengalami peningkatan menjadi 31,73 persen di 2021.

Tidak hanya masyarakat, produsen dan pemerintah juga memiliki peran penting untuk pencapaian produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Diantaranya melalui publikasi laporan keberlanjutan perusahaan, sertifikasi ISO SNI 14001, dan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan.





INDIKATOR 12.3.1.(A) **PERSENTASE SISA MAKANAN**

GAMBAR 12.1. **INDEKS KERUGIAN PANGAN, 2019-2020**

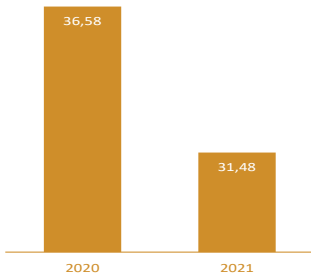


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Di saat sebagian orang mengalami kelaparan, di sisi lain beberapa orang membuang sisa makanannya. Kondisi ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab dalam hal produksi dan konsumsi. Pada tahun 2020, Indeks Kerugian Pangan di Indonesia mencapai 39,81. Angka tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 39,74.

INDIKATOR 12.4.1.(A) **PERSENTASE PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI DARI BASELINE 50 TON PENGGUNAAN MERKURI**

GAMBAR 12.2. **PERSENTASE PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI DARI BASELINE 50 TON PENGGUNAAN MERKURI, 2020-2021**

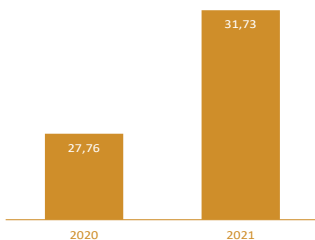


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada tahun 2021, pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri di Indonesia mencapai 31,48 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Antara lain sebagai upaya pengurangan penggunaan merkuri adalah pengurangan penggunaan baterai dan termometer.

INDIKATOR 12.4.1.(B) **PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT KONSUMSI PERUSAK OZON DARI BASELINE**

GAMBAR 12.3. **PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT KONSUMSI PERUSAK OZON DARI BASELINE, 2020-2021**



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

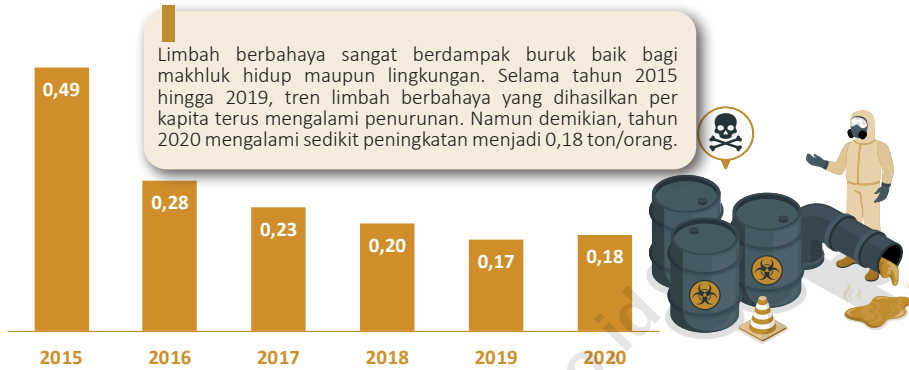
Salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya adalah mengurangi konsumsi bahan perusak ozon, antara lain dari *Hydrochlorofluorocarbon* (HCFC) yang mulai digantikan dengan *Hydrofluorocarbon* (HFC) yang sering dimanfaatkan dalam mesin penyejuk udara. Pada tahun 2021, persentase penurunan penggunaan HCFC sudah mencapai 31,73 persen.





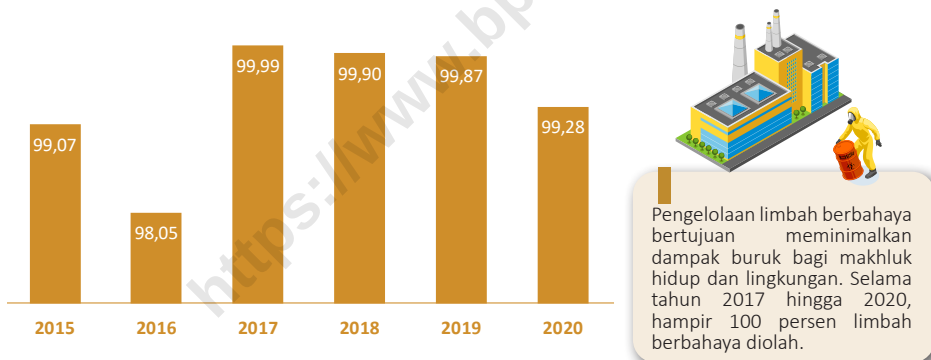
INDIKATOR 12.4.2* (A) LIMBAH B3 YANG DIHASILKAN PER KAPITA; DAN (B) PROPORSI LIMBAH B3 YANG DITANGANI/DIOLAH BERDASARKAN JENIS PENANGANANNYA/PENGELOLAANNYA

GAMBAR 12.4. LIMBAH B3 YANG DIHASILKAN PER KAPITA (TON/ORANG), 2015-2020



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Pusat Statistik

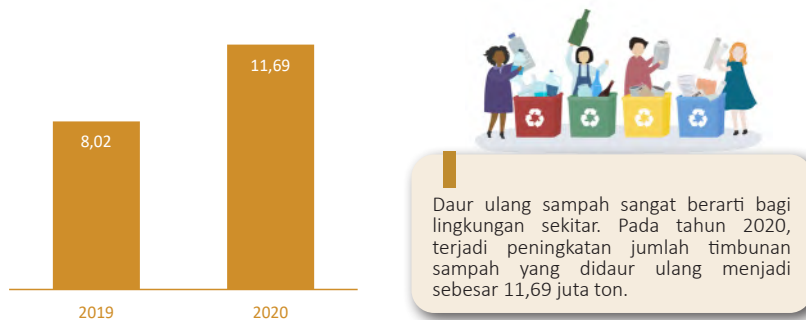
GAMBAR 12.5. PROPORSI LIMBAH B3 YANG DIOLAH, 2015-2020



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 12.5.1.(A) JUMLAH TIMBULAN SAMPAH YANG DIDAUR ULANG

GAMBAR 12.6. JUMLAH TIMBULAN SAMPAH YANG DIDAUR ULANG (JUTA TON), 2019-2020



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



INDIKATOR 12.6.1* JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMPUBLIKASI LAPORAN KEBERLANJUTANNYA

GAMBAR 12.7. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGUNG JAWAB, 2019

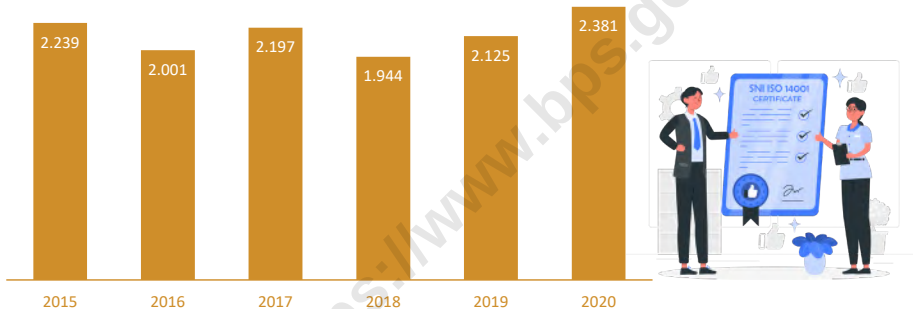


Target 12.6 adalah mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus laporannya. Pada tahun 2019, 100 perusahaan telah mempublikasikan laporan keberlanjutannya.

Sumber: BEI

INDIKATOR 12.6.1.(A) JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN SERTIFIKASI SNI ISO 14001 TINGKAT KEMISKINAN EKSTREM

GAMBAR 12.8. JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN SERTIFIKASI SNI ISO 14001, 2015-2020



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SNI ISO 14001 merupakan standar sistem manajemen lingkungan yang telah disepakati secara internasional untuk mengendalikan seluruh aspek dampak lingkungan dengan mengacu pada batas baku mutu yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, jumlah perusahaan di Indonesia yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 sebanyak 2.381 perusahaan.

INDIKATOR 12.7.1.(A) JUMLAH PRODUK RAMAH LINGKUNGAN YANG TEREGERISER DAN MASUK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

TABEL 12.1. JUMLAH PRODUK RAMAH LINGKUNGAN YANG TEREGERISER DAN MASUK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, 2020-2021

Disagregasi Jenis Produk	
2020	2021
6 Produk	9 Produk
Kertas Fotokopi	Kertas Fotokopi
Folder File	Folder File
Furnitur Kayu Bersertifikat SVLK	Furnitur Kayu Bersertifikat SVLK
Piranti Pengkondisi Udara (Air Conditioner/AC)	Piranti Pengkondisi Udara (Air Conditioner/AC)
Microwave (Alat Pengolah Limbah Medis)	Microwave (Alat Pengolah Limbah Medis)

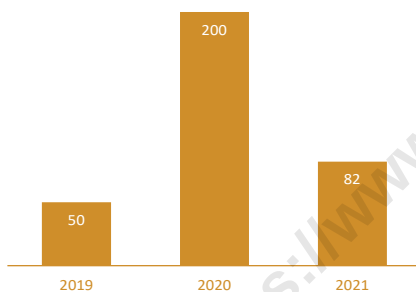
Disagregasi Jenis Produk	
2020	2021
Autoclave Hybrid (Alat Pengolah Limbah Medis)	Autoclave Hybrid (Alat Pengolah Limbah Medis)
	Kayu Olahan untuk konstruksi
	Beton
	Semen

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan dimulai dari inventarisasi keperluan barang operasional kantor, daftar pilihan barang dan jasa diatur dengan Permen LHK No. 5 Tahun 2019 sebagaimana pada Tabel 12.1.

INDIKATOR 12.7.1.(B) JUMLAH DOKUMEN PENERAPAN LABEL RAMAH LINGKUNGAN UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA

GAMBAR 12.9. JUMLAH DOKUMEN PENERAPAN LABEL RAMAH LINGKUNGAN UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA, 2019-2021



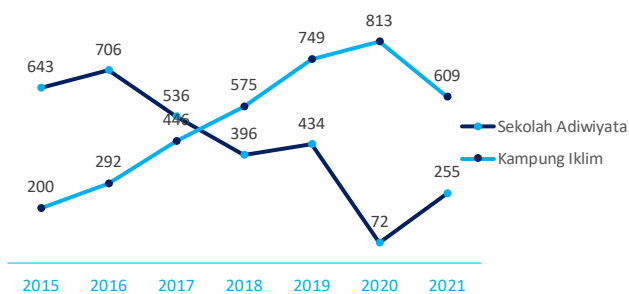
Jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa pada tahun 2021 mengalami penurunan, dari yang semula berjumlah 200 dokumen di tahun 2020 menjadi 82 dokumen di tahun 2021.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR 12.8.1.(A) JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN LEMBAGA/ KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP

GAMBAR 12.10. JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN LEMBAGA/KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP, 2015-2021



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam hendaknya dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya melalui satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang mengalami tren peningkatan selama tahun 2015 hingga 2021.



INDIKATOR 12.8.1.(B) JUMLAH FASILITAS PUBLIK YANG MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT (SPM) DAN TEREJISTER

GAMBAR 12.11.

JUMLAH FASILITAS PUBLIK YANG MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT (SPM) DAN TEREJISTER, 2021

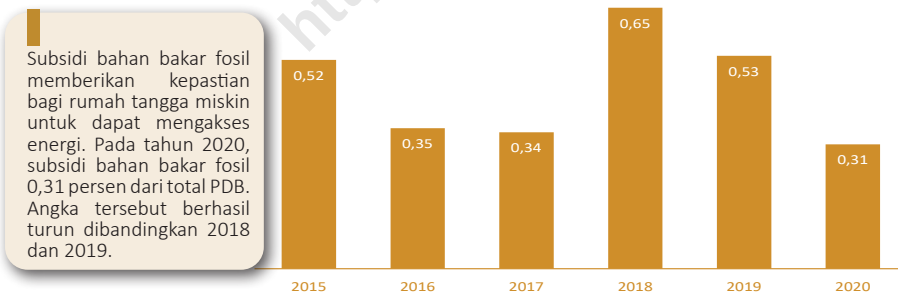


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR 12.C.1* (A) JUMLAH SUBSIDI BAHAN BAKAR FOSIL SEBAGAI PERSENTASE DARI PDB; DAN (B) JUMLAH SUBSIDI BAHAN BAKAR FOSIL SEBAGAI PROPORSI DARI TOTAL PENGELUARAN NASIONAL UNTUK BAHAN BAKAR FOSIL

GAMBAR 12.12.

JUMLAH SUBSIDI BAHAN BAKAR FOSIL SEBAGAI PERSENTASE DARI PDB, 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik





13

PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

E misi industri, pembakaran bahan bakar fosil, serta pembangunan ekonomi yang kurang memerhatikan lingkungan merupakan beberapa penyebab perubahan iklim. Tanpa disadari, aktivitas tersebut menyebabkan pemanasan global yang berdampak negatif, salah satunya meningkatnya frekuensi bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim serta dampaknya yang menjadi tujuan ke-13 dalam agenda TPB/SDGs.



Untuk mencapai tujuan di atas, beberapa target pada 2030 adalah memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya perubahan iklim, integrasi tindakan antisipasi dalam kebijakan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi dan adaptasi pengurangan dampak perubahan iklim. Pada tahun 2021, satuan pendidikan dan lembaga masyarakat peduli lingkungan hidup sebanyak 609 kampung iklim dan 255 sekolah adiwiyata. Namun demikian, ditengah meningkatnya bencana alam yang terjadi masih diperlukan edukasi kesiapsiagaan kepada masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Karena pada 2021 jumlah korban meninggal dan hilang serta terluka masih mengalami peningkatan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyusun kembali Rencana Penanggulangan Bencana yang selaras dengan rencana nasional.

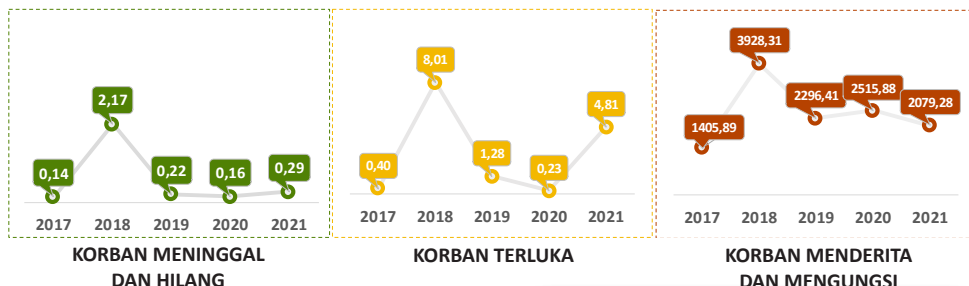


INDIKATOR 13.1.1*

JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG

GAMBAR 13.1.

JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG, 2017-2021



Meningkatnya frekuensi bencana alam seperti kekeringan dan banjir didorong oleh perubahan iklim. Pada tahun 2021, korban meninggal dan hilang serta korban terluka mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,29 dan 4,81 per 100.000 orang. Edukasi kesiapsiagaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko bencana.

Catatan: Data Korban dan Kerusakan Menurut Wilayah diakses dari <https://dibi.bnppb.go.id/kwilayah/index> pada 2 Desember 2022

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

INDIKATOR 13.1.3*

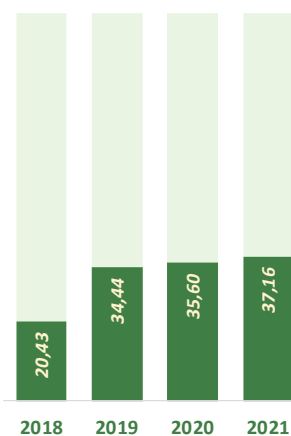
PERSENTASE PEMERINTAH DAERAH YANG MENGADOPTI DAN MENERAPKAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG SELARAS DENGAN RENCANA/STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

GAMBAR 13.2.

PERSENTASE PEMERINTAH DAERAH (KABUPATEN/KOTA) YANG MEMILIKI RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA (RAD-PRB), 2018-2021



Hingga tahun 2021, secara kumulatif sebanyak 37,16 persen pemerintah daerah kabupaten/kota telah mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak pemerintah daerah yang telah memiliki kebijakan, strategi, dan rencana aksi penanggulangan bencana yang sejalan dengan strategi nasional



Sumber: Direktorat Tata Ruang dan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, 2022

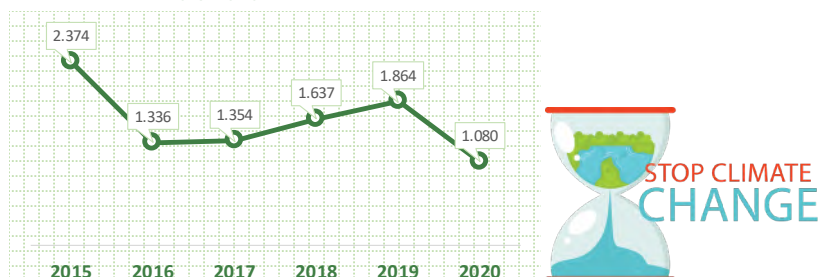


INDIKATOR 13.2.2*

JUMLAH EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) PER TAHUN

GAMBAR 13.3.

JUMLAH EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) PER TAHUN (JUTA TCO₂E), 2015-2020



Penurunan emisi GRK menjadi tantangan dalam penanganan perubahan iklim. Jumlah emisi GRK pada tahun 2020 berhasil turun menjadi 1.080 juta TCO₂E. Penurunan tersebut cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.864 juta TCO₂E. Pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan terus didorong untuk penurunan emisi GRK.

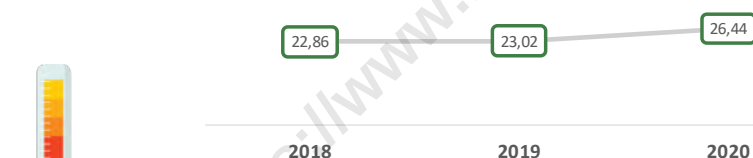
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR 13.2.2.(A)

POTENSI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

GAMBAR 13.4.

PERSENTASE POTENSI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK), 2018-2020



Tindakan antisipasi perubahan iklim sangat penting untuk mendukung penanganan perubahan iklim. Pada tahun 2020, persentase potensi penurunan emisi GRK mencapai 26,44 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

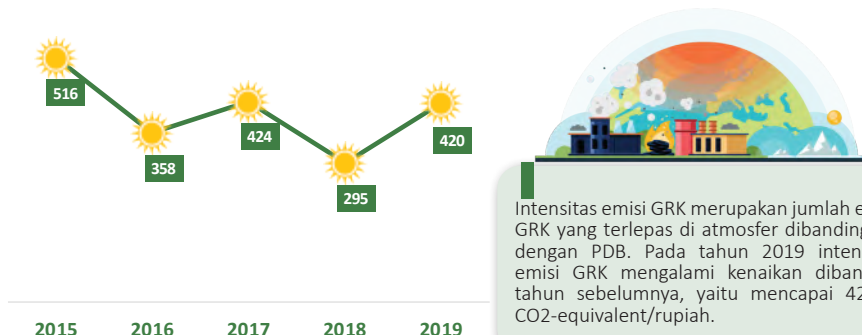
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

INDIKATOR 13.2.2.(B)

POTENSI PENURUNAN INTENSITAS EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

GAMBAR 13.5.

POTENSI PENURUNAN INTENSITAS EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) (T CO₂-EQUIVALENT/RUPIAH), 2015-2019



Intensitas emisi GRK merupakan jumlah emisi GRK yang terlepas di atmosfer dibandingkan dengan PDB. Pada tahun 2019 intensitas emisi GRK mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu mencapai 420 T CO₂-equivalent/rupiah.

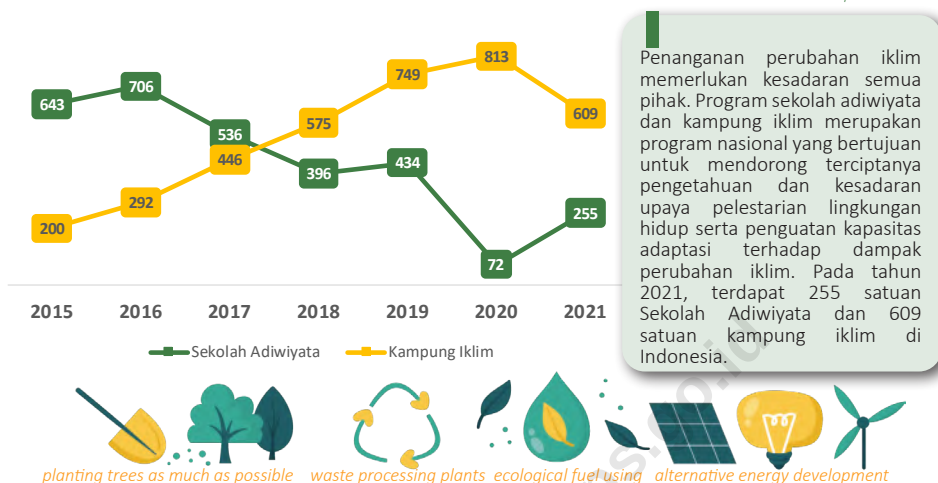
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas



INDIKATOR 13.3.1.(A) JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN LEMBAGA/ KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP

GAMBAR 13.6.

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN LEMBAGA/ KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP, 2015-2021



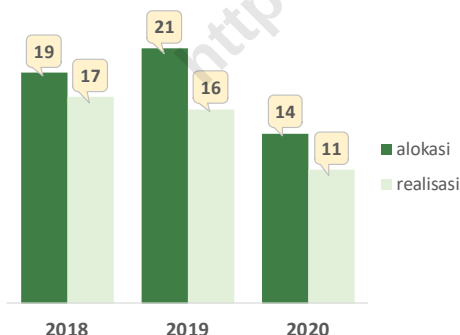
Penanganan perubahan iklim memerlukan kesadaran semua pihak. Program sekolah adiwiyata dan kampung iklim merupakan program nasional yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran upaya pelestarian lingkungan hidup serta penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Pada tahun 2021, terdapat 255 satuan Sekolah Adiwiyata dan 609 satuan kampung iklim di Indonesia.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR 13.A.1.(A) JUMLAH DANA PUBLIK (BUDGET TAGGING) UNTUK PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

GAMBAR 13.7.

JUMLAH DANA PUBLIK (BUDGET TAGGING) UNTUK TANDA PERUBAHAN IKLIM: ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (RP TRILIUN), 2018-2020



Anggaran perubahan iklim (*climate budget tagging*) merupakan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Alokasi untuk pembangunan rendah karbon di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 14 triliun rupiah. Realisasi pada tahun tersebut mencapai 11 triliun atau sekitar 78,6 persen dari total alokasi.

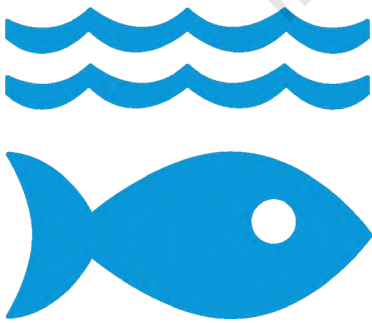
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas



14

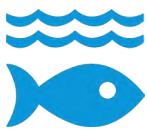
EKOSISTEM LAUTAN

Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan



Ekosistem laut mempunyai peran yang cukup besar bagi organisme laut maupun bagi manusia. Bagi organisme laut sebagai lahan untuk mencari makan dan tempat tinggal, sedangkan bagi manusia untuk penahan gelombang, tonggak pertahanan pangan, penyerap karbon, penghasil oksigen, pengembangan daerah dan sumber daya manusia. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan ke-14 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ada 10 target pada tingkat global yang menjadi alat untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan negara dalam memanfaatkan sumber daya lautan. Sementara untuk menghitung capaian pada tingkat nasional ada sebanyak 15 indikator yang bisa disajikan.

Pada Tujuan 14 secara umum Indonesia mengalami peningkatan capaian pada tahun 2021 dengan melihat dari beberapa indikator yang tersedia. Indikator-indikator tersebut antara lain proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis aman, jumlah luas kawasan konservasi perairan laut, dan persentase kepatuhan pelaku usaha.



INDIKATOR 14.1.1(A) PERSENTASE PENURUNAN SAMPAH TERBUANG KE LAUT

GAMBAR 14.1. PERSENTASE PENURUNAN SAMPAH TERBUANG KE LAUT, 2018-2020



Persentase Pengurangan
15,92

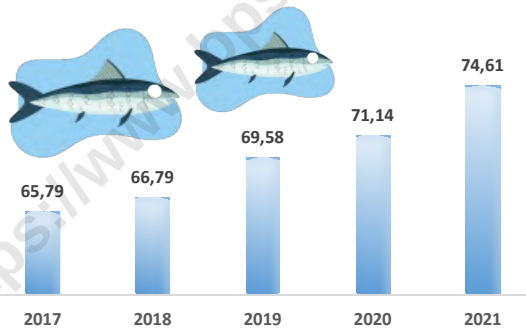
Bersumber dari Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, diketahui bahwa jumlah penurunan sampah yang terbuang ke laut selama kurun waktu 2018-2020 sebanyak 15,92 persen. Jika dilihat penurunan per tahunnya, tahun 2019 turun 8,06 persen sedangkan tahun 2020 turun 7,87 persen.

Sumber: Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, 2021

INDIKATOR 14.4.1* PROPORSI TANGKAPAN JENIS IKAN LAUT YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN

GAMBAR 14.2. PROPORSI TANGKAPAN JENIS IKAN LAUT YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN, 2017-2021

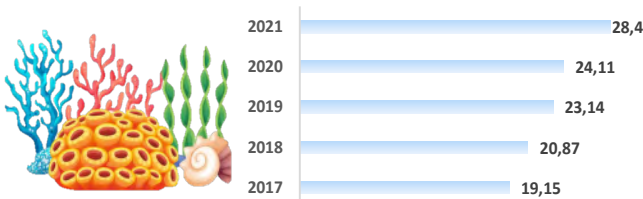
Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 peningkatan terus terjadi pada proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman. Indikator ini bermanfaat untuk memantau kelestarian sumber daya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan ikan.



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR 14.5.1* JUMLAH LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT

GAMBAR 14.3. JUMLAH LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT, 2017-2021



Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Indikator ini bermanfaat untuk memantau kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta tersedianya pengelolaan kawasan konservasi secara optimal dan berkelanjutan.

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

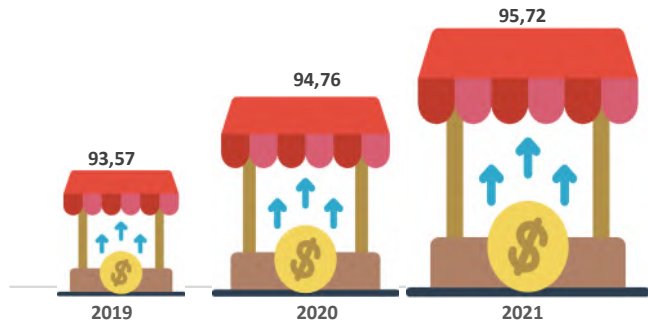


INDIKATOR 14.6.1.(A) PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA

GAMBAR 14.4.

PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA, 2019-2021

Peningkatan terus terjadi pada kepatuhan pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dimana tahun 2021 mencapai 95,72 persen. Manfaat dari indikator ini untuk mencegah kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.

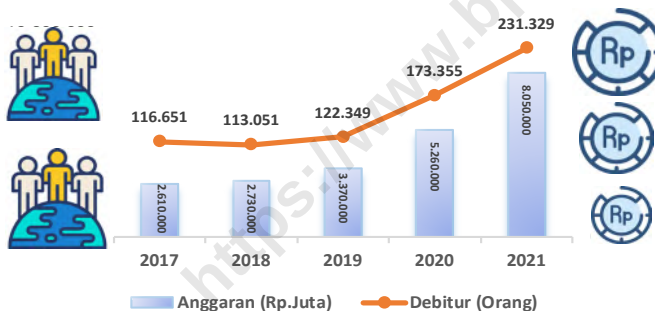


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR 14.B.1.(A) JUMLAH PROVINSI DENGAN PENINGKATAN AKSES PENDANAAN USAHA NELAYAN

GAMBAR 14.5.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SEKTOR KELAUTAN PERIKANAN, 2017-2021



Data yang tersedia dari Indikator ini adalah data KUR sektor kelautan perikanan, dimana KUR ini sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 terus terjadi peningkatan baik dari sisi anggaran maupun debiturnya.

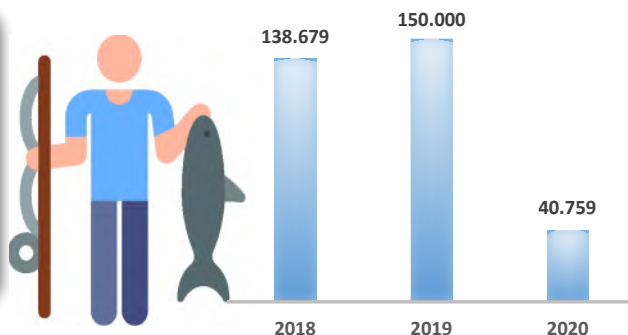
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR 14.B.1.(B) JUMLAH NELAYAN YANG TERLINDUNGI

GAMBAR 14.6.

JUMLAH NELAYAN YANG TERLINDUNGI (ORANG), 2018-2020

Terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 untuk nelayan yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan melakukan usaha perikanan atau usaha pergarakan. Penurunan ini tak lepas dari salah satu dampak Pandemi yang terjadi di Indonesia.



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan



15

EKOSISTEM DARATAN

Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati



Salah satu tujuan yang masuk dalam Pilar Pembangunan Lingkungan adalah Tujuan 15 yaitu Ekosistem Daratan. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati merupakan tujuan-tujuan dari pembangunan berkelanjutan ekosistem daratan. Untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan dalam menanggulangi ekosistem daratan yang berkelanjutan terdapat 12 target dengan 21 indikatornya.

Tingkat keberhasilan dari Tujuan 15 bisa dilihat dari beberapa indikator yang mengalami perbaikan seperti misalnya, terjadi sedikit penambahan pada proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan pada tahun 2021 menjadi 50,90 persen. Jumlah KPH yang masuk kategori maju untuk jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang masuk dalam kategori berkelanjutan juga meningkat pada tahun 2021 menjadi 11. Sementara untuk jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 38 kasus.

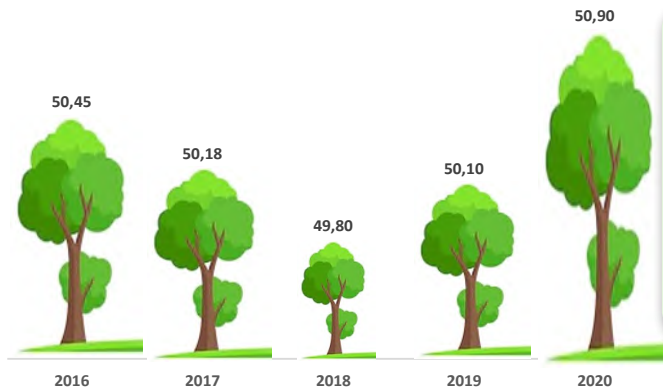


INDIKATOR 15.1.1*

PROPORSI KAWASAN HUTAN TERHADAP TOTAL LUAS LAHAN

GAMBAR 15.1.

PROPORSI KAWASAN HUTAN TERHADAP TOTAL LUAS LAHAN (PERSEN), 2016-2020



Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, ditetapkan oleh pemerintah bahwa kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sejak tahun 2018 hingga 2021 proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan mengalami peningkatan, dimana tahun 2021 mencapai 50,90 persen.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR 15.1.2.(A) LUAS KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI (HCV)

GAMBAR 15.2.

LUAS KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI (HCV) (HA), 2019-2020

Manfaat *High Conservation Value* (HCV) adalah menjadi *database* keragaman hayati dan menjadi bahan evaluasi untuk alternatif kebijakan pimpinan dalam mempertahankan ekosistem mendatang. Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 menjadi 33,7 ribu ha.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

INDIKATOR 15.2.1.(A) JUMLAH KPH YANG MASUK KATEGORI MAJU

GAMBAR 15.3.

JUMLAH KPH YANG MASUK KATEGORI MAJU, 2020-2021



Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Pada tahun 2021, jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang masuk dalam kategori berkelanjutan sebanyak 11, sedangkan jumlah Pengelolaan Hutan Lindung yang masuk dalam kategori berkelanjutan sebanyak 13.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



INDIKATOR 15.3.1*

PROPORSI LAHAN YANG TERDEGRADASI TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN

GAMBAR 15.4.

PROPORSI LAHAN YANG TERDEGRADASI TERHADAP LUAS LAHAN KESELURUHAN, 2019

Degradasi lahan merupakan pengurangan produktivitas biologis dan ekonomi dan kompleksitas lahan pertanian, termasuk penggunaan lahan dan praktik pengelolaan. Manfaat dari indikator ini adalah untuk memantau peningkatan luas lahan terdegradasi guna mengendalikan laju kerusakan hutan dan lahan. Pada tahun 2019, proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan di Indonesia sebesar 7,46 persen.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR 15.4.1*

SITUS PENTING KEANEKARAGAMAN HAYATI PEGUNUNGAN DALAM KAWASAN KONSERVASI

TABEL 15.1.

SITUS PENTING KEANEKARAGAMAN HAYATI PEGUNUNGAN DALAM KAWASAN KONSERVASI, 2020

FUNGSI AREA	JUMLAH AREA	CAKUPAN AREA (HA)
Cagar Alam	36	1.532.824,72
Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	3	19.771,23
Suaka Margasatwa	5	846.144,55
Taman Buru	1	7.271,00
Taman Nasional	11	1.665.084,24
Taman Wisata Alam	18	62.971,34
TOTAL	74	4.134.067,08

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tampak bahwa di tahun 2020 cakupan area cagar alam memiliki jumlah area terbanyak yaitu 36 area dengan luas 1.532.824,72 ha. Sedangkan yang memiliki cakupan area terluas adalah Taman Nasional (1.665.084,24 ha) dengan jumlah area sebanyak 11. Indikator ini mempunyai manfaat untuk memantau situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.



INDIKATOR: 15.4.2* INDEKS TUTUPAN HIJAU PEGUNUNGAN

TABEL 15.2. INDEKS TUTUPAN HIJAU PEGUNUNGAN, 2017 DAN 2019

TAHUN	TUTUPAN TANAH	KAWASAN HUTAN	PENGUNAAN AREA LAINNYA	TOTAL
2017	Hutan lahan kering primer	38.293,50	1.203,10	39.496,60
	Hutan lahan kering sekunder	31.761,90	4.194,00	35.955,90
	Semak/Belukar	8.746,60	6.458,90	15.205,50
	Pertanian lahan Kering Campur semak	8.613,40	16.286,20	24.899,60
	Total 2017	87.415,40	28.142,10	115.557,50
2019	Hutan lahan kering primer	39.070,20	1.193,50	40.263,80
	Hutan lahan kering sekunder	30.460,70	3.846,90	34.307,60
	Semak Belukar	7.428,40	5.235,20	12.663,60
	Pertanian lahan Kering Campur semak	9.465,40	16.832,10	26.297,50
	Total 2019	86.424,70	27.107,70	113.532,40
Indeks Tutupan Hijau Pegunungan		98,87	96,32	98,25

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indeks Tutupan Hijau Pegunungan (*Mountain Green Cover Index/MGCI*) bertujuan untuk mengukur perubahan vegetasi hijau di area pegunungan, seperti kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman, dan tanah lainnya (sesuai IPCC). Indikator ini memiliki manfaat untuk memantau perubahan vegetasi hijau di daerah pegunungan, baik kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman, dan tanah lainnya. Indeks tutupan hijau pegunungan tahun 2019 sebesar 98,25.

INDIKATOR 15.5.1* INDEKS DAFTAR MERAH (RED-LIST INDEX)

TABEL 15.3. INDEKS DAFTAR MERAH (RED-LIST INDEX), 2019

BINATANG	BASLINE 2014 (JUMLAH)	2019 (JUMLAH)	PENGURANGAN/ PENINGKATAN (JUMLAH)	INDEKS 2019
Harimau Sumatera	71	122	51	171,83
Gajah Sumatera	313	344	31	109,90
Badak	77	90	13	116,88
Banteng	277	321	44	115,88
Owa	431	1.236	805	0,29
Orangutan	1.441	2.408	967	167,11
Bekantan	1.957	2.892	935	147,78
Komodo	5.933	2.932	-3.001	49,42
Jalak Bali	147	105	-42	71,43
Maleo	6.397	2.816	-3.581	44,02
Rusa Babi	822	551	-271	67,03
Anoa	513	285	-228	55,56
Elang	65	108	43	166,15
Burung Kakatua	1.188	12.042	10.854	1.013,64
Macan Tutul Jawa	7	49	42	700,00
Rusa Bawean	275	304	29	110,55
Paradise	66	93	27	140,91
Surili	15	27	12	180,00



BINATANG	BASELINE 2014 (JUMLAH)	2019 (JUMLAH)	PENGURANGAN/ PENINGKATAN (JUMLAH)	INDEKS 2019
Tarsius	82	108	26	131,71
Monyet Hitam Sulawesi	319	469	150	147,02
Rangkong Sumba	30	92	62	306,67
Kasturi Leher Ungu	8	12	4	150,00
Turtle	7.036	7.467	431	106,13
Kanguru Pohon	10	2	-8	20,00
Celepuk Rinjani	27	263	236	974,07
TOTAL	27.507	35.138	7.631	
RED-LIST INDEX				127,74

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indeks Daftar Merah (*Red List Index*/RLI) tahun 2019 sebesar 127,74 (tahun dasar 2014=100). Tujuan di kembangkannya Indeks Daftar Merah ini untuk menunjukkan tren risiko kepunahan keseluruhan untuk spesies sekaligus menyumbangkan indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui kemajuan dalam mencapai target mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati.

INDIKATOR 15.7.1.(A) JUMLAH KASUS PERBURUAN ATAU PERDAGANGAN ILEGAL TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL)

GAMBAR 15.5. JUMLAH KASUS PERBURUAN ATAU PERDAGANGAN ILEGAL TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL), 2016-2021



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

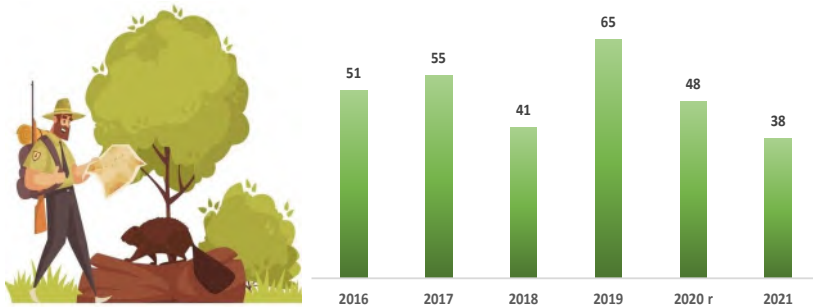
Dalam rentang waktu 2016-2021 jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 65 kasus dan sejak tahun tersebut selalu mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 38 kasus. Penurunan kasus tersebut berkat upaya pemerintah dalam pencegahan dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak kejahatan TSL. Ancaman penyakit menular yang dibawa oleh tumbuhan dan satwa liar tersebut juga sangat berpengaruh dalam hal ini.



INDIKATOR 15.C.1.(A) JUMLAH KASUS PERBURUAN ATAU PERDAGANGAN ILEGAL TSL

GAMBAR 15.6.

JUMLAH KASUS PERBURUAN ATAU PERDAGANGAN ILEGAL TSL, 2016-2021



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL tahun 2021 kembali mengalami penurunan hingga 38 kasus. Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meminimalisir kejahatan TSL antara lain penguatan tata kelola dan penegakan hukum di hulu/habitat, sinergitas manajemen *authority* dan *enforcement authority* di tingkat hilir baik legal maupun ilegal. Pelanggaran ilegal akan dilakukan penegakan hukum sementara pelanggaran legal akan dilakukan tata kelola baik regulasi, sistem perizinan, kontrol monitoring dan evaluasi perizinan.

<https://www.kemling.go.id>

KELURAHAN PEMILK LINGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

KABUPATEN : BADUNG

KECAMATAN / DISTRIK : MENJWI

DESA / KELURAHAN : SADIHO

NOMOR TPS : 18

NAMA KETUA : FIRMAN HUDAIRMAN



16

PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan



Perdamaian, penegakan hak-hak asasi manusia, kelembagaan yang tangguh dan pemerintahan yang efektif menjadi salah satu pilar penting terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Konflik, kekerasan bersenjata, dan rasa tidak aman dapat menjadi disrupsi bagi proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif menjadi prasyarat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Capaian indikator yang merefleksikan stabilitas keamanan hingga tahun 2021 terus menunjukkan perbaikan, seperti jumlah kasus kejahatan pembunuhan, proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan, dan jumlah kematian yang disebabkan konflik menunjukkan tren penurunan. Serupa, kelembagaan juga semakin tangguh dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang direfleksikan oleh semakin banyaknya instansi pemerintah yang mendapat opini WTP dan indeks reformasi birokrasi dan nilai sapip minimal B dan didukung oleh nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi yang konsisten meningkat.



INDIKATOR 16.1.1.(A) JUMLAH KASUS KEJAHATAN PEMBUNUHAN PADA SATU TAHUN TERAKHIR

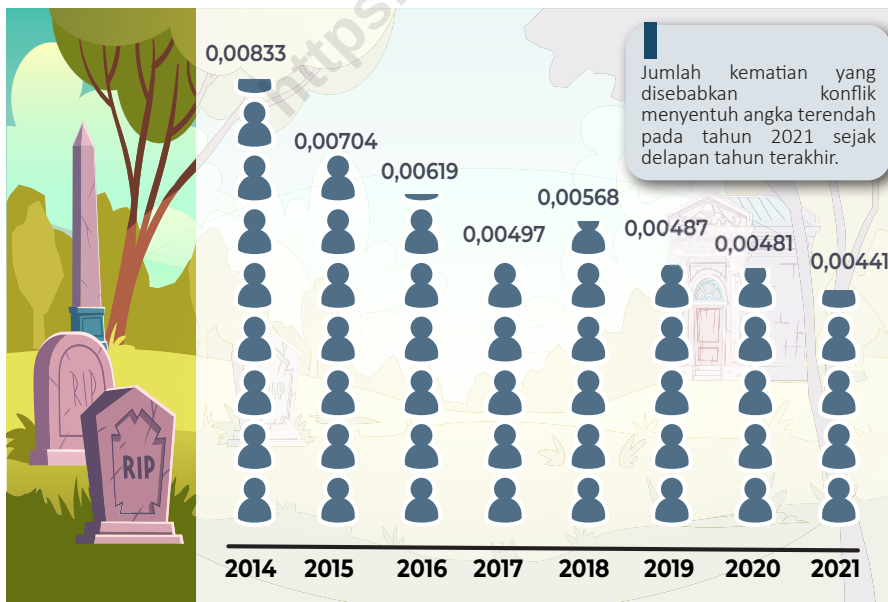
GAMBAR 16.1. JUMLAH KASUS KEJAHATAN PEMBUNUHAN PADA SATU TAHUN TERAKHIR, 2016-2021



Sumber: POLRI

INDIKATOR 16.1.2. (A) KEMATIAN DISEBABKAN KONFLIK PER 100.000 PENDUDUK

GAMBAR 16.2. JUMLAH KEMATIAN DISEBABKAN KONFLIK PER 100.000 PENDUDUK, 2014-2021

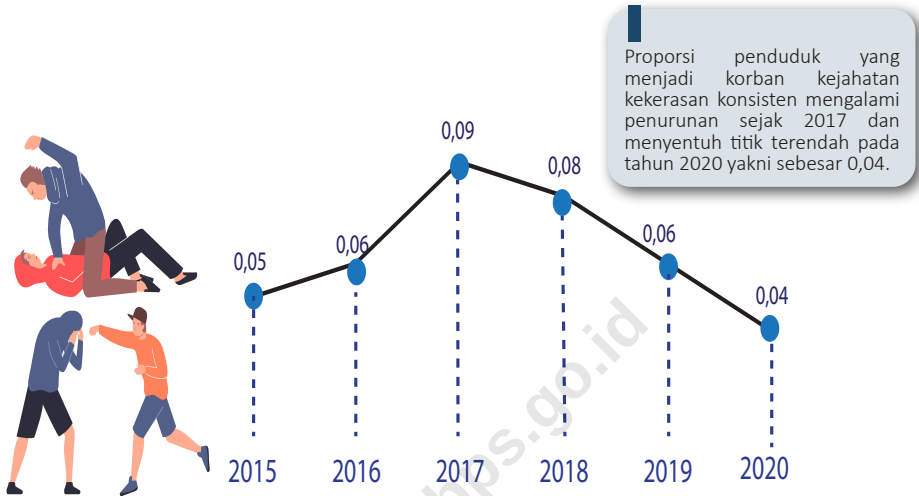


Sumber: POLRI



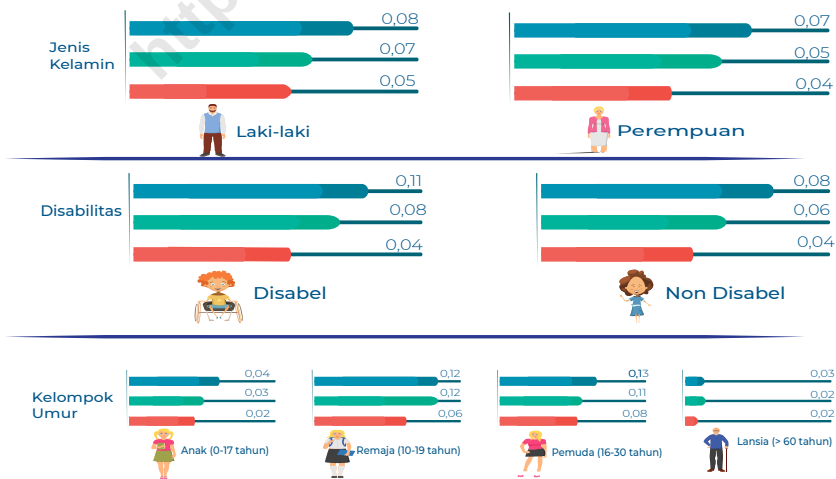
INDIKATOR 16.1.3.(A) PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

GAMBAR 16.3. PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN, 2015-2020



Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

GAMBAR 16.4. PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN MENURUT JENIS KELAMIN, STATUS DISABILITAS, DAN KELOMPOK UMUR, 2018-2020



Orang dengan disabilitas dan remaja usia 10-19 tahun merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban kejahatan kekerasan.

Catatan: *Time reference* indikator adalah 1 Januari - 31 Desember t-1 (Data Januari-Desember 2020 diperoleh dari Susenas 2021)

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

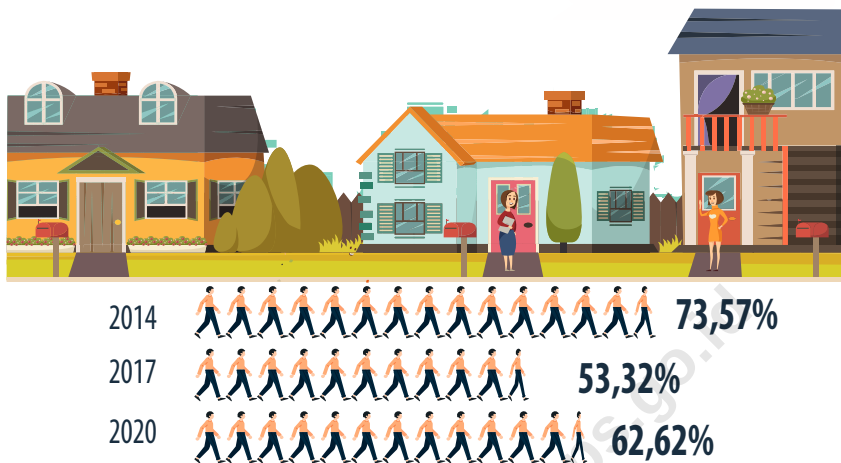


INDIKATOR 16.1.4

PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA

GAMBAR 16.5.

PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA (PERSEN), 2014, 2017 DAN 2020



Rasa aman penduduk untuk berjalan sendiri di area tempat tinggalnya meningkat pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2017.

Sumber: Susenas Modul Hansos, Badan Pusat Statistik

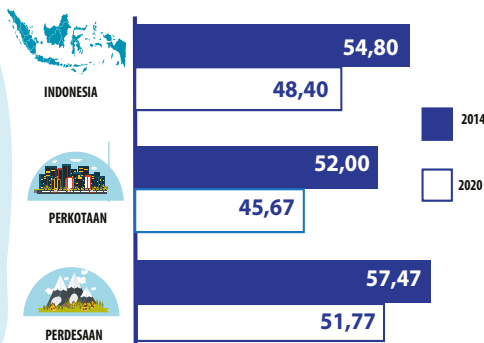
INDIKATOR 16.2.1.(A)

PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ANAK UMUR 1-17 TAHUN YANG MENGALAMI HUKUMAN FISIK DAN/ATAU AGRESI PSIKOLOGIS DARI PENGASUH DALAM SETAHUN TERAKHIR

GAMBAR 16.6.

PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ANAK UMUR 1-17 TAHUN YANG MENGALAMI HUKUMAN FISIK DAN/ATAU AGRESI PSIKOLOGIS DARI PENGASUH DALAM SETAHUN TERAKHIR (PERSEN), 2014 DAN 2020

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh mengalami penurunan di tahun 2020 baik untuk wilayah pedesaan, perkotaan, maupun level nasional.



Catatan: Susenas 2014 Anak Usia 1-14 Tahun, Susenas 2020 Anak Usia 1-17 Tahun.

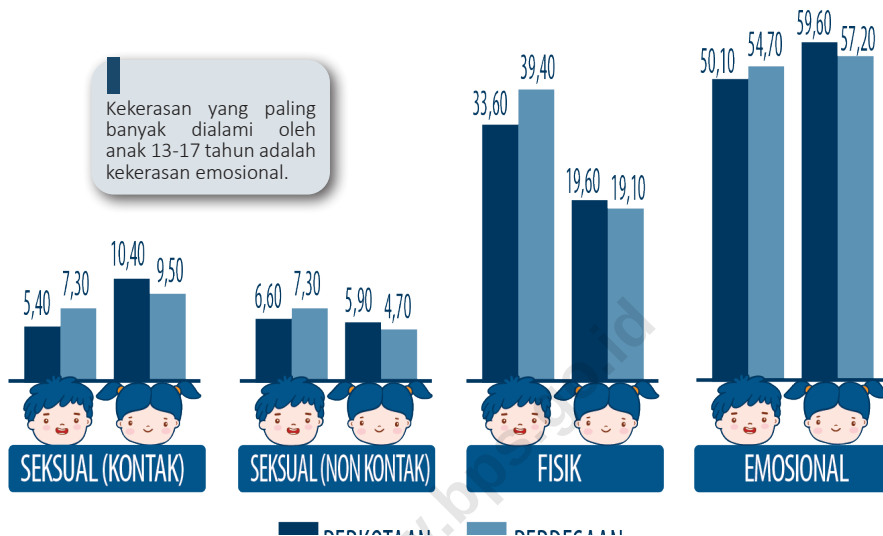
Sumber: Susenas Modul Hansos, Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 16.2.1.(B) PREVALENSI ANAK USIA 13-17 TAHUN YANG PERNAH MENGALAMI KEKERASAN SEPANJANG HIDUPNYA

GAMBAR 16.7.

PREVALENSI ANAK USIA 13-17 TAHUN YANG PERNAH MENGALAMI KEKERASAN SEPANJANG HIDUPNYA (PERSEN), 2018



Catatan: Survei diselenggarakan 5 tahun sekali

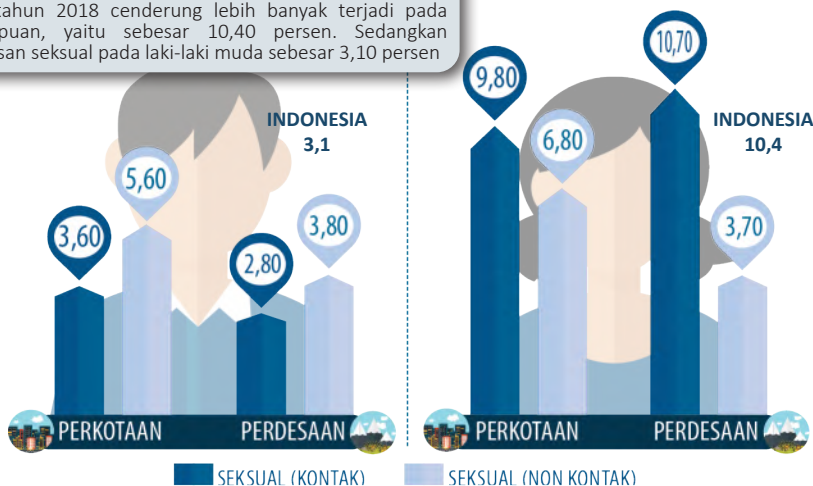
Sumber: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

INDIKATOR 16.2.3.(A) PROPORSI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MUDA UMUR 18-24 TAHUN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SEBELUM UMUR 18 TAHUN

GAMBAR 16.8.

PROPORSI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MUDA UMUR 18-24 TAHUN YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL SEBELUM UMUR 18 TAHUN, 2018

Kekerasan seksual pada penduduk muda (18-24 tahun) pada tahun 2018 cenderung lebih banyak terjadi pada perempuan, yaitu sebesar 10,40 persen. Sedangkan kekerasan seksual pada laki-laki muda sebesar 3,10 persen



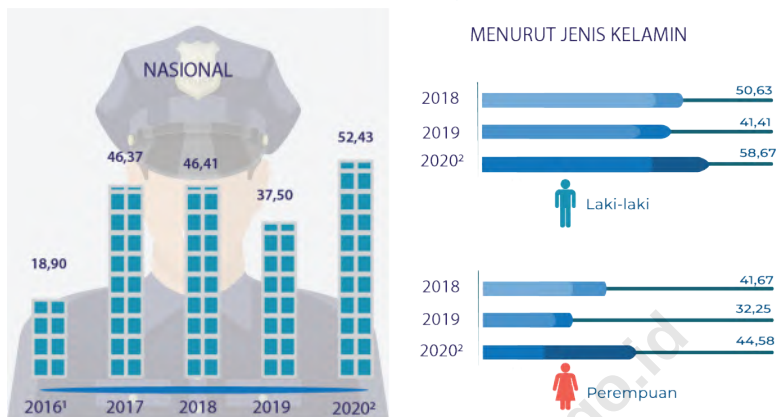
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 16.3.1.(A) PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI

GAMBAR 16.9.

PROPORSI KORBAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR YANG MELAPORKAN KEPADA POLISI, 2016-2020



Setiap tahun, persentase laki-laki yang menjadi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dan melaporkan kepada polisi lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Catatan: ¹ Kejadian kejahatan yang dilaporkan meliputi pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya (ketersediaan variabel tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilahan hanya untuk kejadian kejahatan kekerasan saja).

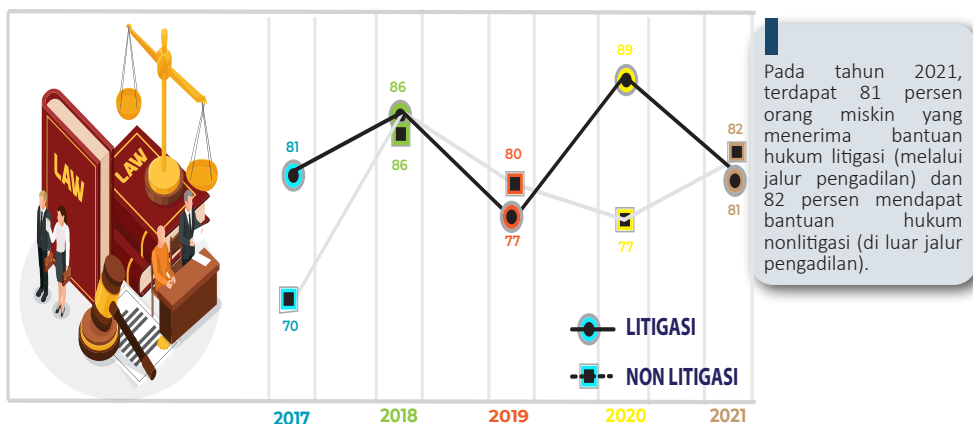
² Time reference indikator adalah 1 Januari- 31 Desember t-1 (Data Januari-Desember 2020 diperoleh dari Susenas 2021)

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.3.1.(B) PERSENTASE ORANG MISKIN YANG MENERIMA BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

GAMBAR 16.10.

PERSENTASE ORANG MISKIN YANG MENERIMA BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI, 2017-2021



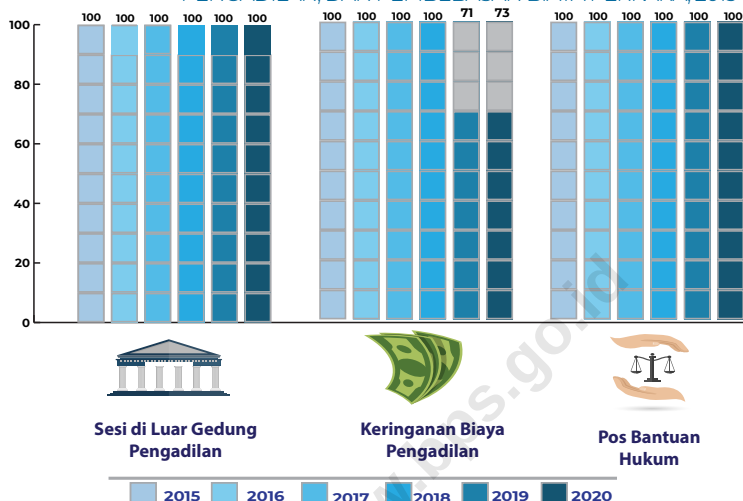
Sumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional, KemenkumHAM



INDIKATOR 16.3.1.(C) PERSENTASE ORANG TIDAK MAMPU YANG MENERIMA LAYANAN HUKUM BERUPA POS BANTUAN HUKUM, SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN, DAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

GAMBAR 16.11.

PERSENTASE ORANG TIDAK MAMPU YANG MENERIMA LAYANAN HUKUM BERUPA POS BANTUAN HUKUM, SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN, DAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA, 2015-2020



Selama periode 2015 hingga 2020, seluruh orang tidak mampu telah menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum dan sidang di luar gedung pengadilan. Untuk pembebasan biaya perkara, persentase orang tidak mampu yang menerima turun di tahun 2019 dan 2020 menjadi sekitar 70 persen.

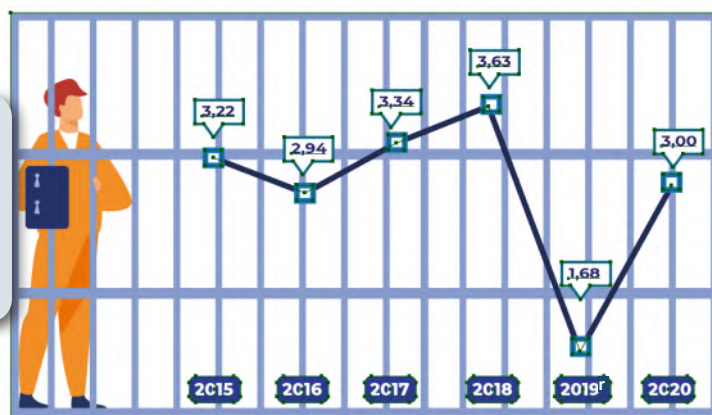
Sumber: Mahkamah Agung

INDIKATOR 16.3.2.(A) PROPORSI TAHANAN YANG MELEBIHI MASA PENAHANAN TERHADAP SELURUH JUMLAH TAHANAN

GAMBAR 16.12.

PROPORSI TAHANAN YANG MELEBIHI MASA PENAHANAN TERHADAP SELURUH JUMLAH TAHANAN, 2015- 2020

Dari 2015 hingga 2020, proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan berkisar 3 persen, kecuali tahun 2019 yang merupakan persentase terendah.



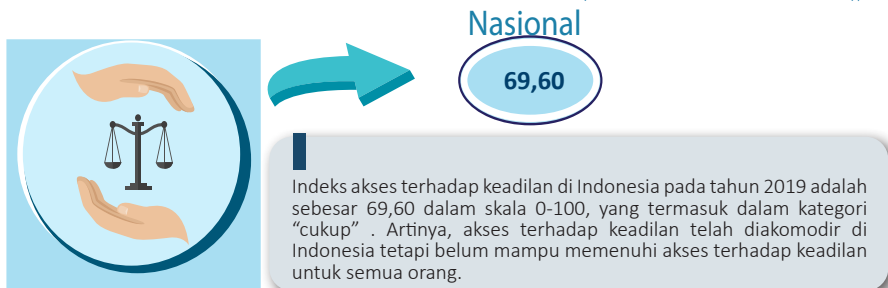
Catatan: ^f Data revisi

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM



INDIKATOR 16.3.3.(A) INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN (ACCESS TO JUSTICE INDEX)

GAMBAR 16.13. INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN (ACCESS TO JUSTICE INDEX), 2019



Catatan: Perhitungan Indeks Akses ke Keadilan dilakukan untuk pertama kalinya pada tahun 2019 dan dihitung setiap 3 tahun dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan akan dihitung ulang pada tahun 2021.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

INDIKATOR 16.5.1 PROPORSI PENDUDUK YANG MEMILIKI PALING TIDAK SATU KONTAK HUBUNGAN DENGAN PETUGAS YANG MEMBAYAR SUAP KEPADA PETUGAS ATAU DIMINTA UNTUK MENYUAP PETUGAS DALAM 12 BULAN TERAKHIR

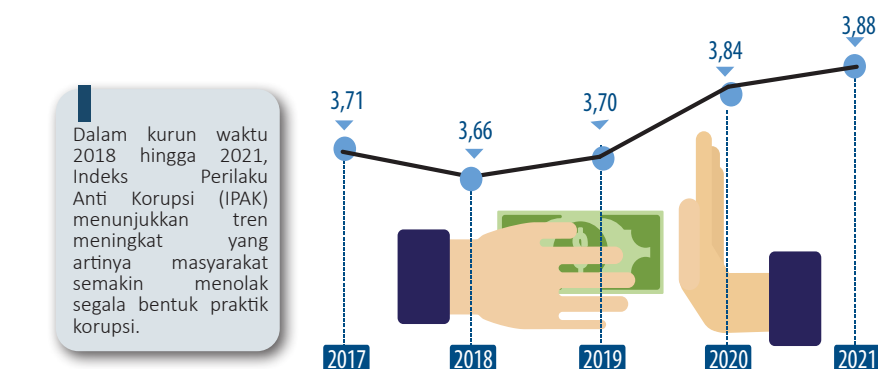
GAMBAR 16.14. PROPORSI MASYARAKAT YANG MENGELUARKAN UANG/BARANG/FASILITAS MELEBIHI KETENTUAN KETIKA BERURUSAN DENGAN LAYANAN PUBLIK, 2020-2021



Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.5.1.(A) INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)

GAMBAR 16.15. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI, 2017-2021

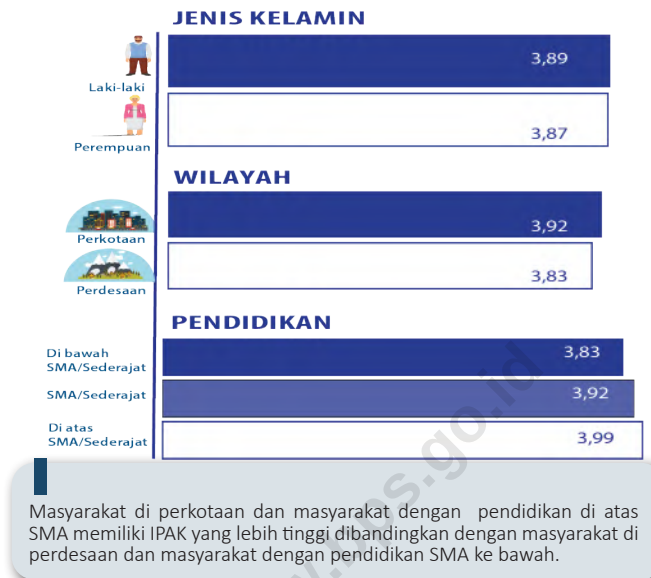


Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), Badan Pusat Statistik



GAMBAR 16.16.

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI MENURUT BEBERAPA KARAKTERISTIK, 2021



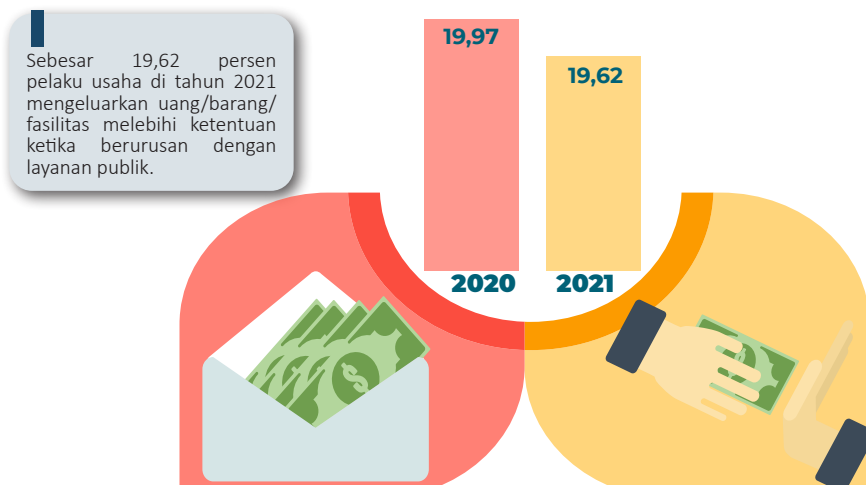
Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.5.2

PROPORSI PELAKU USAHA YANG PALING TIDAK MEMILIKI KONTAK DENGAN PETUGAS PEMERINTAH DAN YANG MEMBAYAR SUAP KEPADA SEORANG PETUGAS, ATAU DIMINTA UNTUK MEMBAYAR SUAP OLEH PETUGAS-PETUGAS SELAMA 12 BULAN TERAKHIR

GAMBAR 16.17.

PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MENGELUARKAN UANG/ BARANG/ FASILITAS MELEBIHI KETENTUAN KETIKA BERURUSAN DENGAN LAYANAN PUBLIK, 2020-2021



Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), Badan Pusat Statistik

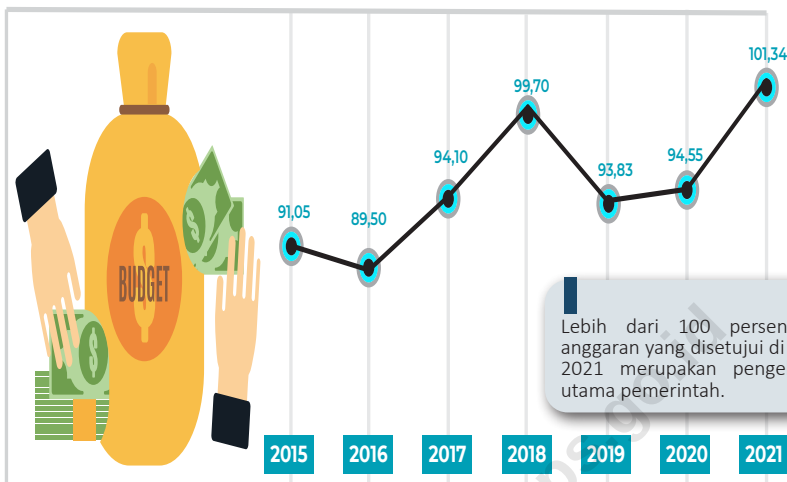


INDIKATOR 16.6.1*

PROPORSI PENGELUARAN UTAMA PEMERINTAH TERHADAP ANGGARAN YANG DISETUJUI

GAMBAR 16.18.

PROPORSI PENGELUARAN UTAMA PEMERINTAH TERHADAP ANGGARAN YANG DISETUJUI, 2015-2021

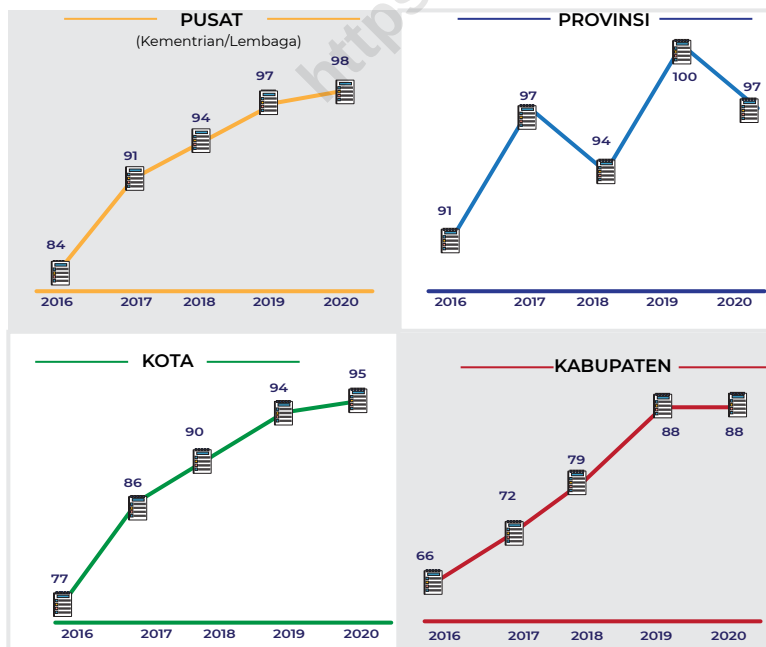


Sumber: Kementerian Keuangan

INDIKATOR 16.6.1.(A) PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

GAMBAR 16.19.

PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP), 2016-2020

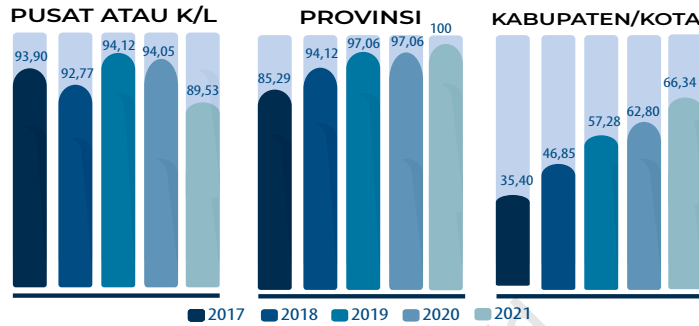


Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



INDIKATOR 16.6.1.(B) **PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH DENGAN SKOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) $\geq$ B**

GAMBAR 16.20. PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH DENGAN SKOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) $\geq$ B, 2017-2021

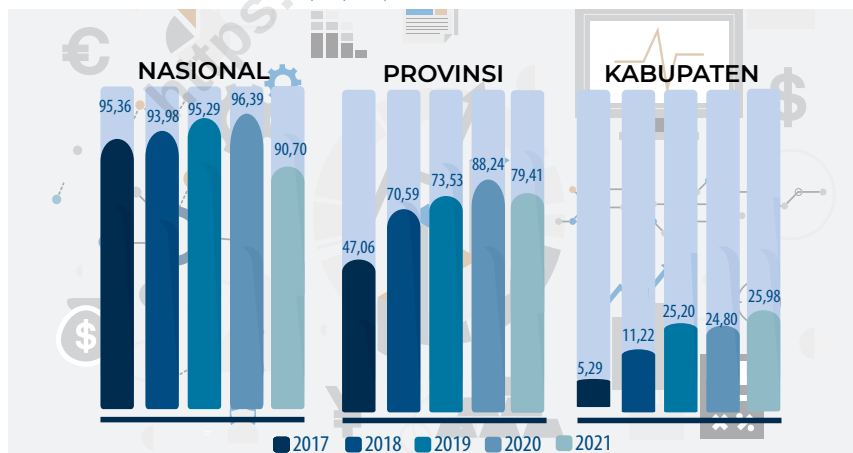


Secara umum, skor SAKIP instansi pemerintah pada level nasional dan level provinsi lebih baik daripada instansi pemerintah pada level kabupaten/kota.

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

INDIKATOR 16.6.1.(C) **PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH DENGAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI (RB) $\geq$ B**

GAMBAR 16.21. PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH DENGAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI (RB) $\geq$ B, 2017-2021



Instansi pemerintah pada level nasional memiliki indeks RB yang jauh lebih baik dibandingkan dengan instansi pemerintah pada level provinsi dan kabupaten.

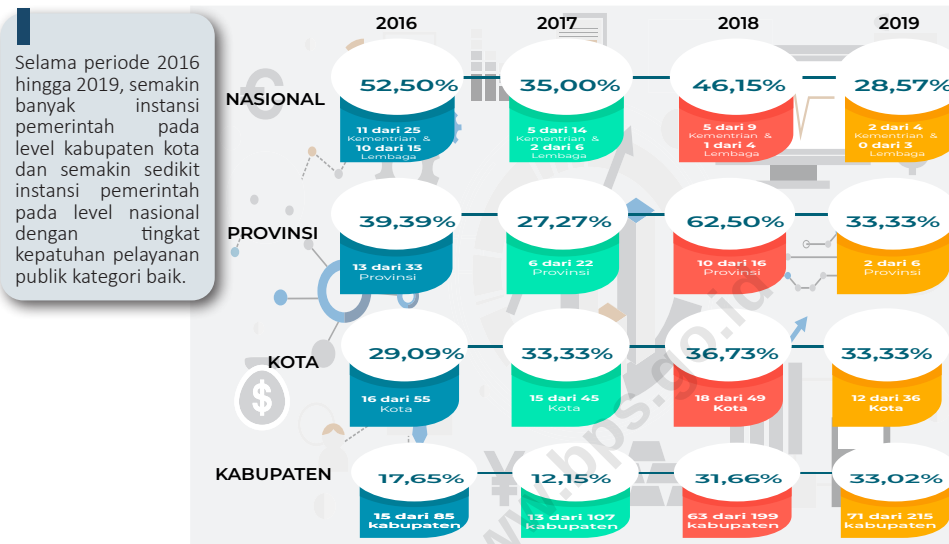
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



INDIKATOR 16.6.2.(A) JUMLAH INSTANSI PEMERINTAH DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK KATEGORI BAIK

GAMBAR 16.22.

JUMLAH INSTANSI PEMERINTAH DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK KATEGORI BAIK, 2016-2019

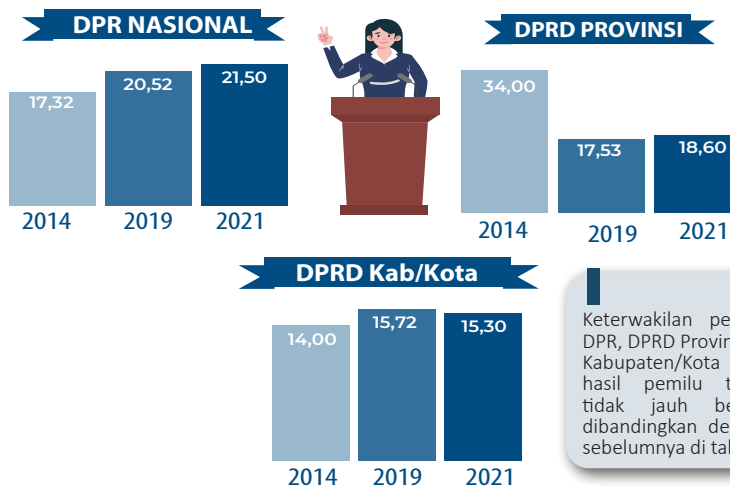


Sumber: Ombudsman

INDIKATOR 16.7.1.(A) PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

GAMBAR 16.23.

PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), 2014, 2019 DAN 2021



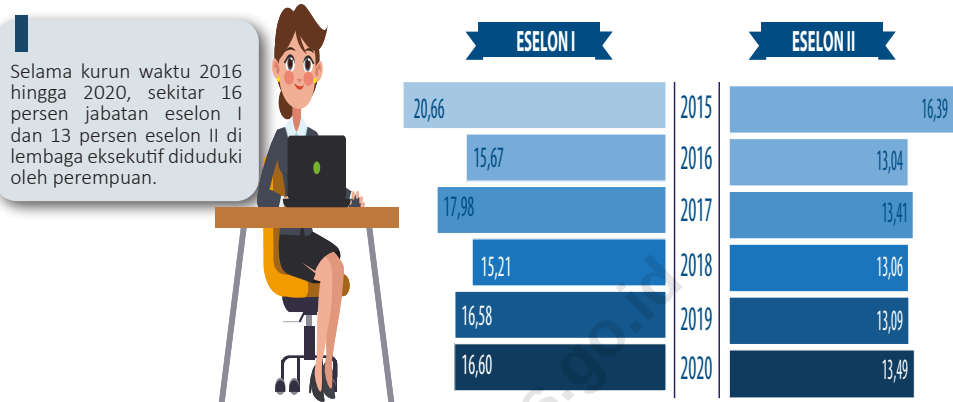
Catatan: Perhitungan indikator ini berdasarkan periode pemilihan legislatif, yaitu setiap 5 tahun

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)



INDIKATOR 16.7.1.(B) **PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LEMBAGA EKSEKUTIF (ESELON I DAN II)**

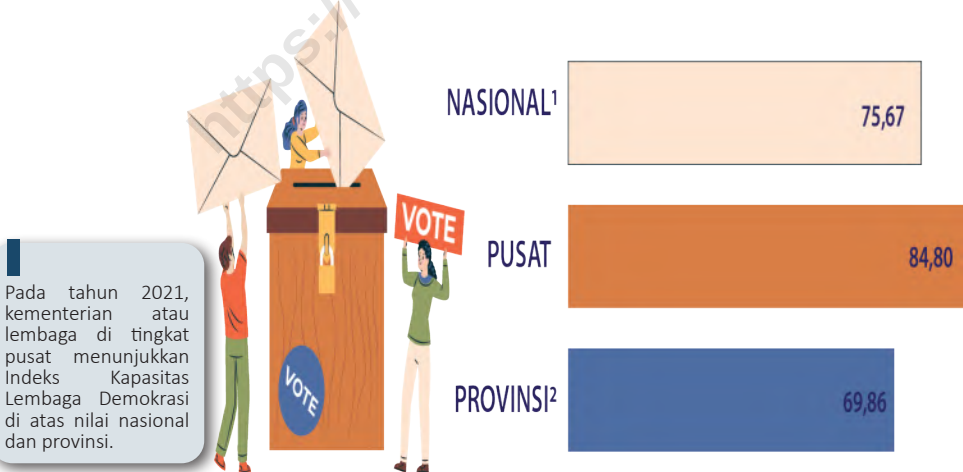
GAMBAR 16.24. PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LEMBAGA EKSEKUTIF (ESELON I DAN II), 2015-2020



Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

INDIKATOR 16.7.2.(A) **INDEKS KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI**

GAMBAR 16.25. INDEKS KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI, 2021



Catatan: Angka 2021 menggunakan angka IDI metode baru

¹ Nilai Indeks Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat

² Nilai Indeks Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

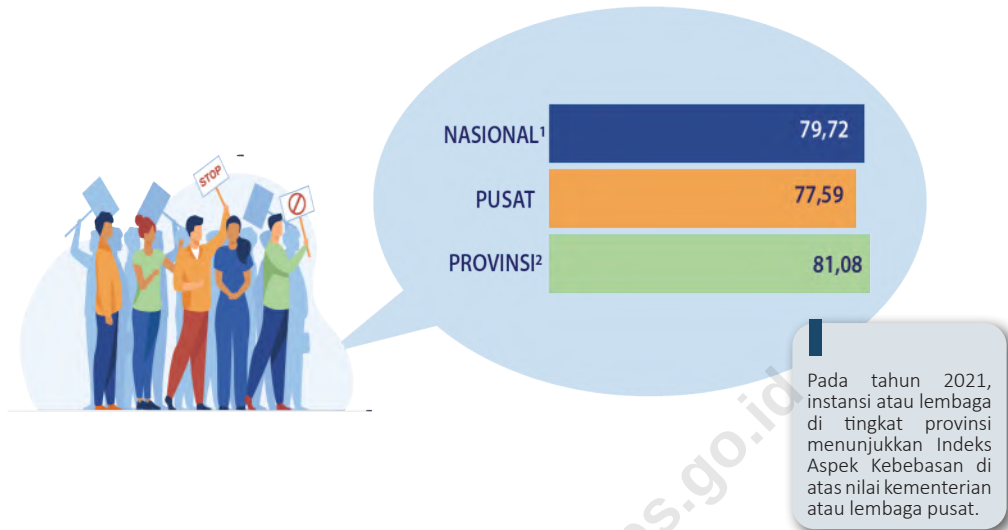
Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) – Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



INDIKATOR 16.7.2.(B) INDEKS ASPEK KEBEBASAN

GAMBAR 16.26.

INDEKS ASPEK KEBEBASAN, 2021



Catatan: Angka 2021 menggunakan angka IDI metode baru

¹ Nilai Indeks Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat

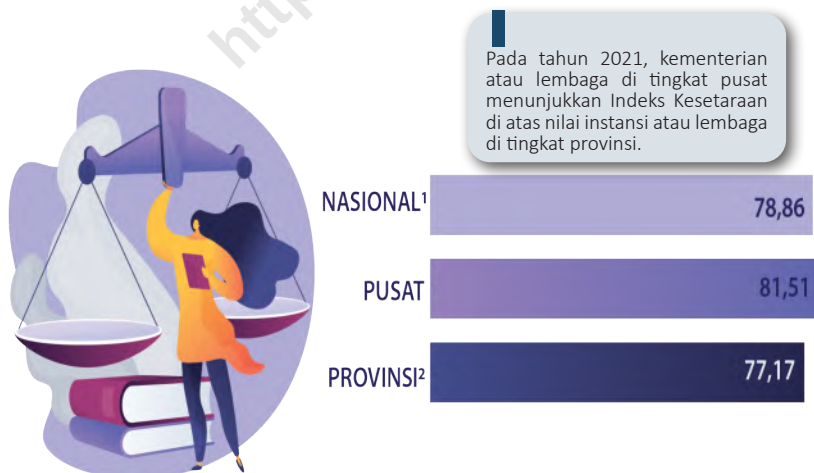
² Nilai Indeks Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) – Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

INDIKATOR 16.7.2.(C) INDEKS KESETARAAN

GAMBAR 16.27.

INDEKS KESETARAAN, 2021



Catatan: Angka 2021 menggunakan angka IDI metode baru

¹ Nilai Indeks Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat

² Nilai Indeks Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) – Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



INDIKATOR 16.8.1.(A) JUMLAH KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI DALAM FORUM DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

GAMBAR 16.28.

JUMLAH KEANGGOTAAN DAN KONTRIBUSI DALAM FORUM DAN ORGANISASI INTERNASIONAL, 2016-2020

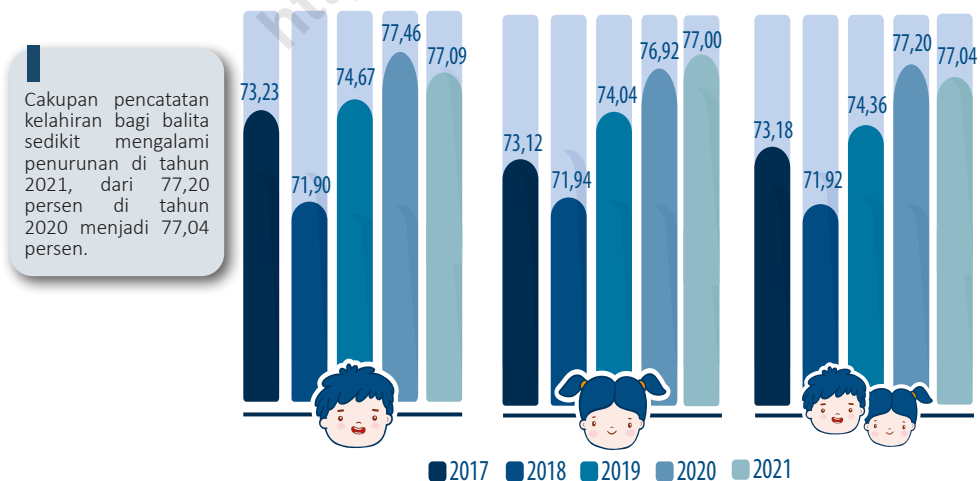


Sumber: Kementerian Luar Negeri

INDIKATOR 16.9.1* PROPORSI ANAK DI BAWAH 5 TAHUN YANG KELAHIRANNYA DICATAT OLEH LEMBAGA PENCATATAN SIPIL MENURUT UMUR

GAMBAR 16.29.

PROPORSI ANAK DI BAWAH 5 TAHUN YANG KELAHIRANNYA DICATAT OLEH LEMBAGA PENCATATAN SIPIL, 2017-2021



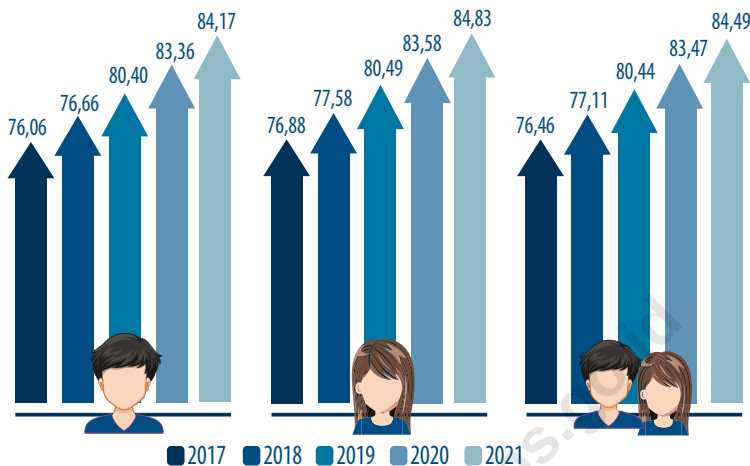
Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 16.9.1.(A) **PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA LAHIR UNTUK PENDUDUK 0-17 TAHUN PADA 40% BERPENDAPATAN BAWAH**

GAMBAR 16.30.

PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA LAHIR UNTUK PENDUDUK 0-17 TAHUN PADA 40% BERPENDAPATAN BAWAH, 2017-2021



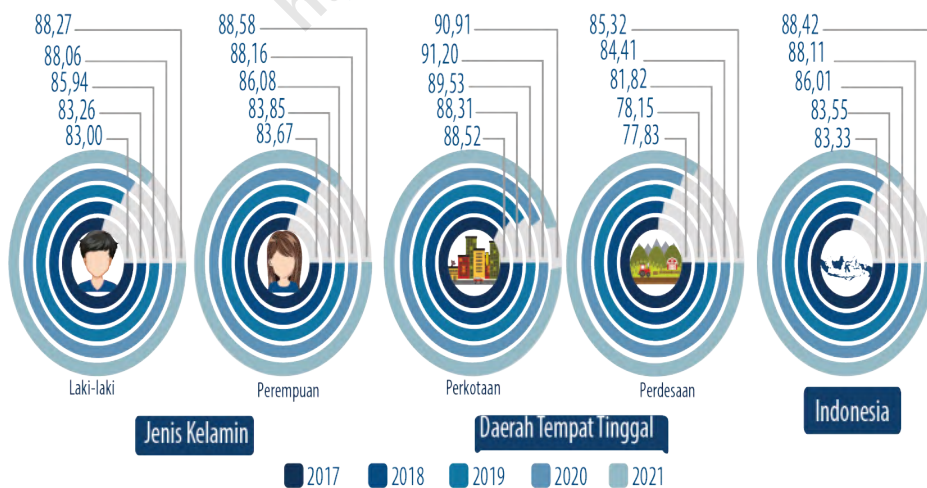
Tidak terdapat perbedaan cakupan pencatatan kelahiran anak perempuan dan anak laki-laki pada kelompok penduduk 40 persen pendapatan terendah.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.9.1.(B) **PERSENTASE CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PADA PENDUDUK 0-17 TAHUN**

GAMBAR 16.31.

PERSENTASE ANAK BERUSIA 0-17 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN, 2017-2021



Proporsi anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 16.10.1.(A) INDIKATOR KEBEBASAN DARI KEKERASAN BAGI JURNALIS DAN AWAK MEDIA

GAMBAR 16.32.

INDEKS KEBEBASAN DARI KEKERASAN BAGI JURNALIS DAN AWAK MEDIA, 2016-2020

Indeks kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media terus meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2016 hingga 2020.

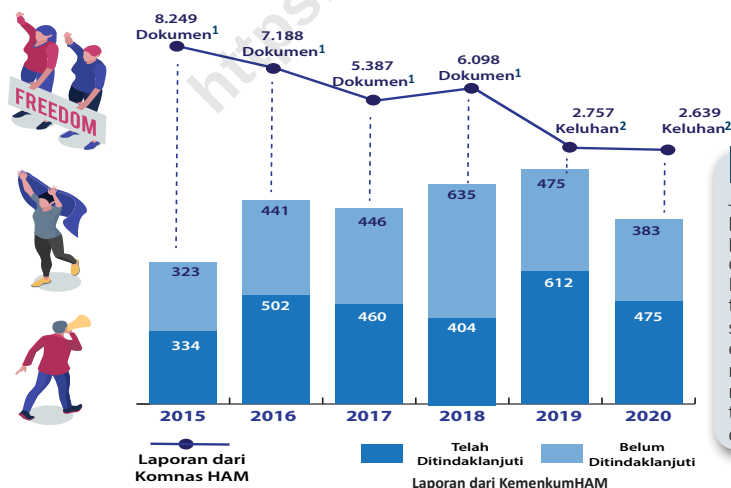


Sumber: Dewan Pers Nasional

INDIKATOR 16.10.1.(B) JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

GAMBAR 16.33.

JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM), 2015-2020



Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM dari laporan Komnas HAM menunjukkan tren menurun sedangkan laporan dari Kemenkumham menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2019 dan turun di 2020.

Catatan: Dalam laporan dari Komnas HAM, terjadi perubahan unit perhitungan, sebagai bagian dari upaya Komnas HAM untuk meningkatkan akurasi dalam menyajikan data pengaduan.

¹ Dokumen mengacu pada jumlah dokumen yang diserahkan oleh pelapor dan pihak yang dikeluhkan untuk pengaduan (kasus) yang bersangkutan.

² Keluhan mengacu pada kasus yang diajukan oleh pelapor. Sehingga ada kemungkinan bahwa dalam satu keluhan, ada lebih dari satu dokumen.

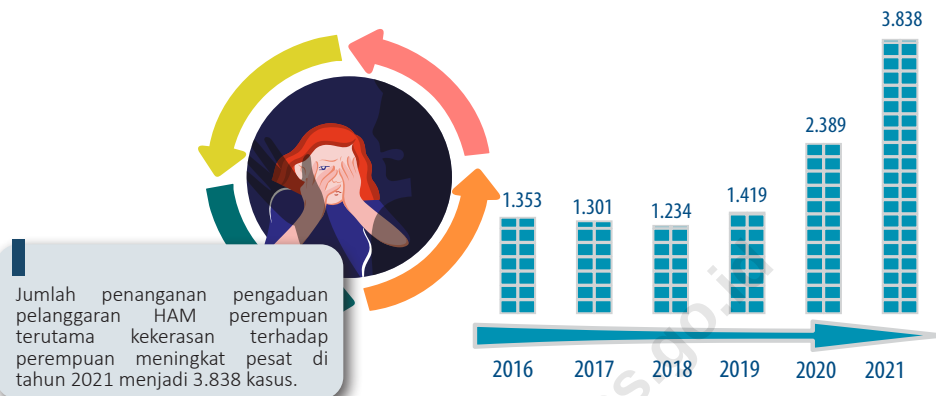
Sumber: KemenkumHAM dan Komnas HAM



INDIKATOR 16.10.1.(C) JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEREMPUAN TERUTAMA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

GAMBAR 16.34.

JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEREMPUAN TERUTAMA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, 2016-2021



Sumber: KemenkumHAM

INDIKATOR 16.10.2* JUMLAH NEGARA YANG MENGADOPSI DAN MELAKSANAKAN KONSTITUSI, STATUTORI DAN/ATAU JAMINAN KEBIJAKAN UNTUK AKSES PUBLIK PADA INFORMASI

GAMBAR 16.35.

JUMLAH NEGARA YANG MENGADOPSI DAN MELAKSANAKAN KONSTITUSI, STATUTORI DAN/ATAU JAMINAN KEBIJAKAN UNTUK AKSES PUBLIK PADA INFORMASI



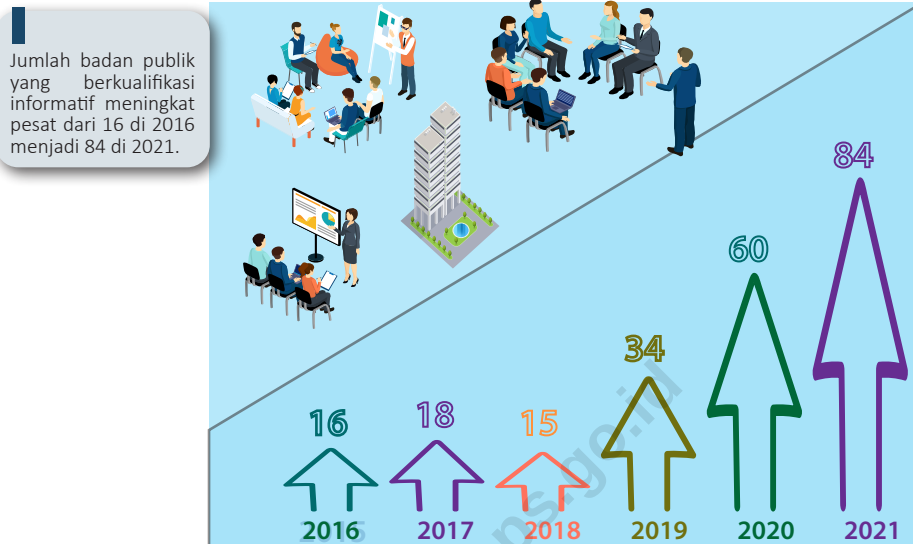
Sumber: Komisi Informasi Publik (KIP)



INDIKATOR 16.10.2.(A) JUMLAH BADAN PUBLIK YANG BERKUALIFIKASI INFORMATIF

GAMBAR 16.36.

JUMLAH BADAN PUBLIK YANG BERKUALIFIKASI INFORMATIF, 2016-2021

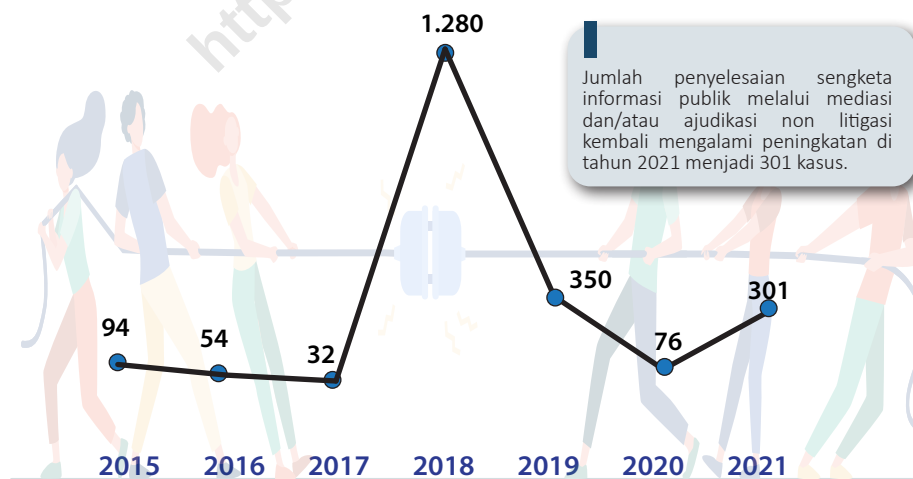


Sumber: Komisi Informasi Publik (KIP)

INDIKATOR 16.10.2.(B) JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI DAN/ATAU AJUDIKASI NON LITIGASI

GAMBAR 16.37.

JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI DAN/ATAU AJUDIKASI NON LITIGASI, 2015-2021



Sumber: Komisi Informasi Publik (KIP)



INDIKATOR 16.A.1*

TERSEDIANYA LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA (HAM) NASIONAL YANG INDEPENDEN YANG SEJALAN DENGAN *PARIS PRINCIPLES*

GAMBAR 16.38.

TERSEDIANYA LEMBAGA HAK ASASI MANUSIA (HAM) NASIONAL YANG INDEPENDEN YANG SEJALAN DENGAN *PARIS PRINCIPLES*



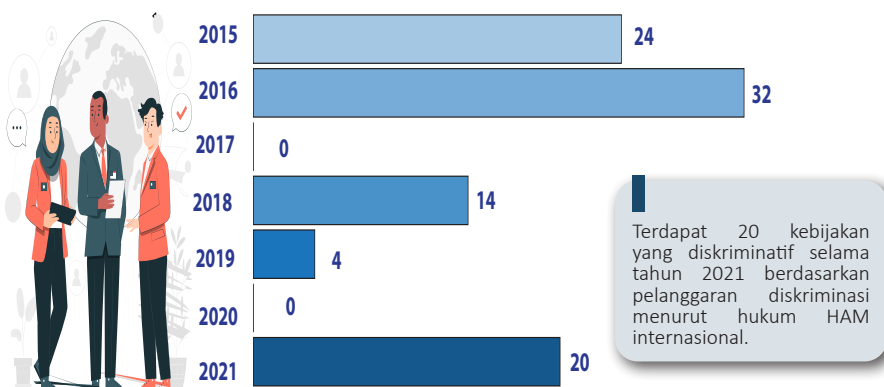
Sumber: Komnas HAM

INDIKATOR 16.B.1.(A)

JUMLAH KEBIJAKAN YANG DISKRIMINATIF DALAM 12 BULAN LALU BERDASARKAN PELARANGAN DISKRIMINASI MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL

GAMBAR 16.39.

JUMLAH KEBIJAKAN YANG DISKRIMINATIF DALAM 12 BULAN LALU BERDASARKAN PELARANGAN DISKRIMINASI MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL, 2015-2021



Sumber: Komnas Perempuan

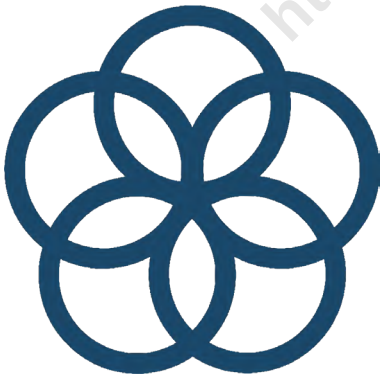
<https://www.bps.go.id>



17

KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan



Kemitraan dan kerja sama global yang kuat menjadi komponen penting demi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini salah satunya menasar penguatan kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan dengan mendukung rencana nasional untuk meraih target. Di samping itu, kemitraan global juga diarahkan untuk mendorong perdagangan internasional dan membantu negara-negara berkembang meningkatkan ekspor mereka demi meraih sistem perdagangan yang berdasar aturan universal dan tepat yang terbuka, adil dan menguntungkan semua pihak. Terlebih lagi krisis kemanusiaan akibat pandemi, konflik, dan bencana alam berdampak pada banyak negara yang membutuhkan bantuan pembangunan resmi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perdagangan.



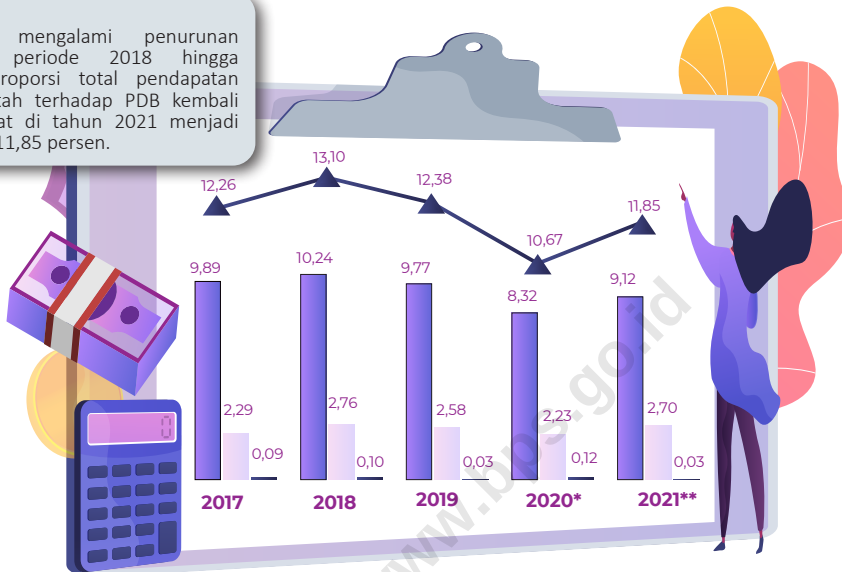
INDIKATOR 17.1.1*

TOTAL PENDAPATAN PEMERINTAH SEBAGAI PROPORSI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) MENURUT SUMBERNYA

GAMBAR 17.1.

TOTAL PENDAPATAN PEMERINTAH SEBAGAI PROPORSI TERHADAP PDB MENURUT SUMBERNYA (PERSEN), 2017-2021

Setelah mengalami penurunan selama periode 2018 hingga 2020, proporsi total pendapatan pemerintah terhadap PDB kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 11,85 persen.



Catatan: * Berdasarkan angka sementara PDB

** Berdasarkan angka sangat sementara PDB

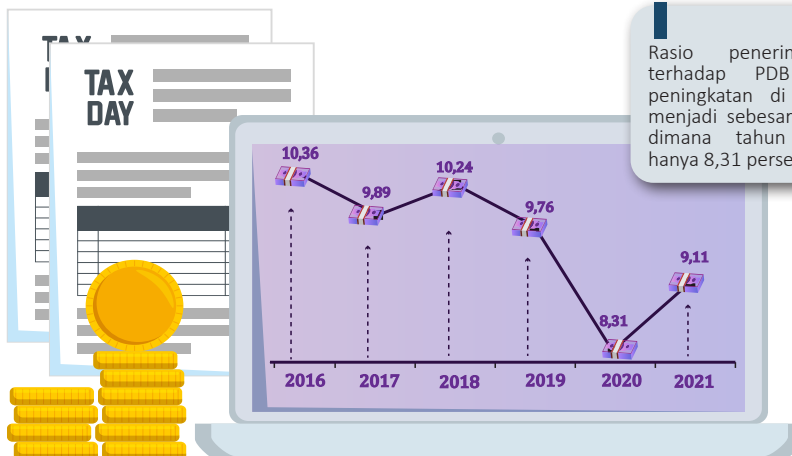
Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 17.1.1.(A)

RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PDB

GAMBAR 17.2.

RASIO PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PDB (PERSEN), 2016-2021



Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

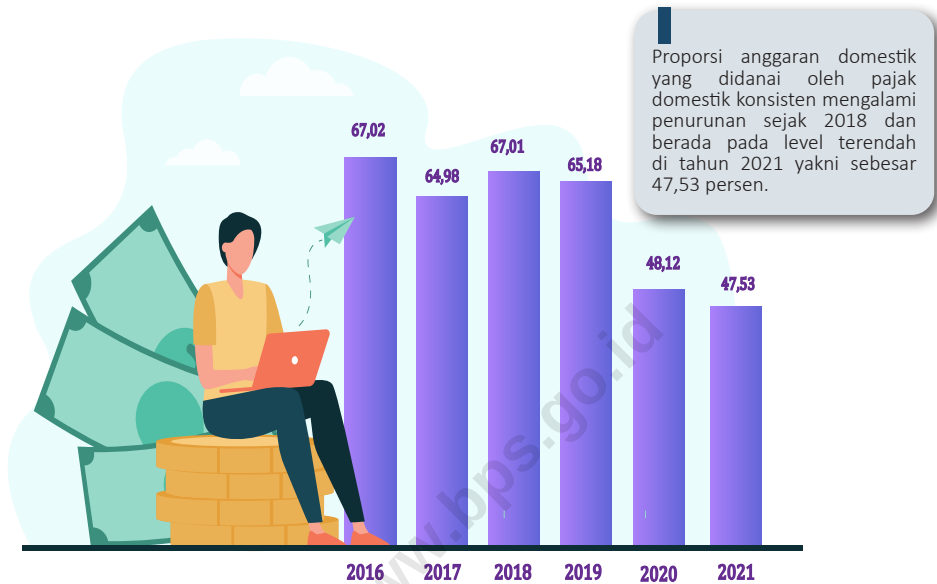


INDIKATOR 17.1.2*

PROPORSI ANGGARAN DOMESTIK YANG DIDANAI OLEH PAJAK DOMESTIK

GAMBAR 17.3.

PROPORSI ANGGARAN DOMESTIK YANG DIDANAI OLEH PAJAK DOMESTIK, 2016-2021

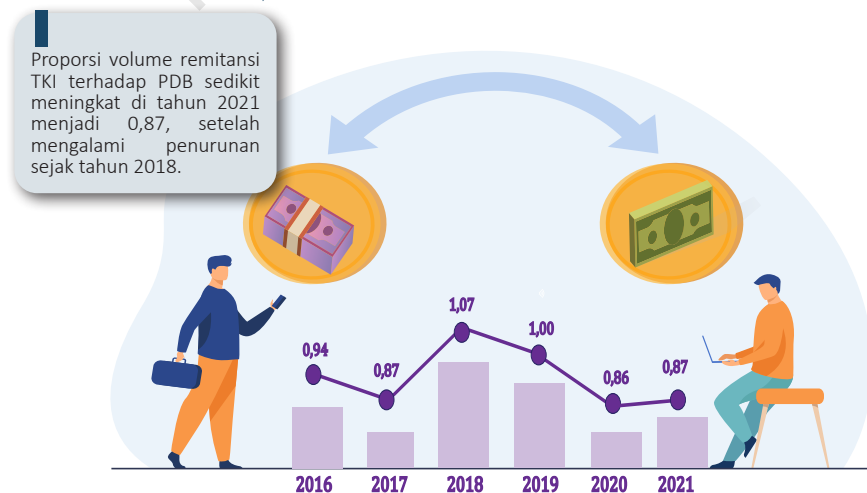


Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 17.3.2.(A) PROPORSI VOLUME REMITANSI TKI (DALAM US DOLAR) TERHADAP PDB

GAMBAR 17.4.

PROPORSI VOLUME REMITANSI TKI (DALAM US DOLAR) TERHADAP PDB, 2016-2021



Sumber: BNP2TKI dan Bank Indonesia

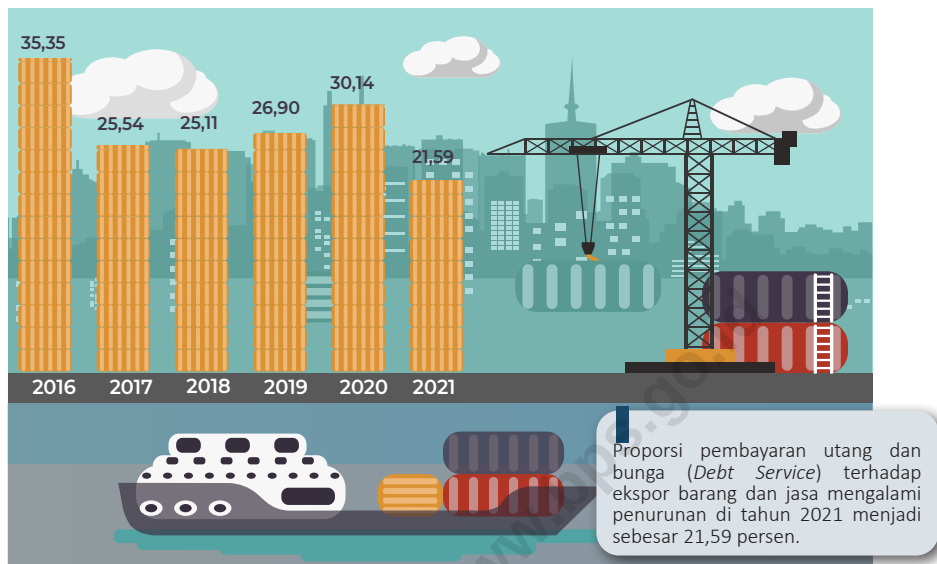


INDIKATOR 17.4.1*

PROPORSI PEMBAYARAN UTANG DAN BUNGA (*DEBT SERVICE*) TERHADAP EKSPOR BARANG DAN JASA

GAMBAR 17.5.

PROPORSI PEMBAYARAN UTANG DAN BUNGA (*DEBT SERVICE*) TERHADAP EKSPOR BARANG DAN JASA, 2016-2021



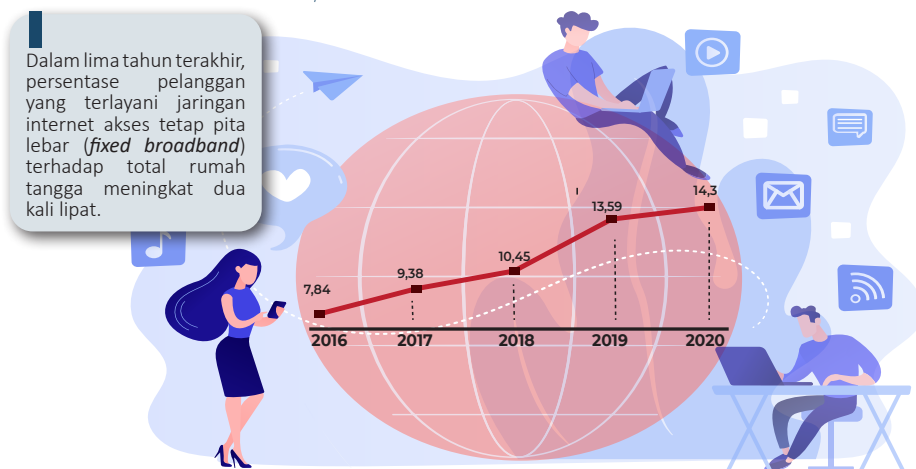
Sumber: Laporan Bank Indonesia (Neraca Pembayaran)

INDIKATOR 17.6.1.(A)

PERSENTASE PELANGGAN TERLAYANI JARINGAN INTERNET AKSES TETAP PITA LEBAR (*FIXED BROADBAND*) TERHADAP TOTAL RUMAH TANGGA

GAMBAR 17.6.

PERSENTASE PELANGGAN TERLAYANI JARINGAN INTERNET AKSES TETAP PITA LEBAR (*FIXED BROADBAND*) TERHADAP TOTAL RUMAH TANGGA, 2016-2020

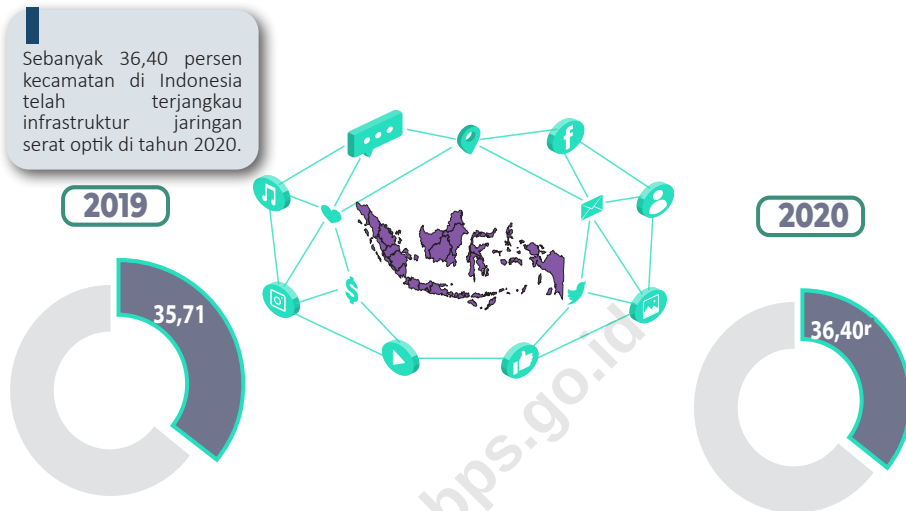


Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika



INDIKATOR 17.6.1.(B) PERSENTASE KECAMATAN YANG TERJANGKAU INFRASTRUKTUR JARINGAN SERAT OPTIK (KUMULATIF)

GAMBAR 17.7. PERSENTASE KECAMATAN YANG TERJANGKAU INFRASTRUKTUR JARINGAN SERAT OPTIK (KUMULATIF), 2019-2020

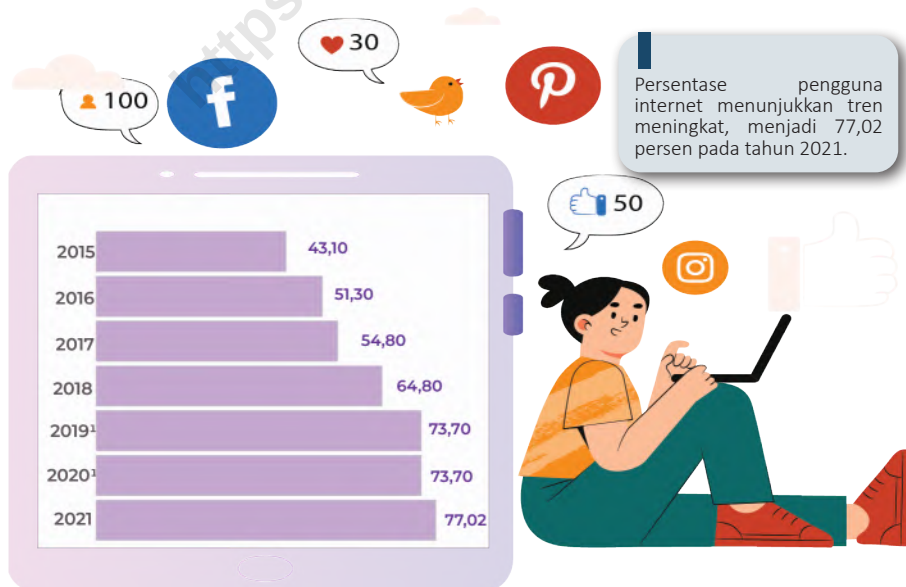


Catatan: ^r Angka revisi

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR 17.8.1.* PERSENTASE PENGGUNA INTERNET

GAMBAR 17.8. PERSENTASE PENGGUNA INTERNET, 2015-2021



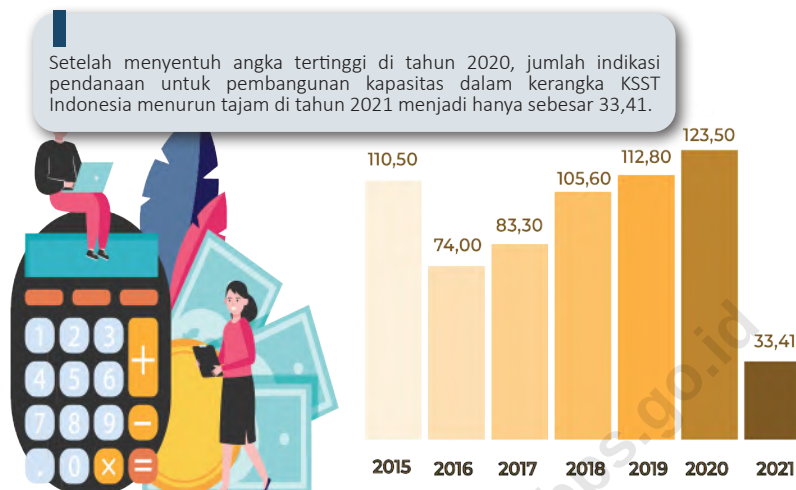
Catatan: ¹ Survei APJII 2019 dilakukan pada awal 2020 sehingga hasil survei mencakup 2019- 2020 (Q2)

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)



INDIKATOR 17.9.1.(A) JUMLAH PENDANAAN KEGIATAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL TERMASUK KSST

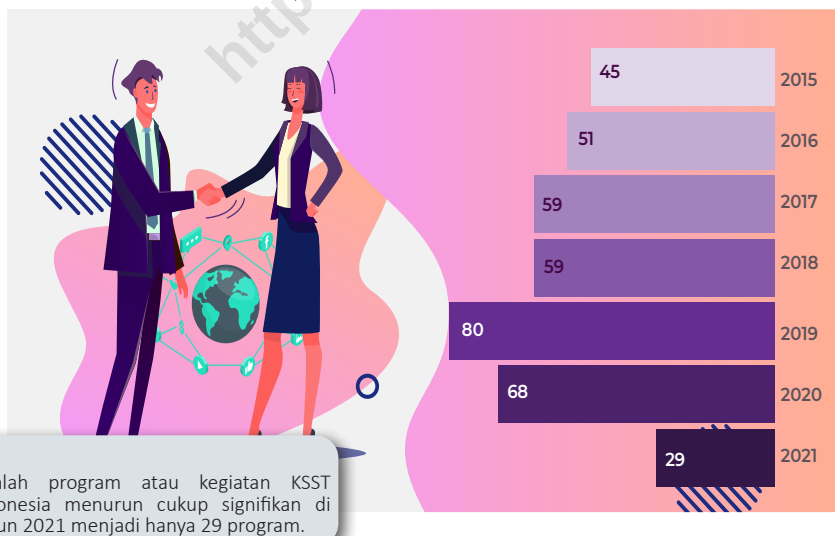
GAMBAR 17.9. JUMLAH INDIKASI PENDANAAN UNTUK PEMBANGUNAN KAPASITAS DALAM KERANGKA KSST INDONESIA (MILIAR RUPIAH), 2015-2021



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

INDIKATOR 17.9.1.(B) JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

GAMBAR 17.10. JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR, 2015-2021



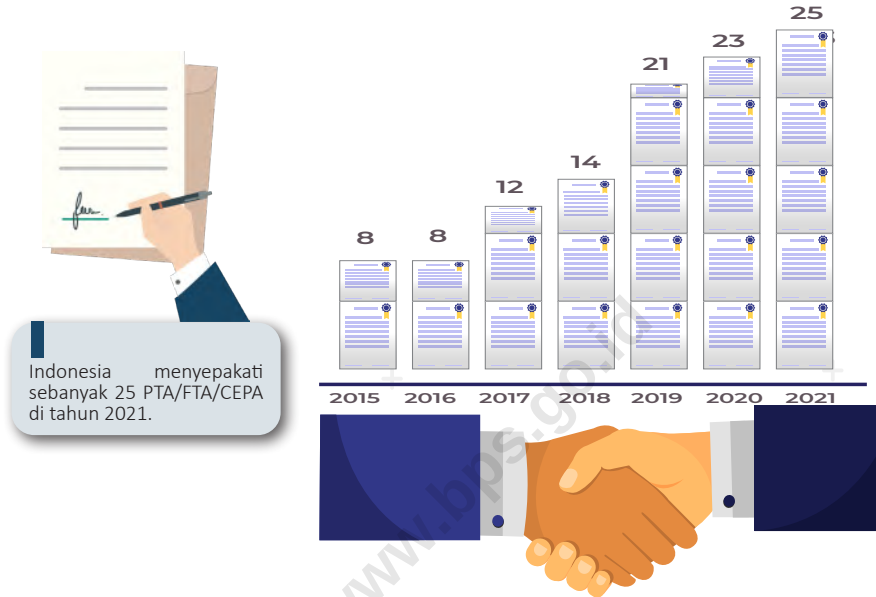
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas



INDIKATOR 17.10.1.(A) JUMLAH PTA (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT)/FTA (FREE TRADE AGREEMENT)/CEPA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) YANG DISEPAKATI

GAMBAR 17.11.

JUMLAH PTA/FTA/CEPA YANG DISEPAKATI, 2015-2021

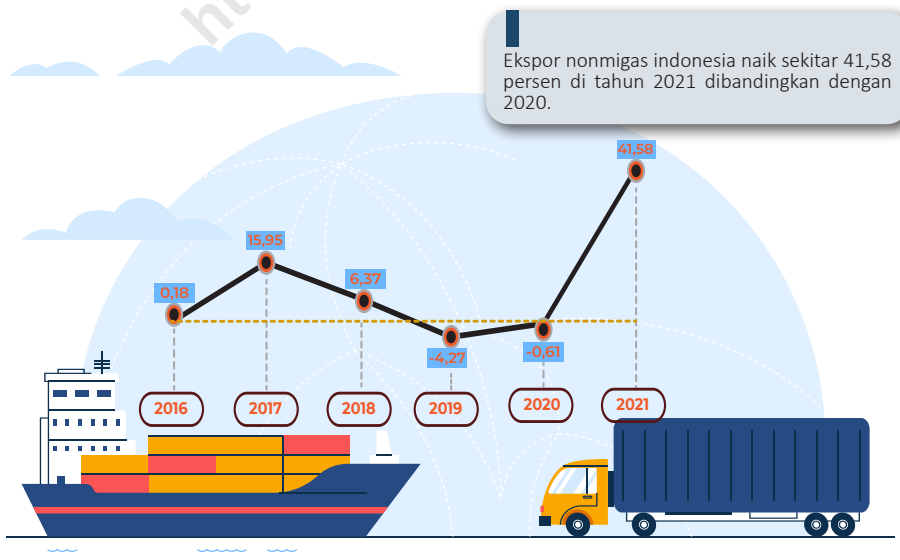


Sumber: Kementerian Perdagangan

INDIKATOR 17.11.1.(A) PERTUMBUHAN EKSPOR PRODUK NONMIGAS

GAMBAR 17.12.

PERTUMBUHAN EKSPOR PRODUK NONMIGAS, 2016-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 17.13.1 *

TERSEDIANYA DASHBOARD MAKROEKONOMI

GAMBAR 17.13.

TERSEDIANYA DASHBOARD MAKROEKONOMI

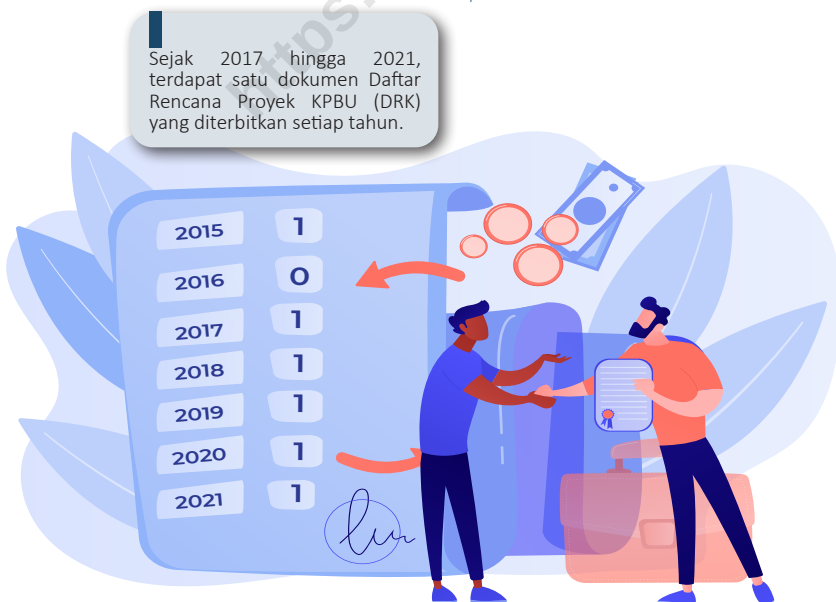


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

INDIKATOR 17.17.1.(A) JUMLAH DOKUMEN DAFTAR RENCANA PROYEK KPBU (DRK) YANG DITERBITKAN SETIAP TAHUN

GAMBAR 17.14.

JUMLAH DOKUMEN DAFTAR RENCANA PROYEK KPBU (DRK) YANG DITERBITKAN SETIAP TAHUN, 2015-2021



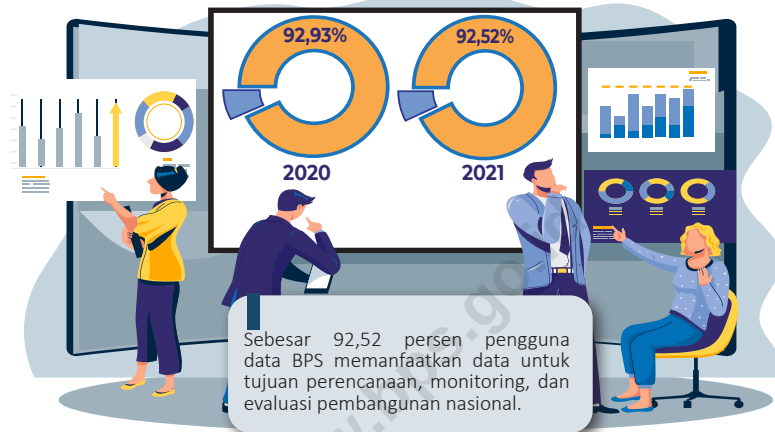
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas



INDIKATOR 17.18.1.(A) PERSENTASE PENGGUNA DATA YANG MENGGUNAKAN DATA BPS SEBAGAI DASAR PERENCANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL

GAMBAR 17.15.

PERSENTASE PENGGUNA DATA YANG MENGGUNAKAN DATA BPS SEBAGAI DASAR PERENCANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL, 2020-2021

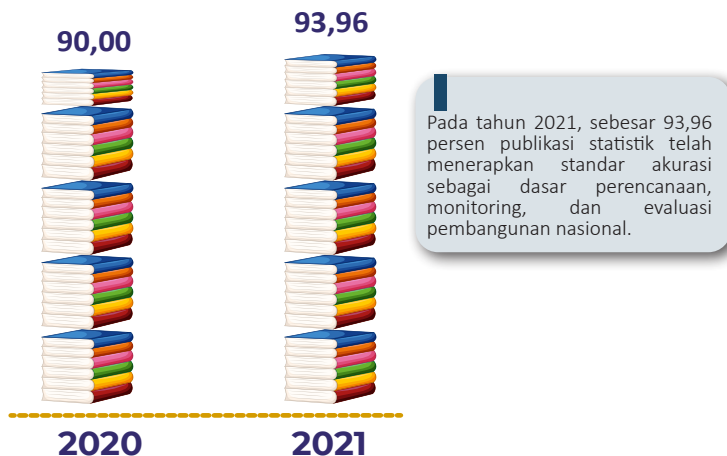


Sumber: Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 17.18.1.(B) PERSENTASE PUBLIKASI STATISTIK YANG MENERAPKAN STANDAR AKURASI SEBAGAI DASAR PERENCANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL

GAMBAR 17.16.

PERSENTASE PUBLIKASI STATISTIK YANG MENERAPKAN STANDAR AKURASI SEBAGAI DASAR PERENCANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL, 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 17.18.2* JUMLAH NEGARA YANG MEMILIKI UNDANG-UNDANG STATISTIK NASIONAL YANG TUNDUK PADA PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL STATISTIK RESMI

GAMBAR 17.17. KEBERADAAN UNDANG-UNDANG STATISTIK NASIONAL,

Indonesia telah memiliki Undang-undang statistik nasional yakni UU No.16 Tahun 1997.



Sumber: Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 17.18.3* JUMLAH NEGARA DENGAN PERENCANAAN STATISTIK NASIONAL YANG DIDANAI DAN MELAKSANAKAN RENCANANYA BERDASAR SUMBER PENDANAAN

GAMBAR 17.18. KETERSEDIAAN RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK (RENSTRA)

BPS telah menerbitkan Renstra setiap 5 tahun sekali.



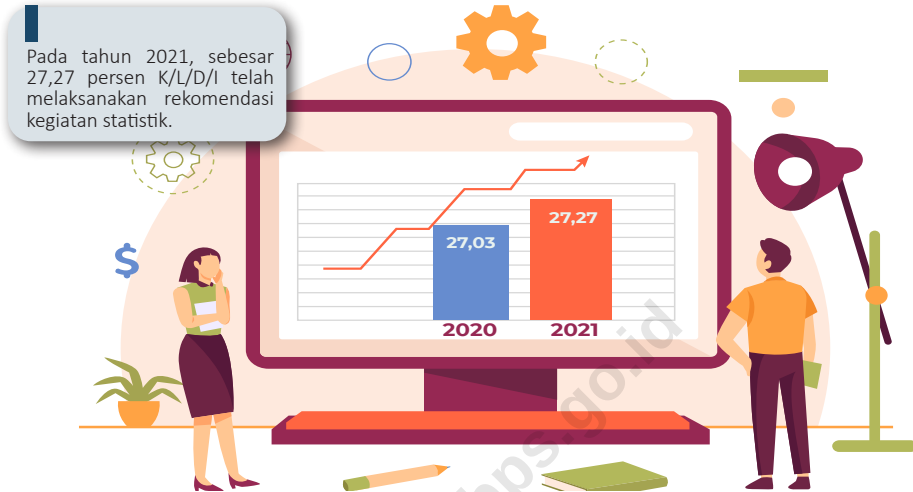
Catatan: Renstra BPS 2015-2019 (<https://www.bps.go.id/website/fileMenu/Renstra-2015-2019.pdf>)
Renstra BPS 2020-2024 (<https://www.bps.go.id/website/fileMenu/Renstra-BPS-2020-2024.pdf>)

Sumber: Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 17.19.1.(A) PERSENTASE K/L/D/I YANG MELAKSANAKAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

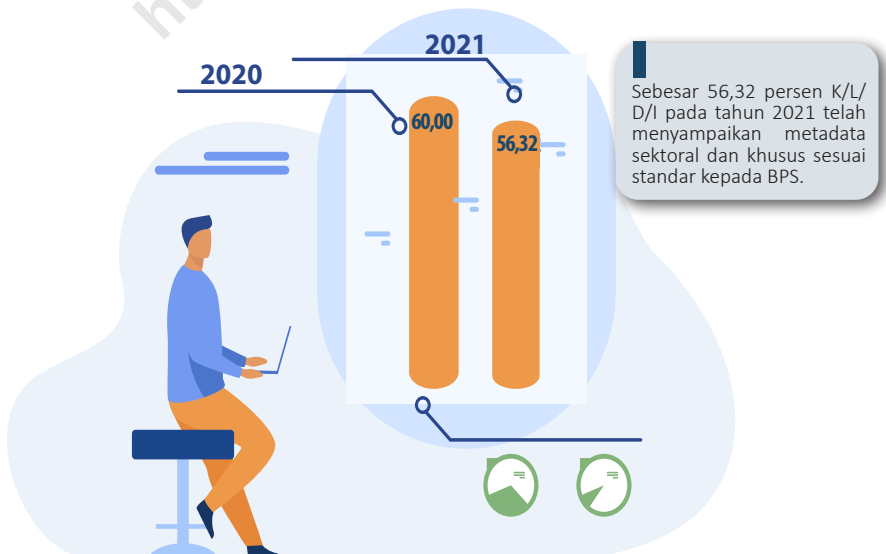
GAMBAR 17.19. PERSENTASE K/L/D/I YANG MELAKSANAKAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK, 2020-2021



Catatan: Perbandingan target dan realisasi
Sumber: Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 17.19.1.(B) PERSENTASE K/L/D/I YANG MENYAMPAIKAN METADATA SEKTORAL DAN KHUSUS SESUAI STANDAR

GAMBAR 17.20. PERSENTASE K/L/D/I YANG MENYAMPAIKAN METADATA SEKTORAL DAN KHUSUS SESUAI STANDAR, 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 17.19.2.(A) TERLAKSANANYA SENSUS PENDUDUK DAN PERUMAHAN PADA TAHUN 2020

GAMBAR 17.21. TERLAKSANANYA SENSUS PENDUDUK DAN PERUMAHAN PADA TAHUN 2020

Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020.



Catatan: <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>

Sumber: Badan Pusat Statistik

<https://www.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pertanian 2020 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (Hasil Survei Pertanian Terintegrasi)*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Wisatawan Nusantara 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara*. Jakarta: BPS.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Data Korban dan Kerusakan Menurut Wilayah*, diakses dari <https://dibi.bnpb.go.id/kwilayah/index> pada tanggal 2 Desember 2022.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Ekonomi*. Jakarta:Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020a). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola*. Jakarta:Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020b). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan*. Jakarta:Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020c). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta:Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Annexes Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021a). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) 2021-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 137 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Data dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Badan Pusat Statistik Tahun 2022.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2017*. Jakarta: KLHK.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesi Tahun 2020 Meningkat*, diakses dari <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5835/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-indonesia-tahun-2020-meningkat> pada tanggal 1 Desember 2022.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Masa Depan Konservasi Satwa Liar di Indonesia*. Diakses dari <https://jasling.menlhk.go.id/berita-dan-artikel/berita/masa-depan-konservasi-satwa-liar-di-indonesia> pada tanggal 24 November 2022.
- Merdeka.com. (14 Oktober 2021). *Mengenal Program Kampung Iklim beserta Tujuan dan Manfaatnya*, diakses dari <https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-program-kampung-iklim-beserta-tujuan-dan-manfaatnya-kln.html> pada tanggal 29 November 2022.
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Tanziha, Iku. (2012). Pengukuran dan Indikator Kelaparan serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya. *Seminar Food Security in Indonesia from Social and Cultural Approach*.

LAMPIRAN

INDIKATOR
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
INDONESIA 2022



TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

Provinsi	Kode Indikator									
	1.2.1*									
	2017	2018		2019		2020		2021		2022
	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	15,92	15,97	15,68	15,32	15,01	14,99	15,43	15,33	15,53	14,64
Sumatera Utara	9,28	9,22	8,94	8,83	8,63	8,75	9,14	9,01	8,49	8,42
Sumatera Barat	6,75	6,65	6,55	6,42	6,29	6,28	6,56	6,63	6,04	5,92
Riau	7,41	7,39	7,21	7,08	6,90	6,82	7,04	7,12	7,00	6,78
Jambi	7,90	7,92	7,85	7,60	7,51	7,58	7,97	8,09	7,67	7,62
Sumatera Selatan	13,10	12,80	12,82	12,71	12,56	12,66	12,98	12,84	12,79	11,90
Bengkulu	15,59	15,43	15,41	15,23	14,91	15,03	15,30	15,22	14,43	14,62
Lampung	13,04	13,14	13,01	12,62	12,30	12,34	12,76	12,62	11,67	11,57
Kep. Bangka Belitung	5,30	5,25	4,77	4,62	4,50	4,53	4,89	4,90	4,67	4,45
Kepulauan Riau	6,13	6,20	5,83	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24
DKI Jakarta	3,78	3,57	3,55	3,47	3,42	4,53	4,69	4,72	4,67	4,69
Jawa Barat	7,83	7,45	7,25	6,91	6,82	7,88	8,43	8,40	7,97	8,06
Jawa Tengah	12,23	11,32	11,19	10,80	10,58	11,41	11,84	11,79	11,25	10,93
DI Yogyakarta	12,36	12,13	11,81	11,70	11,44	12,28	12,80	12,80	11,91	11,34
Jawa Timur	11,20	10,98	10,85	10,37	10,20	11,09	11,46	11,40	10,59	10,38
Banten	5,59	5,24	5,25	5,09	4,94	5,92	6,63	6,66	6,50	6,16
Bali	4,14	4,01	3,91	3,79	3,61	3,78	4,45	4,53	4,72	4,57
Nusa Tenggara Barat	15,05	14,75	14,63	14,56	13,88	13,97	14,23	14,14	13,83	13,68
Nusa Tenggara Timur	21,38	21,35	21,03	21,09	20,62	20,90	21,21	20,99	20,44	20,05
Kalimantan Barat	7,86	7,77	7,37	7,49	7,28	7,17	7,24	7,15	6,84	6,73
Kalimantan Tengah	5,26	5,17	5,10	4,98	4,81	4,82	5,26	5,16	5,16	5,28
Kalimantan Selatan	4,70	4,54	4,65	4,55	4,47	4,38	4,83	4,83	4,56	4,49
Kalimantan Timur	6,08	6,03	6,06	5,94	5,91	6,10	6,64	6,54	6,27	6,31
Kalimantan Utara	6,96	7,09	6,86	6,63	6,49	6,80	7,41	7,36	6,83	6,77
Sulawesi Utara	7,90	7,80	7,59	7,66	7,51	7,62	7,78	7,77	7,36	7,28
Sulawesi Tengah	14,22	14,01	13,69	13,48	13,18	12,92	13,06	13,00	12,18	12,33
Sulawesi Selatan	9,48	9,06	8,87	8,69	8,56	8,72	8,99	8,78	8,53	8,63
Sulawesi Tenggara	11,97	11,63	11,32	11,24	11,04	11,00	11,69	11,66	11,74	11,17
Gorontalo	17,14	16,81	15,83	15,52	15,31	15,22	15,59	15,61	15,41	15,42
Sulawesi Barat	11,18	11,25	11,22	11,02	10,95	10,87	11,50	11,29	11,85	11,75
Maluku	18,29	18,12	17,85	17,69	17,65	17,44	17,99	17,87	16,30	15,97
Maluku Utara	6,44	6,64	6,62	6,77	6,91	6,78	6,97	6,89	6,38	6,23
Papua Barat	23,12	23,01	22,66	22,17	21,51	21,37	21,70	21,84	21,82	21,33
Papua	27,76	27,74	27,43	27,53	26,55	26,64	26,80	26,86	27,38	26,56
Indonesia	10,12	9,82	9,66	9,41	9,22	9,78	10,19	10,14	9,71	9,54

1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

Provinsi	Kode Indikator								
	1.4.1* Akses Pada Layanan Air Minum ¹			1.4.1* Akses Pada Layanan Sanitasi Dasar			1.4.1* Akses Pada Fasilitas Kebersihan Dasar ²		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	33,77	36,96	39,40	73,16	77,06	77,55	64,00	67,98	69,31
Sumatera Utara	40,20	41,32	42,39	79,59	81,08	82,02	71,43	67,30	68,22
Sumatera Barat	35,94	38,47	39,56	63,98	68,11	68,68	78,80	82,69	82,09
Riau	35,66	32,99	36,57	80,04	83,99	83,64	72,11	73,05	74,93
Jambi	46,26	45,49	46,33	75,60	77,82	80,36	71,47	73,12	73,41
Sumatera Selatan	47,13	49,57	52,39	74,67	76,94	77,29	73,84	75,04	75,28
Bengkulu	35,88	37,36	43,76	75,91	78,10	79,81	77,81	79,12	78,83
Lampung	44,18	47,51	52,03	79,22	78,81	83,89	74,73	78,06	80,69
Kep. Bangka Belitung	21,06	19,21	19,33	90,32	92,58	92,24	85,35	86,67	89,44
Kepulauan Riau	16,46	13,02	14,47	89,13	89,19	91,62	74,49	80,35	83,77
DKI Jakarta	27,48	24,94	24,11	92,89	93,04	95,17	73,18	76,83	79,52
Jawa Barat	39,30	38,54	40,64	69,64	71,40	71,66	76,82	79,10	79,49
Jawa Tengah	56,98	55,00	55,91	80,29	83,24	83,28	81,22	84,42	85,81
DI Yogyakarta	58,91	61,92	65,03	94,67	96,96	97,12	80,89	84,64	87,54
Jawa Timur	52,38	52,41	52,50	78,78	80,98	80,97	77,08	79,36	81,88
Banten	34,42	33,75	35,30	81,01	82,00	82,89	74,19	78,36	80,27
Bali	43,49	40,22	40,93	94,59	95,01	95,95	88,33	89,68	91,30
Nusa Tenggara Barat	49,12	46,98	43,82	80,02	82,89	82,85	71,47	74,26	75,10
Nusa Tenggara Timur	28,96	26,91	29,78	64,55	69,70	73,36	51,92	54,43	56,33
Kalimantan Barat	50,62	48,68	51,77	72,08	75,81	78,39	71,31	72,90	74,94
Kalimantan Tengah	26,64	26,76	30,45	69,23	72,31	73,77	77,16	77,82	79,63
Kalimantan Selatan	37,21	36,90	39,80	76,56	81,17	81,43	85,39	86,70	87,16
Kalimantan Timur	17,66	15,28	18,22	89,27	89,17	89,77	75,84	76,83	78,03
Kalimantan Utara	20,16	24,68	20,62	77,20	82,09	79,80	83,40	87,02	87,73
Sulawesi Utara	34,45	34,20	37,32	82,36	85,49	84,85	83,12	83,71	84,58
Sulawesi Tengah	35,48	34,02	35,01	71,95	74,61	76,06	81,38	81,93	82,23
Sulawesi Selatan	44,25	44,39	46,22	87,80	88,96	91,57	85,34	88,71	89,08
Sulawesi Tenggara	41,45	42,07	42,40	79,75	82,38	85,62	82,97	85,97	85,69
Gorontalo	34,87	32,04	31,69	74,57	75,68	78,58	79,71	85,40	86,87
Sulawesi Barat	32,80	30,49	40,80	73,39	77,07	80,12	80,77	79,52	76,25
Maluku	29,38	29,63	28,83	70,00	75,06	76,77	75,60	79,13	79,84
Maluku Utara	39,60	43,31	45,23	72,52	75,99	77,11	72,81	80,52	81,21
Papua Barat	32,06	25,21	28,46	76,39	78,71	77,89	69,47	73,53	73,71
Papua	24,64	25,37	30,07	38,27	40,31	40,81	35,55	36,44	36,97
Indonesia	42,84	42,31	43,81	77,39	79,53	80,29	76,07	78,30	79,59

1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar

Catatan: ¹ Komponen penyusun indikator air minum yang dikelola secara aman (air layak, terletak di dalam kawasan rumah, tersedia setiap dibutuhkan (tidak kekurangan air dalam 24 jam), dan memenuhi syarat kualitas air minum (tidak keruh, berwarna, berbusa, dll)).

² Akses ke fasilitas kebersihan dasar mengacu pada ketersediaan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

Provinsi	Kode Indikator									
	1.4.2* Proporsi rumah tangga dengan Rumah milik					1.4.2* Proporsi rumah tangga dengan Rumah Sewa/ Kontrak				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	80,42	81,21	80,32	80,96	80,51	6,61	7,31	6,69	6,98	6,86
Sumatera Utara	67,53	68,32	68,35	69,16	67,57	13,99	12,87	14,02	12,54	14,13
Sumatera Barat	70,58	71,21	70,75	71,24	68,34	11,31	12,51	11,93	11,44	11,37
Riau	68,15	69,90	70,55	69,78	72,52	16,04	16,00	15,40	13,61	11,82
Jambi	81,39	83,64	82,26	84,32	84,21	7,11	7,06	6,53	5,83	5,95
Sumatera Selatan	80,60	80,65	81,52	81,76	81,32	6,93	6,25	6,09	5,13	6,18
Bengkulu	80,83	83,39	82,72	83,56	84,32	9,30	7,59	7,74	7,49	7,03
Lampung	86,36	87,89	88,60	88,39	89,40	4,60	3,96	4,20	4,16	3,92
Kep. Bangka Belitung	83,75	85,91	85,51	85,33	83,14	6,75	5,25	5,92	5,76	7,31
Kepulauan Riau	65,70	69,44	66,62	66,37	66,83	27,36	23,48	24,03	26,29	25,95
DKI Jakarta	48,33	47,85	47,12	45,04	48,48	36,27	35,63	36,36	37,71	34,63
Jawa Barat	76,83	77,71	77,89	77,60	79,63	11,06	10,50	11,11	10,68	9,50
Jawa Tengah	88,01	88,17	89,04	89,20	89,92	2,88	2,85	2,91	2,56	2,62
DI Yogyakarta	75,26	76,54	73,29	74,55	76,53	13,57	13,71	17,53	15,01	13,98
Jawa Timur	87,55	87,46	87,58	87,12	88,80	5,81	5,97	6,02	5,65	4,55
Banten	81,38	81,33	80,36	82,26	82,82	11,23	12,48	12,35	11,62	11,30
Bali	70,54	71,75	72,88	71,17	73,92	21,39	19,99	21,03	22,03	19,63
Nusa Tenggara Barat	85,66	85,48	87,15	87,43	87,36	2,52	3,47	3,10	3,38	3,05
Nusa Tenggara Timur	86,50	85,91	86,88	87,39	85,22	5,17	6,17	6,00	5,93	6,42
Kalimantan Barat	87,99	88,84	88,52	88,83	88,21	3,60	3,39	3,19	2,86	3,48
Kalimantan Tengah	76,80	75,24	75,58	78,35	77,04	8,58	7,99	8,47	7,57	7,22
Kalimantan Selatan	77,30	76,77	76,33	77,58	79,83	9,50	10,66	10,98	9,91	8,19
Kalimantan Timur	68,87	70,31	69,13	68,83	70,76	18,45	17,90	16,97	17,44	16,70
Kalimantan Utara	69,72	67,23	72,06	73,77	69,60	16,81	17,69	15,94	14,09	16,19
Sulawesi Utara	76,79	77,65	77,27	78,67	77,37	7,02	6,66	6,43	5,64	6,13
Sulawesi Tengah	83,70	84,32	84,31	84,32	84,46	5,98	5,99	6,25	5,61	6,06
Sulawesi Selatan	82,75	83,61	83,69	83,40	84,75	6,43	5,36	5,20	5,31	4,71
Sulawesi Tenggara	84,78	84,43	85,28	86,14	86,33	6,22	5,80	5,95	5,30	4,29
Gorontalo	80,45	79,48	80,64	80,18	81,16	3,48	2,92	4,65	2,46	3,90
Sulawesi Barat	88,98	86,85	86,80	87,56	89,72	2,69	2,49	2,16	2,15	1,41
Maluku	80,15	80,09	79,48	79,00	75,13	6,53	6,57	6,50	7,29	8,67
Maluku Utara	86,83	83,87	82,73	83,65	83,40	5,47	7,32	7,36	6,63	6,67
Papua Barat	72,06	69,19	71,27	72,09	76,03	13,10	14,42	14,50	13,35	11,19
Papua	81,00	81,36	82,12	83,05	83,20	9,02	9,18	8,85	8,47	7,87
Indonesia	79,61	80,02	80,07	80,10	81,08	9,52	9,35	9,64	9,27	8,66

1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Provinsi	Kode Indikator									
	2.1.1*					2.1.2*				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	8,40	8,68	9,41	8,58	6,90	11,35	7,35	6,41	4,88	4,39
Sumatera Utara	7,39	5,75	4,84	6,73	6,33	9,94	8,73	6,60	6,41	6,64
Sumatera Barat	5,53	5,45	4,90	5,86	6,02	11,18	7,24	6,34	5,91	5,38
Riau	8,61	9,66	8,32	9,16	10,61	8,99	7,45	8,00	4,91	4,94
Jambi	10,94	10,05	8,95	9,12	9,25	7,07	5,87	5,57	4,70	4,07
Sumatera Selatan	7,47	10,84	9,04	9,77	6,82	8,82	8,54	6,19	6,87	5,15
Bengkulu	12,51	8,71	7,66	7,72	8,64	9,20	8,16	6,26	4,87	4,31
Lampung	9,20	12,11	10,51	12,19	10,25	9,01	7,12	7,60	7,51	5,66
Kep. Bangka Belitung	9,61	10,07	7,85	9,35	11,05	3,97	3,55	2,96	3,10	3,81
Kepulauan Riau	4,09	4,38	4,08	6,07	7,71	8,65	6,63	6,39	4,77	7,55
DKI Jakarta	1,80	1,46	1,43	1,94	2,20	5,20	4,96	2,68	3,13	3,57
Jawa Barat	3,60	3,82	3,70	3,90	4,44	9,52	7,16	6,02	5,79	5,46
Jawa Tengah	13,82	11,22	11,61	11,80	12,34	5,43	4,26	3,61	2,84	2,87
DI Yogyakarta	8,84	8,70	7,35	9,90	10,18	4,58	3,14	2,91	2,00	3,25
Jawa Timur	8,51	7,40	7,47	8,58	9,14	5,58	4,28	3,49	3,24	2,98
Banten	2,64	2,95	2,13	2,11	2,80	8,54	7,97	6,16	6,31	4,86
Bali	4,69	2,73	2,91	4,01	7,43	7,29	4,41	4,09	1,84	4,51
Nusa Tenggara Barat	8,71	5,97	2,77	2,97	1,78	15,13	13,39	9,93	10,85	9,44
Nusa Tenggara Timur	11,26	13,46	14,11	13,12	11,84	27,54	21,32	10,59	15,46	15,31
Kalimantan Barat	18,90	18,68	19,11	19,92	19,60	8,29	7,26	6,76	7,08	6,15
Kalimantan Tengah	9,03	8,71	9,38	10,10	8,88	7,98	5,81	5,08	4,31	3,61
Kalimantan Selatan	2,29	2,67	2,51	2,72	2,78	5,96	4,68	3,27	3,70	3,99
Kalimantan Timur	11,61	10,18	6,97	8,24	12,56	5,71	5,38	4,61	4,84	4,29
Kalimantan Utara	14,35	11,05	10,12	12,11	12,75	9,86	8,71	3,45	3,37	4,54
Sulawesi Utara	3,10	3,12	3,96	4,49	6,91	11,94	10,08	8,48	6,29	6,71
Sulawesi Tengah	4,60	6,95	8,44	8,85	10,63	14,37	13,57	12,58	9,61	7,73
Sulawesi Selatan	5,43	6,22	7,65	10,14	7,93	7,63	6,78	4,83	4,33	4,02
Sulawesi Tenggara	7,55	7,12	8,79	10,06	11,17	11,85	8,28	7,55	5,58	5,53
Gorontalo	9,27	11,55	7,78	10,33	14,84	19,36	10,81	8,79	5,67	9,00
Sulawesi Barat	10,59	10,23	6,79	9,16	10,81	11,69	8,84	8,63	8,25	7,88
Maluku	26,57	34,17	34,12	35,55	29,62	13,98	13,84	12,03	10,95	11,62
Maluku Utara	34,05	30,75	35,81	35,48	28,86	13,96	14,74	14,99	12,55	10,16
Papua Barat	27,22	21,18	19,22	23,09	24,59	11,18	11,89	10,14	8,56	8,41
Papua	34,27	38,35	38,21	31,49	37,37	9,85	15,12	10,98	8,68	7,58
Indonesia	8,23	7,92	7,63	8,34	8,49	8,66	6,86	5,42	5,12	4,79

2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Provinsi	Kode Indikator									
	2.2.1*			2.2.2*			2.2.2.(a) ¹			
	2018	2019	2021	2018	2019	2021	2017	2018	2019	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	37,10	34,18	33,20	11,90	9,20	10,70	76,20	74,80	74,50	76,50
Sumatera Utara	32,40	30,11	25,80	12,10	10,60	7,90	85,90	86,80	87,60	85,50
Sumatera Barat	29,90	27,47	23,30	11,30	6,20	7,40	86,30	83,70	83,90	82,70
Riau	27,40	23,95	22,30	12,30	9,10	9,20	84,90	85,00	85,50	84,10
Jambi	30,20	21,03	22,40	12,00	8,00	9,10	90,90	88,00	87,00	88,50
Sumatera Selatan	31,60	28,98	24,80	11,50	9,10	7,60	93,10	89,70	87,10	89,10
Bengkulu	28,00	26,86	22,10	8,20	6,40	5,00	82,60	85,60	82,60	83,70
Lampung	27,30	26,26	18,50	10,60	6,80	7,20	90,60	88,40	89,70	89,00
Kep. Bangka Belitung	23,40	19,93	18,60	9,90	6,20	6,20	83,00	82,90	85,30	81,80
Kep. Riau	23,60	16,82	17,60	11,20	6,00	7,70	87,10	84,80	86,10	86,40
DKI Jakarta	17,60	19,96	16,80	10,10	5,40	6,90	83,80	90,80	89,90	86,60
Jawa Barat	31,10	26,21	24,50	8,40	6,60	5,30	85,20	89,00	87,80	86,00
Jawa Tengah	31,30	27,68	20,90	8,50	6,60	6,70	86,20	92,10	91,40	88,60
DI Yogyakarta	21,40	21,04	17,30	8,40	6,10	5,80	89,00	95,60	94,80	95,30
Jawa Timur	32,80	26,86	23,50	9,10	6,60	6,40	89,70	92,50	91,30	88,70
Banten	26,60	24,11	24,50	10,50	6,90	6,30	89,10	88,80	87,90	85,70
Bali	21,90	14,42	10,90	6,30	3,30	3,00	95,90	92,20	90,90	88,20
Nusa Tenggara Barat	33,50	37,85	31,40	14,40	6,50	7,50	82,10	89,90	94,80	93,60
Nusa Tenggara Timur	42,70	43,82	37,80	12,80	9,90	10,10	81,20	71,20	71,40	73,40
Kalimantan Barat	33,30	31,46	29,80	14,30	8,80	10,00	83,50	77,00	78,60	76,70
Kalimantan Tengah	34,00	32,30	27,40	13,90	7,90	7,60	92,30	84,70	85,10	82,70
Kalimantan Selatan	33,10	31,75	30,00	13,20	9,10	10,30	86,50	84,70	86,30	83,30
Kalimantan Timur	29,20	28,09	22,80	7,60	7,30	8,10	84,60	84,70	87,30	83,40
Kalimantan Utara	26,90	26,25	27,50	4,60	5,50	6,80	82,80	81,20	82,50	80,60
Sulawesi Utara	25,50	21,18	21,60	9,50	5,50	7,10	94,90	86,90	88,10	83,10
Sulawesi Tengah	32,30	31,26	29,70	12,80	8,50	9,40	91,40	82,50	84,50	77,20
Sulawesi Selatan	35,70	30,59	27,40	10,10	6,80	6,20	92,60	86,80	87,80	80,10
Sulawesi Tenggara	28,70	31,44	30,20	11,90	8,60	6,60	93,30	84,20	86,20	79,00
Gorontalo	32,50	34,89	29,00	14,40	7,80	10,20	92,80	78,90	83,00	74,30
Sulawesi Barat	41,60	40,38	33,80	10,50	6,60	7,10	76,80	73,00	81,40	74,60
Maluku	34,00	30,38	28,70	13,20	15,80	12,00	80,60	70,60	70,40	70,70
Maluku Utara	31,40	29,07	27,50	11,90	8,80	10,60	79,20	75,50	76,50	74,50
Papua Barat	27,80	24,58	26,20	12,20	13,10	10,80	94,10	80,50	80,70	78,30
Papua	33,10	29,36	29,50	10,30	9,40	8,80	87,60	70,60	72,30	72,30
Indonesia	30,80	27,67	24,40	10,20	7,40	7,10	90,40	91,30	90,80	87,20

2.2.1* Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

Sumber: Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018, Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, Survei Status Gizi Indonesia 2021, Kementerian Kesehatan

2.2.2* Prevalensi *wasting* (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

Sumber: Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018, Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, Survei Status Gizi Indonesia 2021, Kementerian Kesehatan

2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Catatan: ¹ dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.000 Kkal/Kapita/Hari (2017-2019) dan AKE 2.100 Kkal/Kapita/Hari (2021)

Sumber: Badan Keamanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Provinsi	Kode Indikator		
	2.3.1.(a)		
	2019	2020 ^x	2021 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	58.476.041	58.692.850	65.183.290
Sumatera Utara	65.883.233	71.399.202	75.608.129
Sumatera Barat	63.444.677	57.871.786	61.265.328
Riau	154.991.101	165.160.425	186.128.829
Jambi	78.268.309	78.880.562	92.016.190
Sumatera Selatan	35.645.547	36.935.389	39.537.471
Bengkulu	45.400.557	42.961.110	47.977.161
Lampung	60.430.497	54.946.581	57.274.356
Kep. Bangka Belitung	65.571.850	67.903.078	90.195.289
Kepulauan Riau	109.921.407	88.571.947	86.555.430
DKI Jakarta	95.408.352	83.074.739	72.448.253
Jawa Barat	63.388.237	52.424.691	53.847.252
Jawa Tengah	45.008.038	41.796.719	46.505.049
DI Yogyakarta	31.942.484	32.839.862	35.761.810
Jawa Timur	40.496.540	39.532.353	42.375.056
Banten	62.737.336	56.656.856	63.634.639
Bali	73.198.088	62.021.072	64.599.194
Nusa Tenggara Barat	39.324.374	34.673.641	36.882.527
Nusa Tenggara Timur	23.520.940	21.650.180	22.860.080
Kalimantan Barat	35.620.192	36.949.977	41.801.670
Kalimantan Tengah	59.040.664	65.600.023	75.373.559
Kalimantan Selatan	41.207.390	37.133.903	39.905.217
Kalimantan Timur	159.684.833	154.191.705	164.355.886
Kalimantan Utara	153.748.725	160.272.315	175.557.483
Sulawesi Utara	81.806.695	84.330.002	106.361.868
Sulawesi Tengah	70.864.028	65.727.944	74.059.461
Sulawesi Selatan	73.094.626	68.677.992	78.976.457
Sulawesi Tenggara	69.038.358	66.389.333	74.799.690
Gorontalo	89.919.294	88.765.761	98.241.444
Sulawesi Barat	62.224.227	59.066.732	67.796.601
Maluku	40.554.135	42.129.664	43.154.985
Maluku Utara	37.101.243	37.763.454	56.948.791
Papua Barat	65.668.506	60.919.528	59.081.780
Papua	19.752.010	21.606.160	19.838.286
Indonesia	56.776.482	55.341.371	60.700.128

2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan (Rupiah/Tenaga Kerja)

Catatan: ^x menggunakan pembagi PDB/PDRB angka sementara

^{xx} menggunakan pembagi PDB/PDRB angka sangat sementara

Sumber: Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Kota	Kode Indikator		
	2.c.1*		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Banda Aceh	0,08	0,96	-0,05
Medan	-0,57	0,09	-0,07
Padang	0,89	-0,18	-0,02
Pekanbaru	0,05	-0,22	-0,06
Jambi	-1,66	0,24	-0,77
Palembang	-1,01	-0,24	-0,46
Bengkulu	-0,51	-0,10	-0,81
Bandar Lampung	-0,65	0,19	-0,73
Pangkal Pinang	-0,02	-0,22	-1,09
Tanjung Pinang	-0,06	-0,07	-0,16
Dki Jakarta	-0,23	-0,26	-0,32
Bandung	-0,83	-1,02	-0,27
Semarang	-0,85	0,04	-0,25
Yogyakarta	-0,21	0,59	-0,50
Surabaya	-0,66	0,09	0,20
Serang	-1,57	-0,35	-1,02
Denpasar	-0,83	0,86	0,15
Mataram	-0,19	0,10	-1,26
Kupang	-1,11	0,96	-2,38
Pontianak	-0,21	0,07	-0,33
Palangka Raya	1,09	0,92	-0,08
Banjarmasin	0,25	1,35	-0,21
Samarinda	-0,51	0,09	0,14
Tanjung Selor	-	-	-
Manado	-0,60	0,50	-0,22
Palu	-0,45	0,20	-0,30
Makassar	-0,07	0,20	-0,30
Kendari	-0,15	0,38	-0,83
Gorontalo	-0,25	0,19	-0,19
Mamuju	-0,35	-0,18	-0,46
Ambon	-0,67	1,14	-0,90
Ternate	-0,37	-0,30	-0,06
Manokwari	0,03	-0,03	0,10
Jayapura	-1,43	0,02	-0,40
Nasional	0,21	0,43	0,19

2.c.1* Indikator anomali harga pangan

Sumber: Badan Pusat Statistik

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Provinsi	Kode Indikator									
	3.1.2* (a) ditolong oleh tenaga kesehatan					3.1.2* (b) di fasilitas kesehatan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	97,32	97,57	98,29	98,23	98,65	81,57	86,12	88,80	89,97	91,31
Sumatera Utara	95,27	94,51	96,40	96,30	96,47	70,11	72,90	78,44	83,54	87,43
Sumatera Barat	97,43	96,82	97,66	97,29	97,86	89,73	91,76	92,60	94,80	93,22
Riau	93,99	93,41	94,51	95,82	95,45	71,15	71,25	74,38	78,68	81,81
Jambi	90,29	88,44	90,32	93,37	95,21	57,16	60,11	65,59	70,80	73,07
Sumatera Selatan	93,62	92,66	92,93	95,30	95,69	68,98	73,43	78,95	83,05	82,92
Bengkulu	93,40	95,80	96,52	97,78	98,81	62,50	63,81	72,35	80,47	81,40
Lampung	95,07	94,04	95,59	97,32	97,74	81,79	85,00	86,85	89,12	92,30
Kep. Bangka Belitung	98,76	97,06	98,08	99,67	99,37	90,26	88,04	91,00	95,66	95,36
Kepulauan Riau	99,30	97,90	97,92	99,46	98,82	91,38	92,37	92,41	94,30	95,89
DKI Jakarta	99,59	99,72	99,86	99,43	99,92	97,86	97,19	98,81	99,15	99,26
Jawa Barat	90,68	93,10	92,76	93,00	93,25	80,74	82,22	85,41	86,88	84,94
Jawa Tengah	98,97	99,48	99,64	99,74	99,66	95,57	96,77	98,08	98,09	97,90
DI Yogyakarta	99,90	100,00	100,00	100,00	99,76	99,40	99,05	99,79	99,76	98,75
Jawa Timur	97,30	96,82	98,17	98,06	98,59	93,83	93,69	95,11	96,09	96,55
Banten	87,66	90,16	91,70	91,79	96,96	75,46	79,40	83,36	86,69	87,50
Bali	99,65	99,87	99,84	99,68	100,00	99,30	99,87	99,84	98,33	99,86
Nusa Tenggara Barat	95,68	94,77	96,99	97,36	98,28	90,42	89,63	93,16	93,90	96,14
Nusa Tenggara Timur	80,59	82,08	83,19	84,88	89,25	73,05	76,42	79,06	80,65	85,02
Kalimantan Barat	83,86	84,59	86,93	87,99	90,84	62,12	64,93	71,91	72,73	77,56
Kalimantan Tengah	84,44	85,97	90,42	88,53	88,45	46,80	47,68	56,82	57,89	63,13
Kalimantan Selatan	94,43	95,96	97,16	97,39	97,81	72,71	77,27	77,60	80,45	83,62
Kalimantan Timur	96,44	96,34	96,39	97,46	96,50	87,37	87,34	89,31	90,48	92,11
Kalimantan Utara	95,11	95,98	97,48	95,92	97,38	81,76	84,29	90,25	90,03	92,63
Sulawesi Utara	93,50	91,77	93,92	95,88	95,12	82,16	83,90	89,13	91,38	89,91
Sulawesi Tengah	87,96	87,64	92,38	93,75	92,53	67,47	70,50	78,10	77,26	81,29
Sulawesi Selatan	95,31	95,81	97,21	97,65	98,44	82,24	83,50	87,99	92,72	95,44
Sulawesi Tenggara	88,41	86,39	91,55	92,93	93,29	43,78	47,74	54,92	56,64	57,29
Gorontalo	95,72	94,99	97,68	98,22	97,55	89,86	86,63	88,65	88,78	89,33
Sulawesi Barat	83,27	89,18	91,81	91,30	91,28	66,39	69,87	78,60	81,59	83,24
Maluku	66,50	63,66	68,34	72,81	71,42	30,21	33,91	39,74	43,35	45,94
Maluku Utara	71,38	75,94	81,34	80,98	82,78	40,96	41,12	57,60	62,23	64,73
Papua Barat	76,78	82,63	82,50	85,56	82,77	55,96	59,46	69,13	73,96	72,87
Papua	68,29	61,55	69,41	68,49	72,93	57,25	53,11	61,00	62,46	66,71
Indonesia	93,25	93,63	94,71	95,16	95,93	81,31	82,74	85,94	87,91	88,91

3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya: (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Provinsi	Kode Indikator						
	3.2.1* (a)	3.2.1* (b)	3.2.2*	3.3.3*			
	2012	2012	2012	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	52,00	47,00	28,00	0,02	0,02	0,04	0,06
Sumatera Utara	54,00	40,00	26,00	0,09	0,07	0,07	0,17
Sumatera Barat	34,00	27,00	17,00	0,09	0,06	0,02	0,01
Riau	28,00	24,00	15,00	0,01	0,02	0,24	0,13
Jambi	36,00	34,00	16,00	0,05	0,02	0,02	0,01
Sumatera Selatan	37,00	29,00	20,00	0,08	0,07	0,01	0,00
Bengkulu	35,00	29,00	21,00	0,16	0,04	0,05	0,00
Lampung	38,00	30,00	20,00	0,38	0,18	0,05	0,06
Kep. Bangka Belitung	32,00	27,00	20,00	0,16	0,09	0,12	0,07
Kepulauan Riau	42,00	35,00	21,00	0,11	0,06	0,09	0,02
DKI Jakarta	31,00	22,00	15,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Jawa Barat	38,00	30,00	17,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Jawa Tengah	38,00	32,00	22,00	0,02	0,01	0,01	0,02
DI Yogyakarta	30,00	25,00	18,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Jawa Timur	34,00	30,00	14,00	0,01	0,02	0,01	0,01
Banten	38,00	32,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bali	33,00	29,00	18,00	0,02	0,01	0,00	0,01
Nusa Tenggara Barat	75,00	57,00	33,00	0,34	0,19	0,05	0,07
Nusa Tenggara Timur	58,00	45,00	26,00	3,42	2,37	2,76	1,69
Kalimantan Barat	37,00	31,00	18,00	0,02	0,00	0,01	0,00
Kalimantan Tengah	56,00	49,00	25,00	0,25	0,07	0,06	0,06
Kalimantan Selatan	57,00	44,00	30,00	0,20	0,20	0,12	0,07
Kalimantan Timur	31,00	21,00	12,00	0,63	0,55	0,62	0,61
Kalimantan Utara	-	-	-	0,04	0,08	0,09	0,05
Sulawesi Utara	37,00	33,00	23,00	0,25	0,20	0,36	0,28
Sulawesi Tengah	85,00	58,00	26,00	0,06	0,06	0,06	0,02
Sulawesi Selatan	37,00	25,00	13,00	0,15	0,10	0,09	0,10
Sulawesi Tenggara	55,00	45,00	25,00	0,31	0,30	0,14	0,13
Gorontalo	78,00	67,00	26,00	0,05	0,03	0,03	0,04
Sulawesi Barat	70,00	60,00	26,00	0,19	0,14	0,10	0,07
Maluku	60,00	36,00	24,00	1,16	0,72	0,42	0,45
Maluku Utara	85,00	62,00	37,00	0,39	0,46	0,16	0,10
Papua Barat	109,00	74,00	35,00	8,49	7,38	10,15	7,56
Papua	115,00	54,00	27,00	52,99	64,03	63,12	80,05
Indonesia	40,00	32,00	19,00	0,84	0,93	0,94	1,12

3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup; (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
Sumber: SDKI, BPS dan BKKBN

3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup
Sumber: SDKI, BPS dan BKKBN

3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang
Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Provinsi	Kode Indikator								
	3.3.3.(a)				3.3.5.(a)	3.3.5.(b)			
	2018	2019	2020	2021	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	19	21	21	22	20	0	2	2	2
Sumatera Utara	21	21	21	21	33	3	5	5	5
Sumatera Barat	16	17	17	18	19	4	6	7	7
Riau	10	10	10	11	12	3	5	6	8
Jambi	5	7	7	7	10	1	1	1	1
Sumatera Selatan	8	8	9	11	17	0	0	2	4
Bengkulu	3	3	4	7	10	0	0	1	3
Lampung	10	11	11	11	15	0	0	0	0
Kep. Bangka Belitung	5	6	6	6	7	2	4	5	5
Kepulauan Riau	3	3	3	4	6	0	0	0	0
DKI Jakarta	6	6	6	6	5	NA	NA	NA	0
Jawa Barat	23	23	25	26	23	4	6	6	7
Jawa Tengah	30	33	33	33	32	0	0	0	0
DI Yogyakarta	3	4	4	4	5	NA	NA	NA	0
Jawa Timur	38	38	38	38	34	NA	NA	NA	0
Banten	6	6	6	8	8	3	5	5	5
Bali	9	9	9	9	9	NA	NA	NA	0
Nusa Tenggara Barat	3	3	3	6	8	NA	NA	NA	0
Nusa Tenggara Timur	0	0	3	5	14	2	2	2	2
Kalimantan Barat	3	3	4	6	13	0	0	0	0
Kalimantan Tengah	9	10	11	11	14	1	3	3	3
Kalimantan Selatan	7	7	7	9	13	2	2	1	1
Kalimantan Timur	3	3	3	4	10	0	0	0	0
Kalimantan Utara	1	1	3	3	5	0	0	0	0
Sulawesi Utara	6	6	8	8	5	NA	NA	NA	0
Sulawesi Tengah	4	5	6	6	13	1	3	3	3
Sulawesi Selatan	19	20	21	21	18	1	1	2	3
Sulawesi Tenggara	9	9	11	12	11	3	3	3	3
Gorontalo	2	2	2	5	1	4	4	4	4
Sulawesi Barat	3	5	5	5	4	1	1	1	1
Maluku	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Maluku Utara	0	0	1	4	2	1	1	1	1
Papua Barat	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Papua	0	0	0	0	13	2	2	4	4
Indonesia	285	300	318	347	413	38	56	64	72

3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan

3.3.5.(a) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan

3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi

Catatan: Tidak ada kabupaten/kota endemis filariasis di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara.

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Provinsi	Kode Indikator					
	3.4.1.(b)		3.4.1.(c)		3.5.1.(a)	3.5.1.(b)
	2013	2018	2013	2018	2021	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	21,50	26,45	27,90	38,30	349	129
Sumatera Utara	24,70	29,19	31,10	40,60	69	253
Sumatera Barat	22,60	25,16	23,60	33,50	460	75
Riau	20,90	29,14	25,70	38,10	852	22
Jambi	24,60	28,99	22,70	30,90	207	54
Sumatera Selatan	26,10	30,44	20,80	30,30	1.327	70
Bengkulu	21,60	28,14	23,70	33,10	105	28
Lampung	24,70	29,94	18,50	29,60	437	34
Kep. Bangka Belitung	30,90	29,90	30,50	37,40	82	39
Kepulauan Riau	22,40	25,84	30,50	39,80	27	50
DKI Jakarta	20,00	33,43	34,80	45,40	1.169	110
Jawa Barat	29,40	39,60	26,90	36,70	815	264
Jawa Tengah	26,40	37,57	23,60	33,40	283	161
DI Yogyakarta	25,70	32,86	26,60	34,70	236	90
Jawa Timur	26,20	36,32	28,10	36,10	604	155
Banten	23,00	29,47	24,80	35,30	150	49
Bali	19,90	29,97	28,80	38,80	194	41
Nusa Tenggara Barat	24,30	27,80	19,40	26,70	339	51
Nusa Tenggara Timur	23,30	27,72	12,90	19,10	2	0
Kalimantan Barat	28,30	36,99	20,10	30,20	263	76
Kalimantan Tengah	26,70	34,47	23,00	31,90	221	42
Kalimantan Selatan	30,80	44,13	24,70	32,90	1.315	112
Kalimantan Timur	29,60	39,30	35,40	44,20	509	53
Kalimantan Utara	-	33,02	-	40,30	14	34
Sulawesi Utara	27,10	33,12	40,60	46,50	4	95
Sulawesi Tengah	28,70	29,75	28,20	34,50	14	117
Sulawesi Selatan	28,10	31,68	24,30	32,10	36	56
Sulawesi Tenggara	22,50	29,75	23,40	32,40	1	24
Gorontalo	29,00	29,64	34,70	39,30	0	42
Sulawesi Barat	22,50	34,77	20,80	31,40	39	14
Maluku	24,10	28,96	25,00	32,80	6	33
Maluku Utara	21,20	24,65	30,60	38,00	12	1
Papua Barat	20,50	25,90	30,40	39,70	3	10
Papua	16,80	22,22	29,70	35,10	5	12
Indonesia	25,80	34,11	26,30	35,40	10.149	2.396

3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi

Sumber: Riskesdas 2013, Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan

3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun

Catatan: Obesitas dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 25

Sumber: Riskesdas 2013, Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan

3.5.1.(a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis

Sumber: Laporan Tahunan Masalah Penyalahgunaan Napza, Kemenkes

3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi

Sumber: Badan Narkotika Nasional

TUJUAN 3

KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Provinsi	Kode Indikator					
	3.7.1* Wanita menikah usia reproduksi		3.7.2* ASFR 15-19 tahun		3.7.2.(a)	
	2012	2017	2012	2017	2012	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	73,10	72,50	25	21	2,8	2,7
Sumatera Utara	61,90	63,10	32	29	3,0	2,9
Sumatera Barat	71,10	72,30	26	16	2,8	2,5
Riau	74,10	70,70	42	54	2,9	2,9
Jambi	82,90	83,00	75	46	2,3	2,3
Sumatera Selatan	85,10	80,40	66	46	2,8	2,6
Bengkulu	83,50	83,10	51	49	2,2	2,3
Lampung	84,80	84,30	59	32	2,7	2,3
Kep. Bangka Belitung	82,30	81,10	61	50	2,6	2,3
Kepulauan Riau	71,00	67,80	33	21	2,6	2,3
DKI Jakarta	75,80	69,70	20	20	2,3	2,2
Jawa Barat	82,30	80,00	52	35	2,5	2,4
Jawa Tengah	81,40	77,80	35	38	2,5	2,3
DI Yogyakarta	73,20	69,70	32	15	2,1	2,2
Jawa Timur	82,80	81,30	53	29	2,3	2,1
Banten	82,60	80,20	32	27	2,5	2,3
Bali	78,90	70,30	48	22	2,3	2,1
Nusa Tenggara Barat	76,30	74,90	75	42	2,8	2,5
Nusa Tenggara Timur	58,60	60,90	39	49	3,3	3,4
Kalimantan Barat	85,50	79,50	104	63	3,1	2,7
Kalimantan Tengah	86,50	87,30	89	83	2,8	2,5
Kalimantan Selatan	86,60	84,10	73	56	2,5	2,4
Kalimantan Timur	74,10	77,30	50	53	2,8	2,7
Kalimantan Utara	NA	68,40	NA	33	-	2,8
Sulawesi Utara	80,00	76,40	68	36	2,6	2,2
Sulawesi Tengah	73,40	79,30	91	60	3,2	2,7
Sulawesi Selatan	67,60	68,50	53	45	2,6	2,4
Sulawesi Tenggara	69,40	67,40	57	46	3,0	2,8
Gorontalo	80,10	80,00	62	44	2,6	2,5
Sulawesi Barat	72,30	70,60	101	46	3,6	2,7
Maluku	62,40	59,60	51	51	3,2	3,3
Maluku Utara	75,50	71,90	60	57	3,1	2,9
Papua Barat	64,90	56,00	82	39	3,7	3,2
Papua	42,00	66,90	53	65	3,5	3,3
Indonesia	79,00	77,10	48	36	2,6	2,4

3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern

Sumber: SDKI, BPS dan BKKBN

3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama

Sumber: SDKI, BPS dan BKKBN

3.7.2.(a) *Total Fertility Rate (TFR)*

Sumber: SDKI, BPS dan BKKBN

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Provinsi	Kode Indikator									
	3.8.1.(a)					3.8.2.(a)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	3,62	4,53	4,36	4,33	4,29	103,65	109,65	100,82	101,02	102,05
Sumatera Utara	4,19	3,80	4,23	4,75	3,83	67,40	72,69	75,45	74,45	78,64
Sumatera Barat	4,22	3,31	3,28	4,13	3,26	72,71	78,72	80,56	79,73	83,75
Riau	6,25	6,11	4,86	4,63	3,20	57,97	62,28	64,68	68,99	71,34
Jambi	4,62	4,66	4,57	4,48	3,85	60,07	66,88	70,37	72,30	74,37
Sumatera Selatan	4,65	4,05	5,14	5,36	3,32	55,43	60,53	75,57	74,46	80,41
Bengkulu	4,58	5,65	5,33	5,14	4,49	70,51	77,60	78,48	79,22	83,64
Lampung	5,64	5,27	5,47	5,42	3,89	65,51	69,79	77,69	76,78	80,60
Kep. Bangka Belitung	3,57	3,99	3,69	4,31	3,36	63,62	74,09	73,78	77,48	82,28
Kepulauan Riau	3,88	3,46	3,05	2,61	2,25	67,59	76,32	77,04	77,91	87,24
DKI Jakarta	3,56	3,20	2,81	3,93	2,61	142,14	165,45	164,32	164,04	173,53
Jawa Barat	5,12	4,69	5,38	5,87	3,86	65,66	71,57	73,21	75,25	77,39
Jawa Tengah	5,26	4,84	5,10	5,83	8,28	72,11	78,18	82,70	83,04	84,80
DI Yogyakarta	4,37	4,31	4,61	3,90	3,02	81,99	89,59	85,41	83,90	86,56
Jawa Timur	5,75	4,74	5,10	5,28	6,75	62,59	68,65	72,81	74,65	79,50
Banten	4,74	5,98	6,97	7,00	4,29	65,64	77,04	80,07	74,78	82,57
Bali	4,36	3,19	2,96	2,96	2,42	73,99	85,07	95,02	90,66	95,13
Nusa Tenggara Barat	6,44	7,31	7,37	7,68	8,49	71,42	76,23	84,09	82,89	85,72
Nusa Tenggara Timur	7,66	8,09	7,79	7,03	7,37	75,92	79,79	80,78	82,32	84,13
Kalimantan Barat	6,01	5,72	5,55	5,93	4,48	60,55	66,61	74,46	75,83	78,94
Kalimantan Tengah	7,11	6,76	6,84	6,06	4,18	60,45	78,69	87,28	88,91	92,34
Kalimantan Selatan	6,41	5,51	6,70	6,55	6,46	50,15	58,36	71,38	75,52	80,41
Kalimantan Timur	4,18	4,04	3,85	3,39	2,61	62,82	90,36	90,79	96,18	101,70
Kalimantan Utara	7,55	4,81	3,76	4,62	3,73	74,43	91,05	83,54	96,63	93,43
Sulawesi Utara	5,44	5,46	4,73	4,68	3,19	80,79	100,71	102,63	96,53	101,63
Sulawesi Tengah	9,32	8,57	8,67	7,52	6,25	72,13	81,16	87,30	81,53	92,68
Sulawesi Selatan	5,51	5,49	5,80	5,66	4,22	83,29	92,88	95,28	92,20	94,90
Sulawesi Tenggara	7,52	7,58	7,34	8,54	7,59	69,97	85,57	87,44	84,12	87,14
Gorontalo	8,81	7,46	7,89	6,03	6,45	96,97	106,96	93,45	84,61	95,76
Sulawesi Barat	6,78	5,93	6,36	6,84	6,98	82,15	88,58	93,09	93,96	95,44
Maluku	6,28	5,57	5,18	4,38	4,45	72,11	81,83	79,60	78,47	81,43
Maluku Utara	5,05	5,50	4,39	4,77	5,41	61,80	70,30	72,89	68,86	78,10
Papua Barat	5,46	4,33	4,19	3,33	2,78	125,58	139,76	133,53	115,15	122,42
Papua	3,28	3,01	2,41	2,70	2,95	108,07	114,14	111,86	81,91	118,92
Indonesia	5,26	4,91	5,18	5,44	5,03	71,59	79,44	82,69	82,51	86,96

3.8.1.(a) *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Provinsi	Kode Indikator								
	3.a.1*			3.b.1* DPT-3		3.b.1* CAMP-2		3.b.1* Imunisasi dasar lengkap ¹	
	2019	2020	2021	2013	2018	2013	2018	2013	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	28,70	28,06	28,30	52,90	22,00	62,40	37,90	38,30	19,50
Sumatera Utara	27,46	27,28	27,24	63,10	39,20	70,10	65,40	39,10	32,70
Sumatera Barat	30,75	30,08	30,50	60,20	45,40	71,40	63,90	39,70	38,70
Riau	29,04	28,06	28,34	70,00	36,70	77,30	68,60	52,20	34,40
Jambi	28,54	28,01	27,47	76,70	60,50	79,70	80,30	60,30	62,60
Sumatera Selatan	30,91	30,56	30,65	73,60	51,10	82,60	78,40	48,30	48,30
Bengkulu	33,14	32,31	33,17	86,70	67,60	90,20	85,10	62,10	62,60
Lampung	34,39	33,43	34,07	82,50	70,10	87,90	83,00	62,40	67,30
Kep. Bangka Belitung	29,18	28,23	28,16	83,70	72,00	86,40	81,90	67,70	75,20
Kepulauan Riau	27,59	26,16	26,17	87,40	74,90	91,90	80,00	71,60	71,20
DKI Jakarta	26,04	25,75	24,44	79,10	72,90	85,30	82,10	64,50	68,00
Jawa Barat	32,97	32,55	32,68	71,50	61,90	80,80	78,10	56,60	58,30
Jawa Tengah	27,40	27,70	28,24	89,20	77,10	92,60	86,60	76,90	75,00
DI Yogyakarta	22,87	22,64	24,54	95,10	91,00	98,10	96,90	83,10	83,70
Jawa Timur	27,93	27,78	28,53	85,70	72,00	89,00	82,80	74,50	69,20
Banten	31,69	31,58	31,76	63,30	52,60	66,70	63,80	45,80	47,00
Bali	20,96	20,50	19,58	90,40	90,60	93,50	94,40	80,80	92,10
Nusa Tenggara Barat	30,49	30,58	32,71	85,20	69,20	90,60	87,90	75,40	70,80
Nusa Tenggara Timur	27,33	26,14	27,22	66,00	46,80	84,10	82,50	50,30	51,60
Kalimantan Barat	28,50	27,49	27,93	71,90	61,90	77,30	68,10	47,40	48,00
Kalimantan Tengah	29,84	28,89	29,33	67,90	54,20	77,40	67,00	42,00	47,50
Kalimantan Selatan	23,95	23,83	24,51	72,00	68,60	74,10	81,00	52,00	68,70
Kalimantan Timur	24,52	24,42	23,37	81,40	71,60	84,10	84,10	65,90	73,60
Kalimantan Utara	27,63	25,66	27,46	NA	75,20	NA	85,40	NA	73,30
Sulawesi Utara	28,41	27,95	27,87	83,30	61,80	94,40	84,10	60,90	56,90
Sulawesi Tengah	31,64	30,64	29,77	72,60	53,30	76,70	75,70	47,10	47,90
Sulawesi Selatan	25,59	24,89	24,91	69,50	63,70	76,90	79,80	49,50	60,80
Sulawesi Tenggara	26,80	25,77	25,85	75,30	49,80	83,80	80,20	47,30	45,60
Gorontalo	32,37	30,30	30,50	93,00	66,30	94,90	81,30	80,60	61,60
Sulawesi Barat	27,06	26,85	27,17	67,10	56,90	72,50	75,30	52,40	50,20
Maluku	27,09	26,18	27,90	53,80	42,80	70,50	68,90	29,70	33,10
Maluku Utara	31,18	29,83	29,84	68,90	48,80	80,30	66,00	42,60	38,10
Papua Barat	28,67	25,80	27,07	60,00	50,70	76,90	73,00	35,60	47,60
Papua	26,05	26,97	24,91	40,80	34,00	56,80	60,70	29,20	29,20
Indonesia	29,03	28,69	28,96	75,60	61,30	82,10	77,30	59,20	57,90

3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional

Catatan: ¹ Imunisasi Dasar Lengkap mencakup 1 dosis Hb-0, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio atau 3 dosis IPV, dan 1 dosis campak.

Sumber: Riskesdas, Kementerian Kesehatan

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Provinsi	Kode Indikator				
	3.b.3*				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	75,83	93,10	99,43	94,10	89,92
Sumatera Utara	81,34	96,70	95,78	89,60	94,43
Sumatera Barat	100,00	100,00	98,53	96,00	100,00
Riau	82,38	97,20	96,73	89,82	90,95
Jambi	90,71	98,40	100,00	91,58	94,55
Sumatera Selatan	52,40	72,50	90,36	82,70	78,30
Bengkulu	100,00	91,60	93,30	89,39	98,32
Lampung	81,69	90,80	94,02	77,35	76,38
Kep. Bangka Belitung	100,00	100,00	100,00	100,00	90,63
Kepulauan Riau	84,13	95,40	98,85	97,75	92,22
DKI Jakarta	99,40	99,70	98,51	96,32	99,70
Jawa Barat	77,23	96,80	95,84	93,33	94,11
Jawa Tengah	90,63	89,60	95,92	95,95	88,00
DI Yogyakarta	98,35	100,00	100,00	100,00	100,00
Jawa Timur	95,66	97,70	99,42	96,63	98,74
Banten	84,27	87,00	97,86	78,93	72,02
Bali	100,00	97,50	100,00	91,67	100,00
Nusa Tenggara Barat	100,00	98,70	100,00	99,41	94,71
Nusa Tenggara Timur	61,11	67,20	82,46	94,24	96,93
Kalimantan Barat	65,37	85,20	99,59	97,56	93,09
Kalimantan Tengah	86,77	85,40	91,01	87,00	81,50
Kalimantan Selatan	95,85	95,70	100,00	98,29	100,00
Kalimantan Timur	97,83	98,90	99,47	98,93	99,47
Kalimantan Utara	98,00	95,80	100,00	100,00	98,25
Sulawesi Utara	90,43	88,30	100,00	100,00	83,42
Sulawesi Tengah	90,00	91,40	94,69	90,29	93,81
Sulawesi Selatan	100,00	99,80	99,55	90,83	95,20
Sulawesi Tenggara	57,20	91,30	91,52	82,41	91,78
Gorontalo	86,02	92,30	96,67	86,02	100,00
Sulawesi Barat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maluku	100,00	98,50	100,00	93,78	63,38
Maluku Utara	89,84	82,00	99,22	88,89	86,11
Papua Barat	70,86	83,20	95,63	89,93	89,26
Papua	84,32	85,40	93,37	89,83	90,69
Indonesia	85,99	92,83	96,34	92,12	92,33

3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan

Sumber: Laporan Rutin Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

TUJUAN 3

KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Provinsi	Kode Indikator						
	3.c.1* (2021)						
	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Gizi	Tenaga Kesehatan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,17	0,73	0,14	4,07	4,66	0,21	0,27
Sumatera Utara	0,17	0,71	0,13	1,74	2,80	0,10	0,05
Sumatera Barat	0,19	0,67	0,19	2,94	2,57	0,30	0,15
Riau	0,13	0,73	0,14	1,64	2,13	0,13	0,02
Jambi	0,10	0,57	0,09	2,69	2,56	0,16	0,15
Sumatera Selatan	0,13	0,47	0,08	2,23	2,53	0,11	0,10
Bengkulu	0,08	0,49	0,08	3,08	3,03	0,31	0,14
Lampung	0,07	0,33	0,03	1,53	1,63	0,07	0,09
Kep. Bangka Belitung	0,13	0,39	0,09	2,82	1,44	0,22	0,07
Kepulauan Riau	0,16	0,58	0,15	2,45	2,15	0,09	0,24
DKI Jakarta	0,67	1,49	0,44	5,97	2,15	0,40	0,38
Jawa Barat	0,12	0,44	0,11	1,41	0,99	0,06	0,04
Jawa Tengah	0,11	0,37	0,07	2,05	1,14	0,10	0,06
DI Yogyakarta	0,43	1,08	0,30	3,91	1,66	0,46	0,20
Jawa Timur	0,14	0,41	0,12	1,78	1,15	0,10	0,05
Banten	0,16	0,60	0,18	1,32	1,16	0,06	0,03
Bali	0,42	1,09	0,28	3,30	1,77	0,23	0,15
Nusa Tenggara Barat	0,06	0,30	0,04	2,22	1,69	0,19	0,11
Nusa Tenggara Timur	0,04	0,20	0,04	2,64	2,03	0,21	0,19
Kalimantan Barat	0,06	0,28	0,04	2,44	1,69	0,18	0,15
Kalimantan Tengah	0,09	0,37	0,07	3,21	2,13	0,27	0,06
Kalimantan Selatan	0,12	0,40	0,11	2,72	2,10	0,28	0,18
Kalimantan Timur	0,18	0,56	0,14	2,89	1,81	0,10	0,08
Kalimantan Utara	0,13	0,42	0,10	2,82	2,33	0,10	0,09
Sulawesi Utara	0,27	1,02	0,12	3,80	1,37	0,24	0,15
Sulawesi Tengah	0,08	0,40	0,06	2,62	2,19	0,15	0,13
Sulawesi Selatan	0,21	0,58	0,19	4,02	3,57	0,19	0,18
Sulawesi Tenggara	0,07	0,34	0,09	3,84	3,04	0,43	0,19
Gorontalo	0,10	0,27	0,06	3,33	2,37	0,54	0,14
Sulawesi Barat	0,04	0,12	0,06	2,42	2,79	0,15	0,16
Maluku	0,06	0,31	0,04	2,42	1,33	0,27	0,24
Maluku Utara	0,06	0,23	0,04	2,28	2,26	0,29	0,19
Papua Barat	0,07	0,30	0,06	2,27	1,19	0,18	0,04
Papua	0,05	0,28	0,03	1,10	0,81	0,07	0,07
Indonesia	0,16	0,52	0,12	2,28	1,70	0,14	0,10

3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (per 1.000 penduduk)

Sumber: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (KKI dan KTKI) diolah Pusrengun SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Provinsi	Kode Indikator						
	3.c.1* (2021)						
	Tenaga Keterampilan Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Apoteker	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Psikolog Klinik	Tenaga Kesehatan Tradisional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,10	0,34	0,19	0,42	0,34	0,01	0,00
Sumatera Utara	0,05	0,16	0,24	0,26	0,20	0,00	0,00
Sumatera Barat	0,12	0,50	0,42	0,37	0,25	0,01	0,00
Riau	0,07	0,18	0,22	0,27	0,21	0,01	0,00
Jambi	0,07	0,26	0,22	0,36	0,19	0,01	0,00
Sumatera Selatan	0,06	0,18	0,16	0,31	0,15	0,00	0,00
Bengkulu	0,02	0,14	0,32	0,56	0,42	0,00	0,00
Lampung	0,02	0,11	0,13	0,22	0,04	0,00	0,00
Kep. Bangka Belitung	0,07	0,24	0,19	0,35	0,33	0,01	0,00
Kepulauan Riau	0,04	0,18	0,24	0,27	0,25	0,01	0,00
DKI Jakarta	0,25	0,62	0,60	0,86	0,27	0,03	0,00
Jawa Barat	0,05	0,17	0,33	0,22	0,05	0,01	0,00
Jawa Tengah	0,12	0,25	0,32	0,31	0,09	0,01	0,01
DI Yogyakarta	0,19	0,77	1,26	0,73	0,41	0,07	0,00
Jawa Timur	0,04	0,16	0,26	0,23	0,06	0,01	0,01
Banten	0,05	0,11	0,20	0,18	0,05	0,01	0,00
Bali	0,09	0,25	0,35	0,48	0,10	0,02	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,04	0,22	0,18	0,39	0,10	0,01	0,00
Nusa Tenggara Timur	0,03	0,23	0,15	0,31	0,25	0,00	0,00
Kalimantan Barat	0,04	0,25	0,20	0,27	0,13	0,01	0,00
Kalimantan Tengah	0,05	0,16	0,25	0,36	0,09	0,01	0,00
Kalimantan Selatan	0,04	0,32	0,27	0,49	0,21	0,01	0,00
Kalimantan Timur	0,07	0,13	0,45	0,48	0,19	0,01	0,00
Kalimantan Utara	0,04	0,17	0,41	0,32	0,19	0,01	0,00
Sulawesi Utara	0,07	0,19	0,18	0,21	0,26	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	0,03	0,09	0,26	0,18	0,39	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	0,12	0,35	0,47	0,59	0,30	0,00	0,00
Sulawesi Tenggara	0,03	0,27	0,36	0,40	0,85	0,00	0,00
Gorontalo	0,02	0,12	0,23	0,22	0,75	0,00	0,00
Sulawesi Barat	0,02	0,05	0,15	0,13	0,17	0,00	0,00
Maluku	0,02	0,07	0,15	0,28	0,18	0,00	0,00
Maluku Utara	0,03	0,09	0,19	0,45	0,53	0,00	0,00
Papua Barat	0,01	0,07	0,32	0,21	0,23	0,00	0,00
Papua	0,01	0,04	0,15	0,22	0,13	0,00	0,00
Indonesia	0,07	0,22	0,30	0,32	0,15	0,01	0,00

3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (per 1.000 penduduk)

Sumber: Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (KKI dan KTKI) diolah Pusrengun SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator					
	4.1.1.(a)					
	kelas 5 (i) membaca	kelas 5 (ii) matematika	kelas 8 (i) membaca	kelas 8 (ii) matematika	kelas 11 (i) membaca	kelas 11 (ii) matematika
	2021	2021	2021	2021	2021	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	39,01	21,05	38,62	27,62	38,58	23,20
Sumatera Utara	47,08	28,16	40,70	29,21	42,16	26,36
Sumatera Barat	62,02	32,06	60,07	37,41	60,64	36,67
Riau	55,92	31,11	53,96	34,38	55,01	32,02
Jambi	49,56	26,90	47,60	31,33	48,49	27,81
Sumatera Selatan	41,66	23,62	41,25	30,13	43,66	26,90
Bengkulu	44,96	22,17	46,86	31,18	46,98	27,32
Lampung	46,37	23,76	44,61	30,87	46,41	27,37
Kep. Bangka Belitung	59,86	28,06	65,09	41,17	66,02	40,11
Kepulauan Riau	68,08	36,86	71,88	46,82	69,86	43,05
DKI Jakarta	75,56	44,05	79,96	53,64	77,23	50,14
Jawa Barat	55,22	33,30	53,17	36,84	54,14	33,28
Jawa Tengah	62,52	34,78	66,43	44,39	66,65	42,43
DI Yogyakarta	75,22	43,69	83,11	59,07	76,31	51,90
Jawa Timur	62,42	37,09	58,13	40,17	55,07	35,19
Banten	47,35	28,71	43,18	31,88	47,05	30,34
Bali	63,15	37,00	66,62	44,55	65,85	39,52
Nusa Tenggara Barat	44,41	26,22	33,34	24,42	34,86	22,84
Nusa Tenggara Timur	37,43	21,38	30,58	23,26	35,79	21,74
Kalimantan Barat	38,47	19,85	43,50	29,67	50,54	29,00
Kalimantan Tengah	47,88	25,76	51,93	33,68	58,28	33,35
Kalimantan Selatan	54,45	30,67	54,85	35,48	59,60	34,54
Kalimantan Timur	59,03	31,64	64,97	41,83	65,33	38,19
Kalimantan Utara	47,27	23,54	53,28	34,67	54,92	31,21
Sulawesi Utara	38,81	20,39	37,73	27,67	39,25	25,42
Sulawesi Tengah	36,44	19,48	36,53	26,37	42,23	23,98
Sulawesi Selatan	45,19	26,61	39,18	28,85	41,37	25,95
Sulawesi Tenggara	40,80	23,36	36,82	27,81	41,43	24,96
Gorontalo	36,78	20,39	35,92	28,69	38,89	23,54
Sulawesi Barat	31,96	18,31	33,17	24,94	35,88	22,47
Maluku	35,32	20,61	27,41	23,35	29,93	20,14
Maluku Utara	26,82	14,40	23,73	20,96	24,43	17,28
Papua Barat	36,48	20,78	35,21	25,91	34,61	22,56
Papua	41,46	21,82	41,58	29,08	30,86	20,29
Indonesia	53,47	30,66	50,78	35,11	52,10	32,34

4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika

Sumber: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator							
	4.1.2* SD/ sederajat				4.1.2* SMP/ sederajat			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	96,75	98,60	98,33	99,44	87,15	89,50	90,92	93,43
Sumatera Utara	95,76	97,12	96,48	98,57	87,97	88,26	91,63	91,35
Sumatera Barat	90,54	91,25	93,26	95,29	82,59	84,07	87,12	89,49
Riau	95,39	95,11	95,18	96,91	83,45	84,97	86,84	87,11
Jambi	94,62	96,99	95,34	98,54	83,29	84,40	86,31	89,00
Sumatera Selatan	94,02	96,08	95,93	97,82	84,18	83,40	85,02	87,68
Bengkulu	93,20	93,33	95,16	98,16	86,34	85,13	87,68	89,94
Lampung	95,39	96,05	97,69	98,33	85,09	84,08	86,66	89,46
Kep. Bangka Belitung	92,04	92,80	96,05	96,61	79,70	77,96	81,91	80,99
Kepulauan Riau	98,13	95,69	95,25	98,16	90,15	91,56	94,80	92,71
DKI Jakarta	95,26	96,05	97,80	99,26	92,80	93,02	94,57	95,00
Jawa Barat	97,08	97,92	97,76	98,45	85,18	85,53	88,17	88,18
Jawa Tengah	96,15	96,61	97,20	98,06	86,90	85,47	89,00	88,44
DI Yogyakarta	95,12	94,92	96,43	98,48	92,66	92,34	92,36	94,94
Jawa Timur	95,70	96,30	96,81	97,76	86,04	86,21	89,98	90,30
Banten	95,35	96,26	96,03	98,82	85,21	87,40	86,70	90,63
Bali	96,40	98,34	96,66	97,02	93,78	93,33	93,21	94,26
Nusa Tenggara Barat	97,59	96,62	97,29	98,71	87,88	88,64	89,91	92,19
Nusa Tenggara Timur	83,87	87,39	86,92	91,84	71,42	74,31	78,81	78,83
Kalimantan Barat	86,44	88,23	91,79	94,29	71,47	72,78	80,88	79,65
Kalimantan Tengah	93,33	94,66	95,45	97,45	79,87	81,01	84,83	89,76
Kalimantan Selatan	92,20	91,85	94,10	95,67	84,05	82,77	82,48	84,06
Kalimantan Timur	95,32	96,07	95,84	96,82	89,14	86,98	92,40	95,34
Kalimantan Utara	92,03	93,23	96,38	95,77	82,85	83,85	87,14	90,14
Sulawesi Utara	95,48	95,97	95,58	96,10	86,72	85,67	86,69	91,05
Sulawesi Tengah	91,44	93,56	95,05	96,19	78,61	82,23	82,79	85,42
Sulawesi Selatan	94,05	95,18	96,13	97,30	83,32	83,74	85,08	88,18
Sulawesi Tenggara	95,25	94,54	95,28	95,58	86,05	85,46	89,18	90,88
Gorontalo	88,24	89,04	91,90	93,44	77,41	80,60	80,10	81,22
Sulawesi Barat	92,60	91,54	94,70	95,93	78,83	77,68	83,08	86,09
Maluku	94,49	94,95	97,47	98,50	86,38	88,43	88,04	93,08
Maluku Utara	95,65	94,66	95,59	96,97	85,39	85,07	87,41	92,93
Papua Barat	86,46	88,46	89,25	91,81	81,19	80,91	83,47	85,18
Papua	71,83	73,07	78,40	78,43	57,19	59,31	65,75	66,06
Indonesia	94,68	95,48	96,00	97,37	84,96	85,23	87,89	88,88

4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator						
	4.1.2* SMA/ sederajat				4.1.2.(a) SMA/ Sederajat		
	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	70,68	69,96	70,07	74,36	14,97	12,82	13,20
Sumatera Utara	68,34	65,21	70,39	72,81	16,87	14,60	13,46
Sumatera Barat	65,34	60,32	67,11	70,06	16,44	17,11	14,28
Riau	63,71	58,78	66,62	68,94	23,12	17,22	16,22
Jambi	66,06	56,87	63,66	64,51	24,00	22,83	20,76
Sumatera Selatan	63,94	58,23	65,42	67,20	23,03	23,37	21,17
Bengkulu	58,86	61,47	62,73	62,46	20,35	17,47	19,51
Lampung	54,89	54,87	57,59	60,09	27,50	22,96	21,85
Kep. Bangka Belitung	55,01	53,84	56,74	63,98	29,99	28,02	24,83
Kepulauan Riau	82,86	78,14	78,65	81,07	10,29	9,31	10,72
DKI Jakarta	83,48	84,35	85,67	84,98	15,93	15,84	16,49
Jawa Barat	61,04	57,46	63,56	64,89	27,54	25,80	25,54
Jawa Tengah	55,62	49,79	55,82	59,90	26,56	25,02	24,90
DI Yogyakarta	81,96	84,54	87,99	90,12	8,13	6,28	6,44
Jawa Timur	62,48	57,74	63,53	66,33	23,40	23,21	21,91
Banten	67,54	56,94	64,24	66,90	26,83	26,09	24,44
Bali	78,67	64,52	74,88	75,86	16,73	14,88	14,39
Nusa Tenggara Barat	52,60	57,60	64,66	65,71	19,66	20,36	17,38
Nusa Tenggara Timur	43,41	43,85	50,65	44,88	24,04	23,66	24,71
Kalimantan Barat	47,66	49,29	55,23	54,27	29,88	27,11	28,11
Kalimantan Tengah	53,47	50,01	60,77	61,04	25,68	27,70	25,72
Kalimantan Selatan	61,09	59,52	63,05	63,59	26,43	26,16	24,35
Kalimantan Timur	68,73	64,74	71,63	74,26	15,68	12,07	12,97
Kalimantan Utara	58,22	61,10	67,77	62,30	20,25	19,85	19,75
Sulawesi Utara	70,02	67,58	73,79	68,56	19,62	17,92	16,80
Sulawesi Tengah	53,84	52,00	57,68	61,16	23,39	24,60	21,89
Sulawesi Selatan	56,86	60,97	66,22	69,43	26,54	24,19	21,26
Sulawesi Tenggara	67,67	64,26	68,28	70,65	21,10	20,38	18,66
Gorontalo	52,39	50,87	55,35	53,73	27,57	28,32	25,89
Sulawesi Barat	37,65	48,20	56,60	56,22	29,10	25,76	25,72
Maluku	66,42	67,82	70,55	68,12	16,74	13,94	13,93
Maluku Utara	60,07	59,13	66,52	66,95	23,29	17,00	17,52
Papua Barat	60,47	50,95	61,49	59,08	16,89	15,40	15,71
Papua	29,56	27,44	30,92	32,95	39,65	36,68	36,52
Indonesia	61,84	58,33	63,95	65,94	23,75	22,31	21,47

4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah jenjang: (a) PAUD/ Sederajat; (b) SD/ Sederajat; (c) SMP/ Sederajat; dan (d) SMA/ Sederajat

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator								
	4.2.2*				4.3.1* 15-64 tahun		4.3.1.(a)		
	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	98,16	97,84	94,02	94,06	58,07	43,86	44,51	44,58	44,65
Sumatera Utara	96,85	96,83	92,66	93,72	52,22	31,11	30,82	31,14	31,10
Sumatera Barat	96,90	95,54	92,17	94,91	57,69	44,19	42,18	43,09	44,25
Riau	93,68	93,68	91,44	90,75	52,17	34,15	33,93	35,07	35,97
Jambi	97,37	96,99	95,64	95,55	46,43	33,78	30,71	31,42	30,74
Sumatera Selatan	97,90	97,12	97,93	97,38	43,85	26,23	25,59	26,41	26,32
Bengkulu	99,43	97,90	95,84	96,99	53,76	38,31	37,63	38,39	38,66
Lampung	98,36	97,57	92,90	95,71	45,34	21,32	21,98	23,08	22,64
Kep. Bangka Belitung	98,91	95,43	97,74	95,64	43,51	13,20	14,27	14,73	15,23
Kepulauan Riau	91,50	93,71	90,98	95,63	51,02	27,64	25,11	26,68	27,59
DKI Jakarta	93,63	96,44	89,38	86,33	49,37	36,71	39,43	40,34	40,05
Jawa Barat	94,56	97,05	93,93	92,05	44,97	25,14	25,15	25,75	25,83
Jawa Tengah	99,21	98,75	96,73	94,79	46,83	21,96	21,80	22,62	23,86
DI Yogyakarta	99,67	100,00	99,18	99,51	70,45	70,60	73,14	74,69	74,90
Jawa Timur	96,75	97,03	94,89	94,08	48,35	29,99	29,20	29,52	29,96
Banten	95,93	96,95	89,26	95,49	45,30	33,40	33,22	33,07	32,51
Bali	97,32	97,77	91,45	85,57	53,99	36,40	35,96	36,46	36,51
Nusa Tenggara Barat	96,96	97,67	90,21	96,53	50,82	29,75	30,70	31,28	32,26
Nusa Tenggara Timur	93,37	94,16	92,82	94,56	51,69	30,14	30,22	31,28	33,27
Kalimantan Barat	95,40	93,85	91,39	93,83	46,31	22,68	24,87	25,36	26,22
Kalimantan Tengah	97,50	97,46	93,40	91,27	47,15	25,24	25,45	25,70	26,46
Kalimantan Selatan	96,52	99,31	91,87	94,75	48,00	26,41	27,04	27,35	27,97
Kalimantan Timur	97,56	97,25	90,26	89,64	54,30	35,64	37,78	39,16	40,21
Kalimantan Utara	87,64	94,87	89,82	80,50	45,95	21,58	23,43	22,71	25,23
Sulawesi Utara	97,56	98,84	94,06	96,06	47,73	35,00	33,86	34,61	34,43
Sulawesi Tengah	94,76	96,03	93,89	95,74	47,99	40,61	38,64	39,32	40,11
Sulawesi Selatan	97,43	95,51	91,77	90,64	52,27	41,23	42,72	42,69	42,35
Sulawesi Tenggara	98,51	98,04	93,12	90,66	51,56	46,42	47,56	47,40	44,77
Gorontalo	97,24	99,13	91,36	93,59	52,82	35,23	36,71	37,74	37,32
Sulawesi Barat	95,65	94,55	93,05	91,55	47,03	28,90	30,85	29,44	30,15
Maluku	95,34	94,46	95,21	95,54	57,50	48,42	47,65	48,62	48,36
Maluku Utara	95,12	94,18	88,47	93,15	56,68	42,68	44,02	43,97	43,63
Papua Barat	88,61	92,19	91,11	87,82	55,61	35,97	34,83	35,30	35,80
Papua	61,51	61,69	52,68	50,19	42,58	19,03	21,08	21,87	20,04
Indonesia	95,86	96,37	92,76	92,72	48,66	30,19	30,28	30,85	31,19

4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin

Sumber: Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan, Badan Pusat Statistik

4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator							
	4.4.1.(a) 15-24 tahun				4.4.1.(a) 15-59 tahun			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	62,96	69,01	76,68	83,84	40,47	46,77	54,25	60,21
Sumatera Utara	71,24	77,28	82,51	89,79	43,65	51,78	58,60	67,41
Sumatera Barat	76,27	80,64	84,73	92,04	47,49	52,85	58,67	68,00
Riau	75,76	82,03	84,61	93,14	49,45	55,37	62,67	70,69
Jambi	74,00	81,58	86,06	91,03	43,42	50,83	56,87	64,47
Sumatera Selatan	72,36	77,26	83,31	90,45	41,33	46,50	54,52	62,59
Bengkulu	69,56	77,02	80,69	90,44	40,42	48,70	53,42	62,10
Lampung	73,25	81,61	85,18	92,42	40,23	48,37	55,57	65,76
Kep. Bangka Belitung	77,06	84,49	87,10	94,21	45,45	54,93	60,37	66,33
Kepulauan Riau	86,37	93,05	90,65	97,33	65,60	77,18	81,73	89,06
DKI Jakarta	92,15	95,41	95,85	98,37	77,14	85,17	88,08	91,79
Jawa Barat	82,69	88,79	92,14	94,69	55,91	65,37	71,09	76,08
Jawa Tengah	83,33	90,93	94,02	96,56	48,63	58,75	65,78	71,15
DI Yogyakarta	95,48	97,91	98,22	99,07	68,82	75,04	81,36	84,72
Jawa Timur	80,51	87,97	90,93	93,65	48,07	57,23	63,91	68,07
Banten	81,53	87,86	88,47	93,03	57,86	66,96	69,35	75,69
Bali	87,56	91,40	94,75	97,23	57,71	65,48	72,56	77,09
Nusa Tenggara Barat	66,23	77,54	81,17	88,55	37,11	47,85	52,72	58,69
Nusa Tenggara Timur	43,32	51,03	58,40	75,20	29,65	36,33	42,89	53,16
Kalimantan Barat	63,05	70,40	78,07	86,63	38,92	47,04	54,10	62,04
Kalimantan Tengah	68,48	80,96	83,94	90,18	43,17	54,54	59,66	66,43
Kalimantan Selatan	78,81	87,16	90,59	94,95	49,32	57,82	62,88	70,39
Kalimantan Timur	83,52	89,87	91,39	95,78	60,85	69,44	75,33	81,17
Kalimantan Utara	80,51	87,29	88,29	94,46	58,42	65,36	71,99	76,94
Sulawesi Utara	74,69	81,22	84,93	90,53	51,22	57,48	63,03	69,77
Sulawesi Tengah	61,45	68,81	76,52	85,82	37,02	44,13	51,68	58,19
Sulawesi Selatan	76,72	83,30	88,78	94,10	47,07	54,85	60,50	67,29
Sulawesi Tenggara	70,66	79,51	84,21	91,69	43,94	53,36	60,35	65,75
Gorontalo	74,22	79,60	82,70	90,80	42,71	50,62	55,68	61,94
Sulawesi Barat	57,05	68,06	74,15	85,15	33,95	40,95	47,66	55,72
Maluku	54,29	60,17	65,83	77,55	39,20	44,02	49,96	59,26
Maluku Utara	49,32	52,88	62,11	70,33	34,24	38,11	45,22	51,53
Papua Barat	61,29	65,40	70,93	74,27	45,41	52,37	59,45	62,31
Papua	33,48	32,88	39,06	34,95	24,23	26,45	30,93	30,58
Indonesia	77,05	83,58	87,17	91,83	49,73	58,22	64,26	70,17

4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator							
	4.5.1* SD (a)				4.5.1* SD (c)		4.5.1* SMP (a)	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	99,64	99,68	100,01	100,50	100,13	99,83	96,48	98,07
Sumatera Utara	99,26	99,74	100,45	99,62	101,57	102,50	101,58	97,49
Sumatera Barat	99,65	99,74	99,70	100,01	99,84	100,64	103,11	106,33
Riau	99,96	99,90	99,63	98,92	100,64	101,30	100,01	102,25
Jambi	99,69	100,62	100,16	100,55	101,89	100,38	96,98	102,30
Sumatera Selatan	99,13	99,39	99,11	99,66	101,86	100,54	102,12	98,27
Bengkulu	100,26	99,90	99,92	100,58	100,15	100,44	90,21	95,65
Lampung	99,22	100,41	100,15	100,36	100,00	99,95	92,60	98,96
Kep. Bangka Belitung	98,77	98,48	100,11	100,19	100,89	100,00	100,24	104,43
Kepulauan Riau	99,12	99,97	100,71	100,82	100,74	100,32	101,31	103,27
DKI Jakarta	99,09	99,66	100,37	100,77	101,66	100,76	102,64	93,52
Jawa Barat	99,29	100,47	99,44	99,89	100,28	100,55	98,80	96,42
Jawa Tengah	99,96	99,60	100,71	100,20	100,70	99,74	96,67	97,93
DI Yogyakarta	99,89	99,92	99,64	100,02	100,35	100,41	92,73	96,54
Jawa Timur	99,78	99,99	100,26	99,72	99,74	99,54	99,09	101,73
Banten	99,29	100,23	100,77	100,09	98,37	99,90	102,70	93,10
Bali	99,12	99,52	100,28	99,62	100,40	97,94	99,96	98,13
Nusa Tenggara Barat	100,30	100,17	99,89	99,44	98,91	99,00	96,93	101,46
Nusa Tenggara Timur	99,48	100,31	100,72	99,43	102,09	99,51	99,86	107,12
Kalimantan Barat	99,65	99,70	100,22	99,32	98,53	98,89	99,48	108,02
Kalimantan Tengah	99,91	99,78	100,14	100,01	99,69	100,77	95,56	98,71
Kalimantan Selatan	98,78	99,70	100,24	100,65	99,53	99,45	99,39	93,56
Kalimantan Timur	100,13	100,57	99,95	100,25	100,00	99,29	93,19	92,68
Kalimantan Utara	99,11	95,80	99,19	97,70	102,29	102,07	99,96	107,70
Sulawesi Utara	100,04	99,07	98,28	100,35	104,41	102,07	107,68	104,19
Sulawesi Tengah	98,06	99,23	97,48	98,87	101,08	101,40	106,62	110,70
Sulawesi Selatan	100,25	101,32	99,58	100,18	100,60	100,72	95,30	103,42
Sulawesi Tenggara	100,39	100,33	99,45	99,24	98,68	99,79	102,56	99,77
Gorontalo	100,89	101,11	100,38	101,22	97,70	97,85	107,22	106,92
Sulawesi Barat	100,57	101,91	98,34	99,13	98,93	97,44	102,17	107,68
Maluku	99,74	99,25	97,85	100,34	103,66	100,57	109,29	100,85
Maluku Utara	99,78	99,84	99,89	100,48	102,26	100,36	95,28	100,60
Papua Barat	98,22	98,47	99,02	100,11	101,44	100,01	107,83	97,14
Papua	99,18	99,28	98,27	103,28	89,26	93,98	103,86	93,46
Indonesia	99,57	100,02	99,98	99,98	99,97	99,90	99,09	98,96

4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator							
	4.5.1* SMP (c)		4.5.1* SMA (a)		4.5.1* SMA (b)		4.5.1* SMA (c)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	104,49	99,37	105,42	105,46	93,12	95,16	80,60	81,71
Sumatera Utara	105,13	97,20	97,76	107,34	96,59	95,05	81,44	85,20
Sumatera Barat	107,22	87,88	107,91	108,20	89,47	90,97	73,83	82,82
Riau	89,95	95,93	106,05	104,16	83,00	80,25	69,95	76,78
Jambi	103,86	102,53	104,83	98,45	80,77	76,69	77,53	66,44
Sumatera Selatan	108,02	101,65	93,58	107,89	75,13	76,97	76,38	73,85
Bengkulu	101,40	107,63	104,01	116,28	87,38	87,92	80,99	73,56
Lampung	97,25	106,87	106,86	111,88	83,73	90,37	74,05	68,78
Kep. Bangka Belitung	106,69	92,09	100,67	93,10	90,76	89,55	64,62	72,52
Kepulauan Riau	87,37	102,87	97,69	101,48	98,25	90,54	109,35	86,79
DKI Jakarta	91,98	98,87	89,03	105,37	-	-	114,78	80,31
Jawa Barat	97,62	88,73	101,07	104,44	82,18	82,45	64,79	67,08
Jawa Tengah	104,96	104,09	103,03	105,35	95,59	94,85	70,15	67,89
DI Yogyakarta	135,08	96,42	104,07	97,62	95,28	81,98	96,03	83,15
Jawa Timur	98,45	96,69	96,85	100,72	81,57	82,17	66,98	68,35
Banten	97,24	94,41	97,41	101,62	84,62	84,71	74,18	80,71
Bali	112,59	110,83	90,38	103,77	94,93	94,58	92,06	95,71
Nusa Tenggara Barat	97,71	96,70	93,79	94,89	96,22	94,83	103,53	89,05
Nusa Tenggara Timur	90,36	102,52	121,25	116,48	82,21	75,96	67,64	64,69
Kalimantan Barat	97,19	94,46	108,90	107,18	87,13	99,02	82,36	68,53
Kalimantan Tengah	104,92	84,01	104,73	92,41	80,99	85,47	83,52	84,86
Kalimantan Selatan	85,87	81,25	93,54	113,15	95,04	92,16	85,40	87,54
Kalimantan Timur	105,98	108,25	103,83	95,03	93,42	103,65	80,93	69,27
Kalimantan Utara	84,33	95,76	96,64	122,03	72,97	74,71	75,66	53,59
Sulawesi Utara	99,99	95,35	103,24	109,18	97,84	92,00	83,84	79,97
Sulawesi Tengah	86,71	82,76	108,05	108,54	82,58	80,20	69,31	81,47
Sulawesi Selatan	92,12	87,95	105,37	99,68	92,81	89,41	84,09	78,40
Sulawesi Tenggara	107,54	96,24	100,86	107,97	88,41	80,54	81,99	83,17
Gorontalo	87,90	96,91	104,56	120,25	97,61	87,86	76,18	74,06
Sulawesi Barat	92,32	98,40	109,19	105,92	107,30	80,59	80,30	112,73
Maluku	101,47	124,69	102,60	102,33	91,45	93,06	80,23	75,67
Maluku Utara	98,46	86,64	120,80	102,25	92,48	103,78	85,65	100,04
Papua Barat	97,11	87,09	98,53	111,69	71,89	80,22	82,44	65,80
Papua	80,07	75,89	90,80	91,48	54,31	51,28	61,42	71,21
Indonesia	97,87	95,00	100,92	104,27	90,63	90,80	76,75	75,67

4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator							
	4.5.1* PT (a)				4.6.1.(a)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	119,55	119,84	107,36	116,72	98,03	98,21	98,25	98,24
Sumatera Utara	124,15	122,32	115,41	122,58	99,07	99,15	99,16	99,19
Sumatera Barat	117,78	123,63	133,35	140,12	99,07	99,17	99,17	99,26
Riau	100,31	128,94	100,22	123,69	99,20	99,21	99,23	99,20
Jambi	118,32	118,29	109,22	123,61	98,15	98,20	98,19	98,08
Sumatera Selatan	124,26	109,65	122,14	107,98	98,66	98,76	98,75	98,78
Bengkulu	142,45	145,87	118,84	109,75	97,91	98,01	98,01	97,88
Lampung	128,53	119,21	125,37	105,55	96,93	97,11	97,24	97,28
Kep. Bangka Belitung	153,04	113,88	112,94	122,48	97,76	98,09	98,08	98,10
Kepulauan Riau	88,63	91,49	134,90	111,90	98,87	99,00	99,00	99,09
DKI Jakarta	94,42	108,29	95,71	99,58	99,72	99,74	99,69	99,73
Jawa Barat	106,81	109,49	102,11	111,94	98,48	98,53	98,63	98,62
Jawa Tengah	110,70	98,47	129,61	126,62	93,45	93,54	93,62	93,79
DI Yogyakarta	110,16	96,79	96,18	103,51	94,83	94,96	95,09	95,22
Jawa Timur	119,35	103,47	107,17	110,60	91,85	92,32	92,50	92,56
Banten	112,69	109,75	88,36	122,58	97,62	97,62	97,88	97,78
Bali	110,48	96,96	97,37	98,80	92,98	94,53	94,80	95,00
Nusa Tenggara Barat	104,80	92,79	99,60	95,45	87,42	87,59	87,60	87,39
Nusa Tenggara Timur	122,41	107,66	101,38	128,96	91,90	93,24	93,31	93,85
Kalimantan Barat	87,48	117,96	127,71	107,76	92,58	93,21	93,41	93,41
Kalimantan Tengah	111,47	86,02	105,33	100,40	99,21	99,22	99,20	99,10
Kalimantan Selatan	92,21	131,15	135,09	105,88	98,42	98,50	98,45	98,27
Kalimantan Timur	104,09	120,37	111,63	110,38	98,96	99,03	98,97	98,90
Kalimantan Utara	195,63	140,52	110,05	87,06	95,18	96,39	96,66	96,55
Sulawesi Utara	129,71	118,85	99,92	116,58	99,87	99,80	99,79	99,80
Sulawesi Tengah	132,27	102,35	106,49	126,89	97,87	98,22	98,24	98,28
Sulawesi Selatan	126,50	122,00	116,50	127,54	91,81	92,45	92,56	92,49
Sulawesi Tenggara	106,72	108,75	109,98	112,27	94,46	94,91	95,00	94,94
Gorontalo	136,66	106,72	130,40	175,50	98,63	98,75	98,75	98,75
Sulawesi Barat	123,30	97,73	110,47	132,71	92,85	93,59	93,17	93,09
Maluku	119,62	106,09	114,10	116,26	99,22	99,39	99,42	99,42
Maluku Utara	105,49	120,42	97,91	113,98	98,76	98,79	98,77	98,71
Papua Barat	126,51	92,76	102,45	113,32	97,37	97,72	97,52	97,91
Papua	97,78	92,82	101,38	99,39	76,79	78,00	77,90	78,89
Indonesia	113,24	109,47	109,01	115,26	95,66	95,90	96,00	96,04

4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator									
	4.a.1* (2021)									
	(a) listrik					(b) internet untuk tujuan pengajaran				
	(1) SD	(2) SMP	(3) SMA	(4) SMK	(5) SLB	(1) SD	(2) SMP	(3) SMA	(4) SMK	(5) SLB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	99,66	99,92	100,00	99,55	94,44	83,43	87,80	93,76	97,27	68,06
Sumatera Utara	95,53	97,92	99,44	98,67	98,28	79,54	87,23	96,72	95,38	53,45
Sumatera Barat	99,01	99,88	100,00	99,53	100,00	82,94	89,47	98,19	99,06	77,42
Riau	96,83	99,27	100,00	100,00	100,00	89,08	92,44	97,54	96,68	72,34
Jambi	98,58	99,42	100,00	99,44	100,00	83,28	87,45	97,87	96,61	75,00
Sumatera Selatan	98,34	99,86	100,00	100,00	100,00	88,64	91,90	96,83	99,02	67,65
Bengkulu	98,07	99,54	100,00	100,00	100,00	72,44	85,42	97,20	96,19	70,19
Lampung	99,20	99,58	100,00	100,00	100,00	85,50	92,71	95,51	97,54	68,97
Kep. Bangka Belitung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,25	96,41	98,57	98,31	60,00
Kepulauan Riau	99,59	100,00	99,34	100,00	95,00	87,50	93,48	96,71	96,40	60,00
DKI Jakarta	99,92	100,00	100,00	99,65	100,00	99,41	98,79	99,59	99,31	74,68
Jawa Barat	99,79	99,96	100,00	99,62	100,00	93,86	95,83	98,80	98,42	61,11
Jawa Tengah	99,85	100,00	100,00	99,55	99,48	96,79	98,46	99,65	99,16	72,47
DI Yogyakarta	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	98,21	99,78	98,22	99,07	64,71
Jawa Timur	99,55	99,88	99,93	99,62	100,00	95,56	96,09	98,55	98,64	67,20
Banten	99,48	99,94	100,00	99,18	100,00	92,68	94,83	98,09	97,68	66,67
Bali	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	94,37	96,57	98,73	97,59	64,29
Nusa Tenggara Barat	99,20	99,49	100,00	98,76	100,00	88,80	89,08	97,60	94,41	66,00
Nusa Tenggara Timur	91,38	96,80	98,62	98,72	97,56	70,70	78,34	91,55	93,59	75,61
Kalimantan Barat	88,59	97,34	99,55	100,00	99,50	53,58	72,17	90,40	94,12	58,29
Kalimantan Tengah	91,70	96,21	97,93	100,00	100,00	63,81	69,70	90,04	91,24	56,00
Kalimantan Selatan	99,01	99,35	100,00	100,00	100,00	83,22	90,63	96,04	98,43	56,52
Kalimantan Timur	98,21	99,25	100,00	100,00	100,00	85,64	90,27	93,86	96,79	58,33
Kalimantan Utara	92,10	94,09	100,00	96,88	97,30	61,33	72,58	89,39	87,50	70,27
Sulawesi Utara	99,05	100,00	100,00	100,00	100,00	65,33	80,33	92,14	94,12	59,38
Sulawesi Tengah	93,65	97,91	99,56	99,46	100,00	62,46	72,33	91,63	90,22	50,00
Sulawesi Selatan	98,47	99,35	100,00	99,52	100,00	78,09	81,88	94,79	94,95	67,44
Sulawesi Tenggara	97,13	98,71	99,02	100,00	100,00	66,47	70,41	84,92	88,48	42,31
Gorontalo	98,70	99,11	100,00	100,00	100,00	76,67	80,47	92,75	91,38	62,50
Sulawesi Barat	91,25	95,49	100,00	99,24	100,00	50,79	61,27	82,95	80,92	48,00
Maluku	94,07	95,40	98,58	100,00	100,00	47,39	57,72	85,82	90,43	42,86
Maluku Utara	93,82	95,62	100,00	97,95	100,00	54,66	63,75	69,30	72,60	80,00
Papua Barat	86,40	98,14	99,22	98,25	100,00	50,83	70,28	71,32	84,21	60,00
Papua	71,46	90,01	96,75	98,56	100,00	32,74	53,54	77,24	87,05	50,00
Indonesia	97,42	98,96	99,71	99,51	99,46	84,08	87,94	95,07	96,75	65,41

4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator									
	4.a.1* (2021)									
	(c) komputer untuk tujuan pengajaran					(d) air minum layak				
	(1) SD	(2) SMP	(3) SMA	(4) SMK	(5) SLB	(1) SD	(2) SMP	(3) SMA	(4) SMK	(5) SLB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	3,93	40,97	46,88	70,91	11,11	70,82	67,93	71,46	68,18	76,39
Sumatera Utara	4,86	49,21	34,52	79,06	20,69	68,99	74,45	77,30	77,62	74,14
Sumatera Barat	3,35	42,25	38,67	81,60	10,97	76,04	69,47	69,49	68,87	80,65
Riau	6,13	37,32	34,45	71,76	23,40	67,05	69,27	74,27	77,08	76,60
Jambi	2,64	33,77	32,77	66,67	22,22	69,72	73,02	68,51	70,06	55,56
Sumatera Selatan	4,35	32,78	32,89	69,84	14,71	63,99	68,96	68,61	70,49	73,53
Bengkulu	3,15	35,76	41,26	72,38	35,29	69,15	69,25	74,83	71,43	47,06
Lampung	4,80	46,46	39,84	77,87	27,59	65,63	69,41	74,22	77,66	72,41
Kep. Bangka Belitung	5,21	44,84	38,57	81,36	33,33	69,85	73,54	71,43	62,71	55,56
Kepulauan Riau	15,39	47,87	25,00	79,28	20,00	76,96	76,69	78,29	79,28	75,00
DKI Jakarta	41,64	88,77	25,97	92,88	36,36	74,92	78,18	80,37	76,74	65,91
Jawa Barat	9,29	53,69	38,45	82,04	14,29	68,06	74,49	80,44	76,50	77,40
Jawa Tengah	13,02	73,03	45,52	90,20	28,04	72,10	74,16	77,71	74,98	68,78
DI Yogyakarta	40,55	84,15	41,42	90,65	32,91	84,41	78,79	84,02	80,37	86,08
Jawa Timur	15,00	59,26	43,59	81,04	18,09	70,76	76,07	77,05	76,96	75,13
Banten	16,05	57,05	37,33	84,88	21,15	65,57	74,79	76,56	71,12	77,88
Bali	7,41	65,20	28,48	73,49	50,00	67,52	64,46	70,25	66,87	50,00
Nusa Tenggara Barat	2,14	24,17	41,44	55,90	12,00	77,67	75,43	81,38	78,26	86,00
Nusa Tenggara Timur	1,72	20,65	23,28	56,09	9,76	70,70	65,82	65,34	73,72	51,22
Kalimantan Barat	2,51	25,61	36,83	71,95	21,74	59,14	66,54	64,06	72,40	60,87
Kalimantan Tengah	2,96	25,44	29,05	51,82	16,67	63,05	62,96	70,12	68,61	75,00
Kalimantan Selatan	2,31	38,45	35,15	75,59	48,00	59,19	59,13	65,84	68,50	48,00
Kalimantan Timur	8,15	44,46	38,16	76,15	27,03	63,12	66,47	65,79	66,51	64,86
Kalimantan Utara	5,20	41,40	39,39	78,13	20,00	62,58	61,83	69,70	68,75	100,00
Sulawesi Utara	2,48	33,29	32,31	61,50	15,63	86,32	85,69	83,41	76,47	65,63
Sulawesi Tengah	1,03	23,49	23,79	59,24	13,33	70,25	65,58	72,25	67,93	76,67
Sulawesi Selatan	2,23	37,72	34,79	71,39	13,95	74,28	68,83	72,94	70,91	75,58
Sulawesi Tenggara	1,80	30,10	35,08	50,30	7,69	67,37	65,63	64,92	65,45	76,92
Gorontalo	3,46	25,74	33,33	60,34	62,50	71,27	59,76	60,87	62,07	62,50
Sulawesi Barat	1,06	24,14	35,23	50,38	4,00	68,68	62,86	62,50	64,89	88,00
Maluku	2,49	24,48	35,82	44,35	35,71	76,83	68,99	71,63	71,30	85,71
Maluku Utara	2,21	22,51	24,19	50,00	5,00	81,83	77,89	66,51	66,44	85,00
Papua Barat	3,40	36,53	29,46	77,19	20,00	52,57	56,04	61,24	71,93	60,00
Papua	4,08	35,92	32,93	66,19	0,00	48,65	52,43	62,20	71,94	70,00
Indonesia	8,48	46,48	36,49	77,90	19,16	69,44	71,38	73,95	74,51	74,29

4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator									
	4.a.1* (2021)									
	(e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin					(f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))				
	(1) SD	(2) SMP	(3) SMA	(4) SMK	(5) SLB	(1) SD	(2) SMP	(3) SMA	(4) SMK	(5) SLB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	28,72	36,44	40,64	41,82	37,50	72,30	71,94	77,65	74,89	88,89
Sumatera Utara	30,60	45,96	51,50	44,35	41,38	69,26	75,69	78,56	78,85	84,75
Sumatera Barat	37,08	47,34	54,98	47,17	34,84	78,08	78,22	80,00	81,31	84,42
Riau	39,26	47,97	46,76	52,49	44,68	77,21	79,32	81,36	81,11	87,23
Jambi	31,82	40,26	54,47	48,02	50,00	76,54	75,94	80,51	84,36	84,21
Sumatera Selatan	40,34	50,36	50,08	54,10	35,29	80,46	81,81	84,41	82,32	91,18
Bengkulu	28,20	46,47	54,55	51,43	41,18	70,45	78,36	82,39	74,29	58,82
Lampung	37,39	49,79	52,54	50,20	72,41	79,22	83,58	84,02	86,04	93,10
Kep. Bangka Belitung	52,78	55,16	64,29	50,85	77,78	81,38	86,10	88,57	94,92	100,00
Kepulauan Riau	50,00	55,64	58,55	54,95	35,00	84,55	84,67	87,50	86,21	68,42
DKI Jakarta	65,33	68,06	69,33	62,67	50,00	86,84	86,36	84,55	87,72	84,44
Jawa Barat	40,33	52,09	54,41	49,29	37,14	77,24	79,44	83,71	81,71	86,20
Jawa Tengah	51,61	63,07	64,15	56,87	49,21	84,48	84,37	83,29	84,05	92,06
DI Yogyakarta	70,11	71,65	62,72	63,55	67,09	91,62	92,46	86,23	88,07	96,20
Jawa Timur	41,66	53,79	54,64	48,19	42,96	81,73	81,39	84,55	83,19	87,99
Banten	41,12	53,99	57,99	47,82	33,65	79,25	80,41	81,57	79,22	91,43
Bali	50,43	62,01	54,43	55,42	92,86	87,60	86,60	84,38	78,49	85,71
Nusa Tenggara Barat	33,10	32,15	36,34	36,34	30,00	77,93	73,04	77,84	74,18	90,00
Nusa Tenggara Timur	18,02	21,04	27,59	29,81	26,83	70,63	67,34	71,63	74,51	81,08
Kalimantan Barat	25,24	37,31	41,96	47,96	52,17	73,09	81,14	79,51	83,33	79,17
Kalimantan Tengah	23,61	35,98	44,40	46,72	58,33	75,76	79,00	84,58	79,86	95,83
Kalimantan Selatan	33,36	44,43	54,95	55,91	60,00	80,52	85,95	81,77	81,10	81,48
Kalimantan Timur	39,98	50,90	56,14	53,67	43,24	79,32	81,08	81,66	81,36	72,97
Kalimantan Utara	30,56	38,71	37,88	34,38	60,00	76,09	80,00	83,33	71,88	80,00
Sulawesi Utara	33,50	45,12	51,53	42,25	25,00	76,30	78,33	83,84	84,21	84,38
Sulawesi Tengah	23,37	38,02	48,90	36,41	36,67	65,02	71,98	82,82	78,38	80,00
Sulawesi Selatan	33,63	41,44	47,56	38,22	29,07	73,37	75,34	78,22	70,85	83,33
Sulawesi Tenggara	25,04	39,02	43,28	30,91	26,92	70,27	74,77	78,06	78,24	82,89
Gorontalo	38,44	49,11	55,07	39,66	50,00	76,00	81,60	88,24	75,86	75,00
Sulawesi Barat	15,70	30,24	50,00	29,01	16,00	59,23	67,72	75,00	68,94	72,00
Maluku	19,07	24,18	31,56	20,87	14,29	62,78	61,83	69,96	69,91	75,00
Maluku Utara	18,32	22,91	31,63	28,77	35,00	63,50	64,09	65,74	56,16	84,21
Papua Barat	17,00	30,03	34,11	42,11	40,00	58,77	69,11	79,69	77,19	60,00
Papua	14,33	23,58	35,37	31,65	30,00	44,18	61,00	64,23	68,75	70,00
Indonesia	37,51	46,95	50,48	48,13	41,00	76,85	78,36	80,85	80,88	86,32

4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator		
	4.a.1.(a)		
	Siswa kelas 5 SD/ sederajat	Siswa Kelas 8 SMP/ sederajat	Siswa Kelas 11 SMA/ SMK/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	31,86	35,98	23,26
Sumatera Utara	25,25	28,67	18,49
Sumatera Barat	29,96	28,29	13,16
Riau	25,41	26,35	14,69
Jambi	29,10	29,44	16,50
Sumatera Selatan	28,21	28,69	16,85
Bengkulu	31,01	29,68	16,93
Lampung	30,09	29,31	16,70
Kep. Bangka Belitung	28,21	20,90	9,30
Kepulauan Riau	23,99	17,93	9,03
DKI Jakarta	15,60	8,85	5,10
Jawa Barat	25,29	23,69	14,02
Jawa Tengah	27,49	21,59	10,88
DI Yogyakarta	18,42	10,68	6,32
Jawa Timur	27,25	27,62	17,34
Banten	26,44	27,27	16,72
Bali	22,13	15,64	7,95
Nusa Tenggara Barat	28,82	34,57	23,77
Nusa Tenggara Timur	26,61	34,23	21,62
Kalimantan Barat	30,14	26,39	13,58
Kalimantan Tengah	27,07	24,29	10,73
Kalimantan Selatan	25,67	20,47	10,09
Kalimantan Timur	23,13	19,28	9,19
Kalimantan Utara	25,77	21,29	10,68
Sulawesi Utara	27,83	28,44	17,70
Sulawesi Tengah	28,91	29,35	17,89
Sulawesi Selatan	27,72	30,06	18,15
Sulawesi Tenggara	27,96	28,85	17,51
Gorontalo	31,88	30,66	19,31
Sulawesi Barat	30,25	28,15	18,78
Maluku	27,81	38,10	26,19
Maluku Utara	30,45	35,78	27,74
Papua Barat	28,67	29,31	20,87
Papua	28,83	29,77	22,87
Indonesia	26,80	26,32	15,54

4.a.1.(a) Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir

Sumber: PISA 2018 dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Lingkungan Belajar 2021
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator						
	4.c.1* (2021)						
	(1) Persentase guru dengan kualifikasi minimal S1 atau D4						
	(1) TK	(2) SD	(3) SMP	(4) SMA	(5) SMK	(6) SLB	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	56,18	92,09	97,45	99,24	98,69	92,27	74,13
Sumatera Utara	50,36	94,75	97,32	98,12	95,49	83,46	70,95
Sumatera Barat	64,03	96,28	97,59	99,02	98,08	85,13	74,14
Riau	52,91	93,55	96,36	98,05	96,21	79,06	70,59
Jambi	48,40	92,26	97,60	98,53	97,21	86,77	71,57
Sumatera Selatan	50,45	93,57	97,18	98,55	95,02	83,41	70,93
Bengkulu	55,26	94,23	97,34	99,13	96,42	88,96	73,01
Lampung	50,40	93,09	95,85	97,61	93,17	73,95	68,65
Kep. Bangka Belitung	69,75	95,97	97,64	99,04	96,69	76,02	73,35
Kepulauan Riau	58,97	94,27	96,86	98,42	96,47	79,20	71,81
DKI Jakarta	72,81	96,58	97,82	98,75	96,51	83,15	75,00
Jawa Barat	59,54	96,41	96,90	98,16	95,12	86,99	72,95
Jawa Tengah	71,51	97,58	98,34	98,81	97,29	85,44	75,39
DI Yogyakarta	83,34	97,31	98,05	98,67	97,50	89,86	78,07
Jawa Timur	73,44	97,25	98,30	98,88	97,56	83,90	75,51
Banten	64,13	95,78	97,01	97,89	96,18	78,83	72,50
Bali	74,17	97,87	98,77	98,79	96,53	86,23	75,91
Nusa Tenggara Barat	63,53	94,08	97,97	98,92	97,32	83,77	73,74
Nusa Tenggara Timur	55,74	92,48	96,91	97,63	93,20	73,41	69,63
Kalimantan Barat	55,51	92,92	95,92	97,80	94,51	76,62	70,21
Kalimantan Tengah	45,36	94,34	97,62	98,96	97,33	84,93	70,86
Kalimantan Selatan	64,15	95,96	98,58	99,01	96,84	86,93	74,41
Kalimantan Timur	61,10	95,70	97,81	98,78	97,10	84,28	73,34
Kalimantan Utara	53,76	94,80	97,71	98,89	98,56	93,83	73,95
Sulawesi Utara	43,11	92,90	95,99	98,46	96,51	79,02	69,00
Sulawesi Tengah	38,28	87,50	97,59	99,07	97,36	70,38	67,26
Sulawesi Selatan	64,22	95,80	98,47	98,78	97,89	81,23	73,59
Sulawesi Tenggara	48,48	92,58	98,02	99,02	96,86	70,93	69,04
Gorontalo	65,57	96,78	97,70	99,58	96,69	74,01	72,42
Sulawesi Barat	35,99	86,42	95,60	99,03	95,24	77,93	67,44
Maluku	31,49	83,79	94,78	97,70	95,12	74,40	65,72
Maluku Utara	26,70	79,44	95,55	97,17	93,87	80,82	65,81
Papua Barat	42,29	87,23	96,80	98,78	96,30	87,18	70,37
Papua	48,77	77,04	92,06	97,61	93,81	83,90	69,49
Indonesia	62,28	94,76	97,37	98,48	96,35	83,62	73,17

4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan

Sumber: Dapodik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Provinsi	Kode Indikator						
	4.c.1* (2021)						
	(2) Persentase guru yang bersertifikat pendidik						
	(1) TK	(2) SD	(3) SMP	(4) SMA	(5) SMK	(6) SLB	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,14	29,48	30,00	27,43	35,82	20,65	19,56
Sumatera Utara	3,56	35,00	40,47	34,53	35,60	34,36	24,81
Sumatera Barat	10,37	43,39	47,42	25,00	50,29	31,20	27,45
Riau	4,71	35,29	35,30	29,66	29,73	25,45	20,87
Jambi	4,37	32,76	34,33	35,41	30,63	21,12	21,03
Sumatera Selatan	3,04	31,32	30,46	31,73	24,22	26,46	19,37
Bengkulu	5,31	40,28	37,85	35,55	35,60	17,73	22,07
Lampung	4,15	34,13	38,54	36,21	27,88	29,80	22,82
Kep. Bangka Belitung	7,49	43,54	33,09	40,47	39,95	25,15	24,43
Kepulauan Riau	4,47	28,33	27,99	34,23	28,59	16,00	18,59
DKI Jakarta	7,28	38,15	46,30	41,53	35,11	43,72	29,05
Jawa Barat	5,84	39,85	39,01	43,88	26,06	43,44	26,44
Jawa Tengah	8,95	41,85	55,79	44,29	44,22	40,23	32,32
DI Yogyakarta	10,33	44,44	52,32	40,02	53,08	54,98	35,20
Jawa Timur	7,68	41,22	51,73	45,07	39,02	41,62	30,92
Banten	5,44	37,87	34,06	44,80	23,65	32,23	23,43
Bali	7,68	44,17	44,03	49,00	35,50	37,66	29,05
Nusa Tenggara Barat	4,62	29,71	29,04	46,97	28,66	20,71	21,72
Nusa Tenggara Timur	4,22	20,54	16,83	43,81	23,18	17,82	17,68
Kalimantan Barat	6,42	34,16	28,23	41,52	29,57	22,94	21,50
Kalimantan Tengah	4,36	38,25	31,64	36,87	34,03	13,91	20,20
Kalimantan Selatan	6,38	41,38	48,28	38,72	37,64	27,36	26,46
Kalimantan Timur	6,27	37,49	38,89	40,33	35,29	27,56	24,79
Kalimantan Utara	2,25	27,09	25,97	43,70	38,18	17,28	21,27
Sulawesi Utara	5,07	40,43	43,49	36,22	38,11	29,51	25,47
Sulawesi Tengah	2,46	31,42	32,37	39,82	34,84	23,85	22,28
Sulawesi Selatan	9,06	40,43	43,52	36,29	39,43	39,87	28,09
Sulawesi Tenggara	3,46	34,69	38,41	41,48	41,52	15,98	23,53
Gorontalo	6,47	41,48	40,80	34,94	39,52	20,26	23,74
Sulawesi Barat	3,91	26,19	28,41	40,34	25,16	17,24	19,22
Maluku	1,06	26,27	19,46	31,05	24,20	11,31	14,56
Maluku Utara	2,38	18,07	20,49	38,71	21,82	14,29	16,31
Papua Barat	3,36	20,26	25,03	36,33	30,89	15,38	18,53
Papua	3,91	16,02	23,46	40,69	31,22	38,14	22,93
Indonesia	6,33	36,74	39,74	39,12	34,49	34,52	25,76

4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan

Sumber: Dapodik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

Provinsi	Kode Indikator							
	5.3.1* <18 tahun			5.5.1* ¹ (b) pemerintah daerah		5.5.2*		
	2019	2020	2021	2014	2019	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	6,59	5,43	4,60	14,81	11,11	26,13	32,61	30,60
Sumatera Utara	6,50	5,95	4,82	13,00	13,00	28,96	26,92	27,29
Sumatera Barat	5,96	5,03	3,48	9,23	6,15	33,67	38,48	33,22
Riau	8,30	9,19	5,55	27,69	16,92	26,67	32,46	31,06
Jambi	14,78	14,03	10,67	13,33	11,11	28,72	35,29	29,66
Sumatera Selatan	13,53	13,44	12,24	12,73	14,55	28,49	30,50	31,15
Bengkulu	13,24	10,68	11,93	17,33	21,33	28,14	24,67	25,66
Lampung	12,10	10,24	9,77	11,11	4,44	30,55	26,64	25,17
Kep. Bangka Belitung	15,48	18,76	14,05	17,78	15,56	23,61	23,19	29,39
Kepulauan Riau	3,82	7,31	2,89	16,47	20,00	33,75	23,63	25,66
DKI Jakarta	3,12	1,45	4,68	17,92	21,70	35,96	34,19	33,15
Jawa Barat	12,33	11,96	10,09	22,00	20,00	28,17	31,44	33,73
Jawa Tengah	10,19	10,05	9,75	18,82	17,65	33,10	33,43	30,91
DI Yogyakarta	3,06	1,83	3,52	23,00	19,17	33,41	40,54	25,84
Jawa Timur	11,11	10,67	10,44	10,91	18,18	35,92	39,99	37,86
Banten	6,00	6,23	6,00	13,00	16,67	26,88	33,89	34,26
Bali	10,18	8,79	5,06	9,09	16,36	23,58	36,38	32,96
Nusa Tenggara Barat	16,09	16,61	16,59	9,23	1,54	23,31	32,45	29,99
Nusa Tenggara Timur	8,51	9,22	5,95	9,23	18,46	31,24	29,82	31,30
Kalimantan Barat	17,86	17,14	13,84	10,77	13,85	23,25	24,37	23,68
Kalimantan Tengah	20,16	16,35	15,47	22,22	35,56	29,03	29,69	26,78
Kalimantan Selatan	21,18	16,24	15,30	12,73	20,00	26,58	29,27	28,48
Kalimantan Timur	12,36	11,79	8,64	10,91	16,36	21,94	30,52	30,38
Kalimantan Utara	12,94	12,70	10,16	0,00	11,43	21,08	26,27	29,31
Sulawesi Utara	13,54	14,01	13,56	31,11	26,67	36,62	47,93	42,14
Sulawesi Tengah	16,25	14,89	12,51	15,56	26,67	32,49	37,01	39,30
Sulawesi Selatan	12,11	11,25	9,25	18,82	28,24	27,36	26,42	32,14
Sulawesi Tenggara	16,56	16,09	13,26	17,78	17,78	30,76	21,54	27,18
Gorontalo	13,16	14,73	11,64	26,67	26,67	45,82	50,43	39,80
Sulawesi Barat	19,17	17,12	17,71	17,78	11,11	29,95	31,49	30,01
Maluku	9,54	6,84	7,08	26,67	22,22	35,80	26,47	37,72
Maluku Utara	14,36	15,29	13,09	8,89	24,44	20,62	29,75	32,45
Papua Barat	13,20	12,91	12,27	11,11	14,55	27,02	33,40	33,42
Papua	11,21	13,78	13,21	2,22	15,56	23,70	22,38	28,23
Indonesia	10,82	10,35	9,23	15,92	17,53	30,37	33,08	32,50

5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah

Catatan: ¹ Data proporsi kursi yang dipegang oleh perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 2014 dan 2019

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

Provinsi	Kode Indikator							
	5.6.1* Semua Wanita Usia Reproduksi		5.6.1* Wanita yang sudah menikah dari usia reproduksi		5.b.1* ¹			
	2012	2017	2012	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	15,40	15,10	24,20	23,10	59,05	57,75	59,60	61,20
Sumatera Utara	20,30	23,40	31,20	35,50	59,45	60,66	59,56	65,05
Sumatera Barat	23,40	26,20	34,00	42,00	62,83	62,62	61,83	65,34
Riau	26,70	27,60	35,10	38,60	67,74	67,29	66,35	70,57
Jambi	33,10	33,10	42,50	43,90	64,29	64,75	64,06	67,32
Sumatera Selatan	36,20	34,60	46,80	46,10	61,12	60,70	60,68	64,53
Bengkulu	31,80	33,60	42,30	44,70	60,31	61,18	60,19	64,34
Lampung	38,30	35,10	49,40	45,40	59,81	61,54	59,03	63,83
Kep. Bangka Belitung	32,20	36,60	43,20	51,60	68,41	67,77	66,61	68,22
Kepulauan Riau	22,30	22,70	31,60	32,80	74,11	76,39	74,33	81,83
DKI Jakarta	24,20	24,40	37,20	39,20	76,16	78,42	77,57	67,83
Jawa Barat	28,90	29,60	38,70	40,30	65,01	66,24	64,83	62,76
Jawa Tengah	26,50	27,90	35,50	37,70	60,47	61,66	60,87	62,76
DI Yogyakarta	35,60	32,40	51,10	47,70	68,32	67,66	67,62	69,81
Jawa Timur	31,80	34,40	40,70	45,60	60,66	62,16	61,82	62,99
Banten	30,10	29,40	41,50	41,50	64,25	65,21	64,40	68,20
Bali	27,90	34,10	37,50	47,90	67,99	69,61	69,93	71,65
Nusa Tenggara Barat	20,90	24,00	30,40	34,20	53,88	57,10	56,36	59,16
Nusa Tenggara Timur	21,40	23,20	32,70	35,20	43,91	45,01	44,12	51,92
Kalimantan Barat	39,20	28,80	50,10	38,80	58,25	58,57	58,11	62,39
Kalimantan Tengah	38,60	42,60	48,60	55,10	68,20	70,28	68,56	71,62
Kalimantan Selatan	32,40	33,10	44,10	44,40	66,04	68,97	67,69	69,49
Kalimantan Timur	34,00	34,30	45,80	46,70	76,36	76,88	76,71	81,10
Kalimantan Utara	-	24,80	-	38,20	73,99	74,32	71,95	76,02
Sulawesi Utara	39,30	38,70	53,10	54,30	64,64	67,90	67,13	70,32
Sulawesi Tengah	32,70	35,40	43,80	49,10	56,66	57,68	57,89	61,10
Sulawesi Selatan	24,90	28,70	38,10	44,10	63,85	65,07	65,14	69,13
Sulawesi Tenggara	23,10	29,00	31,20	40,90	60,34	62,68	63,86	68,22
Gorontalo	29,00	31,90	39,50	43,10	58,50	60,36	61,42	64,64
Sulawesi Barat	19,60	25,50	28,60	38,30	50,44	52,18	54,41	59,51
Maluku	17,30	19,10	25,60	29,80	56,13	56,96	56,16	62,41
Maluku Utara	23,20	24,80	33,30	35,60	53,55	53,69	54,88	59,08
Papua Barat	17,50	22,10	24,40	31,90	65,08	66,49	66,61	68,11
Papua	8,60	18,20	11,70	25,30	40,46	38,50	40,44	38,94
Indonesia	28,30	29,50	38,60	41,00	62,41	63,53	62,84	65,87

5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan

Sumber: SDKI, BPS dan BKKBN

5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

Catatan: ¹ penduduk usia 5 tahun ke atas

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Provinsi	Kode Indikator								
	6.1.1*			6.2.1* Akses terhadap sanitasi layak			6.2.1* Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	33,77	36,96	39,40	73,16	77,06	77,55	64,00	67,98	69,31
Sumatera Utara	40,20	41,32	42,39	79,59	81,08	82,02	71,43	67,30	68,22
Sumatera Barat	35,94	38,47	39,56	63,98	68,11	68,68	78,80	82,69	82,09
Riau	35,66	32,99	36,57	80,04	83,99	83,64	72,11	73,05	74,93
Jambi	46,26	45,49	46,33	75,60	77,82	80,36	71,47	73,12	73,41
Sumatera Selatan	47,13	49,57	52,39	74,67	76,94	77,29	73,84	75,04	75,28
Bengkulu	35,88	37,36	43,76	75,91	78,10	79,81	77,81	79,12	78,83
Lampung	44,18	47,51	52,03	79,22	78,81	83,89	74,73	78,06	80,69
Kep. Bangka Belitung	21,06	19,21	19,33	90,32	92,58	92,24	85,35	86,67	89,44
Kepulauan Riau	16,46	13,02	14,47	89,13	89,19	91,62	74,49	80,35	83,77
DKI Jakarta	27,48	24,94	24,11	92,89	93,04	95,17	73,18	76,83	79,52
Jawa Barat	39,30	38,54	40,64	69,64	71,40	71,66	76,82	79,10	79,49
Jawa Tengah	56,98	55,00	55,91	80,29	83,24	83,28	81,22	84,42	85,81
DI Yogyakarta	58,91	61,92	65,03	94,67	96,96	97,12	80,89	84,64	87,54
Jawa Timur	52,38	52,41	52,50	78,78	80,98	80,97	77,08	79,36	81,88
Banten	34,42	33,75	35,30	81,01	82,00	82,89	74,19	78,36	80,27
Bali	43,49	40,22	40,93	94,59	95,01	95,95	88,33	89,68	91,30
Nusa Tenggara Barat	49,12	46,98	43,82	80,02	82,89	82,85	71,47	74,26	75,10
Nusa Tenggara Timur	28,96	26,91	29,78	64,55	69,70	73,36	51,92	54,43	56,33
Kalimantan Barat	50,62	48,68	51,77	72,08	75,81	78,39	71,31	72,90	74,94
Kalimantan Tengah	26,64	26,76	30,45	69,23	72,31	73,77	77,16	77,82	79,63
Kalimantan Selatan	37,21	36,90	39,80	76,56	81,17	81,43	85,39	86,70	87,16
Kalimantan Timur	17,66	15,28	18,22	89,27	89,17	89,77	75,84	76,83	78,03
Kalimantan Utara	20,16	24,68	20,62	77,20	82,09	79,80	83,40	87,02	87,73
Sulawesi Utara	34,45	34,20	37,32	82,36	85,49	84,85	83,12	83,71	84,58
Sulawesi Tengah	35,48	34,02	35,01	71,95	74,61	76,06	81,38	81,93	82,23
Sulawesi Selatan	44,25	44,39	46,22	87,80	88,96	91,57	85,34	88,71	89,08
Sulawesi Tenggara	41,45	42,07	42,40	79,75	82,38	85,62	82,97	85,97	85,69
Gorontalo	34,87	32,04	31,69	74,57	75,68	78,58	79,71	85,40	86,87
Sulawesi Barat	32,80	30,49	40,80	73,39	77,07	80,12	80,77	79,52	76,25
Maluku	29,38	29,63	28,83	70,00	75,06	76,77	75,60	79,13	79,84
Maluku Utara	39,60	43,31	45,23	72,52	75,99	77,11	72,81	80,52	81,21
Papua Barat	32,06	25,21	28,46	76,39	78,71	77,89	69,47	73,53	73,71
Papua	24,64	25,37	30,07	38,27	40,31	40,81	35,55	36,44	36,97
Indonesia	42,84	42,31	43,81	77,39	79,53	80,29	76,07	78,30	79,59

6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman

Catatan: Komponen penyusun indikator air minum yang dikelola secara aman (air layak, terletak di dalam kawasan rumah, tersedia setiap dibutuhkan (tidak kekurangan air dalam 24 jam), dan memenuhi syarat kualitas air minum (tidak keruh, berwarna, berbusa, dll)).

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Provinsi	Kode Indikator				
	6.3.2.(a)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	80,00	75,71	60,56	61,43	57,14
Sumatera Utara	78,33	63,06	51,11	53,33	53,72
Sumatera Barat	64,56	83,98	53,19	53,50	52,55
Riau	65,23	73,68	53,55	53,24	52,25
Jambi	57,50	81,21	58,49	56,75	48,96
Sumatera Selatan	77,62	88,15	64,45	63,33	58,25
Bengkulu	80,80	82,08	47,64	50,83	49,81
Lampung	55,56	68,73	55,74	56,21	57,77
Kep. Bangka Belitung	72,50	82,13	69,29	65,63	58,37
Kepulauan Riau	66,67	57,85	54,00	50,00	55,15
DKI Jakarta	21,33	51,93	41,94	42,73	44,19
Jawa Barat	29,00	65,77	45,59	41,50	43,09
Jawa Tengah	45,43	77,77	51,64	55,21	47,94
DI Yogyakarta	20,19	81,63	35,37	50,00	45,73
Jawa Timur	37,08	74,43	50,79	53,85	53,57
Banten	35,98	67,32	43,11	50,56	54,95
Bali	79,50	77,67	65,33	64,33	54,29
Nusa Tenggara Barat	79,50	74,63	40,23	50,98	45,10
Nusa Tenggara Timur	39,63	58,09	59,48	59,19	58,28
Kalimantan Barat	80,00	69,38	50,00	51,67	54,35
Kalimantan Tengah	62,35	61,15	56,80	53,61	55,34
Kalimantan Selatan	73,57	75,80	55,31	51,67	54,75
Kalimantan Timur	73,33	86,19	62,01	60,00	51,92
Kalimantan Utara	72,96	81,86	52,22	51,82	57,34
Sulawesi Utara	57,69	78,50	45,48	50,53	49,69
Sulawesi Tengah	56,44	75,95	62,59	61,67	55,84
Sulawesi Selatan	77,62	82,62	58,40	52,38	56,82
Sulawesi Tenggara	64,67	86,17	50,55	51,60	53,26
Gorontalo	40,00	81,93	57,20	53,00	53,46
Sulawesi Barat	73,89	82,43	56,15	52,44	56,04
Maluku	71,33	67,40	57,56	55,67	55,56
Maluku Utara	63,64	88,01	53,61	50,00	53,08
Papua Barat	82,50	81,25	53,89	52,22	54,44
Papua	77,33	61,78	47,29	55,00	57,83
Indonesia	53,20	51,01	52,62	53,53	52,82

6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku

Data: Indeks Kualitas Air

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TUJUAN 7

ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Provinsi	Kode Indikator					
	7.1.1*				7.1.2.(b)	
	2017	2018	2019	2020	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	97,68	99,20	99,96	99,99	90,23	91,89
Sumatera Utara	99,90	99,99	99,11	99,99	85,37	88,12
Sumatera Barat	89,15	91,60	98,50	99,20	75,21	79,71
Riau	95,25	98,44	99,34	99,75	90,81	91,48
Jambi	76,97	88,11	99,89	99,90	84,35	87,11
Sumatera Selatan	88,38	91,21	98,30	98,61	92,97	94,16
Bengkulu	93,68	98,09	99,99	99,99	89,51	92,05
Lampung	96,49	99,96	99,87	99,94	86,41	88,14
Kep. Bangka Belitung	106,35	99,99	99,99	99,99	91,87	92,23
Kepulauan Riau	91,96	96,38	98,72	99,05	86,09	87,89
DKI Jakarta	103,75	99,99	99,99	99,99	89,52	92,15
Jawa Barat	105,97	99,99	99,29	99,59	89,05	89,39
Jawa Tengah	102,90	99,99	99,99	99,99	85,63	85,82
DI Yogyakarta	96,30	99,97	99,99	99,99	76,25	76,65
Jawa Timur	103,03	99,99	98,39	98,86	83,35	83,97
Banten	92,03	94,65	99,99	99,99	88,88	88,12
Bali	97,12	100,00	100,00	100,00	81,05	82,10
Nusa Tenggara Barat	84,11	62,07	98,66	99,88	61,65	79,52
Nusa Tenggara Timur	59,85	90,82	85,84	87,62	1,01	1,41
Kalimantan Barat	89,93	87,29	97,96	98,65	90,55	91,91
Kalimantan Tengah	80,82	84,56	94,60	94,98	85,25	87,12
Kalimantan Selatan	92,12	95,98	99,48	99,99	82,68	85,63
Kalimantan Timur	100,80	99,99	99,89	99,99	95,07	96,28
Kalimantan Utara	84,78	90,28	98,74	99,87	82,09	82,12
Sulawesi Utara	94,56	97,47	99,99	99,99	78,87	80,94
Sulawesi Tengah	79,31	91,54	97,33	98,33	59,55	68,96
Sulawesi Selatan	99,12	99,99	99,99	99,99	89,98	91,53
Sulawesi Tenggara	81,54	90,39	94,94	95,91	62,38	64,49
Gorontalo	95,28	99,99	98,06	99,99	88,56	90,80
Sulawesi Barat	86,56	89,59	99,70	99,72	80,39	81,86
Maluku	87,39	90,95	91,34	91,83	0,80	1,76
Maluku Utara	96,09	99,99	99,99	99,99	0,97	1,48
Papua Barat	95,70	90,47	99,99	99,99	4,35	5,21
Papua	61,42	99,99	94,31	94,42	1,73	1,92
Indonesia	95,35	98,30	98,89	99,20	81,98	83,36

7.1.1* Rasio Elektrifikasi

Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Provinsi	Kode Indikator							
	8.1.1*				8.1.1.(a)			
	2018	2019	2020 ^x	2021 ^{xx}	2018	2019	2020 ^x	2021 ^{xx}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	2,79	3,45	0,71	1,36	29.521	30.879	31.633	34.680
Sumatera Utara	4,06	3,61	-1,84	1,36	51.427	54.620	54.979	57.570
Sumatera Barat	3,95	3,14	-2,33	2,17	42.803	44.886	43.844	45.294
Riau	-0,01	2,51	6,03	1,44	110.385	111.227	114.332	129.853
Jambi	3,07	4,46	0,34	2,31	58.225	60.829	58.286	65.193
Sumatera Selatan	4,70	4,11	0,53	2,28	50.105	53.359	54.084	57.487
Bengkulu	3,42	4,49	-1,70	1,85	33.822	36.565	36.552	39.143
Lampung	4,21	4,18	-7,44	1,70	39.716	42.172	39.347	40.950
Kep. Bangka Belitung	2,37	3,95	-2,34	3,52	50.082	52.233	52.007	58.339
Kepulauan Riau	1,83	-0,08	4,77	0,49	116.461	119.395	123.529	130.125
DKI Jakarta	5,16	5,46	-2,70	2,86	247.678	268.052	262.702	274.710
Jawa Barat	4,25	4,30	-0,77	2,41	40.273	43.309	43.289	45.300
Jawa Tengah	4,59	5,17	-7,71	2,49	36.771	39.388	36.984	38.669
DI Yogyakarta	5,06	4,78	2,75	4,15	34.137	36.460	37.745	40.230
Jawa Timur	4,92	4,88	-4,39	2,88	55.411	59.015	56.640	60.043
Banten	3,75	5,06	3,48	2,78	48.370	52.014	52.736	55.211
Bali	5,18	3,90	-8,25	-3,64	54.433	57.756	51.940	50.381
Nusa Tenggara Barat	-5,61	1,10	-3,49	0,70	24.706	25.716	25.184	26.002
Nusa Tenggara Timur	3,46	3,98	1,56	1,01	18.418	19.630	20.057	20.581
Kalimantan Barat	3,62	4,17	-8,26	3,42	38.815	42.045	39.632	42.283
Kalimantan Tengah	3,43	6,53	-1,91	1,91	52.107	56.625	57.145	62.913
Kalimantan Selatan	3,50	3,26	1,90	1,97	41.046	42.824	44.084	46.713
Kalimantan Timur	0,58	5,54	-6,40	1,08	174.165	180.259	161.757	182.541
Kalimantan Utara	1,63	10,09	-1,67	1,94	119.414	138.751	143.657	155.081
Sulawesi Utara	5,00	5,24	-5,65	3,32	48.105	52.173	50.521	54.043
Sulawesi Tengah	18,83	7,70	7,13	10,07	55.519	61.056	66.306	81.733
Sulawesi Selatan	6,05	6,33	-3,28	3,66	52.642	57.182	55.676	59.656
Sulawesi Tenggara	4,34	6,10	1,13	2,44	44.492	48.514	49.745	52.294
Gorontalo	4,94	7,23	0,60	1,38	31.828	34.977	35.693	37.170
Sulawesi Barat	4,33	5,27	-6,25	1,00	32.059	34.112	32.810	35.036
Maluku	4,17	5,72	-4,95	1,99	24.269	26.097	25.094	26.073
Maluku Utara	5,82	5,99	1,77	14,60	29.586	32.125	33.085	40.302
Papua Barat	3,75	-0,13	-15,42	-2,77	84.958	87.542	73.933	73.539
Papua	5,47	-16,36	-20,13	13,42	63.386	56.619	46.427	54.034
Indonesia	3,93	4,27	-3,03	2,51	55.992	59.318	57.270	62.236

8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita

Catatan: ^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

Sumber: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan, Badan Pusat Statistik

8.1.1.(a) PDB per kapita (Ribu Rupiah)

Catatan: ^x Angka Sementara

^{xx} Angka Sangat Sementara

Sumber: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 8

PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Provinsi	Kode Indikator							
	8.2.1*				8.3.1*			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	-0,30	3,54	-4,73	2,73	59,44	57,12	61,88	60,69
Sumatera Utara	-4,89	5,62	1,39	-0,22	56,57	55,00	59,62	59,33
Sumatera Barat	-0,60	2,55	-3,18	3,30	63,94	62,13	66,28	64,77
Riau	-1,52	0,62	-3,41	-0,77	54,95	52,22	55,97	54,57
Jambi	0,62	6,93	-3,64	3,19	56,45	57,06	62,74	62,01
Sumatera Selatan	4,34	5,51	-2,03	1,39	61,22	60,52	65,26	64,16
Bengkulu	-0,87	3,45	-2,89	4,26	68,84	65,12	69,23	68,16
Lampung	-1,53	4,70	-3,82	2,69	70,79	68,49	72,26	71,31
Kep. Bangka Belitung	1,43	1,95	-2,01	4,82	50,43	46,82	52,93	50,93
Kepulauan Riau	-0,11	-0,55	-6,43	-3,31	31,78	29,57	35,41	35,20
DKI Jakarta	1,24	3,05	1,70	1,86	30,15	31,35	38,22	38,26
Jawa Barat	3,71	-0,30	-0,69	0,77	48,21	50,20	55,59	54,61
Jawa Tengah	3,92	4,27	-2,28	1,59	60,67	57,99	62,75	60,38
DI Yogyakarta	1,36	5,44	-0,47	0,69	54,45	51,64	57,41	55,36
Jawa Timur	1,76	4,52	-2,06	3,21	61,88	60,64	63,64	62,64
Banten	0,36	1,47	-3,38	1,76	43,99	42,14	49,17	48,87
Bali	0,94	8,02	-7,60	-3,21	49,38	49,46	56,69	57,10
Nusa Tenggara Barat	-2,52	-6,51	-2,72	-0,83	71,81	71,02	73,47	73,89
Nusa Tenggara Timur	-7,31	5,88	-4,87	-0,50	75,65	72,26	76,10	75,97
Kalimantan Barat	-0,14	4,17	-2,35	3,76	59,55	60,11	63,01	60,87
Kalimantan Tengah	-0,85	4,79	-1,33	1,22	52,37	51,02	55,80	55,50
Kalimantan Selatan	1,79	3,73	-3,57	2,20	60,08	56,82	60,82	59,63
Kalimantan Timur	-2,44	0,25	-2,81	0,84	41,16	41,76	47,14	46,49
Kalimantan Utara	4,57	5,14	-4,22	1,61	42,95	46,69	50,93	50,74
Sulawesi Utara	-1,01	2,48	0,25	4,90	55,61	54,81	60,46	60,70
Sulawesi Tengah	11,98	9,86	1,38	11,09	66,66	62,97	67,37	67,32
Sulawesi Selatan	-3,85	5,53	0,59	0,78	63,32	60,55	64,22	63,24
Sulawesi Tenggara	-1,51	5,79	-2,69	1,13	63,09	62,55	64,59	62,81
Gorontalo	-1,98	5,80	0,73	0,56	61,78	58,66	62,12	62,39
Sulawesi Barat	-1,35	2,53	-4,23	0,53	74,69	71,91	72,63	72,80
Maluku	-8,59	3,41	-3,14	-0,18	64,37	61,98	66,56	64,41
Maluku Utara	-3,71	5,26	4,78	13,08	66,92	61,69	66,13	63,56
Papua Barat	1,84	-1,28	-5,66	-5,52	54,30	52,25	57,98	57,92
Papua	1,26	-15,34	8,39	3,16	78,11	79,29	79,92	80,47
Indonesia	0,79	3,00	-1,84	1,64	56,98	55,88	60,47	59,45

8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

Sumber: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan dan Sakernas, Badan Pusat Statistik

8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin

Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Provinsi	Kode Indikator							
	8.5.1*				8.5.2*			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	13.814	15.065	18.099	17.037	6,34	6,17	6,59	6,30
Sumatera Utara	13.257	14.061	15.949	15.486	5,55	5,39	6,91	6,33
Sumatera Barat	14.431	15.210	17.571	16.630	5,66	5,38	6,88	6,52
Riau	15.613	16.270	18.411	19.144	5,98	5,76	6,32	4,42
Jambi	14.007	14.304	15.840	16.043	3,73	4,06	5,13	5,09
Sumatera Selatan	13.214	13.580	15.072	15.873	4,27	4,53	5,51	4,98
Bengkulu	14.353	14.511	17.407	18.271	3,35	3,26	4,07	3,65
Lampung	11.779	12.575	14.912	15.224	4,04	4,03	4,67	4,69
Kep. Bangka Belitung	15.818	17.373	15.763	17.692	3,61	3,58	5,25	5,03
Kepulauan Riau	23.212	22.912	25.032	25.736	8,04	7,50	10,34	9,91
DKI Jakarta	25.238	25.236	28.420	30.662	6,65	6,54	10,95	8,50
Jawa Barat	16.843	17.365	19.078	19.716	8,23	8,04	10,46	9,82
Jawa Tengah	11.417	11.828	12.707	13.072	4,47	4,44	6,48	5,95
DI Yogyakarta	12.554	13.275	15.771	15.098	3,37	3,18	4,57	4,56
Jawa Timur	12.561	13.119	14.389	14.789	3,91	3,82	5,84	5,74
Banten	20.565	21.003	23.035	24.839	8,47	8,11	10,64	8,98
Bali	15.889	16.408	17.775	17.662	1,40	1,57	5,63	5,37
Nusa Tenggara Barat	11.359	11.954	13.627	12.992	3,58	3,28	4,22	3,01
Nusa Tenggara Timur	12.318	12.610	17.696	16.386	2,85	3,14	4,28	3,77
Kalimantan Barat	14.614	15.309	16.098	16.127	4,18	4,35	5,81	5,82
Kalimantan Tengah	17.489	18.090	20.677	21.040	3,91	4,04	4,58	4,53
Kalimantan Selatan	15.735	16.517	18.863	18.874	4,35	4,18	4,74	4,95
Kalimantan Timur	21.303	21.691	24.097	23.943	6,41	5,94	6,87	6,83
Kalimantan Utara	18.931	20.639	26.002	22.972	5,11	4,49	4,97	4,58
Sulawesi Utara	16.954	18.350	21.390	20.963	6,61	6,01	7,37	7,06
Sulawesi Tengah	13.462	14.682	18.140	20.637	3,37	3,11	3,77	3,75
Sulawesi Selatan	15.777	17.105	19.172	19.217	4,94	4,62	6,31	5,72
Sulawesi Tenggara	15.944	15.849	20.449	19.302	3,19	3,52	4,58	3,92
Gorontalo	11.891	13.492	15.128	14.613	3,70	3,76	4,28	3,01
Sulawesi Barat	12.144	13.126	18.136	18.072	3,01	2,98	3,32	3,13
Maluku	14.923	17.306	26.198	21.156	6,95	6,69	7,57	6,93
Maluku Utara	15.864	17.425	23.338	21.131	4,63	4,81	5,15	4,71
Papua Barat	21.727	22.987	27.904	29.600	6,45	6,43	6,80	5,84
Papua	25.987	24.984	32.138	30.382	3,00	3,51	4,28	3,33
Indonesia	15.275	15.823	17.696	18.089	5,30	5,23	7,07	6,49

8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja (Rupiah)

Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Provinsi	Kode Indikator							
	8.5.2.(a)				8.6.1*			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	11,30	12,38	16,18	13,16	22,77	23,61	23,60	24,38
Sumatera Utara	8,42	7,68	10,43	9,67	18,46	18,71	22,87	20,29
Sumatera Barat	9,74	9,20	12,93	10,28	20,50	19,93	20,46	18,78
Riau	8,57	8,29	11,87	9,95	23,79	22,66	23,62	21,11
Jambi	7,43	8,57	11,25	9,75	20,78	22,81	22,66	21,76
Sumatera Selatan	8,33	9,22	12,98	10,93	23,35	22,78	25,55	25,38
Bengkulu	8,32	10,12	13,09	11,16	20,77	20,51	20,63	22,75
Lampung	9,30	8,66	13,18	10,33	23,42	22,84	23,35	22,09
Kep. Bangka Belitung	5,92	6,25	9,11	6,05	21,56	22,65	27,34	24,38
Kepulauan Riau	3,81	2,84	5,75	6,17	19,74	16,55	20,71	16,42
DKI Jakarta	1,99	1,89	6,43	6,76	16,98	15,41	20,13	20,47
Jawa Barat	5,39	5,52	10,31	8,80	26,22	25,52	29,33	26,44
Jawa Tengah	5,19	5,36	8,60	7,23	21,23	21,80	24,01	20,32
DI Yogyakarta	4,25	3,94	8,04	6,37	12,52	9,78	12,71	9,89
Jawa Timur	5,79	5,23	8,99	7,47	21,11	21,14	22,41	20,77
Banten	4,23	4,52	9,53	7,84	24,65	23,11	27,50	26,52
Bali	2,36	1,93	8,62	8,53	8,59	9,40	14,90	14,52
Nusa Tenggara Barat	16,82	13,97	16,83	15,00	24,95	21,98	22,24	20,78
Nusa Tenggara Timur	12,25	11,79	15,10	14,19	18,46	19,25	19,17	18,97
Kalimantan Barat	9,17	7,93	10,42	9,62	24,50	23,20	25,43	24,74
Kalimantan Tengah	7,14	6,05	8,04	6,01	22,76	22,31	24,69	23,92
Kalimantan Selatan	5,76	6,67	9,38	8,28	23,06	22,18	21,16	20,54
Kalimantan Timur	4,20	4,74	7,14	5,97	23,24	19,65	24,25	21,56
Kalimantan Utara	7,68	6,44	8,33	7,16	17,37	21,42	22,59	19,80
Sulawesi Utara	8,16	6,38	11,05	8,80	29,73	28,10	29,94	29,43
Sulawesi Tengah	10,40	9,10	10,53	10,38	21,14	21,85	22,23	22,31
Sulawesi Selatan	7,37	7,34	9,96	7,42	23,07	21,91	25,48	23,78
Sulawesi Tenggara	11,18	8,46	10,49	10,45	20,45	21,32	23,00	19,87
Gorontalo	9,15	6,16	7,68	6,08	26,37	26,41	27,35	25,79
Sulawesi Barat	8,36	9,91	11,98	10,65	24,12	23,07	24,15	22,85
Maluku	9,27	10,76	14,20	12,75	25,18	26,59	27,46	28,64
Maluku Utara	7,64	8,15	10,78	9,76	23,04	24,94	26,37	27,59
Papua Barat	8,57	8,90	13,18	12,06	18,61	20,77	24,01	21,97
Papua	7,51	7,03	11,26	8,72	16,74	17,57	20,92	18,51
Indonesia	6,61	6,42	10,19	8,71	22,15	21,77	24,28	22,40

8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran

Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Provinsi	Kode Indikator				
	8.7.1.(a)			8.9.1.(b)	
	2019	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,18	1,98	1,39	4.647.806	5.470.747
Sumatera Utara	4,01	6,39	4,83	13.045.164	16.403.507
Sumatera Barat	2,46	4,29	2,64	6.930.832	8.293.259
Riau	2,21	3,37	2,87	5.203.647	6.191.890
Jambi	2,06	2,43	1,86	2.300.410	2.973.777
Sumatera Selatan	2,27	3,41	2,76	5.466.863	6.345.638
Bengkulu	1,99	2,98	1,94	1.427.427	1.600.420
Lampung	2,20	4,01	3,56	7.749.577	8.656.920
Kep. Bangka Belitung	2,41	4,81	3,30	847.930	979.220
Kepulauan Riau	0,98	1,19	0,97	421.559	491.533
DKI Jakarta	1,17	1,30	0,82	43.920.059	51.023.328
Jawa Barat	1,85	1,91	1,60	90.182.229	96.136.034
Jawa Tengah	2,17	2,31	2,26	118.122.553	133.341.972
DI Yogyakarta	2,08	1,91	2,06	22.319.030	24.159.626
Jawa Timur	1,64	2,59	2,01	125.343.705	155.114.120
Banten	1,31	2,02	1,07	30.090.681	38.047.415
Bali	3,02	4,31	3,70	7.818.391	8.925.402
Nusa Tenggara Barat	4,08	6,55	4,74	3.470.669	3.139.109
Nusa Tenggara Timur	3,42	5,67	4,49	1.889.690	2.506.137
Kalimantan Barat	2,55	4,01	3,50	1.678.423	2.163.002
Kalimantan Tengah	3,06	4,81	3,52	1.410.749	1.677.301
Kalimantan Selatan	2,31	3,11	2,95	4.350.200	4.441.329
Kalimantan Timur	1,43	3,11	2,20	2.236.182	2.242.203
Kalimantan Utara	2,66	4,84	5,66	202.610	223.367
Sulawesi Utara	2,45	3,15	2,98	2.370.027	3.646.083
Sulawesi Tengah	4,04	5,59	5,12	1.334.611	1.755.687
Sulawesi Selatan	4,90	6,16	5,33	8.828.147	9.858.971
Sulawesi Tenggara	5,26	8,05	6,46	1.873.628	2.461.439
Gorontalo	4,57	5,46	4,28	920.208	1.279.750
Sulawesi Barat	3,46	5,28	5,50	690.045	939.195
Maluku	3,04	3,35	2,49	225.290	528.846
Maluku Utara	3,51	3,80	2,12	438.188	617.179
Papua Barat	2,30	5,35	3,81	282.041	546.763
Papua	3,17	3,49	3,25	550.391	838.831
Indonesia	2,35	3,25	2,63	518.588.962	603.020.000

8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Sumber: Sakernas, Badan Pusat Statistik

8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Sumber: Badan Pusat Statistik

TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

Provinsi	Kode Indikator									
	9.1.1.(a)	9.1.2.(a)	9.2.1* Proporsi NTSIM terhadap PDB				9.2.1* NTSIM per kapita (ribu rupiah)			
	2021	2020	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	98,19	8	5,05	4,80	4,60	4,59	1.214	1.192	1.152	1.165
Sumatera Utara	95,27	7	18,76	18,05	18,09	17,88	6.672	6.651	6.544	6.556
Sumatera Barat	92,41	2	10,03	9,36	9,46	9,50	3.055	2.942	2.905	2.979
Riau	86,75	5	30,02	30,90	31,85	32,07	21.237	22.407	24.489	25.015
Jambi	93,45	3	10,59	10,39	10,45	10,21	4.240	4.345	4.384	4.382
Sumatera Selatan	93,25	2	18,81	18,66	18,81	18,58	6.708	6.926	7.021	7.092
Bengkulu	95,6	3	6,16	6,00	5,86	5,81	1.385	1.411	1.353	1.366
Lampung	93,89	2	18,62	19,14	18,44	18,76	5.163	5.531	4.932	5.102
Kep. Bangka Belitung	99,44	2	22,58	22,11	21,36	21,44	8.074	8.221	7.755	8.058
Kepulauan Riau	98,38	7	37,47	37,98	40,77	41,96	30.432	30.817	34.657	35.844
DKI Jakarta	0,00	1	12,66	11,82	10,86	11,64	20.990	20.662	18.468	20.362
Jawa Barat	96,33	5	43,42	42,98	42,16	42,36	12.662	13.071	12.725	13.093
Jawa Tengah	92,09	4	34,23	34,14	33,73	33,41	9.340	9.796	8.934	9.067
DI Yogyakarta	99,03	2	12,74	12,63	12,42	11,81	3.284	3.412	3.445	3.413
Jawa Timur	92,57	6	29,86	30,23	30,31	30,25	11.820	12.549	12.030	12.350
Banten	92,87	1	34,45	33,89	33,44	33,60	11.775	12.172	12.428	12.834
Bali	98,76	1	6,30	6,37	6,57	6,74	2.260	2.375	2.248	2.223
Nusa Tenggara Barat	98,22	3	4,74	4,75	4,66	4,66	855	865	820	824
Nusa Tenggara Timur	94,69	14	1,28	1,32	1,26	1,17	157	169	163	153
Kalimantan Barat	93,85	5	15,76	16,14	16,03	16,10	4.116	4.391	4.000	4.154
Kalimantan Tengah	82,31	8	15,58	15,33	15,54	15,65	5.540	5.807	5.773	5.924
Kalimantan Selatan	95,63	4	12,98	12,69	12,46	12,79	3.975	4.011	4.012	4.200
Kalimantan Timur	82,41	8	20,83	19,90	19,90	19,86	26.528	26.743	25.034	25.256
Kalimantan Utara	86,00	6	9,35	9,17	8,91	8,78	7.497	8.094	7.737	7.776
Sulawesi Utara	93,65	4	9,93	9,45	9,95	10,40	3.366	3.373	3.349	3.618
Sulawesi Tengah	98,39	7	21,38	23,05	27,18	29,11	8.350	9.692	12.246	14.434
Sulawesi Selatan	95,02	10	13,19	13,56	13,04	12,83	4.650	5.083	4.725	4.822
Sulawesi Tenggara	88,63	5	6,22	6,47	6,99	7,09	2.070	2.286	2.495	2.593
Gorontalo	94,94	1	3,89	4,08	4,13	4,24	877	986	1.003	1.046
Sulawesi Barat	90,12	1	10,79	10,75	10,63	10,97	2.477	2.597	2.407	2.510
Maluku	92,13	13	5,46	5,32	5,24	5,11	906	933	875	870
Maluku Utara	92,37	7	7,88	7,50	11,44	17,65	1.600	1.615	2.507	4.430
Papua Barat	75,55	17	31,48	30,36	31,16	30,60	20.302	19.555	16.977	16.210
Papua	78,74	41	1,91	2,24	2,08	1,80	917	899	666	655
Indonesia	91,81	215	21,04	20,79	20,61	20,55	8.276	8.530	8.198	8.379

9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (diakses dari <https://data.pu.go.id/dataset/kemantapan-jalan-nasional> pada 14 Desember 2022)

9.1.2.(a) Jumlah bandara

Sumber: Statistik Transportasi Udara 2020, Badan Pusat Statistik (data dari Laporan tahunan PT Angkasa Pura 1 dan PT Angkasa Pura 2 dan Laporan Bandar Udara - Dokumen III)

9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita

Sumber: Badan Pusat Statistik

TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

Provinsi	Kode Indikator							
	9.2.1.(a)				9.2.2*			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	8,26	-1,10	-4,43	2,53	7,78	8,21	8,26	8,36
Sumatera Utara	3,66	1,23	-0,84	1,43	10,25	9,94	9,58	9,70
Sumatera Barat	-0,58	-1,98	-0,54	3,68	8,75	9,51	9,46	8,95
Riau	3,59	5,82	1,91	4,08	7,42	7,68	7,62	8,18
Jambi	3,39	2,36	0,12	1,27	4,95	5,56	5,03	4,76
Sumatera Selatan	5,40	4,82	0,72	2,30	7,80	6,22	5,91	6,33
Bengkulu	3,56	2,31	-2,44	2,37	5,43	5,82	5,42	5,73
Lampung	9,04	8,24	-5,27	4,57	8,99	11,23	9,17	9,29
Kep. Bangka Belitung	3,97	1,20	-5,63	5,44	7,08	7,66	8,19	7,61
Kepulauan Riau	4,14	6,25	3,25	6,45	23,70	23,91	22,76	25,01
DKI Jakarta	5,68	-1,22	-10,34	11,01	13,02	12,30	11,01	11,47
Jawa Barat	6,52	3,95	-4,36	4,22	20,97	21,07	18,56	19,37
Jawa Tengah	4,33	5,07	-3,80	2,32	21,86	22,40	20,64	22,17
DI Yogyakarta	5,12	5,72	-4,37	0,37	16,32	17,05	17,03	17,71
Jawa Timur	7,55	6,82	-2,06	3,36	15,89	15,85	14,62	15,12
Banten	3,61	3,57	-4,68	4,93	23,39	23,68	20,32	20,80
Bali	5,69	6,79	-6,44	0,09	14,63	14,94	15,75	16,14
Nusa Tenggara Barat	1,68	4,07	-2,41	2,10	12,28	13,15	11,14	12,09
Nusa Tenggara Timur	5,16	9,01	-5,42	-5,10	8,95	10,15	9,50	10,56
Kalimantan Barat	2,80	7,63	-2,52	5,23	6,45	6,02	5,82	6,08
Kalimantan Tengah	5,11	4,42	-0,09	4,11	5,47	6,03	5,77	5,67
Kalimantan Selatan	4,34	1,72	-3,63	6,23	8,75	9,11	8,79	9,15
Kalimantan Timur	0,45	0,01	-2,86	2,29	7,20	7,60	6,23	6,59
Kalimantan Utara	1,19	4,82	-3,84	2,50	8,39	7,96	7,83	8,12
Sulawesi Utara	4,39	0,59	4,20	8,92	9,07	8,95	8,58	10,38
Sulawesi Tengah	106,29	17,30	23,68	19,62	7,56	7,36	6,75	6,64
Sulawesi Selatan	0,94	9,92	-4,57	3,02	9,03	8,89	8,16	8,47
Sulawesi Tenggara	6,81	10,83	7,26	5,58	8,96	9,37	8,94	9,44
Gorontalo	6,77	11,55	1,13	5,35	11,17	7,81	8,30	8,86
Sulawesi Barat	7,51	5,13	-3,51	5,89	7,51	8,57	7,64	8,51
Maluku	7,28	2,69	-2,31	0,47	8,53	9,06	11,02	10,52
Maluku Utara	18,41	1,22	60,65	79,49	5,48	5,83	5,70	16,66
Papua Barat	7,28	-0,99	1,86	-2,31	6,65	3,90	5,08	4,80
Papua	5,65	-1,25	-5,02	-0,21	1,79	1,97	2,16	1,76
Indonesia	4,27	3,80	-2,93	3,39	14,68	14,91	13,61	14,27

9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Sumber: Badan Pusat Statistik

9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur

Sumber: Badan Pusat Statistik

TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

Provinsi	Kode Indikator					
	9.b.1.(a)					9.c.1*
	2017	2018	2019	2020 ^r	2021	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	14,66	7,92	7,14	6,34	7,48	65,17
Sumatera Utara	20,80	22,01	22,10	21,82	22,45	73,49
Sumatera Barat	5,78	5,46	4,42	5,10	5,59	69,66
Riau	6,84	10,50	10,26	10,35	13,53	56,65
Jambi	1,31	0,75	0,01	0,31	0,10	54,85
Sumatera Selatan	7,12	4,25	3,71	5,10	3,18	61,25
Bengkulu	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	60,54
Lampung	4,44	6,97	6,19	4,30	4,60	68,94
Kep. Bangka Belitung	1,27	1,51	1,23	1,37	0,39	63,97
Kepulauan Riau	47,44	47,79	51,35	54,88	52,23	79,69
DKI Jakarta	40,95	45,58	48,88	46,06	49,89	99,93
Jawa Barat	48,28	47,12	47,52	46,24	48,08	90,99
Jawa Tengah	9,56	8,72	8,28	8,83	9,58	86,63
DI Yogyakarta	7,38	8,15	5,17	6,78	5,91	91,15
Jawa Timur	19,15	19,54	20,74	16,54	18,79	86,05
Banten	28,67	28,93	28,44	27,81	29,68	90,85
Bali	2,40	2,74	2,26	2,29	2,06	96,22
Nusa Tenggara Barat	0,01	0,05	0,02	0,02	0,00	86,42
Nusa Tenggara Timur	10,25	9,91	7,74	8,60	13,13	61,38
Kalimantan Barat	7,40	2,46	2,51	2,13	1,79	49,17
Kalimantan Tengah	0,34	1,59	1,43	1,95	1,16	33,95
Kalimantan Selatan	1,32	1,21	1,24	0,99	0,88	71,80
Kalimantan Timur	2,79	3,74	4,59	6,21	6,35	64,27
Kalimantan Utara	0,01	0,09	0,10	0,06	0,01	44,84
Sulawesi Utara	3,04	4,90	3,96	4,58	5,69	74,68
Sulawesi Tengah	0,18	2,30	3,43	2,19	2,39	46,27
Sulawesi Selatan	0,30	0,55	0,26	0,29	0,18	73,39
Sulawesi Tenggara	1,86	0,33	0,04	0,02	0,00	51,42
Gorontalo	0,00	0,00	0,20	0,29	0,00	65,46
Sulawesi Barat	4,61	4,00	2,56	2,96	4,31	42,35
Maluku	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	69,03
Maluku Utara	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	74,35
Papua Barat	0,00	0,10	0,00	0,00	0,03	26,01
Papua	0,28	0,04	0,11	0,06	0,02	15,79
Indonesia	20,80	20,84	22,26	21,39	20,33	77,70

9.b.1.(a) Proporsi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi (PEPIBT)

Catatan: ^r Angka revisi tahunan

Sumber: Badan Pusat Statistik

9.c.1* Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*

Sumber: Badan Pusat Statistik

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Provinsi	Kode Indikator									
	10.1.1*									
	2017	2018		2019		2020		2021		2022
	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	0,329	0,325	0,318	0,319	0,321	0,323	0,319	0,324	0,323	0,311
Sumatera Utara	0,335	0,318	0,311	0,317	0,315	0,316	0,314	0,314	0,313	0,312
Sumatera Barat	0,312	0,321	0,305	0,306	0,307	0,305	0,301	0,306	0,300	0,300
Riau	0,325	0,327	0,347	0,334	0,331	0,329	0,321	0,326	0,327	0,326
Jambi	0,334	0,334	0,335	0,321	0,324	0,320	0,316	0,321	0,315	0,320
Sumatera Selatan	0,365	0,358	0,341	0,331	0,339	0,339	0,338	0,341	0,340	0,339
Bengkulu	0,349	0,362	0,355	0,340	0,329	0,334	0,323	0,326	0,321	0,315
Lampung	0,333	0,346	0,326	0,329	0,331	0,327	0,320	0,323	0,314	0,314
Kep. Bangka Belitung	0,276	0,281	0,272	0,269	0,262	0,262	0,257	0,256	0,247	0,236
Kepulauan Riau	0,359	0,330	0,339	0,341	0,337	0,339	0,334	0,343	0,339	0,342
DKI Jakarta	0,409	0,394	0,390	0,394	0,391	0,399	0,400	0,409	0,411	0,423
Jawa Barat	0,393	0,407	0,405	0,402	0,398	0,403	0,398	0,412	0,406	0,417
Jawa Tengah	0,365	0,378	0,357	0,361	0,358	0,362	0,359	0,372	0,368	0,374
DI Yogyakarta	0,440	0,441	0,422	0,423	0,428	0,434	0,437	0,441	0,436	0,439
Jawa Timur	0,415	0,379	0,371	0,370	0,364	0,366	0,364	0,374	0,364	0,371
Banten	0,379	0,385	0,367	0,365	0,361	0,363	0,365	0,365	0,363	0,363
Bali	0,379	0,377	0,364	0,366	0,370	0,369	0,369	0,378	0,375	0,363
Nusa Tenggara Barat	0,378	0,372	0,391	0,379	0,374	0,376	0,386	0,381	0,384	0,373
Nusa Tenggara Timur	0,359	0,351	0,359	0,356	0,355	0,354	0,356	0,346	0,339	0,334
Kalimantan Barat	0,329	0,339	0,325	0,327	0,318	0,317	0,325	0,313	0,315	0,314
Kalimantan Tengah	0,327	0,342	0,344	0,336	0,335	0,329	0,320	0,323	0,320	0,319
Kalimantan Selatan	0,347	0,344	0,340	0,334	0,334	0,332	0,351	0,330	0,325	0,317
Kalimantan Timur	0,333	0,342	0,342	0,330	0,335	0,328	0,335	0,334	0,331	0,327
Kalimantan Utara	0,313	0,303	0,304	0,295	0,292	0,292	0,300	0,292	0,285	0,272
Sulawesi Utara	0,394	0,394	0,372	0,367	0,376	0,370	0,368	0,365	0,359	0,365
Sulawesi Tengah	0,345	0,346	0,317	0,327	0,330	0,326	0,321	0,316	0,326	0,308
Sulawesi Selatan	0,429	0,397	0,388	0,389	0,391	0,389	0,382	0,382	0,377	0,377
Sulawesi Tenggara	0,404	0,409	0,392	0,399	0,393	0,389	0,388	0,390	0,394	0,387
Gorontalo	0,405	0,403	0,417	0,407	0,410	0,408	0,406	0,408	0,409	0,418
Sulawesi Barat	0,339	0,370	0,366	0,365	0,365	0,364	0,356	0,356	0,366	0,362
Maluku	0,321	0,343	0,326	0,324	0,320	0,318	0,326	0,314	0,316	0,301
Maluku Utara	0,330	0,328	0,336	0,312	0,310	0,308	0,290	0,300	0,278	0,279
Papua Barat	0,387	0,394	0,391	0,386	0,381	0,382	0,376	0,380	0,374	0,370
Papua	0,398	0,384	0,398	0,394	0,391	0,392	0,395	0,397	0,396	0,406
Indonesia	0,391	0,389	0,384	0,382	0,380	0,381	0,385	0,384	0,381	0,384

10.1.1* Rasio Gini

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Provinsi	Kode Indikator									
	10.1.1.(a)									
	2017	2018		2019		2020		2021		2022
	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	15,92	15,97	15,68	15,32	15,01	14,99	15,43	15,33	15,53	14,64
Sumatera Utara	9,28	9,22	8,94	8,83	8,63	8,75	9,14	9,01	8,49	8,42
Sumatera Barat	6,75	6,65	6,55	6,42	6,29	6,28	6,56	6,63	6,04	5,92
Riau	7,41	7,39	7,21	7,08	6,90	6,82	7,04	7,12	7,00	6,78
Jambi	7,90	7,92	7,85	7,60	7,51	7,58	7,97	8,09	7,67	7,62
Sumatera Selatan	13,10	12,80	12,82	12,71	12,56	12,66	12,98	12,84	12,79	11,90
Bengkulu	15,59	15,43	15,41	15,23	14,91	15,03	15,30	15,22	14,43	14,62
Lampung	13,04	13,14	13,01	12,62	12,30	12,34	12,76	12,62	11,67	11,57
Kep. Bangka Belitung	5,30	5,25	4,77	4,62	4,50	4,53	4,89	4,90	4,67	4,45
Kepulauan Riau	6,13	6,20	5,83	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24
DKI Jakarta	3,78	3,57	3,55	3,47	3,42	4,53	4,69	4,72	4,67	4,69
Jawa Barat	7,83	7,45	7,25	6,91	6,82	7,88	8,43	8,40	7,97	8,06
Jawa Tengah	12,23	11,32	11,19	10,80	10,58	11,41	11,84	11,79	11,25	10,93
DI Yogyakarta	12,36	12,13	11,81	11,70	11,44	12,28	12,80	12,80	11,91	11,34
Jawa Timur	11,20	10,98	10,85	10,37	10,20	11,09	11,46	11,40	10,59	10,38
Banten	5,59	5,24	5,25	5,09	4,94	5,92	6,63	6,66	6,50	6,16
Bali	4,14	4,01	3,91	3,79	3,61	3,78	4,45	4,53	4,72	4,57
Nusa Tenggara Barat	15,05	14,75	14,63	14,56	13,88	13,97	14,23	14,14	13,83	13,68
Nusa Tenggara Timur	21,38	21,35	21,03	21,09	20,62	20,90	21,21	20,99	20,44	20,05
Kalimantan Barat	7,86	7,77	7,37	7,49	7,28	7,17	7,24	7,15	6,84	6,73
Kalimantan Tengah	5,26	5,17	5,10	4,98	4,81	4,82	5,26	5,16	5,16	5,28
Kalimantan Selatan	4,70	4,54	4,65	4,55	4,47	4,38	4,83	4,83	4,56	4,49
Kalimantan Timur	6,08	6,03	6,06	5,94	5,91	6,10	6,64	6,54	6,27	6,31
Kalimantan Utara	6,96	7,09	6,86	6,63	6,49	6,80	7,41	7,36	6,83	6,77
Sulawesi Utara	7,90	7,80	7,59	7,66	7,51	7,62	7,78	7,77	7,36	7,28
Sulawesi Tengah	14,22	14,01	13,69	13,48	13,18	12,92	13,06	13,00	12,18	12,33
Sulawesi Selatan	9,48	9,06	8,87	8,69	8,56	8,72	8,99	8,78	8,53	8,63
Sulawesi Tenggara	11,97	11,63	11,32	11,24	11,04	11,00	11,69	11,66	11,74	11,17
Gorontalo	17,14	16,81	15,83	15,52	15,31	15,22	15,59	15,61	15,41	15,42
Sulawesi Barat	11,18	11,25	11,22	11,02	10,95	10,87	11,50	11,29	11,85	11,75
Maluku	18,29	18,12	17,85	17,69	17,65	17,44	17,99	17,87	16,30	15,97
Maluku Utara	6,44	6,64	6,62	6,77	6,91	6,78	6,97	6,89	6,38	6,23
Papua Barat	23,12	23,01	22,66	22,17	21,51	21,37	21,70	21,84	21,82	21,33
Papua	27,76	27,74	27,43	27,53	26,55	26,64	26,80	26,86	27,38	26,56
Indonesia	10,12	9,82	9,66	9,41	9,22	9,78	10,19	10,14	9,71	9,54

10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
 Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Provinsi	Kode Indikator					
	10.1.1.(b)			10.1.1.(c)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1.710	915	708	25	30	34
Sumatera Utara	2.535	2.166	1.848	6	8	9
Sumatera Barat	80	42	27	32	40	65
Riau	247	98	65	5	11	18
Jambi	179	115	86	4	8	5
Sumatera Selatan	452	248	137	6	22	21
Bengkulu	306	221	102	0	1	1
Lampung	180	87	25	9	10	36
Kep. Bangka Belitung	1	0	0	16	20	25
Kepulauan Riau	31	9	2	0	2	1
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	27	5	1	341	518	636
Jawa Tengah	42	16	5	296	510	685
DI Yogyakarta	0	0	0	127	151	179
Jawa Timur	200	94	73	345	589	697
Banten	74	39	29	18	29	26
Bali	1	0	0	88	154	181
Nusa Tenggara Barat	16	16	6	41	67	105
Nusa Tenggara Timur	1.563	1.127	955	0	0	0
Kalimantan Barat	992	811	613	14	14	32
Kalimantan Tengah	578	407	335	5	11	23
Kalimantan Selatan	300	138	115	13	26	41
Kalimantan Timur	214	111	89	13	25	30
Kalimantan Utara	299	264	222	4	6	8
Sulawesi Utara	134	71	45	7	9	10
Sulawesi Tengah	378	196	133	1	9	5
Sulawesi Selatan	193	167	109	16	19	17
Sulawesi Tenggara	317	208	140	0	0	0
Gorontalo	29	20	8	3	10	5
Sulawesi Barat	203	148	112	1	1	1
Maluku	688	548	444	6	10	8
Maluku Utara	502	386	306	2	0	2
Papua Barat	1.587	1.558	1.505	0	0	0
Papua	5.094	5.015	4.970	0	0	0
Indonesia	19.152	15.246	13.215	1.444	2.310	2.906

10.1.1.(b) Jumlah Desa Tertinggal

Sumber: Indeks Desa, Badan Pusat Statistik

10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri

Sumber: Indeks Desa, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Provinsi	Kode Indikator				
	10.2.1*				10.3.1.(a)
	2018	2019	2020	2021	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	11,14	10,17	9,53	9,98	85,50
Sumatera Utara	7,92	7,13	6,32	5,87	88,51
Sumatera Barat	3,70	3,26	2,49	2,47	76,19
Riau	3,80	3,63	3,26	2,52	88,40
Jambi	7,52	6,87	6,21	5,91	66,50
Sumatera Selatan	14,44	14,58	14,31	13,24	85,08
Bengkulu	8,57	8,43	8,23	8,37	78,81
Lampung	14,68	14,99	13,04	12,12	76,64
Kep. Bangka Belitung	0,27	0,04	0,16	0,01	68,80
Kepulauan Riau	1,22	0,56	1,84	1,59	90,91
DKI Jakarta	0,23	0,29	0,07	0,18	89,27
Jawa Barat	11,25	10,85	11,42	11,50	89,71
Jawa Tengah	19,35	18,08	18,50	18,41	87,90
DI Yogyakarta	12,74	13,25	12,54	12,94	74,31
Jawa Timur	16,09	14,68	16,08	15,56	88,11
Banten	5,17	4,88	4,32	4,20	82,26
Bali	6,03	5,75	5,57	5,74	84,62
Nusa Tenggara Barat	19,63	18,44	18,25	16,30	77,41
Nusa Tenggara Timur	31,41	31,70	31,45	29,00	87,99
Kalimantan Barat	8,40	7,64	6,83	6,53	81,15
Kalimantan Tengah	5,27	4,71	3,94	3,40	76,09
Kalimantan Selatan	4,23	4,12	3,43	3,24	70,13
Kalimantan Timur	0,87	0,79	0,71	1,13	89,46
Kalimantan Utara	1,00	0,86	0,34	0,31	82,78
Sulawesi Utara	14,00	13,01	12,91	12,43	82,92
Sulawesi Tengah	13,99	13,02	12,20	11,39	92,76
Sulawesi Selatan	20,59	20,01	20,25	19,05	88,18
Sulawesi Tenggara	24,46	22,84	21,70	21,73	79,28
Gorontalo	27,71	25,51	24,28	20,84	81,57
Sulawesi Barat	24,28	25,23	25,33	25,74	67,24
Maluku	13,85	10,75	8,93	7,73	59,36
Maluku Utara	7,65	6,60	6,88	6,34	80,61
Papua Barat	14,95	11,28	12,03	10,84	82,47
Papua	18,83	17,80	16,29	13,35	75,64
Indonesia	12,63	11,93	11,99	11,61	79,72

10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

10.3.1.(a) Indeks Kebebasan

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Provinsi	Kode Indikator						
	11.1.1.(a)			11.2.1.(a)		11.2.1.(b)	
	2019	2020	2021	2017	2020	2017	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	57,41	63,21	64,43	52,70	52,72	2,02	2,15
Sumatera Utara	64,65	67,44	69,48	58,89	59,25	7,97	8,45
Sumatera Barat	51,42	56,87	56,67	54,91	55,01	4,92	4,96
Riau	62,94	68,44	70,63	43,21	43,52	1,33	1,50
Jambi	54,78	61,41	62,54	51,76	52,27	1,59	1,67
Sumatera Selatan	52,24	55,25	57,86	63,43	63,78	3,76	3,85
Bengkulu	41,73	47,94	51,36	71,75	72,03	1,82	2,05
Lampung	52,00	53,22	61,56	44,17	44,72	2,30	2,49
Kep. Bangka Belitung	26,16	30,64	27,60	67,11	67,95	1,95	2,13
Kepulauan Riau	44,09	48,19	50,23	56,06	56,11	5,13	5,31
DKI Jakarta	34,25	33,18	40,00	70,65	74,02	11,67	13,12
Jawa Barat	49,29	52,28	53,14	60,07	63,81	9,13	11,21
Jawa Tengah	64,69	67,93	66,47	51,08	51,47	4,27	4,57
DI Yogyakarta	81,61	86,19	85,15	33,58	34,33	1,01	1,12
Jawa Timur	65,61	68,08	66,93	43,36	43,38	1,79	1,80
Banten	56,92	56,21	60,78	54,65	54,65	5,51	5,55
Bali	77,24	77,05	78,47	51,04	51,24	0,52	0,68
Nusa Tenggara Barat	56,35	62,53	62,90	70,72	71,03	2,63	2,58
Nusa Tenggara Timur	32,08	36,34	40,41	61,96	65,75	4,48	5,83
Kalimantan Barat	53,52	58,81	61,17	38,77	40,34	0,57	0,61
Kalimantan Tengah	47,90	51,97	55,34	40,29	48,24	1,13	1,16
Kalimantan Selatan	46,73	52,99	57,50	51,81	52,68	1,53	1,60
Kalimantan Timur	65,55	70,80	70,70	52,02	53,59	1,99	3,56
Kalimantan Utara	60,76	66,73	65,65	57,99	58,90	0,56	0,62
Sulawesi Utara	64,61	69,48	69,50	82,37	84,87	9,07	13,60
Sulawesi Tengah	56,65	58,85	62,70	69,72	70,41	0,60	2,26
Sulawesi Selatan	60,93	64,24	69,11	66,33	66,45	4,84	7,83
Sulawesi Tenggara	59,82	66,77	70,45	74,77	75,16	3,58	4,33
Gorontalo	62,26	65,42	67,28	64,47	64,88	1,34	5,96
Sulawesi Barat	47,23	50,65	57,26	53,96	61,53	1,73	3,26
Maluku	51,75	57,50	60,69	68,95	70,48	13,11	15,83
Maluku Utara	59,03	62,14	63,85	82,87	83,01	6,95	10,17
Papua Barat	52,22	55,44	57,90	62,75	62,99	10,59	10,85
Papua	26,19	28,56	28,92	42,99	43,43	4,57	8,91
Indonesia	56,51	59,54	60,90	54,67	56,01	4,85	5,74

11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik

Data: Persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman (jarak 0.5 km) ke transportasi umum

Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik

11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum

Data: Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan kendaraan bermotor umum dengan rute tertentu

Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Provinsi	Kode Indikator								
	11.6.2.(b)					11.7.2.(a) ¹			
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	89,84	88,33	91,08	89,51	89,63	0,05	0,04	0,05	0,05
Sumatera Utara	87,32	85,72	86,58	89,22	89,55	0,10	0,11	0,03	0,04
Sumatera Barat	89,87	88,37	89,40	90,39	90,22	0,11	0,10	0,06	0,03
Riau	90,90	89,91	90,47	90,42	90,13	0,06	0,10	0,03	0,05
Jambi	89,39	88,04	87,17	85,65	87,08	0,08	0,09	0,06	0,04
Sumatera Selatan	88,88	85,32	87,13	86,57	86,28	0,09	0,13	0,11	0,06
Bengkulu	92,55	91,63	92,69	90,52	90,81	0,07	0,07	0,09	0,01
Lampung	85,02	82,98	86,63	85,45	85,46	0,13	0,09	0,09	0,05
Kep. Bangka Belitung	94,97	89,09	91,94	91,03	90,39	0,03	0,07	0,03	0,01
Kepulauan Riau	95,47	90,83	90,59	90,80	90,91	0,10	0,06	0,03	0,08
DKI Jakarta	53,50	66,57	67,97	66,69	66,52	0,08	0,12	0,11	0,07
Jawa Barat	77,85	72,80	74,93	78,46	79,34	0,09	0,06	0,06	0,04
Jawa Tengah	83,91	82,97	84,81	84,73	84,60	0,08	0,05	0,04	0,03
DI Yogyakarta	88,08	84,25	85,19	89,55	88,59	0,18	0,16	0,09	0,06
Jawa Timur	85,49	81,80	83,06	84,06	83,20	0,06	0,06	0,07	0,03
Banten	75,36	71,63	74,98	72,83	74,14	0,05	0,07	0,04	0,03
Bali	91,40	88,97	89,85	88,34	89,28	0,04	0,06	0,02	0,01
Nusa Tenggara Barat	88,02	87,17	87,40	88,63	88,52	0,20	0,08	0,08	0,04
Nusa Tenggara Timur	91,18	86,83	88,18	89,80	90,51	0,14	0,12	0,07	0,08
Kalimantan Barat	89,12	88,68	90,07	88,88	90,71	0,04	0,03	0,03	0,02
Kalimantan Tengah	92,25	87,07	88,83	89,84	90,39	0,05	0,03	0,05	0,04
Kalimantan Selatan	88,66	93,56	89,56	88,73	89,15	0,07	0,11	0,03	0,01
Kalimantan Timur	88,87	83,36	90,31	89,02	88,84	0,01	0,08	0,06	0,02
Kalimantan Utara	95,83	90,95	93,79	94,23	93,43	0,09	0,01	0,02	0,07
Sulawesi Utara	94,32	91,07	92,41	90,53	91,27	0,16	0,12	0,06	0,04
Sulawesi Tengah	94,38	89,09	92,98	91,80	91,33	0,23	0,12	0,08	0,06
Sulawesi Selatan	88,66	93,56	89,56	88,73	89,13	0,12	0,10	0,03	0,04
Sulawesi Tenggara	91,04	89,85	90,01	91,21	90,89	0,25	0,07	0,04	0,07
Gorontalo	94,79	92,17	86,88	93,89	93,96	0,13	0,05	0,04	0,04
Sulawesi Barat	91,45	89,26	89,97	89,72	90,97	0,06	0,05	0,00	0,04
Maluku	85,64	84,99	88,72	90,41	90,70	0,11	0,18	0,08	0,17
Maluku Utara	96,00	90,77	92,38	92,10	91,64	0,19	0,05	0,10	0,03
Papua Barat	95,63	90,41	92,64	94,83	95,60	0,27	0,25	0,29	0,25
Papua	90,01	89,89	92,56	94,57	94,02	0,30	0,23	0,12	0,11
Indonesia	87,03	84,74	86,56	87,21	87,36	0,09	0,08	0,06	0,04

11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Catatan: ¹ *time reference* indikator adalah 1 Januari - 31 Desember atau t-1. (Data Januari-Desember 2020 diperoleh dari Susenas 2021)

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN

Provinsi	Kode Indikator
	15.3.1*
	2019
(1)	(2)
Aceh	5,61
Sumatera Utara	18,85
Sumatera Barat	15,58
Riau	8,00
Jambi	4,43
Sumatera Selatan	8,51
Bengkulu	7,43
Lampung	11,76
Kep. Bangka Belitung	1,25
Kepulauan Riau	1,01
DKI Jakarta	NA
Jawa Barat	24,64
Jawa Tengah	10,87
DI Yogyakarta	24,77
Jawa Timur	8,93
Banten	35,18
Bali	8,27
Nusa Tenggara Barat	3,32
Nusa Tenggara Timur	17,81
Kalimantan Barat	6,97
Kalimantan Tengah	5,64
Kalimantan Selatan	13,78
Kalimantan Timur	1,41
Kalimantan Utara	0,00
Sulawesi Utara	20,13
Sulawesi Tengah	4,39
Sulawesi Selatan	9,99
Sulawesi Tenggara	11,76
Gorontalo	27,73
Sulawesi Barat	5,26
Maluku	6,48
Maluku Utara	12,39
Papua Barat	4,54
Papua	1,73
Indonesia	7,46

15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Provinsi	Kode Indikator					
	16.1.3.(a) ¹				16.1.4*	
	2017	2018	2019	2020	2017	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,05	0,04	0,05	0,05	50,93	61,17
Sumatera Utara	0,10	0,11	0,03	0,04	50,62	53,94
Sumatera Barat	0,11	0,10	0,06	0,03	43,32	57,76
Riau	0,06	0,10	0,03	0,05	51,15	64,8
Jambi	0,08	0,09	0,06	0,04	54,90	65,56
Sumatera Selatan	0,09	0,13	0,11	0,06	52,35	70,82
Bengkulu	0,07	0,07	0,09	0,01	66,47	67,42
Lampung	0,13	0,09	0,09	0,05	58,75	71,7
Kep. Bangka Belitung	0,03	0,07	0,03	0,01	47,80	65,91
Kepulauan Riau	0,10	0,06	0,03	0,08	71,43	73,49
DKI Jakarta	0,08	0,12	0,11	0,07	50,57	40,17
Jawa Barat	0,09	0,06	0,06	0,04	43,72	51,78
Jawa Tengah	0,08	0,05	0,04	0,03	63,50	74,56
DI Yogyakarta	0,18	0,16	0,09	0,06	64,62	74,87
Jawa Timur	0,06	0,06	0,07	0,03	58,18	65,95
Banten	0,05	0,07	0,04	0,03	42,24	55,29
Bali	0,04	0,06	0,02	0,01	73,43	81,9
Nusa Tenggara Barat	0,20	0,08	0,08	0,04	52,71	67,27
Nusa Tenggara Timur	0,14	0,12	0,07	0,08	46,47	64,03
Kalimantan Barat	0,04	0,03	0,03	0,02	54,74	73,07
Kalimantan Tengah	0,05	0,03	0,05	0,04	46,04	69,59
Kalimantan Selatan	0,07	0,11	0,03	0,01	59,02	64,62
Kalimantan Timur	0,01	0,08	0,06	0,02	55,42	58,95
Kalimantan Utara	0,09	0,01	0,02	0,07	56,58	63,72
Sulawesi Utara	0,16	0,12	0,06	0,04	52,05	59,99
Sulawesi Tengah	0,23	0,12	0,08	0,06	50,43	53,25
Sulawesi Selatan	0,12	0,10	0,03	0,04	48,28	64,53
Sulawesi Tenggara	0,25	0,07	0,04	0,07	58,24	70,08
Gorontalo	0,13	0,05	0,04	0,04	34,28	51,72
Sulawesi Barat	0,06	0,05	0,00	0,04	66,10	77,03
Maluku	0,11	0,18	0,08	0,17	55,08	64,93
Maluku Utara	0,19	0,05	0,10	0,03	58,92	68,03
Papua Barat	0,27	0,25	0,29	0,25	46,95	58,4
Papua	0,30	0,23	0,12	0,11	58,69	69,31
Indonesia	0,09	0,08	0,06	0,04	53,32	62,62

16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Catatan: ¹ *time reference* indikator adalah 1 Januari - 31 Desember atau t-1. (Data Januari-Desember 2020 diperoleh dari Susenas 2021)

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Provinsi	Kode Indikator			
	16.2.1.(a)	16.7.2.(a)	16.7.2.(b)	16.7.2.(c)
	2020	2021	2021	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	46,74	75,82	85,50	81,41
Sumatera Utara	64,79	69,63	88,51	75,27
Sumatera Barat	52,72	79,98	76,19	79,19
Riau	46,56	62,83	88,40	75,88
Jambi	41,75	75,91	66,50	75,67
Sumatera Selatan	51,08	72,41	85,08	78,51
Bengkulu	57,85	67,74	78,81	71,89
Lampung	47,13	81,96	76,64	81,62
Kep. Bangka Belitung	69,56	74,93	68,80	77,80
Kepulauan Riau	52,97	68,21	90,91	79,61
DKI Jakarta	33,81	70,69	89,27	85,67
Jawa Barat	45,66	77,93	89,71	72,99
Jawa Tengah	45,12	78,63	87,90	77,68
DI Yogyakarta	52,25	80,74	74,31	87,29
Jawa Timur	47,03	74,81	88,11	81,14
Banten	36,27	66,65	82,26	78,48
Bali	43,09	63,92	84,62	77,25
Nusa Tenggara Barat	63,66	59,10	77,41	80,15
Nusa Tenggara Timur	81,04	58,17	87,99	74,16
Kalimantan Barat	42,75	68,46	81,15	72,83
Kalimantan Tengah	46,50	68,02	76,09	75,07
Kalimantan Selatan	37,28	76,32	70,13	79,00
Kalimantan Timur	50,59	77,90	89,46	76,67
Kalimantan Utara	55,79	75,11	82,78	80,14
Sulawesi Utara	55,04	78,67	82,92	79,80
Sulawesi Tengah	51,34	72,38	92,76	70,39
Sulawesi Selatan	51,31	63,85	88,18	73,06
Sulawesi Tenggara	48,17	69,33	79,28	84,09
Gorontalo	44,49	67,18	81,57	81,46
Sulawesi Barat	49,42	62,80	67,24	81,75
Maluku	60,36	58,74	59,36	79,57
Maluku Utara	64,48	58,08	80,61	68,08
Papua Barat	70,94	56,10	82,47	67,84
Papua	59,65	62,15	75,64	62,30
Indonesia	48,40	75,67	79,72	78,86

16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir

Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik

16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi

16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan

16.7.2.(c) Indeks Kesenjangan

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Provinsi	Kode Indikator									
	16.9.1*					16.9.1.(a)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	78,10	76,12	81,68	84,74	86,70	83,25	84,44	88,35	92,31	93,64
Sumatera Utara	55,13	54,51	58,06	62,44	65,24	62,82	64,11	70,46	74,12	78,68
Sumatera Barat	68,01	73,07	74,94	77,38	79,71	73,55	81,72	83,90	86,69	89,24
Riau	64,08	60,51	62,66	68,06	69,30	68,79	68,48	70,37	75,50	79,50
Jambi	81,34	80,86	80,81	83,63	82,92	87,34	87,96	88,76	91,35	91,23
Sumatera Selatan	77,20	77,59	76,15	79,36	79,01	82,16	85,50	85,13	88,02	87,99
Bengkulu	81,06	79,26	81,51	83,27	85,74	84,76	87,79	88,82	89,99	92,83
Lampung	75,48	76,52	78,19	81,02	83,98	84,43	84,44	87,83	89,08	92,30
Kep. Bangka Belitung	88,63	88,34	86,25	89,12	88,69	91,44	93,57	92,39	93,93	95,63
Kepulauan Riau	86,14	82,93	81,62	83,52	85,45	92,60	90,30	92,28	93,06	93,12
DKI Jakarta	94,78	90,53	94,56	93,85	91,92	96,36	95,85	96,67	97,39	96,40
Jawa Barat	73,18	72,17	72,80	75,24	72,96	72,40	73,82	76,29	79,54	78,91
Jawa Tengah	88,67	87,61	89,47	90,97	89,92	92,64	91,92	93,21	95,13	95,16
DI Yogyakarta	93,52	93,84	95,24	95,78	94,41	97,17	96,63	97,25	98,14	97,64
Jawa Timur	79,09	76,57	79,36	83,04	81,87	81,51	79,51	84,26	88,21	87,44
Banten	69,74	66,35	70,83	73,39	74,01	63,09	64,22	69,13	74,09	75,88
Bali	75,17	77,33	80,50	82,61	79,71	80,48	86,66	90,74	92,04	91,50
Nusa Tenggara Barat	58,38	59,87	62,77	68,96	72,36	67,22	74,48	76,52	80,31	86,57
Nusa Tenggara Timur	31,55	32,89	34,12	36,77	39,34	43,87	47,84	51,26	53,46	56,09
Kalimantan Barat	71,18	68,78	71,24	76,04	77,62	74,99	74,72	78,73	83,16	86,95
Kalimantan Tengah	72,86	69,38	72,15	76,37	74,91	72,61	75,38	77,76	81,88	83,95
Kalimantan Selatan	77,31	77,34	78,89	81,75	78,64	81,11	84,21	87,01	89,00	88,60
Kalimantan Timur	84,49	82,84	84,83	85,78	83,08	88,32	90,00	89,37	90,45	90,56
Kalimantan Utara	80,17	78,15	79,99	82,66	80,88	88,33	84,69	88,85	88,59	90,35
Sulawesi Utara	68,46	66,48	71,85	76,65	73,34	81,50	79,22	85,21	88,56	86,65
Sulawesi Tengah	49,52	53,63	58,16	66,14	68,06	60,90	62,58	69,26	75,71	79,84
Sulawesi Selatan	69,31	71,36	75,20	78,87	78,31	80,37	82,24	86,18	87,87	89,00
Sulawesi Tenggara	60,93	61,81	69,81	73,22	74,38	74,35	76,44	84,82	86,03	88,55
Gorontalo	76,84	75,95	80,97	82,29	83,18	85,24	86,45	90,44	90,68	92,35
Sulawesi Barat	68,16	68,28	74,92	75,67	80,08	79,40	78,26	85,61	85,87	89,48
Maluku	46,10	43,24	51,60	52,24	53,08	68,88	63,69	72,14	73,92	76,34
Maluku Utara	55,77	55,82	58,96	61,09	60,59	66,09	65,15	71,32	75,70	78,93
Papua Barat	50,68	52,40	54,49	59,78	54,49	56,71	57,79	63,36	65,47	62,44
Papua	39,81	29,53	40,53	42,02	36,79	28,10	21,57	31,73	36,27	35,25
Indonesia	73,18	71,92	74,36	77,20	77,04	76,46	77,11	80,44	83,47	84,49

16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Provinsi	Kode Indikator				
	16.9.1.(b)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	87,83	87,85	91,22	93,84	94,52
Sumatera Utara	71,78	72,29	76,81	80,45	83,02
Sumatera Barat	80,07	85,35	87,89	90,10	91,38
Riau	77,31	76,78	78,32	81,83	84,25
Jambi	91,02	90,95	91,92	93,73	93,37
Sumatera Selatan	87,57	88,82	88,65	90,65	90,05
Bengkulu	89,14	90,66	91,85	92,77	94,52
Lampung	86,49	88,14	90,23	91,65	93,51
Kep. Bangka Belitung	94,35	95,12	94,60	96,07	96,05
Kepulauan Riau	94,40	92,95	93,53	94,71	94,20
DKI Jakarta	96,97	96,23	97,01	97,52	96,93
Jawa Barat	80,85	81,33	83,68	85,72	84,76
Jawa Tengah	94,28	93,84	95,12	96,26	96,03
DI Yogyakarta	97,29	97,40	97,95	98,36	98,14
Jawa Timur	87,10	86,18	89,06	91,62	91,00
Banten	77,29	76,61	80,45	82,82	84,56
Bali	87,45	90,49	92,72	93,85	93,28
Nusa Tenggara Barat	74,66	79,65	81,72	84,98	88,70
Nusa Tenggara Timur	56,65	58,17	61,08	63,33	65,66
Kalimantan Barat	81,77	81,95	85,10	87,71	90,01
Kalimantan Tengah	82,58	82,33	83,97	87,36	86,96
Kalimantan Selatan	87,64	89,03	90,28	92,19	91,49
Kalimantan Timur	92,30	92,23	92,69	93,38	93,16
Kalimantan Utara	90,89	89,51	91,47	92,64	92,96
Sulawesi Utara	86,56	85,45	88,97	91,00	90,15
Sulawesi Tengah	71,53	73,69	78,02	83,37	85,11
Sulawesi Selatan	86,06	87,04	89,35	91,06	91,47
Sulawesi Tenggara	80,31	81,47	88,12	88,58	90,58
Gorontalo	89,61	90,08	92,99	93,32	94,02
Sulawesi Barat	84,41	84,63	89,11	89,56	91,83
Maluku	75,72	73,59	78,66	80,04	81,63
Maluku Utara	76,18	75,98	79,20	83,08	84,42
Papua Barat	70,65	70,75	75,05	77,36	74,74
Papua	44,50	36,32	45,88	50,40	45,19
Indonesia	83,33	83,55	86,01	88,11	88,42

16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

